



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



LKIP

2016



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Ciamis, Maret 2017
Inspektur Kabupaten Ciamis

Cap/ttd

H. TATANG, S.Ag., M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640316 198412 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2015 dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu **"CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019"** sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Ciamis ke arah yang lebih baik.

Ciamis, Maret 2017

Bupati Ciamis,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Akuntabilitas merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang terukur, dapat diuji dan diandalkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan dan amanah demi mewujudkan Visi “Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016, LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian laporan ini memberikan gambaran dan menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada periode tahun pertama perencanaan jangka menengah Kabupaten Ciamis. Secara umum pencapaian sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2016 telah ditetapkan 47 sasaran dengan 134 indikator sasaran, dengan hasil pengukuran pencapaian sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Hasil pengukuran dari 47 sasaran menunjukkan :
- 24 sasaran atau 51,06% tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik;
 - 10 sasaran atau 21,28 % tercapai sesuai target dengan kategori sangat baik;
 - 7 sasaran atau 14,89 % tidak mencapai target dengan kategori sangat baik;
 - 4 sasaran atau 8,51% tidak mencapai target dengan kategori baik;
 - 1 sasaran atau 2,13 % tidak mencapai target dengan kategori cukup; dan
 - 1 sasaran atau 2,13 % tidak mencapai target dengan kategori sangat kurang.

- b. Dari kategori pencapaian sasaran di atas diketahui dari 47 sasaran strategis menunjukkan sebanyak 41 sasaran atau 87,23% termasuk dalam kategori sangat baik, 4 sasaran atau 8,51% dengan kategori baik, 1 sasaran atau 2,13% dengan kategori kurang, dan 1 sasaran atau 2,13% dengan kategori sangat kurang.
- c. Hasil pengukuran dari 134 indikator sasaran menunjukkan secara keseluruhan kategori pencapaian indikator sasaran menunjukkan sebanyak 124 indikator atau 92,54% termasuk dalam kategori sangat baik, 3 indikator atau 2,24% dalam kategori baik, 2 indikator atau 1,49% dalam kategori cukup, 3 indikator atau 2,24% dengan kategori kurang dan 2 indikator atau 1,49% dengan kategori sangat kurang,

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Ciamis, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 974.543.865.138,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 915.911.976.113,- atau 93,98 % dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator sasaran masih terlihat adanya beberapa sasaran dan indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Ciamis dalam upaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa mendatang.

Ciamis, Maret 2017

Bupati Ciamis,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xvi
Daftar Gambar	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH	2
1.2.1 Kondisi Wilayah dan Geografis	3
1.2.2 Kondisi Demografis/Penduduk	6
1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	10
1.2.4 Perekonomian	14
1.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	14
1.2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	20
1.2.4.3 Inflasi	22
1.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	22
1.4 KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
1.5 KEBIJAKAN INOVASI DAERAH	28
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 31
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ..	32
2.1.1 Visi Pembangunan Daerah	32

2.1.2	Misi Pembangunan Daerah	33
2.1.3	Tujuan dan Sasaran	35
2.2	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	39
2.2.1	Prioritas Pembangunan	39
2.2.2	Program Prioritas	49
2.3	PERJANJIAN KINERJA	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		69
3.1	KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	70
3.2	PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN	73
3.3	AKUNTABILITAS KEUANGAN	403
3.3	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	417
BAB IV PENUTUP		418
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel Data Administratif dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016	4
1.2 Tabel Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016	7
1.3 Tabel Perkembangan IPM di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Metode Lama dan Baru Tahun 2014-2016	12
1.4 Tabel PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)	15
1.5 Tabel PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)	17
1.6 Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016	20
2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 setelah di Reviu.....	35
2.2 Tabel Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2016	49
2.3 Tabel Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Setelah di Reviu	61
3.1 Tabel Tingkat Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Setiap Sasaran Tahun 2016 Setelah di Reviu.....	74
3.2 Tabel Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran pada Masing-Masing Misi Tahun 2016	80
3.3 Tabel Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 Setelah di Reviu	88

3.4	Tabel Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016	95
3.5	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Pendidikan Yang Berkualitas	97
3.6	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Tahun 2016 dengan Target RPJMD	98
3.7	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya dan Minat Baca	112
3.8	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya dan Minat Baca Tahun 2016 dengan Target RPJMD...	113
3.9	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan	119
3.10	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan dengan Target RPJMD	121
3.11	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	143
3.12	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk	144
3.13	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Mempertahankan Laju Penduduk Tahun 2016 dengan Target RPJMD	145
3.14	Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016	146
3.15	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan	147
3.16	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Organisasi Pemuda dalam Pembangunan Tahun 2016 dengan Target RPJMD	148
3.17	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/Kemasyarakatan	151
3.18	Tabel Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/Kemasyarakatan Tahun 2016 dibandingkan dengan Target RPJMD	152
3.19	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga	156
3.20	Tabel Jumlah Sarana Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun 2016	157

3.21	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya yang berkembang di Masyarakat	160
3.22	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya Yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2016 dengan Target RPJMD	161
3.23	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Pemahaman dan Pengamalan Agama dalam Kehidupan Sehari-hari	162
3.24	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Pemahaman dan Pengamalan Agama dalam Kehidupan Sehari-hari Tahun 2016 dengan Target RPJMD	163
3.25	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Kelompok Masyarakat, Inter Umat Beragama Maupun Antar Umat Beragama Serta Pengembangan Toleransi Terhadap Keragaman Agama	165
3.26	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Mewujudkan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Kelompok Masyarakat, Inter Umat Beragama Maupun Antar Umat Beragama Serta Pengembangan Toleransi Terhadap Keragaman Agama Tahun 2016 dengan Target RPJMD	166
3.27	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan	168
3.28	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan Tahun 2016 dengan Target RPJMD	169
3.29	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terlindunginya Perempuan dan Anak-Anak dari Tindak Kekerasan	171
3.30	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terlindunginya Perempuan dan Anak-Anak dari Tindak Kekerasan Tahun 2016 dengan Target RPJMD	172
3.31	Tabel Capaian Kinerja Menurunnya PMKS	177
3.32	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Menurunnya PMKS Tahun 2016 dengan Target RPJMD	178
3.33	Tabel Jumlah PMKS yang ditangani di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016	178
3.34	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Aparat	181
3.35	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Tahun 2016 dengan Target RPJMD	182

3.36	Tabel Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	186
3.37	Tabel Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2016 Dibandingkan dengan Rencana yang Tercantum dalam RPJMD.....	188
3.38	Tabel Data Ketersediaan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016	191
3.39	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Transparansi	204
3.40	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Transparansi Tahun 2016 dengan Target RPJMD	204
3.41	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	209
3.42	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Tahun 2016 dengan Target RPJMD	210
3.43	Tabel Nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat pada SKPD/Unit Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016	211
3.44	Tabel Nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat pada SKPD/Unit Kerja Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016	212
3.45	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	214
3.46	Tabel Data Kepemilikan KTP di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	215
3.47	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2016 dengan Target RPJMD	216
3.48	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat	218
3.49	Tabel Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat Tahun 2016 dengan Target RPJMD	219
3.50	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Supremasi Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	222
3.51	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terciptanya Supremasi Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2016 dengan Target RPJMD	223
3.52	Tabel Data Penegakkan Perda dan/atau Perkada di Kabupaten Ciamis Tahun 2016	224

3.53	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terkendalnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	226
3.54	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terkendalnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2016 dengan Target RPJMD	227
3.55	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi	231
3.56	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi Tahun 2016 dengan Target RPJMD	232
3.57	Tabel Kerjasama Antar Daerah di Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan sampai dengan Tahun 2016	233
3.58	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana Transportasi	237
3.59	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana Transportasi Tahun 2016 dengan Target RPJMD	238
3.60	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keandalan Sistem Jaringan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air	245
3.61	Tabel Perbandingan Realisasi Sasaran Meningkatnya Keandalan Sistem Jaringan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016 dengan Target RPJMD	247
3.62	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	251
3.63	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Tahun 2016 dengan Target RPJMD	253
3.64	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi, Ketenagalistrikan dan Pembinaan Usaha Tambang	254
3.65	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	258

3.66	Tabel Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Tahun 2016 dengan Target RPJMD	259
3.67	Tabel Hasil Pemantauan Kondisi Sungai (10 Titik) di Kabupaten Ciamis Tahun 2016	262
3.68	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah Daerah	266
3.69	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah Daerah Tahun 2016 dengan Target RPJMD	267
3.70	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	270
3.71	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 dengan Target RPJMD	271
3.72	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	272
3.73	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Tahun 2016 dengan Target RPJMD...	274
3.74	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam Mengembangkan Perekonomian Rakyat	282
3.75	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam Mengembangkan Perekonomian Rakyat Tahun 2016 dengan Target RPJMD	283
3.76	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal	287
3.77	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal Tahun 2016 dengan Target RPJMD	288
3.78	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	293
3.79	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Sentra-Sentra Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal	301

3.80	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Sentra-Sentra Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal Tahun 2016 dengan Target RPJMD	302
3.81	Tabel Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat	306
3.82	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat Tahun 2016 dengan Target RPJMD	307
3.83	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Menurunnya Disparitas Pendapatan	310
3.84	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Menurunnya Disparitas Pendapatan Tahun 2016 dengan Target RPJMD	311
3.85	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terjaminnya Lahan Pertanian Berkelanjutan	322
3.86	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terjaminnya Lahan Pertanian Berkelanjutan Tahun 2016 dengan Target RPJMD	322
3.87	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	324
3.88	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2016 dengan Target RPJMD.....	326
3.89	Tabel Produksi Daging, Telur dan Ikan di Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2016	342
3.90	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Berbagai Aktivitas <i>Off Farm</i> Untuk Meningkatkan Penghasilan Petani ...	359
3.91	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan	364
3.92	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan Tahun 2016 dengan Target RPJMD.....	366

3.93	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	387
3.94	Tabel Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016	387
3.95	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdesaan	390
3.96	Tabel Evaluasi Pencapaian Menurunnya Jumlah Desa Tertinggal	392
3.97	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2016 dengan Target RPJMD	393
3.98	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	396
3.99	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan Target RPJMD	397
3.100	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	398
3.101	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Tahun 2016 dengan Target RPJMD	399
3.102	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan dan Pembangunan	401
3.103	Tabel Belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016	404
3.104	Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016	404
3.105	Tabel Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016	407
3.106	Tabel Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016	410
3.107	Tabel Prestasi yang Diraih Kabupaten Ciamis Tahun 2016	412

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1.1 Grafik Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2016	6
1.2 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2016	7
1.3 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan Kategori Pekerjaan Tahun 2014-2016	8
1.4 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2016	9
1.5 Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ciamis Tahun Berdasarkan Metode Lama 2014-2016	12
1.6 Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ciamis Tahun Berdasarkan Metode Baru 2014-2016	13
1.7 Grafik Distribusi Persentase PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016	16
1.8 Grafik Distribusi Persentase PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016	19
1.9 Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2010-2016	21
1.10 Grafik Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2016	22
3.1 Grafik Persentase Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran	81
3.2 Grafik Persentase Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran dan Perhitungan Metode baru BPS Tahun 2016	82
3.3 Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 1	82

3.4	Grafik Persentase Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 1 Menurut Perhitungan Metode Baru BPS Tahun 2016	83
3.5	Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 2	84
3.6	Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 3	84
3.7	Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 4	85
3.8	Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 4 Menurut Perhitungan Metode Baru BPS Tahun 2016	85
3.9	Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 5	86
3.10	Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Berdasarkan Kategori/Predikat Tahun 2016	87
3.11	Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Berdasarkan Kategori/Predikat dan Perhitungan Metode Baru BPS Tahun 2016	88
3.12	Grafik Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	102
3.13	Grafik Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. Tahun 2016	105
3.14	Grafik Perkembangan AMH Di Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. Tahun 2016	107
3.15	Grafik Perkembangan HLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. Tahun 2016	108
3.16	Grafik Perbandingan Jumlah Siswa PAUD dengan Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun Tahun 2013-2016	110
3.17	Grafik Perkembangan Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016	116
3.18	Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016	118
3.19	Grafik Indeks Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	125
3.20	Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	127
3.21	Grafik Perbandingan Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	129

3.22	Grafik Perbandingan Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	131
3.23	Grafik Perbandingan Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	133
3.24	Grafik Perbandingan Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	136
3.25	Grafik Perbandingan Persentase Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	138
3.26	Grafik Perbandingan Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	140
3.27	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	145
3.28	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	168
3.29	Grafik Perkembangan Jumlah SOP Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis	193
3.30	Grafik Capaian Pengadaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016	195
3.31	Grafik Kepemilikan Website Kabupaten dan Website SKPD di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016	207
3.32	Grafik Persentase Capaian Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2013-2016	241
3.33	Grafik Ruas Jalan Kabupaten yang sudah dilengkapi Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016	242
3.34	Grafik Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang sudah dilalui Angkutan Penumpang Umum Tahun 2014-2016	244
3.35	Grafik Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016	249
3.36	Grafik Persentase Rumah Tangga yang Sudah Mempunyai Sambungan Listrik (Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga) Tahun 2013-2016	257
3.37	Grafik Perkembangan Paritas Daya Beli Masyarakat (<i>Purchasing Power Parity</i>) Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016 (Ribu Rupiah)	316
3.38	Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB AdHB Tahun 2013 s.d 2016	344

3.39	Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Perkebunan) terhadap PDRB AdHB Tahun 2013 s.d 2016	348
3.40	Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian (Sub Sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya) terhadap PDRB AdHB Tahun 2013 s.d 2016	350
3.41	Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian (Sub Sektor Kehutanan) terhadap PDRB AdHB Tahun 2013 s.d 2016	354
3.42	Grafik Perkembangan Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat Di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2016	369
3.43	Grafik Perkembangan Cadangan Padi/Beras di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2016	371
3.44	Grafik Perkembangan Harga dan Pasokan Pangan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016	376
3.45	Grafik Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan Non Beras (%) Tahun 2013-2016	378
3.46	Grafik Perkembangan Skor PPH Tahun 2011-2016	380
3.47	Grafik Penurunan Rumah Tangga Rawan Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2016	382
3.48	Grafik Perkembangan Jumlah Daerah Rawan Pangan Yang Tertangani Tahun 2011-2016	384

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Peta Administratif Wilayah Kabupaten Ciamis	3
2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa berdasarkan laporan kinerja tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 disusun untuk memberikan gambaran atas realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran melalui program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016.



1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya, Kabupaten Ciamis telah 2 (dua) kali mengalami pemekaran daerah yaitu dibentuknya Kota Banjar pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat serta dibentuknya Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Hal ini membawa perubahan terhadap kondisi umum Kabupaten Ciamis dalam berbagai aspek terutama kondisi wilayah/geografis, penduduk/demografis dan perekonomian serta aspek-aspek

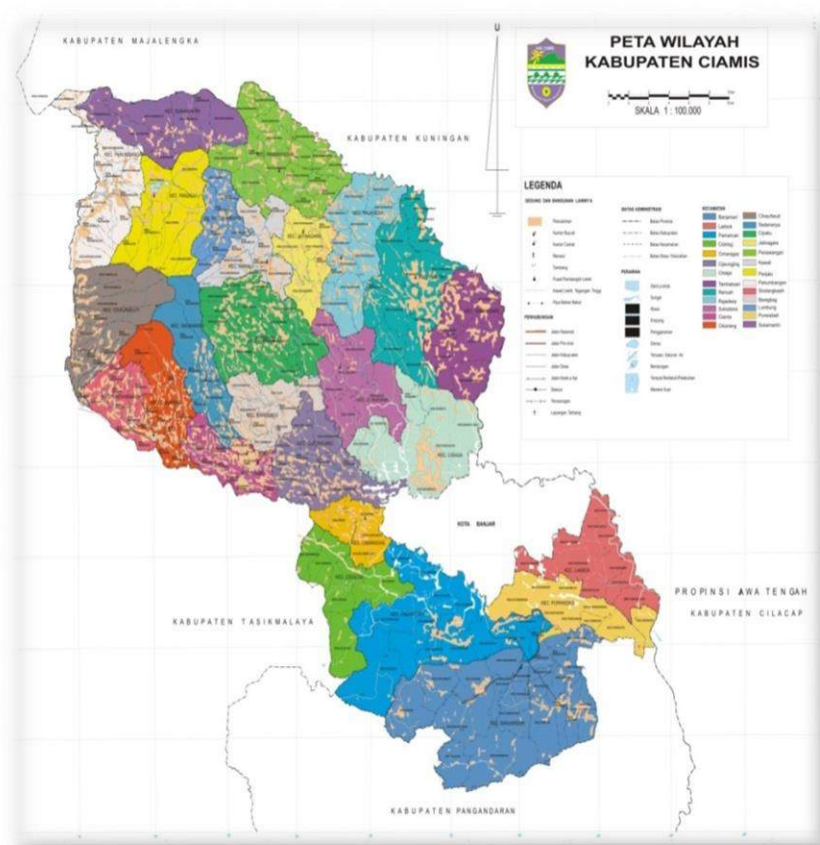
lainnya. Secara umum gambaran mengenai kondisi Kabupaten Ciamis pada saat ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Kondisi Wilayah dan Geografis

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Ciamis berada pada 108°20' sampai dengan 108°40' bujur timur dan 7°40'20" sampai dengan 7°41'20" lintang selatan, berada di ujung tenggara Provinsi Jawa Barat, yang berjarak sekitar 121 km dari ibukota Provinsi, serta mempunyai posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah dan Kota Banjar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran

Gambar 1.1
Peta Administratif Wilayah Kabupaten Ciamis



Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 1.433,87 km² dan secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.225 dusun, 2.920 RW dan 9.151 RT, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1

Data Administratif dan Luas Wilayah per-Kecamatan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Rw	Rt	Luas (Km ²)	(%)
1	Lakbok	10	31	77	327	57,85	4,03
2	Pamarican	14	52	121	455	104,21	7,27
3	Cidolog	6	31	64	161	59,02	4,12
4	Cimaragas	5	22	48	140	27,09	1,89
5	Cijeungjing	11	58	162	415	58,25	4,06
6	Cisaga	11	43	123	343	60,40	4,21
7	Tambaksari	6	37	78	233	64,31	4,49
8	Rancah	13	67	194	496	73,03	5,09
9	Rajadesa	11	56	125	388	58,14	4,05
10	Sukadana	6	43	71	224	58,22	4,06
11	Ciamis	12	21	170	614	32,88	2,29
12	Cikoneng	9	52	117	340	36,03	2,51
13	Cihaurbeuti	11	67	114	343	36,16	2,52
14	Sadananya	8	26	55	222	43,50	3,03
15	Cipaku	13	64	179	431	65,69	4,58
16	Jatinagara	6	32	61	207	35,38	2,47
17	Panawangan	18	70	182	537	80,91	5,64
18	Kawali	11	49	124	367	33,31	2,32
19	Panjalu	8	68	132	317	67,08	4,68
20	Panumbangan	14	75	153	414	59,46	4,15
21	Sindangkasih	9	51	108	355	26,51	1,85
22	Baregbeg	9	32	96	370	24,48	1,71
23	Lumbung	8	41	99	292	24,84	1,73
24	Purwadadi	9	29	56	276	40,05	2,79
25	Sukamantri	5	30	61	167	44,45	3,10
26	Banjarsari	12	38	83	390	77,83	5,43
27	Banjaranyar	10	40	67	327	84,79	5,91
	JUMLAH	258	1225	2920	9151	1,433.87	100

Sumber : Ciamis Dalam Angka Tahun 2016 dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015 (diolah)

Wilayah Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Cijolang dan Ciseel.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai Citanduy dengan luas 173.529,51 Ha, sedangkan sisanya termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai Cimedang dengan luas 70.949,92 Ha. Wilayah Kabupaten Ciamis yang termasuk Daerah Aliran Sungai Citanduy, terbagi kedalam Sub Daerah Aliran Sungai Citanduy Hulu seluas 22.279,38 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai Ciseel seluas 77.421,08 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai Cimuntur seluas 55.163,06 Ha dan Sub Daerah Aliran Sungai Cijolang seluas 18.665,99 Ha.

Daerah Aliran Sungai Citanduy secara nasional dikategorikan sebagai Daerah Aliran Sungai kritis dengan indikator kekritisannya antara lain fluktuasi debit sungai, tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi (± 5 juta ton/tahun terbawa oleh Sungai Citanduy).

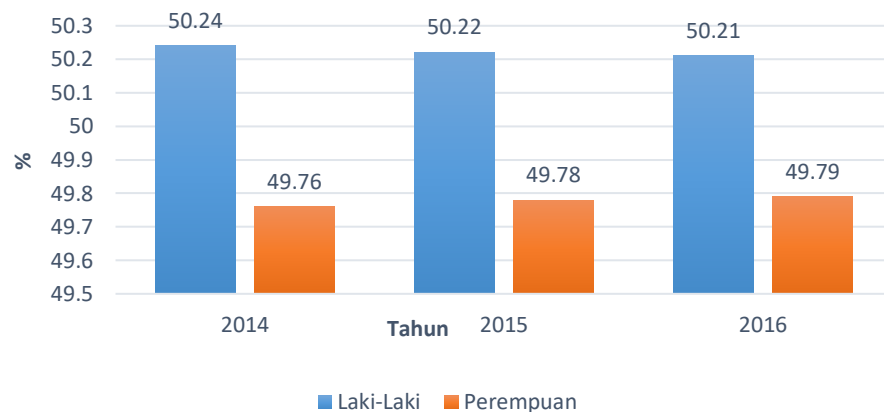
Dilihat dari aspek topografis Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar bergelombang sampai pegunungan. Kemiringan lereng berkisar antara 0 - >40% dengan sebaran 0 - 2% terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan 2 - >40% tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Struktur daratan wilayah Kabupaten Ciamis secara garis besar terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Bagian utara merupakan pegunungan dengan ketinggian 500-1000 m dpl sekitar 19 %, Bagian tengah ke arah barat merupakan perbukitan dengan ketinggian 100-500 m dpl sekitar 49%, sedangkan Bagian tengah ke arah timur merupakan daerah dataran rendah dan rawa dengan ketinggian 25-100 m dpl sekitar 14%.

1.2.2 Kondisi Demografis/Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2016 tercatat sebanyak 1.398.346 orang yang terdiri dari 702.065 laki-laki (50,21 %) dan 696.281 perempuan (49,79 %) dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 976 jiwa/Km², sedangkan jumlah keluarga tercatat sebanyak 471.958 Kepala Keluarga.

Grafik 1.1

Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2016



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

Berdasarkan data BPS Kabupaten Ciamis, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 0,46 % per tahun, meningkat dari tahun 2015 sebesar 0,43 % per tahun dan tahun 2014 sebesar 0,44 % per tahun. Sedangkan *Total Fertility Rate* (TFR) tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tetap yaitu sebesar 2,03 %. Penyebaran penduduk terkonsentrasi di wilayah yang relatif telah berkembang karena ketersediaan akses untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi terdapat di Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Baregbeg, Cikoneng dan Cihaurbeuti sedangkan untuk wilayah kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tambaksari dan Cidolog.

Tabel 1.2
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk (orang) *)	1.378.773	1.389.414	1.398.346
2	Kepadatan Penduduk (orang/km2) *)	961,57	969	976
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) **)	0,44	0,43	0,46***
4	Angka Beban Tanggungan *)	45,99	44,41	44,75
5	Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin (orang)			
	- Laki-laki *)	692.637	697.738	702.065
	- Perempuan *)	686.136	691.676	696.281

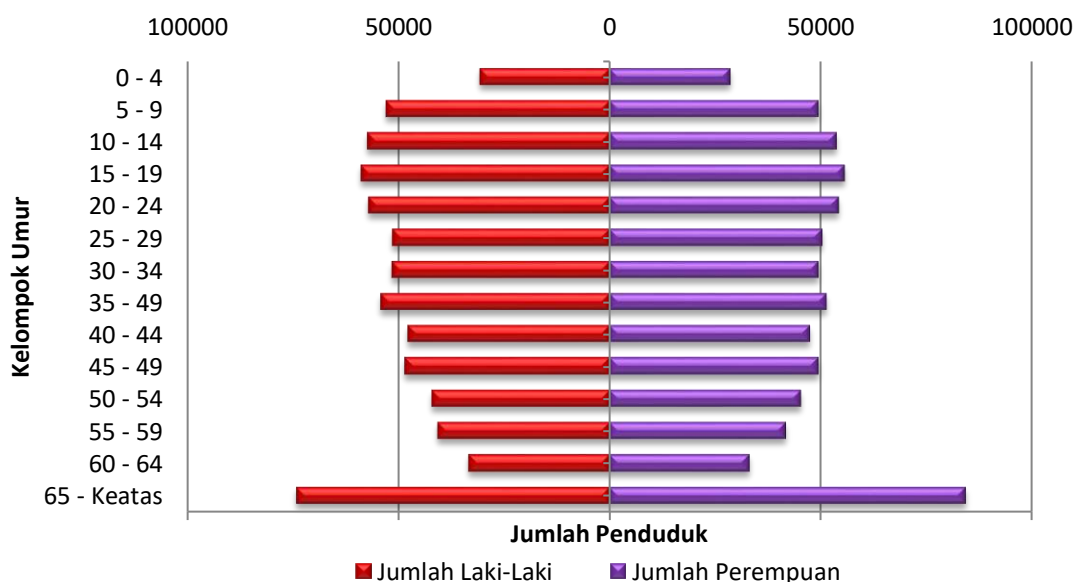
Sumber : *) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**) BPS Kabupaten Ciamis

Menurut struktur umur penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2016 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 966.022 orang (69,08 %), kelompok usia muda (0-14 tahun), 273.502 orang (19,56 %) dan usia tua (65 tahun keatas) sebanyak 158.822 orang (11,36 %).

Piramida penduduk dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada setiap kelompok umur berbeda. Piramida penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2016 dapat diilustrasikan pada grafik di bawah ini :

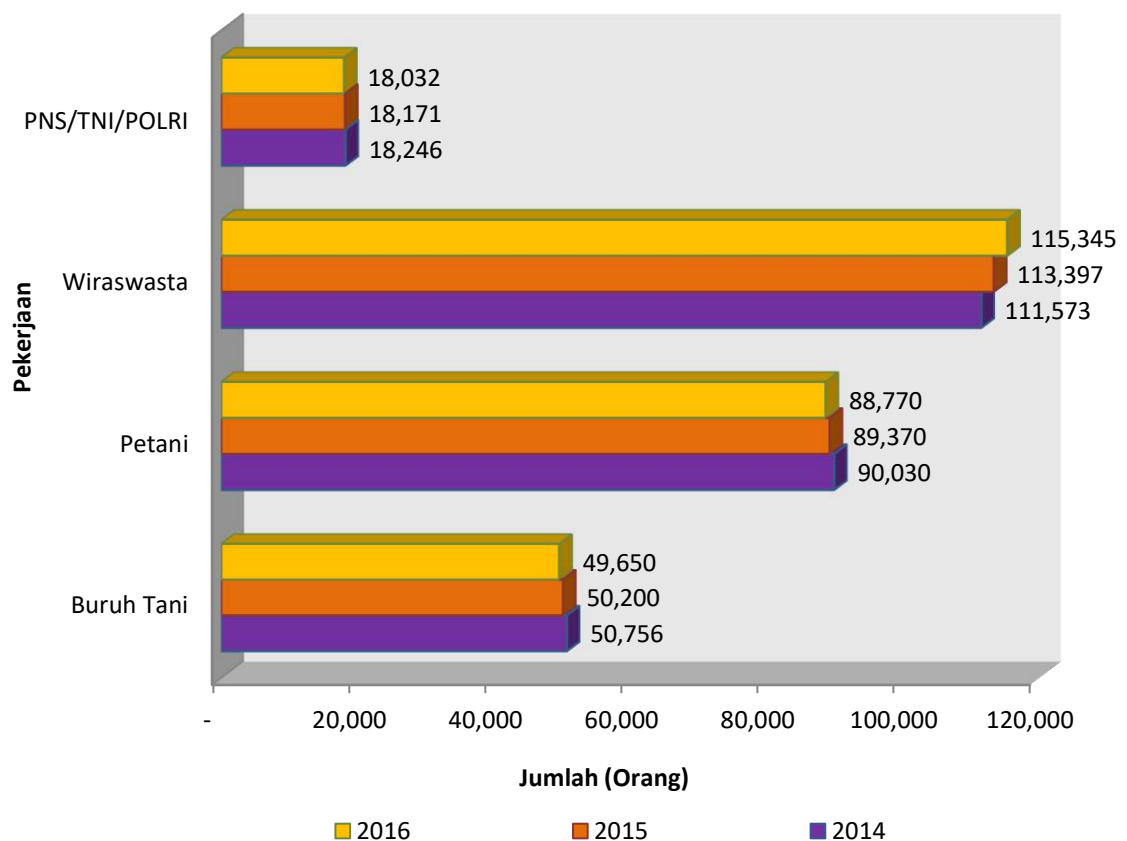
Grafik 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2016



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016

Jumlah penduduk dari aspek pekerjaan pada tahun 2016 sesuai data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pada kategori pekerjaan buruh tani sebanyak 49.650 orang, petani sebanyak 88.770 orang, wiraswasta sebanyak 115.345 orang dan kategori PNS/TNI/Polri sebanyak 18.032 orang.

Grafik 1.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Kategori Pekerjaan Tahun 2014-2016

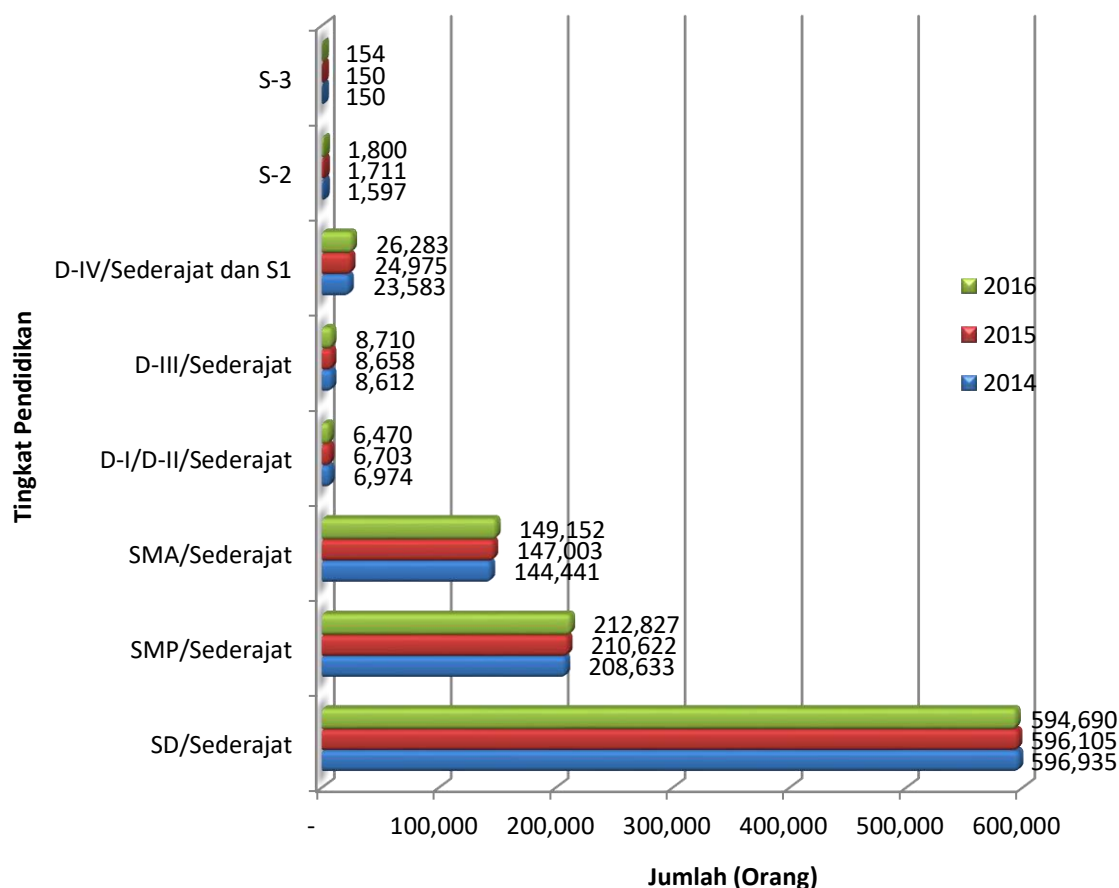


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari tahun 2014 ke tahun 2016 jumlah penduduk dengan kategori pekerjaan buruh tani, petani serta PNS/TNI/Polri mengalami penurunan, sedangkan penduduk dengan pekerjaan wiraswasta mengalami peningkatan dari 111.573 orang menjadi 115.345 orang.

Dari aspek kualitas tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2016



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat 42,53 % penduduk (594.690 orang) yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat, 15,22 % penduduk (212.827 orang) memiliki ijazah tertinggi SMP/ sederajat, 10,67 % penduduk (149.152 orang) memiliki ijazah tertinggi SMA/ sederajat, 0,46 % penduduk (6.470 orang) memiliki ijazah tertinggi DI/DII/ sederajat, 0,62 % penduduk (8.710 orang) memiliki ijazah tertinggi DIII/ sederajat, 1,88 % penduduk (26.283 orang) memiliki ijazah tertinggi DIV sederajat dan S-1, 0,13 % penduduk (1.800 orang) memiliki ijazah tertinggi S2, serta 0,01 % penduduk (154 orang) memiliki ijazah tertinggi S3 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016).

Selama periode tahun 2014-2016, penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat dan D-I/D-II sederajat mengalami penurunan, sedangkan penduduk yang memiliki ijazah SMP, SMA, D-III, D-IV serta S-1, S-2 dan S-3 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Ciamis terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat.

1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu pengukuran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Oleh karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Dalam perkembangannya, pada tahun 2010, UNDP telah merubah metode perhitungan IPM yang kemudian direvisi kembali pada tahun 2011. Berikut ini alasan yang dijadikan dasar perubahan metode penghitungan IPM tersebut :

- a. Beberapa indikator sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM.
 - Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
 - PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

- b. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut ini beberapa perubahan pada metode perhitungan IPM:

- a. Penggunaan Indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
- Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dalam perhitungan Indeks Pendidikan, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

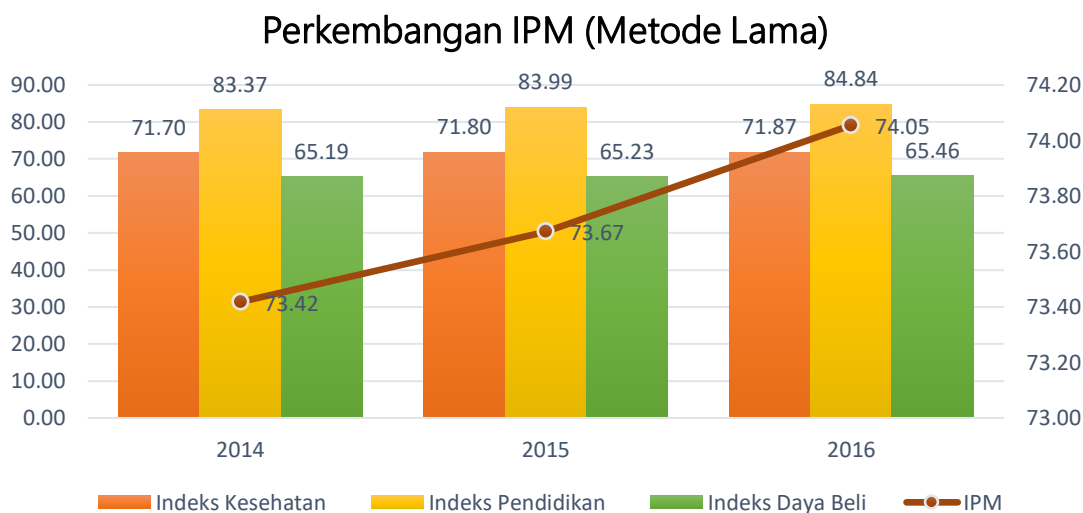
Dalam implementasinya pada tahun 2014 dan tahun 2015 IPM di Kabupaten Ciamis dihitung dengan menggunakan metode perhitungan lama. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan IPM di Kabupaten Ciamis maka dilakukan perbandingan penghitungan IPM dengan metode lama dan metode baru, seperti terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan IPM Di Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Metode Lama dan Baru Tahun 2014-2016

Metode Lama				Metode Baru			
Tahun	2014	2015	2016	Tahun	2014	2015	2016
IPM	73,42	73,67	74,05	IPM	67,64	68,02	68,40
1. Indeks Pendidikan	83,37	83,99	84,84	1. Indeks Pendidikan	62,49	62,58	63,13
a. Indeks Angka Melek Huruf	98,85	98,98	99,39	a. Angka Harapan Lama Sekolah (th)	1,79	0,14	0,88
b. Angka Melek Huruf (%)	98,85	98,98	99,39	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (th)	13,57	13,59	13,62
c. Indeks RLS	52,40	54,00	55,73				
d. RLS (th)	7,86	8,10	8,36				
2. Indeks Kesehatan	71,70	71,80	71,87	2. Indeks Kesehatan	77,45	78,06	78,29
• AHH (th)	68,02	68,08	68,12	• AHH(th)	70,34	70,74	70,89
3. Indeks Daya Beli	65,19	65,23	65,46	3. Indeks Pengeluaran	63,93	64,43	64,74
• Daya Beli Masyarakat (Ribu Rp.)	642,08	642,25	643,26	• Daya Beli Masyarakat (Rp.)	8.162.139	8.295.757	8.382.032

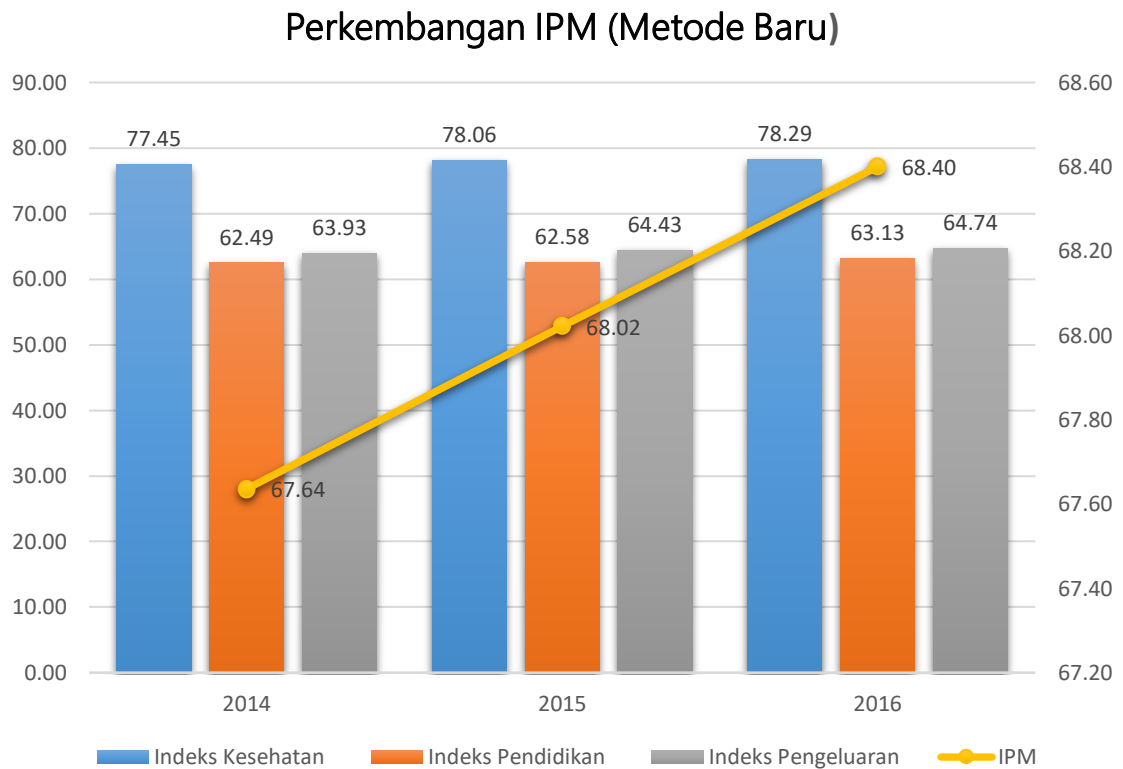
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (diolah)

Grafik 1.5
Perkembangan IPM Di Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Metode Lama Tahun 2014-2016



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Grafik 1.6
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Metode Baru Tahun 2014-2016



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Grafik 1.5 dan 1.6 memberikan gambaran bahwa IPM Kabupaten Ciamis, yang dihitung dengan menggunakan metode lama maupun metode baru, setiap tahun menunjukkan peningkatan. Perhitungan IPM dengan metode lama menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 meningkat 0,38 poin dibandingkan dengan tahun 2015 dan meningkat 0,63 poin dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan jika IPM dihitung dengan metode baru, maka IPM Kabupaten Ciamis Tahun 2016 meningkat 0,38 poin dibandingkan dengan tahun 2015 dan meningkat 0,76 poin dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan IPM ini didasari oleh peningkatan indeks parsial pembentuk IPM itu sendiri, yakni Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli/Indeks Pengeluaran.

Peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Ciamis ditunjang oleh upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan

serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kondisi ini ditunjukkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Demikian pula dengan peningkatan Indeks Kesehatan ditunjang oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk yakni dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan fasilitas kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanannya. Kondisi ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat dan penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal. Meningkatnya Indeks Kesehatan ini ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH).

1.2.4 Perekonomian

1.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, baik PDRB Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) maupun Atas dasar Harga Konstan (AdHK). PDRB AdHB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB AdHB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian dari suatu daerah, sementara PDRB AdHK berguna untuk menunjukkan LPE secara keseluruhan maupun sektoral (lapangan usaha) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. Sedangkan kualitas perkembangan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Nilai dan kontribusi berdasarkan lapangan usaha PDRB AdHB Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.4
PDRB AdHB Kabupaten Ciamis
Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)

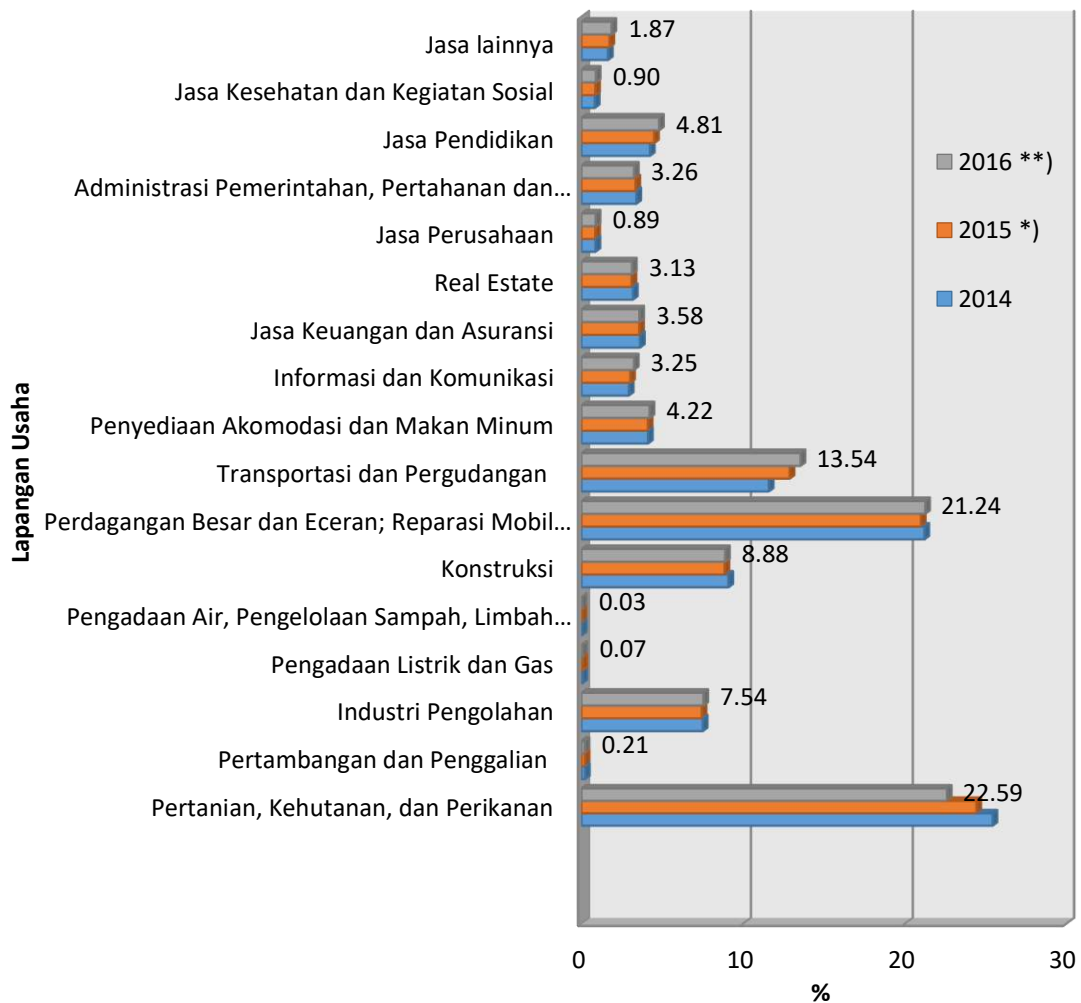
Kategori	Lapangan Usaha	PRDB AdHB (Juta Rp)		
		2014	2015*)	2016**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.184.719,9	5.589.160,0	5.499.212,2
B	Pertambangan dan Penggalian	47.072,4	49.774,0	51.064,0
C	Industri Pengolahan	1.530.467,7	1.702.926,8	1.835.433,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.954,4	16.334,4	16.067,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.916,0	7.336,0	7.589,0
F	Konstruksi	1.853.028,9	2.025.104,6	2.162.005,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.322.638,4	4.800.838,4	5.171.938,4
H	Transportasi dan Pergudangan	2.362.041,9	2.944.529,9	3.296.613,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	840.032,9	940.532,9	1.026.427,9
J	Informasi dan Komunikasi	599.696,6	691.596,6	790.996,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	739.162,9	818.575,9	872.737,9
L	Real Estate	650.579,5	710.791,5	762.991,5
M,N	Jasa Perusahaan	179.477,5	198.277,5	215.627,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	693.783,6	765.859,6	792.993,6
P	Jasa Pendidikan	865.389,1	1.029.389,1	1.169.789,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169.924,6	196.624,6	218.534,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	336.575,2	398.575,2	454.375,2
PDRB AdHB		20.395.461,4	22.886.226,9	24.344.397,8

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2016

*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Grafik 1.7

Distribusi Persentase PDRB AdHB
Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2016) , diolah

Keterangan :*) Angka Perbaikan , **) Angka Sementara

Berdasarkan data pada tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2016 terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 22,59 %. Perkembangan sektor ini pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berkontribusi sebesar 24,42 % dan 2014 yang berkontribusi sebesar 25,42 %.

Kontribusi sektor perekonomian terbesar kedua berdasarkan harga berlaku pada tahun 2016 adalah sektor perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi sebesar 21,24 %. Perkembangan sektor ini pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yang berkontribusi sebesar 20,98 % dan tahun 2014 yang berkontribusi sebesar 21,19 %. Kontribusi sektor terbesar ketiga berdasarkan harga berlaku pada tahun 2016 adalah sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi sebesar 13,54 %. Perkembangan sektor ini pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yang berkontribusi sebesar 12,87 % dan tahun 2014 yang berkontribusi sebesar 11,58 %.

Dilihat dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Ciamis pada dasarnya ditunjang oleh 3 (tiga) sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 57,38 % dari total PDRB Kabupaten Ciamis tahun 2016, sebesar 58,26 % pada tahun 2015 dan sebesar 58,20 % pada tahun 2014.

Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan (PDRB AdHK) menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar Rp. 16,8 trilyun pada tahun 2014, Rp. 17,8 trilyun pada tahun 2015 dan Rp. 18,7 trilyun pada tahun 2016. Gambaran PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan tahun 2014-2016 sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.5
PDRB AdHK Kabupaten Ciamis
Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	PRDB AdHK (Juta Rp)		
		2014	2015*)	2016**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.955.539,8	3.918.595,7	3.829.792,8
B	Pertambangan dan Penggalian	38.237,6	38.449,1	38.777,1

Kategori	Lapangan Usaha	PRDB AdHK (Juta Rp)		
		2014	2015*)	2016**)
C	Industri Pengolahan	1.294.506,8	1.384.131,8	1.477.475,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.440,6	12.525,8	12.623,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.954,3	6.026,4	6.100,4
F	Konstruksi	1.583.580,9	1.658.172,9	1.734.666,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.638.354,9	3.902.990,4	4.114.657,1
H	Transportasi dan Pergudangan	1.931.119,3	2.113.382,8	2.313.542,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	678.969,8	725.629,6	775.937,8
J	Informasi dan Komunikasi	600.647,7	693.327,6	800.601,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	615.887,3	658.058,1	703.200,5
L	Real Estate	533.242,9	559.972,3	588.161,3
M,N	Jasa Perusahaan	147.370,3	157.842,1	169.078,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	642.132,3	656.479,7	671.195,2
P	Jasa Pendidikan	725.879,6	810.202,9	900.632,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145.444,0	160.226,7	174.292,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	290.107,5	323.790,7	361.440,9
PDRB atas Dasar Harga Konstan		16.839.415,6	17.779.804,4	18.672.176,4

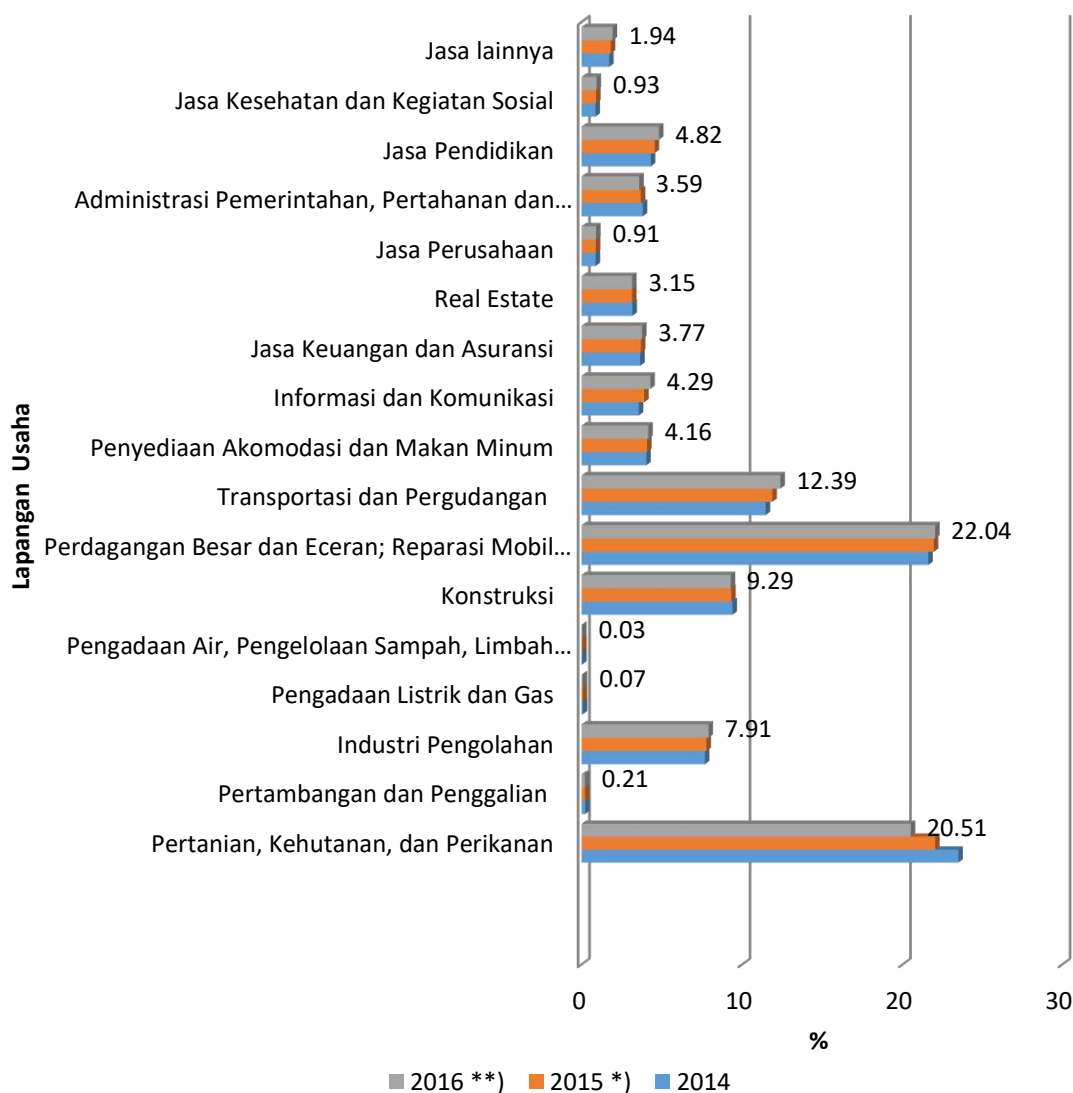
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2016

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Grafik 1.8

Distribusi Persentase PDRB AdHK
Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2016) , diolah

Keterangan : *) Angka Perbaikan,

***) Angka Sementara

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa distribusi PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2016 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor serta transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 54,94 %. Pada tahun 2016 cenderung menunjukkan penurunan jika dibandingkan kontribusi pada

tahun 2015 sebesar 55,88 % dan tahun 2014 sebesar 56,56 %. Penurunan besarnya kontribusi ini diduga terjadi karena adanya peningkatan kontribusi di sektor lain dengan jumlah yang relatif lebih besar.

1.2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 diproyeksikan mengalami perlambatan dibandingkan LPE tahun 2015. LPE tahun 2016 diproyeksikan sebesar 5,02 % lebih lambat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 sebesar 5,58 % dan tahun 2014 sebesar 5,07 %. LPE Kabupaten Ciamis tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

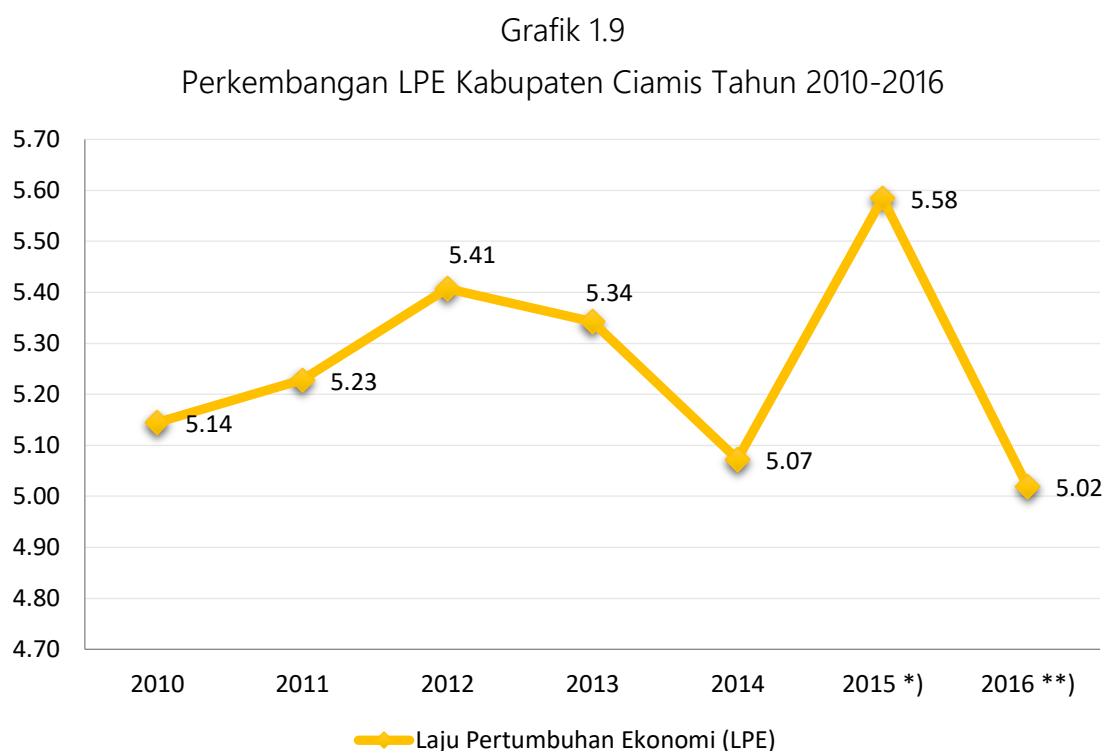
Tabel 1.6
LPE Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016

Kategori	Lapangan Usaha	LPE (%)		
		2014	2015*)	2016**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,97	-0,93	-2,27
B	Pertambangan dan Penggalian	2,03	0,55	0,85
C	Industri Pengolahan	7,49	6,92	6,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,68	0,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,18	1,21	1,23
F	Konstruksi	4,70	4,71	4,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,71	7,27	5,42
H	Transportasi dan Pergudangan	11,44	9,44	9,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,88	6,87	6,93
J	Informasi dan Komunikasi	15,41	15,43	15,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,82	6,85	6,86
L	Real Estate	4,41	5,01	5,03
M,N	Jasa Perusahaan	9,77	7,11	7,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,08	2,23	2,24

Kategori	Lapangan Usaha	LPE (%)		
		2014	2015*)	2016**)
P	Jasa Pendidikan	12,02	11,62	11,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,63	10,16	8,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	12,23	11,61	11,63
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,07	5,58	5,02

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2016)

Keterangan :*) Angka Perbaikan , **) Angka Sementara



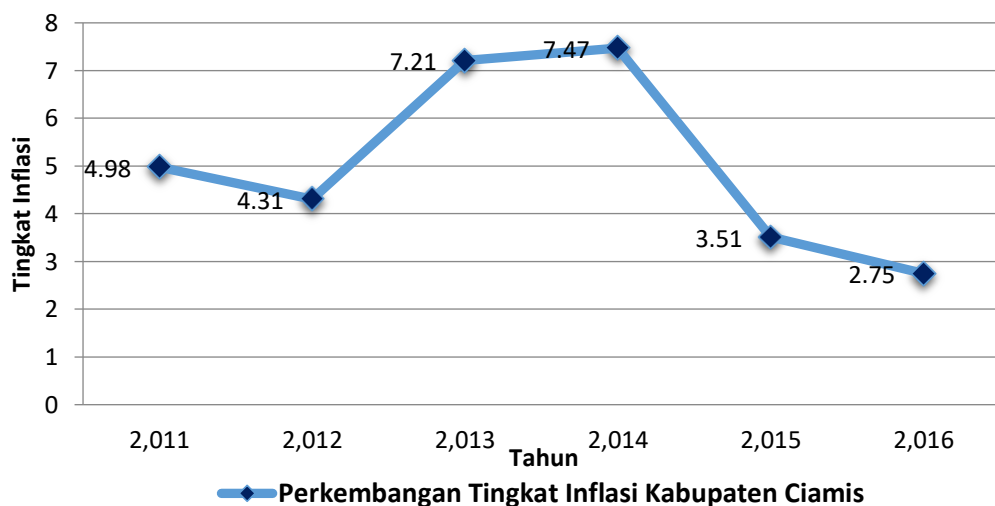
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2016)

Berdasarkan data pada tabel grafik tersebut, diketahui bahwa LPE Kabupaten Ciamis tahun 2016 merupakan LPE terendah dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dengan laju penurunan pada tahun 2014 sebesar -1,97 %, tahun 2015 sebesar -0,93 % dan tahun 2016 sebesar -2,27 %.

1.2.4.3 Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 diproyeksikan tergolong inflasi ringan atau inflasi merayap (*creeping inflation*) yang masih wajar dan belum mengganggu perekonomian secara menyeluruh, yaitu mencapai 2,75 %. Angka tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 3,51 % dan tahun 2014 yang mencapai 7,47 %. Pada tahap inflasi ringan diyakini dapat mendorong peningkatan pendapatan nasional. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Ciamis tahun 2011-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Grafik 1.10
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2016



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2016)

1.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam kerangka penyusunan dokumen

perencanaan di Kabupaten Ciamis perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraann urusan wajib dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan inilah yang menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ciamis ke depan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Kualitas dan kesempatan pendidikan;
2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Daya beli masyarakat;
4. Ketahanan pangan;
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan;
6. Kemitraan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan;
7. Iklim usaha;
8. Fasilitasi dan pembinaan pelaku UKM;
9. Pengembangan destinasi wisata;
10. Pemberdayaan masyarakat;

11. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
12. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan;
13. Kapasitas keuangan daerah;
14. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan desa;
15. Kesenjangan pembangunan antar wilayah;

Berbagai isu strategis tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Ciamis, isu dunia internasional serta penelaahan kebijakan pembangunan nasional dan daerah lain di sekitar Kabupaten Ciamis agar dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan seluruh urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah membentuk Organisasi Perangkat Daerah. Pada tahun 2016 pembentukan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari:

1. Bupati dan Wakil Bupati Ciamis;
2. Sekretaris Daerah;
 - a. Asisten Pemerintahan:
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum Dan Desa :
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Tata Pemerintah dan Desa;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 - 2) Bagian Hukum :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - 3) Bagian Organisasi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :

- 1) Bagian Perekonomian :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sarana Produksi;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
- 2) Bagian Pembangunan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 - a) Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bagian Agama;
 - c) Sub Bagian Bina Masyarakat.
- c. Asisten Administrasi Umum :
 - 1) Bagian Umum :
 - a) Sub Bagian Kesekretariatan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2) Bagian Keuangan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat :
 - a) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat
5. Dinas daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 - i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 - f. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Kecamatan
8. Kelurahan
9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Lembaga Lain :
- a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

11. Staf Ahli, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan.

Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah didahului dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap:

1. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah;
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
3. Kemampuan keuangan daerah;
4. Ketersediaan sumber daya aparatur;
5. Mampu membangun pola pengembangan kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan dan secara berkesinambungan diadakan evaluasi, baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pembangunan sistem. Melalui evaluasi tersebut diharapkan dapat terbentuk kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.5 KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

Seiring dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, setiap tingkatan pemerintahan dituntut dapat melakukan berbagai inovasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Dalam rangka

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki komitmen kuat dalam mendukung tumbuh kembangnya inovasi di berbagai bidang, baik inovasi di bidang administrasi negara maupun inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam bidang inovasi administrasi negara, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mendapat anugerah penghargaan Inovasi Administrasi Negara (INAGARA AWARD) yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) pada tahun 2015 yang diterima oleh Bupati Ciamis sebagai pemimpin daerah yang mendukung laboratorium inovasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Ciamis (Bupati Ciamis) untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik, sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ciamis juga telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis, khususnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat miskin, yaitu dengan membentuk lembaga layanan terpadu penanggulangan kemiskinan yang disebut dengan "LTPKD" (Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang merupakan wadah pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka percepatan dan penguatan secara terpadu dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Visi LTPKD yaitu "Masyarakat Miskin Terlayani 100 %" dengan misi pelayanan yang diemban adalah : (1) Melayani informasi dan data kemiskinan (*by name, by adress, by picture* dan *by geo tagging*); (2) Melayani pengaduan masyarakat secara optimal; dan (3) Melayani langsung sasaran masyarakat miskin secara cepat, tetapt dan terpercaya.

Pembentukan LTPKD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 yang dalam perkembangannya telah mengalami restrukturisasi organisasi dan penguatan regulasi yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis meluncurkan beberapa program inovatif yaitu :

- (1) "CIAMIS WALUYA". Waluya dalam bahasa sunda berarti sehat sepanjang masa. Program ini ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat miskin dengan mengembangkan sistem jaminan kesehatan. Sasaran penerima program ini yaitu masyarakat kurang mampu diluar kuota penerima jamkesmas/KIS, kelompok PMKS dan bayi baru lahir.
- (2) "CIAMIS CALAKAN". Calakan dalam bahasa sunda berarti pintar. Program ini ditujukan untuk melindungi pendidikan masyarakat miskin dengan bantuan pendidikan untuk siswa SMP yang Drop Out (DO) dan rawan Drop Out. Sasaran penerima program ini yaitu siswa SMP dari keluarga pemegang KKS/KPS, PKH, panti asuhan dan anak yatim piatu diluar kuota bantuan siswa miskin (BSM/KIP). Program diberikan dalam bentuk bantuan uang sebesar Rp. 750.000,-per siswa per tahun.
- (3) "CIAMIS WALAGRI". Walagri dalam bahasa sunda berarti sejahtera. Penerima manfaat program ini adalah masyarakat kurang mampu pemilik KPS dan RTM berdasarkan kriteria khusus.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Nomor 53 Tahun 2014, serta



mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016, serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

2.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki serta mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai tahapan pembangunan jangka panjang daerah, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah “Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Maju Berkualitas : Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehinggasecara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunanjuga tidak hanya sekedar kuantitatif tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.

Kemandirian : Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud, merupakan visi yang selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu “Dengan Iman dan Taqwa

Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”. Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, secara jelas direfleksikan pada Visi “Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

2.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
- Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Ciamis yang prima dan menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional.
- Misi 3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Misi 4 : Membangun perekonomian daerah yang tangguh
- Pembangun ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
- Misi 5 : Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
- Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semangat otonomi desa, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan untuk menyusun dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang ingin diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Adapun tujuan dan sasaran setiap Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 Setelah di Reviu

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1 Membangun sumber daya manusia yang terdidik	1.1.1 Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas
		1.1.2 Meningkatnya budaya dan minat baca
	1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.2.1 Meningkatnya layanan kesehatan
		1.2.2 Meningkatnya kesehatan lingkungan
	1.3 Mengendalikan pertumbuhan penduduk	1.3.1 Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
	1.4 Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	1.4.1 Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan
		1.4.2 Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
	1.5 Meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah	1.5.1 Meningkatnya prestasi olahraga.
		1.5.2 Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat.

Misi	Tujuan	Sasaran
	1.6 Meningkatkan kerukunan hidup beragama	1.6.1 Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.
		1.6.2 mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama
	1.7 Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial	1.7.1 Menurunnya tingkat kemiskinan.
		1.7.2 Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.
		1.7.3 Menurunnya PMKS.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat	2.1 Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah	2.1.1 Meningkatnya kualitas SDM aparat
		2.1.2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
	2.2 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2.2.1 Meningkatnya transparansi.
		2.2.2 Meningkatnya pelayanan masyarakat.
		2.2.3 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
	2.3 Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi	2.3.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
	2.4 Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum	2.4.1 Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat.
		2.4.2 Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).
		2.4.3 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi	Tujuan	Sasaran
	2.5 Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	2.5.1 Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	3.1 Menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	3.1.1 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
		3.1.2 Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
		3.1.3 Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
		3.1.4 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang
		3.1.5 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
		3.1.6 Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah
		3.1.7 Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran
		3.1.8 Meningkatnya kualitas penataan ruang
4 Membangun perekonomian daerah yang tangguh	4.1 Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah	4.1.1 Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non per-bankan dalam pengembangan perekonomian rakyat
		4.1.2 Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan local
		4.1.3 Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah
		4.1.4 Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal
	4.2 Meningkatkan daya beli masyarakat	4.1.5 Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat
		4.2.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
	4.3 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	4.3.1 Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan
		4.3.2 Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan
		4.3.3 Berkembangnya berbagai aktivitas <i>off farm</i> untuk meningkatkan penghasilan petani
	4.4 Meningkatkan ketahanan pangan	4.4.1 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan

Misi	Tujuan	Sasaran
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan	5.1 Meningkatkan layanan pemerintah desa kepada masyarakat	5.1.1 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD.
		5.1.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.
		5.1.2 Menurunnya jumlah desa tertinggal.
	5.2 Mewujudkan kemandirian masyarakat desa	5.2.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.
		5.2.2 Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.
		5.2.3 Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

2.2 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

2.2.1 Prioritas Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada pencapaian target RPJMD tahap ketiga dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Prioritas pembangunan daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2016 adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - b. Meningkatnya budaya dan minat baca.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya layanan kesehatan;
 - b. Meningkatnya kesehatan lingkungan.
3. Pengembangan pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - c. Berkembangnya berbagai aktifitas *off-farm* untuk meningkatkan penghasilan petani;
 - d. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sitem informasi dan kelembagaan pangan.
4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat;
 - b. Meningkatnya peran Koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non-Perbankan termasuk lembaga syariah dalam pengembangan perekonomian masyarakat;
 - c. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal;
 - d. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah;
 - e. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal;

- f. Terwujudnya sarana prasarana perekonomian masyarakat;
 - g. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan.
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Menurunnya tingkat kemiskinan;
 - b. Menurunnya PMKS;
 6. Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk;
 - b. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan;
 - c. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan;
 - d. Meningkatnya prestasi olahraga;
 - e. Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.
 7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Meningkatnya RTH yang dikelola pemerintah;
 - c. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas penataan ruang.
 8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman;

- d. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistirikan dan pembinaan usaha tambang.
9. Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya Kualitas SDM Aparat;
 - b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi;
 - c. Meningkatnya transparansi;
 - d. Meningkatnya pelayanan masyarakat;
 - e. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
 - g. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
 - h. Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - i. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - j. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) serta lembaga pendidikan.
10. Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD;
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. Menurunnya jumlah desa tertinggal;
 - d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
 - e. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
 - f. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Prioritas pembangunan tahun 2016 tersebut disusun berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2016. Dalam prioritas ini juga memperhatikan kebijakan dan isu pembangunan Nasional , Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis.

1. Kebijakan Nasional

a. Nawacita

- (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa Dalam kerangka negara kesatuan;
- (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia;
- (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi Domestik;
- (8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - *Sustainable Development Goals* (SDG's)

- (1) Tidak ada kemiskinan;
- (2) Tidak ada kelaparan;

- (3) Kesehatan yang baik;
- (4) Pendidikan berkualitas;
- (5) Kestaraan gender;
- (6) Air bersih dan sanitasi;
- (7) Energi terbarukan;
- (8) Pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi;
- (9) Inovasi dan infrastruktur;
- (10) Berkurangnya ketidaksetaraan;
- (11) Kota dan masyarakat berkelanjutan;
- (12) Pemakaian yang bertanggungjawab;
- (13) Aksi iklim;
- (14) Kehidupan dibawah air;
- (15) Kehidupan di darat;
- (16) Perdamaian dan keadilan;
- (17) Kemitraan untuk tujuan.

c. Bentuk Kerjasama dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Peningkatan Kapasitas;
- (2) Pengakuan Kualifikasi Profesional;
- (3) Konsultasi Lebih Dekat Pada Kebijakan Makro Ekonomi Dan Keuangan;
- (4) Langkah-Langkah Pembiayaan Perdagangan;
- (5) Meningkatkan Infrastruktur;
- (6) Pengembangan Transaksi Elektronik Melalui E-Asean;
- (7) Mengintegrasikan Industri Di Seluruh Wilayah Untuk Mempromosikan Sumber Daerah;
- (8) Meningkatkan Keterlibatan Sektor Swasta Untuk Membangun Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

d. Mendukung Empat Pilar Strategi Pembangunan Sosial Ekonomi

- (1) *Pro Poor*;
- (2) *Pro Job*;
- (3) *Pro Growth*;
- (4) *Pro Environment*.

2. Kebijakan Provinsi Jawa Barat

a. Janji Gubernur

- (1) Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA di Seluruh Jawa Barat;
- (2) Beasiswa pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, serta Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru;
- (3) Revitaliasi posyandu dan dana Operasional Kader Posyandu;
- (4) Membuka 2 Juta Lapangan Kerja Baru dan Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat;
- (5) Alokasi 4 triliun Untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- (6) Rehabilitasi 100.000 Rumah rakyat Miskin;
- (7) Pembangunan Pusat Seni Dan Budaya Jawa Barat Di Kabupaten/ Kota;
- (8) Pembangunan Gelanggang Olahraga di kabupaten/ Kota.

b. *Common Goal* (CG)

- (1) Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan;
- (2) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan;
- (3) Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku;
- (4) Ekonomi Pertanian;
- (5) Ekonomi Non Pertanian;
- (6) Pengelolaan Hidup dan Kebencanaan;
- (7) Pengelolaan Seni, Budaya, Wisata serta Kepemudaan;
- (8) Ketahanan Keluarga dan Kependudukan;
- (9) Kemiskinan, PMKS dan Keamanan;
- (10) Pemerintahan.

c. Tematik Kewilayahan

- (1) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;
- (2) Pengembangan Kluster Unggas, Perikanan Budidaya Air Tawar dan Tankap, Serta Ternak Sapi Perah, Sapi Potong, Domba Garut, Kambing dan Jejaringnya serta Pengembangan Sentra Produksi Pakan Ternak;
- (3) Pengembangan Produksi Tanaman Industri(Kopi, The, Kakao, Karet Dam Atsiri) dan Holtikultura (Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias) Yang Berorientasi Ekspor;
- (4) Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata;
- (5) Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Pebatasan antar Provinsi.

3. Kebijakan Kabupaten Ciamis

a. Janji Bupati

- (1) Revitalisasi pembangunan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan;
- (2) Pengembangan wisata, kesenian dan olah raga. termasuk membangun gedung kesenian;
- (3) Anggaran sebesar Rp. 5 miliar bantuan rehab rumah tak layak huni;
- (4) Anggaran sebesar Rp. 50 miliar untuk pengaspalan (hot mix);
- (5) Anggaran sebesar Rp. 15 miliar pembangunan dan rehabilitasi irigasi;
- (6) Anggaran sebesar Rp. 28 miliar untuk bantuan aspal dan semen untuk perbaikan jalan desa;
- (7) Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga tidak mampu;
- (8) Pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup;
- (9) Penataan ibu kota kabupaten dan kota kecamatan;

- (10) Anggaran sebesar Rp. 15 miliar bantuan pemberdayaan usaha bagi warga tak mampu;
- (11) Penanggulangan pengangguran melalui pelatihan usaha, kerja dan peningkatan keterampilan;
- (12) Membangun unit pelayanan penanggulangan kemiskinan;
- (13) Anggaran sebesar Rp. 20 miliar bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat tidak mampu;
- (14) Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ciamis;
- (15) Anggaran sebesar Rp. 12 miliar untuk pengembangan 10 puskesmas rawat inap;
- (16) Anggaran sebesar Rp. 9 miliar bantuan pendidikan ke SLTA (penuntasan wajib belajar 12 tahun);
- (17) Anggaran sebesar Rp. 1 miliar penanggulangan siswa drop out;
- (18) Perbaikan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, ketua Rukun Warga (RW) dan ketua Rukun Tetangga (RT);
- (19) Anggaran sebesar Rp. 15 miliar untuk peningkatan pendidikan keagamaan. bantuan kesejahteraan/ insentif guru madrasah, RA, TKA, TPA dan DKM, bantuan pesantren dan madrasah;
- (20) Revitalisasi pos yandu Rp. 1 miliar;
- (21) Reformasi birokrasi. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (22) Penyelesaian masalah pertanahan.

Secara umum dapat dicermati bahwa janji-janji tersebut sangat positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga Ciamis. Ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Ciamis, terutama terkait dimensi pendidikan dan kesehatan serta persoalan infrastruktur. Selain itu, janji-janji tersebut juga secara implisit terkandung maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga Ciamis

selanjutnya menjadi pembentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan selain ukuran-ukuran keberhasilan pendukung lainnya.

b. Pembangunan di Wilayah perbatasan

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Perekonomian;
- (4) Infrastruktur;
- (5) Pemerintahan.

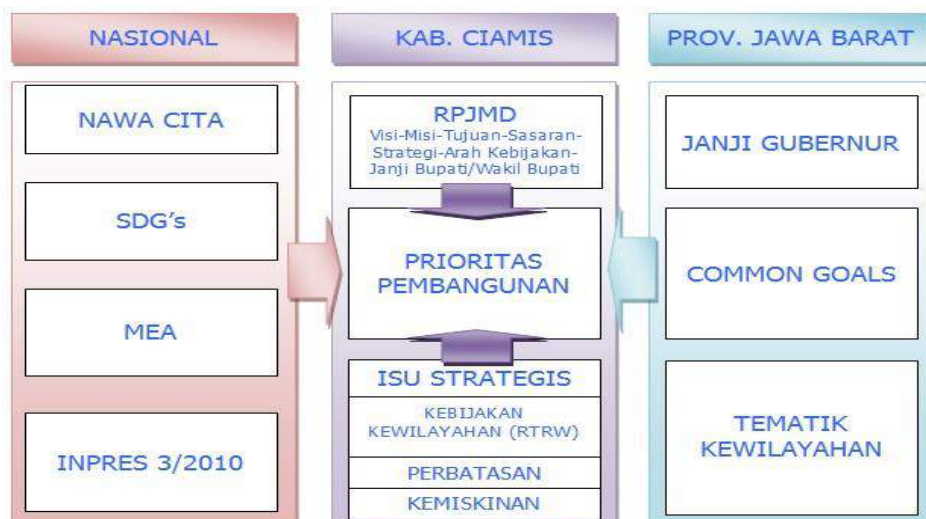
c. Pengentasan Kemiskinan

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Ketenagakerjaan;
- (4) Perasarana Dasar;
- (5) ketahanan Pangan.

Keterkaitan kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



2.2.2 Program Prioritas

Prioritas pembangunan dan program pembangunan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016 adalah sebagaimana pada Tabel 2. 2 berikut:

Tabel 2. 2
Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kabupaten Ciamis
Tahun 2016

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
1.	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Program Pendidikan Non Formal dan Informal
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Program Pendidikan Menengah
		Meningkatnya budaya dan minat baca	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
2.	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan	Meningkatnya layanan kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
			Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Meningkatnya kesehatan lingkungan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
		Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	Program Pembinaan Kepemudaan
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
		Meningkatnya prestasi olahraga.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
			Program Pembinaan Olahraga
4.	Pengembangan pariwisata dan dunis usaha	Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
		Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.	Program koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan keagamaan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
		mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
5.	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	Menurunnya tingkat kemiskinan.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
			Program Pengembangan kapasitas calon transmigran
			Program Transmigrasi Regional
6.	Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga	Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
7.	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	Menurunnya PMKS.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
			Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Program Pembinaan Anak Terlantar
			Program Pembinaan Panti Asuhan atau Panti jompo
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
8.	Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas SDM aparat	Program Pendidikan Kedinasan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (kearsipan)
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
			program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
			Program pengembangan data/informasi
			Program Kerjasama Pembanguna
			program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Penataan penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
			Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
			Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan
			program penataan daerah otonom
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
			Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
			Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
		Meningkatnya transparansi.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Meningkatnya pelayanan masyarakat.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketataksanaan perangkat daerah
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.	Program Pendidikan Politik Masyarakat
		Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
		Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
		Terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan lembaga pendidikan	Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
			Program Kerjasama pembangunan
9.	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Program pembangunan turap/talud/ bronjong
			Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan jembatan
			Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
			Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
			Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
			Program peningkatan pelayanan angkutan
		Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
			Program pengendalian banjir
		Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
			Program Lingkungan sehat perumahan
			Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah
			Program pembangunan jalan lingkungan permukiman perkotaan
			Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
			Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
		Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
			Program pembinaan dan Pengembangan bidang energi
			Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
10.	Penanggulan Bencana dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
			Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
			Program rehabilitasi hutan dan lahan
			Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
			Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
			Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
		Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman
		Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman
		Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Program perencanaan tata ruang
			Program pengendalian pemanfaatan ruang
			Program Pemanfaatan ruang

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
11.	Pengembangan pariwisata dan dunia usaha	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan termasuk lembaga syariah dalam pengembangan perekonomian rakyat	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
		Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
			Program peningkatan kemampuan teknologi industri
			program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
			Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya
			Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK
			Program pemanfaatan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			sumber daya hutan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
			Program Pengembangan Kemitraan
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
		Terwujudnya sarana prasarana perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program peningkatan kesempatan kerja
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
12.	Pengembangan pertanian, kehutanan dan perikanan	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Meningkatkannya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian/perkebunan
			Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan
			Program PSDS dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
		Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan dan perikanan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
		Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
13.	Pembangunan Perdesaan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Desa.

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pedesaan
		Menurunnya jumlah desa tertinggal.	
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
		Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyusun dokumen perencanaan tahunan yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016, serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam periode 2014 - 2019. Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2016 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam RPJMD yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2016, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian sasaran. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016 seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun 2016 Setelah di Reviu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2016	
1	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	1.1	Indeks Pendidikan	84,84	Poin
		1.1	<i>Indeks Pendidikan *)</i>	64,49	Poin
		1.2	RLS	8,36	Tahun

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2016	
		1.2	<i>RLS</i> *)	7,58	Tahun
		1.3	AMH	99,39	%
		1.3	<i>AHLS</i> *)	14,12	%
		1.4	Partisipasi anak usia dini dalam PAUD	52,20	%
2	Meningkatnya budaya dan minat baca	2.1	Kapasitas perpustakaan:		
			- Jumlah Perpustakaan daerah & perpustakaan keliling;	210	Buah
			- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	28.813	Orang
3	Meningkatnya layanan kesehatan	3.1	Indeks Kesehatan	71,87	Poin
		3.1	<i>Indeks Kesehatan</i> *)	77,61	Poin
		3.2	Angka Harapan Hidup	68,12	Tahun
		3.2	<i>Angka Harapan Hidup</i> *)	70,45	Tahun
		3.3	AKI	16	Orang
		3.4	AKB	176	Bayi
		3.5	Balita gizi buruk	155	Balita
		3.6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	100	%
		3.7	Cakupan level I pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana kesehatan (RS)	100	%
		3.8	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	%
		3.9	Cakupan desa siaga aktif	100	%
4	Meningkatnya kesehatan lingkungan	4.1	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100	%
5	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	5.1	LPP	0,46	%
6	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	6.1	Jumlah organisasi kepemudaan	100	Kelompok
		6.2	Cakupan Pembinaan terhadap Organisasi Pemuda	100	%
7	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan	7.1	Partisipasi perempuan di pasar kerja	2	%
		7.2	Partisipasi perempuan dalam partai politik	16	%
8	Meningkatnya prestasi olahraga	8.1	Prestasi Olahraga:		
			- Jumlah sarana olahraga	1.024	Unit

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2016	
9	Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat	9.1	Jumlah situs seni dan budaya;	162	Situs
		9.2	Tempat seni dan budaya	82	Unit
10	Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari	10.1	Tempat ibadah yang menerima bantuan		
			- Masjid	745	Unit
			- Gereja	4	Unit
			- Kelenteng	1	Unit
11	Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	11.1	Kasus berlatar belakang sara	0	Kasus
12	Menurunnya tingkat kemiskinan	12.1	Jumlah penduduk miskin	93.480	Orang
13	Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan	13.1	Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak	20	Kasus
		13.2	Presentase penanganan KDRT dan Traficking	100	%
14	Menurunnya PMKS	14.1	Penurunan jumlah PMKS	15.020	Orang
15	Meningkatnya kualitas SDM aparat	15.1	Kapasitas aparatur:		
			- PNS berijazah S1,S2,S3	55,54	%
			- Keikutsertaan dalam diklat	664	Orang
16	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	16.1	Database:		
			- Persentase ketersediaan SOP	40	%
			- Pengadaan arsip secara baku	100	%
		16.2	Ketersediaan berbagai dokumen perencanaan	Ada	
		16.3	Prestasi:		
			- penilaian LAKIP	B	
			- Predikat penilaian LPPD	Sangat tinggi	
			- Opini BPK	WTP	
		16.4	Presentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	73,01	%

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2016	
17	Meningkatnya transparansi	17.1	Kepemilikan web pemerintah	1	Unit
18	Meningkatnya pelayanan masyarakat	18.1	Indeks kepuasan masyarakat; (jumlah unit kerja)	43	%
19	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	19.1	Kepemilikan KTP	100	%
20	Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat	20.1	Jumlah produk hukum yang dilegalkan	10	buah Perda
				20	buah Perbup
				600	buah SK Bupati
		20.2	Jumlah desa sadar hukum	50	Desa
21	Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)	21.1	Cakupan penegakan perda dan/atau perkara	360	Kasus
22	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	22.1	Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk	45	Orang
		22.2	Rasio pos siskamling per desa/ kelurahan	35	Unit
23	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi	23.1	Jumlah kerjasama	2	Buah
24	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	24.1	Kemantapan jalan kabupaten	66,50	%
		24.2	Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas	7	Ruas
		24.3	Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum	11	Ruas
25	Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	25.1	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	29,230	m/ha
		25.2	Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir	88,46	%
26	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	26.1	Cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar pemukiman	40,37	%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2016	
		27.1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	80	%
28	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	28.1	Persentase luas kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah	41,05	%
		28.2	Pencapaian status mutu sungai dengan tingkat cemar sedang	10	%
		28.3	Cakupan layanan persampahan	5,07	%
29	Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah	29.1	Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	3,01	%
		29.2	Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	0,323	%
30	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	30.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	12,30	%
31	Meningkatnya kualitas penataan ruang	31.1	Jumlah Rencana Tata Ruang	19	Dokumen
		31.2	Kawasan pertanian berkelanjutan yang harus dipertahankan	18.000	Ha
		31.3	Kawasan Hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan	9.910,72	Ha
		31.4	Kawasan hutan produktif tetap yang harus dipertahankan	2.509,74	Ha
32	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	32.1	Jumlah koperasi aktif	319	Unit
		32.2	Jumlah UMKM	14.377	Unit
33	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	33.1	Lama proses perijinan	10	Hari
		33.2	Jumlah investasi:		
			- Jumlah investor PMA	-	Perusahaan
			- Jumlah PMDN	800	Perusahaan
			- Nilai investasi PMA	-	Juta US\$
			- Nilai investasi PMDN	173	Milyar Rupiah
			- Nilai investasi Non PMA/ PMDN	-	Milyar Rupiah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2016	
34	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	34.1	Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	11	IKM
		34.2	Jumlah komoditas unggulan pertanian bersertifikat	3	Jenis
		34.3	Dokumen potensi daerah	1	Dokumen
		34.4	Jumlah kunjungan wisatawan	500.000	Orang
		34.5	Jumlah pameran produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif	9	Kali
		34.6	Jumlah objek wisata rintisan baru	4	Lokasi
35	Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	35.1	Jenis komoditi industri	30	Jenis
		35.2	Jumlah kluster indutri	1	Kluster
36	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat	36.1	Jumlah pasar pemda	4	Unit
		36.2	Jumlah pasar desa	48	Unit
37	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	37.1	LPE	5,04	%
		37.1	<i>LPE *)</i>	5,17	%
		37.2	PDRB Per kapita (AdHB)	20.721.066	Rupiah
		37.2	<i>PDRB Per kapita (AdHB) *)</i>	21.861.914	Rupiah
		37.3	Paritas Daya Beli (PPP) (x 1000)	64.326	Rupiah
		37.3	<i>Daya Beli Masyarakat *)</i>	8.244.200	Rupiah
		37.4	Inflasi	4,37	%
		37.5	Pengangguran	5,30	%
38	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	38.1	Luas tanah pertanian pangan berkelanjutan	18.000	Ha
39	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan	39.1	Kinerja sektor pertanian:		
			- Produksi padi per tahun	436.417	Ton
			- Produksi jagung	21.972	Ton
			- Produktivitas padi	65	Ku/Ha
			- Produktivitas jagung	66	Ku/Ha
			- Produksi Kelapa dalam	19.907,54	Ton
			- Produksi kakao	336,65	Ton
			- Produksi cengkeh	59	Ton
			- Produksi karet	120,08	Ton
			- Produksi teh	348,50	Ton

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2016
		- Produksi kopi	660,20 Ton
		- Produksi daging	73.287,353 Ton
		- Produksi telur	7.046.699,08 Kg
		- Produksi ikan	50.836 Kg
		39.2 Kontribusi setiap sub-sektor di sektor pertanian terhadap PDRB :	
		- Tanaman bahan makanan	17,71 %
		- <i>Tanaman Pangan *)</i>	10,06 %
		- <i>Tanaman Holtikultura Semusim *)</i>	3,50 %
		- Tanaman perkebunan	1,84 %
		- <i>Perkebunan Semusim *)</i>	3,40 %
		- Peternakan dan hasil-hasilnya	3,45 %
		- <i>Peternakan *)</i>	3,66 %
		- <i>Jasa Pertanian dan Perburuan *)</i>	0,37 %
		- Kehutanan	0,25 %
		- <i>Kehutanan *)</i>	0,26 %
		- Perikanan	0,91 %
		- <i>Perikanan *)</i>	1,99 %
		39.3 Konsumsi ikan	17,56 Kg/kapita/t h
40	Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani	40.1 Jumlah promosi hasil :	
		- Pertanian/perkebunan	3 Kali
		- Peternakan	4 Kali
		- Kehutanan	2 Kali
41	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	41.1 Ketersediaan: cadangan pangan daerah dan masyarakat :	
		- Cadangan pangan daerah dan masyarakat;	424,80 Ton
		- Jumlah lumbung pangan masyarakat;	255 LPM
		- Besarnya cadangan padi/beras di lumbung;	415,45 Ton
		- Besarnya cadangan gabah daerah	9,35 Ton
		41.2 Distribusi dan akses pangan :	
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	100 %
		41.3 Penganekaragaman dan keamanan pangan :	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2016
		- Tingkat konsumsi pangan berbasis non-beras;	33,54 %
		- Skor pola pangan harapan	70 %
		41.4 Penanganan kerawanan pangan:	
		- Penurunan rumah tangga rawan pangan;	45 %
		- Daerah rawan pangan tertangani	16 Lokasi
42	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	42.1 Aparatur desa yang mengikuti diklat	308 Orang
43	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan	43.1 Bangunan desa dalam kondisi baik	69,70 %
44	Menurunnya jumlah desa tertinggal	44.1 Jumlah desa tertinggal	27 Desa
45	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	45.1 Jumlah LPM aktif	265 Lembaga
46	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa	46.1 Jumlah UPPKS aktif	265 Kelompok
47	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	47.1 Jumlah kader pembangunan	530 Orang
		47.2 Kader Posyandu	8.042 Orang

Keterangan :

*) : menggunakan metodologi perhitungan baru

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberikan amanah dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui tahapan proses pengumpulan data kinerja dari masing-masing SKPD sebagai penyedia data kinerja berdasarkan indikator sasaran serta dari instansi lainnya yang terkait dengan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan

selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

No	Persentase	Predikat
1	< 100 %	Tidak Tercapai
2	= 100%	Tercapai/Sesuai Target
3	> 100 %	Melebihi Target

Adapun interpretasi terhadap predikat capaian kinerja, baik yang tercapai melebihi target (> 100 %), tercapai sesuai target (= 100 %) maupun yang tidak tercapai (<100 %) dilakukan dengan menggunakan referensi pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan dengan kategori/kriteria sebagai berikut :

No	Persentase Capaian Kinerja	Kategori/Kriteria
1	$\geq 90,00\%$	Sangat Baik
2	75,00% - 89,99%	Baik
3	65,00% - 74,99%	Cukup
4	50,00% - 64,99%	Kurang
5	$\leq 49,99\%$	Sangat Kurang

3. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun lalu;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019;

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional (jika ada, Misalnya SPM, target Provinsi, dan lain-lain);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja sasaran juga dikaitkan dengan program pembangunan yang mendukung upaya pencapaian sasaran dengan sejumlah anggaran yang telah direalisasikan, beserta capaian output dan outcome dari keseluruhan program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut, sehingga diketahui sejauhmana program yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran secara optimal.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap capaian kinerja sasaran strategis, maka dilakukan pengungkapan, analisis dan penjelasan terhadap setiap indikator kinerja sasaran. Analisis terhadap setiap indikator sasaran diawali dengan penjelasan/definisi operasional serta rumus perhitungan dari masing-masing indikator sasaran guna mengukur realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara realisasi (capaian nyata) dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta perbandingan dengan target RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut diungkapkan pula mengenai faktor-faktor yang mendukung/menghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan untuk masing-masing sasaran, dalam akuntabilitas keuangan dihitung anggaran per-sasaran sesuai jumlah program yang mendukung upaya pencapaian sasaran tersebut. Dengan adanya

penjelasan program pendukung beserta besaran anggaran yang digunakan untuk masing-masing sasaran, akan lebih mudah untuk membuat akuntabilitas keuangan. Dalam akuntabilitas keuangan ini juga dilakukan analisa/penghitungan terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk setiap sasaran yang menunjukkan capaian kinerja mencapai dan melebihi target sasaran.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7A Tahun 2015 tentang *Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019*. Penyusunan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2016 telah ditetapkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sasaran dengan 134 (seratus tiga puluh empat) indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis

memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2014-2019, RKPD Tahun 2016 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian target sasaran strategis Tahun 2016. Adapun tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator setiap sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Tahun 2016
Setelah di Reviu

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Misi 1 :								
1.1	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	4	1	20	3	75	-	-
		4 ^{*)}	2	50	-	-	2	50
1.2	Meningkatnya budaya dan minat baca	2	1	50	-	-	1	50
1.3	Meningkatnya layanan kesehatan	9	3	33,33	5	55,56	1	11,11
		9 ^{*)}	5	55,56	3	33,33	1	11,11
1.4	Meningkatnya kesehatan lingkungan	1	-	-	1	100	-	-
1.5	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	1	-	-	1	100	-	-
1.6	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	2	1	50	-	-	1	50
1.7	Meningkatnya peran perempuan	2	-	-	1	50	1	50

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.8	dalam berpolitik/ kemasyarakatan							
	Meningkatnya prestasi olahraga	1	-	-	1	100	-	-
1.9	Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat	2	1	50	-	-	1	50
1.10	Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari	1	-	-	-	-	1	100
1.11	Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	1	-	-	1	100	-	-
1.12	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	-	-	1	100	-	-
1.13	Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan	2	1	50	1	50	-	-
1.14	Menurunnya PMKS	1	1	100	-	-	-	-
Misi 2 :								
2.1	Meningkatnya kualitas SDM aparat	2	2	100	-	-	-	-

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2.2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	7	2	28,57	4	57,14	1	14,29
2.3	Meningkatnya transparansi	1	-	-	1	100	-	-
2.4	Meningkatnya pelayanan masyarakat	1	1	100	-	-	-	-
2.5	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1	-	-	-	-	1	100
2.6	Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat	2	2	100	-	-	-	-
2.7	Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)	1	1	100	-	-	-	-
2.8	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	2	1	50	-	-	1	50
2.9	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi	1	1	100	-	-	-	-
Misi 3 :								
3.1	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	3	1	33,33	2	66,67	-	-
3.2	Meningkatnya keandalan sistem	2	1	50	-	-	1	50

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air							
3.3	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	1	-	-	-	-	1	100
3.4	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang	1	1	100	-	-	-	-
3.5	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	3	2	66,67	1	33,33	-	-
3.6	Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah	2	-	-	1	50	1	50
3.7	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	1	-	-	1	100	-	-
3.8	Meningkatnya kualitas penataan ruang	4	-	-	3	75	1	25
Misi 4 :								
4.1	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga	2	1	50	-	-	1	50

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat							
4.2	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	6	1	16,67	4	57,14	1	16,67
4.3	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	6	1	16,67	5	83,33	-	-
4.4	Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	2	1	50	1	50	-	-
4.5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat	2	-	-	2	100	-	-
4.6	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	5	1	20	4	80	-	-
		5 *)	2	40	2	40	2	20
4.7	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	1	-	-	1	100	-	-
4.8	Meningkatkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan	26	15	57,69	7	26,92	4	15,39

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	kehutanan							
4.9	Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani	3	3	100	-	-	-	-
4.10	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	9	6	66,67	1	11,11	2	22,22
Misi 5 :								
5.1	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	1	1	100	-	-	-	-
5.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	1	1	100	-	-	-	-
5.3	Menurunnya jumlah desa tertinggal	1	-	-	1	100	-	-
5.4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	1	-	-	1	100	-	-
5.5	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa	1	-	-	-	-	1	100

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
5.6	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan & pembangunan	2	1	50	1	50	-	-

Keterangan : *) indikator kinerja berdasarkan perhitungan metode baru BPS tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, maka rekapitulasi tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator setiap sasaran yang dikelompokkan menurut misi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran pada Masing-Masing Misi
Tahun 2016

No	Misi	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi Target		Mencapai/ Sesuai Target		Tidak Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	14	30	8	26,67	16	53,33	6	20
	Misi 1*)	14	30	11	36,67	11	36,67	8	26,66
2	Misi 2	9	18	10	55,55	5	27,78	3	16,67
3	Misi 3	8	17	5	29,41	7	41,18	5	29,41
4	Misi 4	10	62	29	46,77	25	40,32	8	12,90
	Misi 4*)	10	62	30	48,39	23	37,10	9	14,52
5	Misi 5	6	7	3	42,86	3	42,86	1	14,28
Jumlah		47	134	55	41,05	56	41,79	23	17,16
Jumlah *)		47	134	59	44,03	49	36,57	26	19,40

Keterangan : *) indikator kinerja berdasarkan perhitungan metode baru BPS tahun 2016

Dari tabel diatas, diketahui tingkat pencapaian target sasaran dari 134 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 55 indikator atau sebesar 41,05 % tercapai melebihi target ($> 100\%$);
- Sebanyak 56 indikator atau sebesar 41,79 % mencapai/sesuai target ($= 100\%$);
- Sebanyak 23 indikator atau sebesar 17,16 % tidak mencapai target ($< 100\%$).

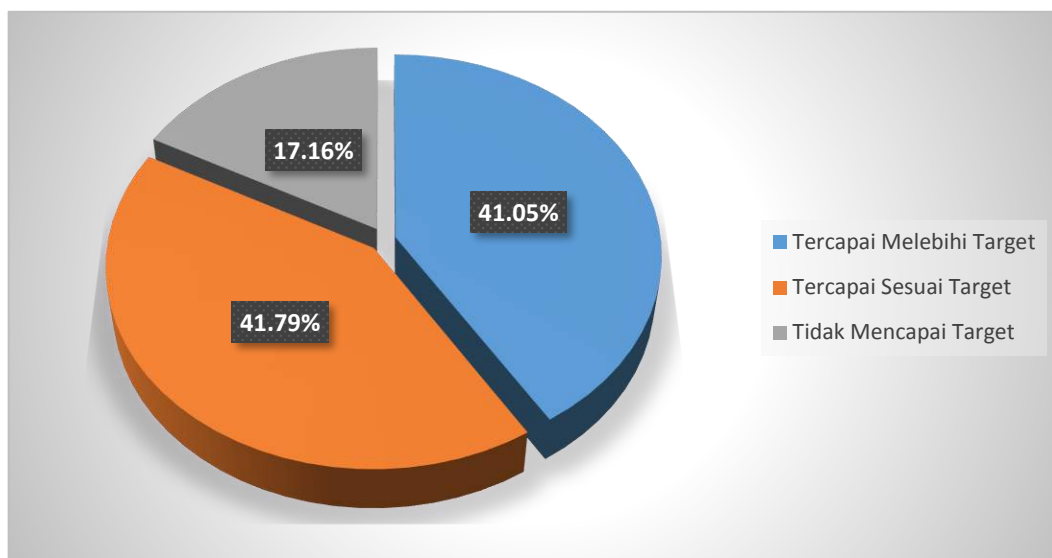
Apabila menggunakan perhitungan metode baru BPS maka dari 134 indikator sasaran tercapai :

- Sebanyak 59 indikator atau sebesar 44,03 % tercapai melebihi target ($> 100\%$);
- Sebanyak 49 indikator atau sebesar 36,57 % mencapai/sesuai target ($= 100\%$);
- Sebanyak 26 indikator atau sebesar 19,40 % tidak mencapai target ($< 100\%$).

Persentase tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1

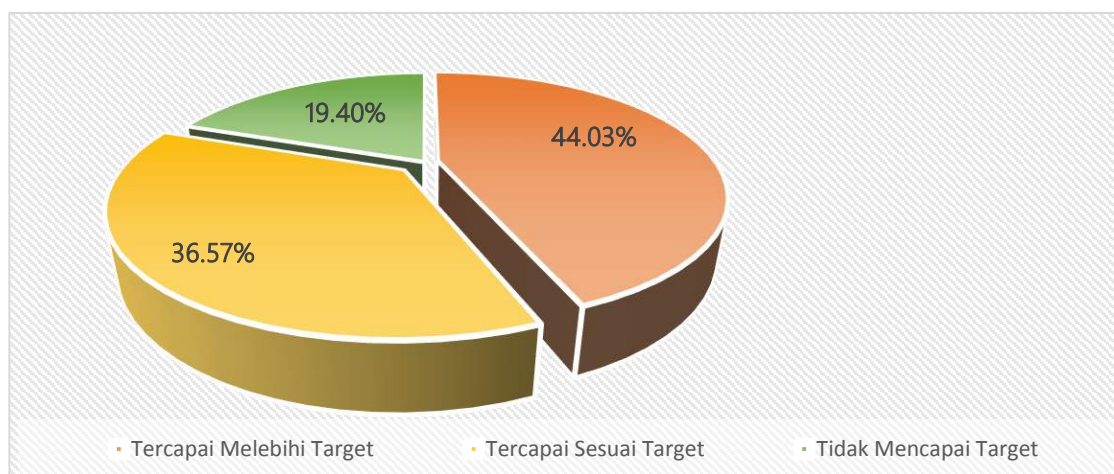
Persentase Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran



Jika menggunakan perhitungan metode baru BPS, maka Persentase tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2

Persentase Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran dan Perhitungan Metode baru BPS Tahun 2016



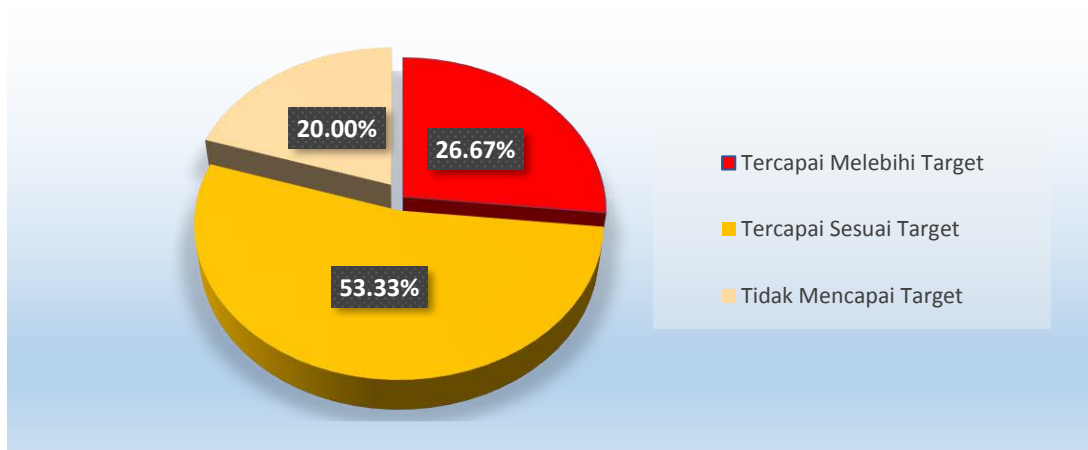
Rincian persentase tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yang dikelompokkan menurut masing-masing misi adalah sebagai berikut :

a. Misi 1 (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)

Jumlah sasaran pada “Misi 1” sebanyak 14 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 30 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 8 indikator (26,67 %) tercapai melebihi target, 16 indikator (53,33 %) mencapai/sesuai target dan 6 indikator (20%) tidak mencapai target.

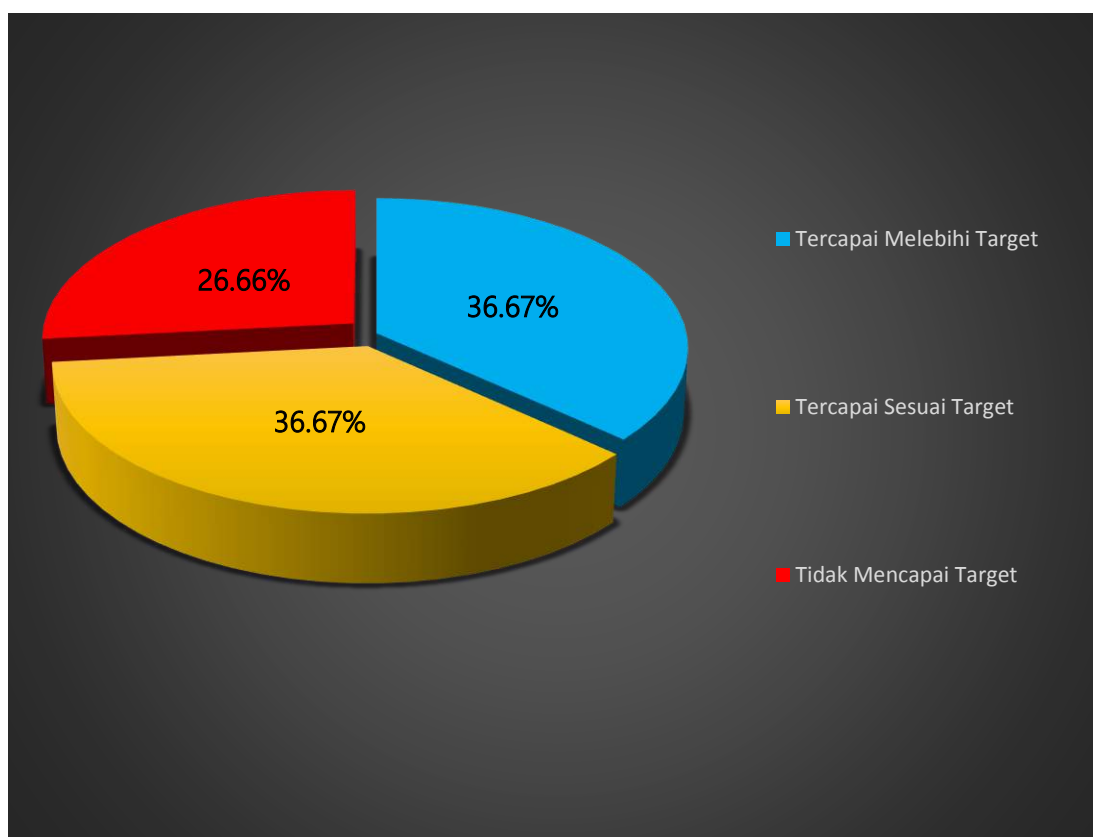
Grafik 3.3

Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 1



Jika menggunakan perhitungan metode baru BPS, maka Persentase tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 11 indikator (36,67 %) tercapai melebihi target, 11 indikator (36,67 %) mencapai/sesuai target dan 8 indikator (26,66 %) tidak mencapai target.

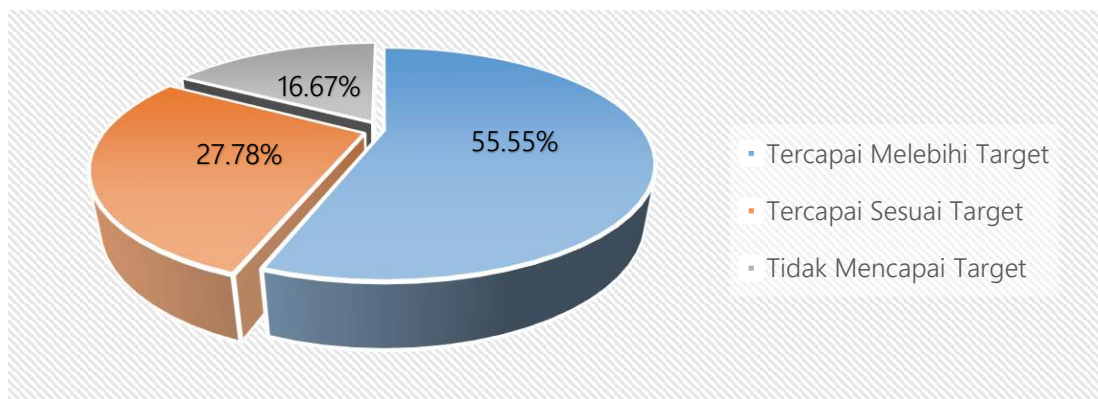
Grafik 3.4
Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 1
Menurut Perhitungan Metode baru BPS Tahun 2016



- b. Misi 2 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha dan Masyarakat)

Jumlah sasaran pada "Misi 2" sebanyak 9 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 18 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 10 indikator (55,55 %) tercapai melebihi target, 5 indikator (27,78 %) mencapai/sesuai target dan 3 indikator (16,67 %) tidak mencapai target.

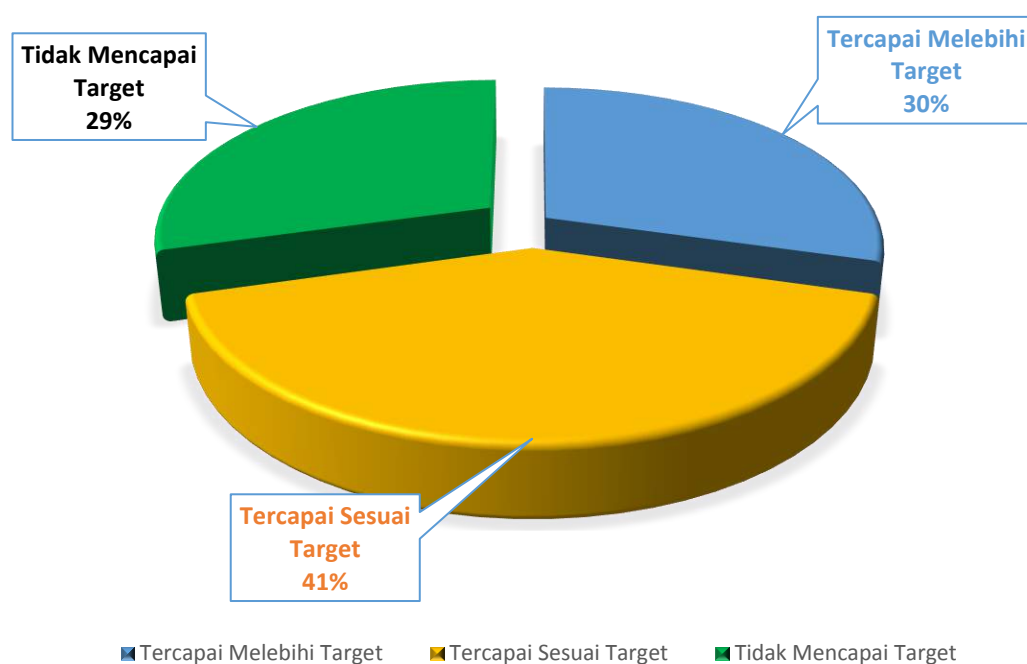
Grafik 3.5
Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 2



- c. Misi 3 (Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan)

Jumlah sasaran pada "Misi 3" sebanyak 8 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 17 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 5 indikator (29,41 %) tercapai melebihi target, 7 indikator (41,18 %) mencapai/sesuai target dan 5 indikator (29,41 %) tidak mencapai target.

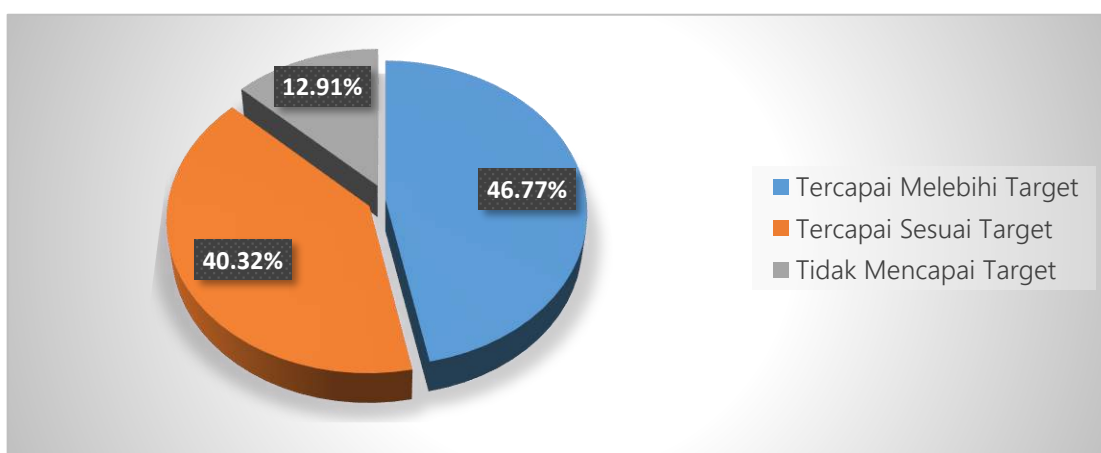
Grafik 3.6
Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 3



d. Misi 4 (Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh)

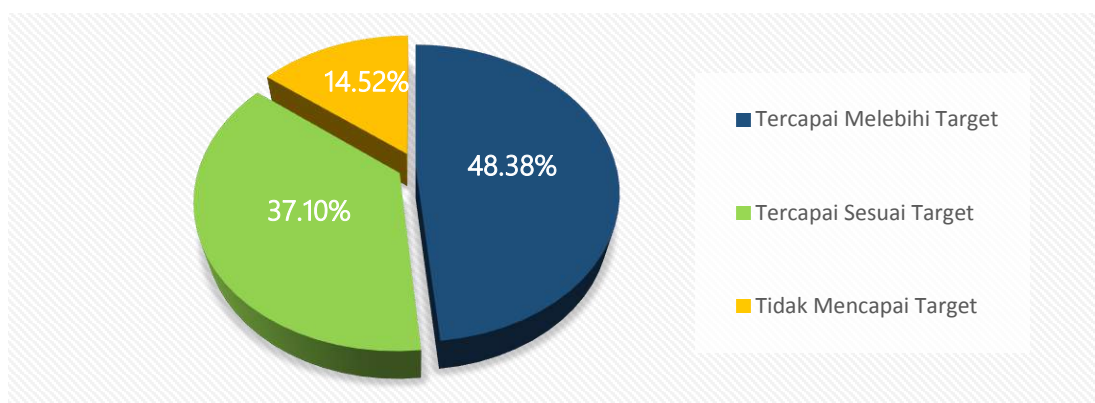
Jumlah sasaran pada "Misi 4" sebanyak 10 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 62 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 29 indikator (46,77 %) tercapai melebihi target, 25 indikator (40,32 %) mencapai/sesuai target dan 8 indikator (12,91 %) tidak mencapai target.

Grafik 3.7
Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 4



Jika menggunakan perhitungan metode baru BPS, maka Persentase tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 30 indikator (48,38 %) tercapai melebihi target, 23 indikator (37,10 %) mencapai/sesuai target dan 9 indikator (14,52 %) tidak mencapai target.

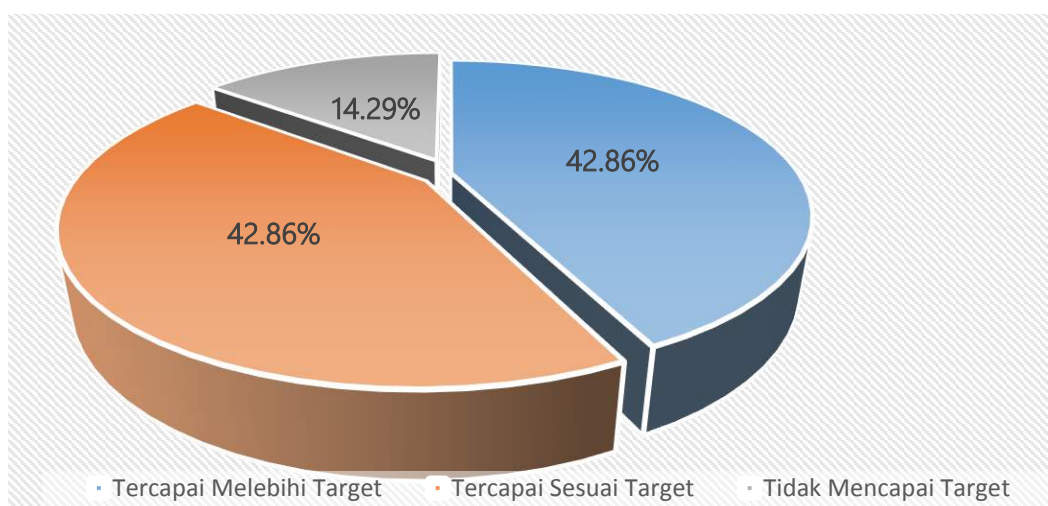
Grafik 3.8
Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 4
Menurut Perhitungan Metode baru BPS Tahun 2016



e. Misi 5 (Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan)

Jumlah sasaran pada "Misi 5" sebanyak 6 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 7 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 3 indikator (42,86 %) tercapai melebihi target, 3 indikator (42,86 %) mencapai/sesuai target dan 1 indikator (14,29 %) tidak mencapai target.

Grafik 3.9
Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 5

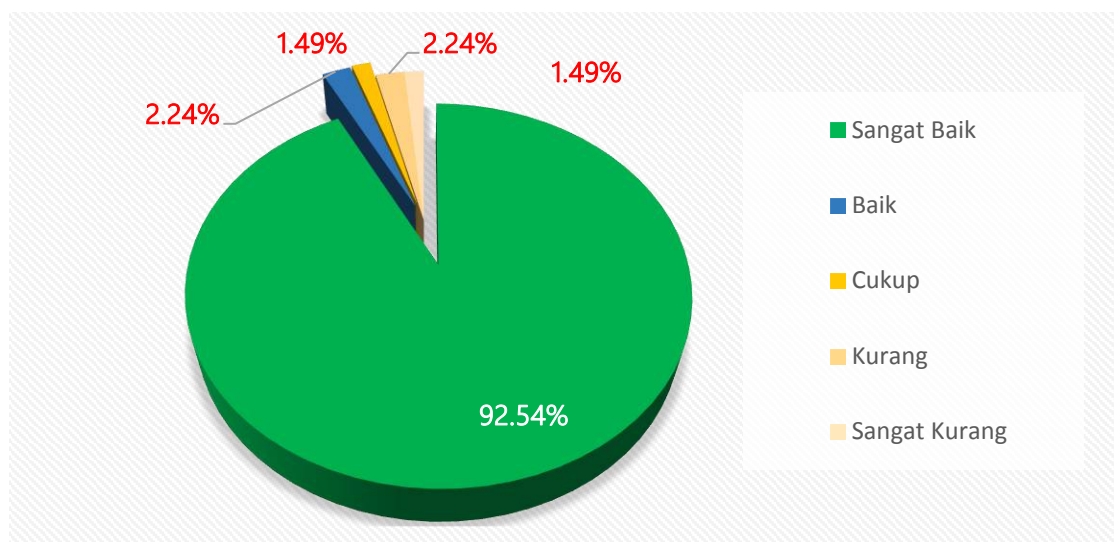


Berdasarkan tingkat pencapaian target sasaran dari 134 indikator kinerja tahun 2016, maka kategori indikator kinerja sesuai dengan persentase capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 55 indikator tercapai melebihi target (>100%) dengan kategori sangat baik
- Sebanyak 56 indikator tercapai sesuai target (=100%) dengan kategori sangat baik
- Sebanyak 23 indikator tidak mencapai target (<100%), dengan rincian dengan rincian kategori sebagai berikut :
 - 13 indikator dengan kategori sangat baik;
 - 3 indikator dengan kategori baik;
 - 2 indikator dengan kategori cukup;
 - 3 indikator dengan kategori kurang; dan
 - 2 indikator dengan kategori sangat kurang.

Secara keseluruhan pengkategorian dari semua indikator kinerja sasaran menunjukkan sebanyak 124 indikator atau 92,54 % termasuk dalam kategori sangat baik, 3 indikator atau 2,24 % dalam kategori baik, 2 indikator atau 1,49 % dalam kategori cukup, 3 indikator atau 2,24 % dengan kategori kurang dan 2 indikator atau 1,49 % dengan kategori sangat kurang.

Grafik 3.10
Pencapaian Indikator Sasaran
Berdasarkan Kategori/Predikat Tahun 2016

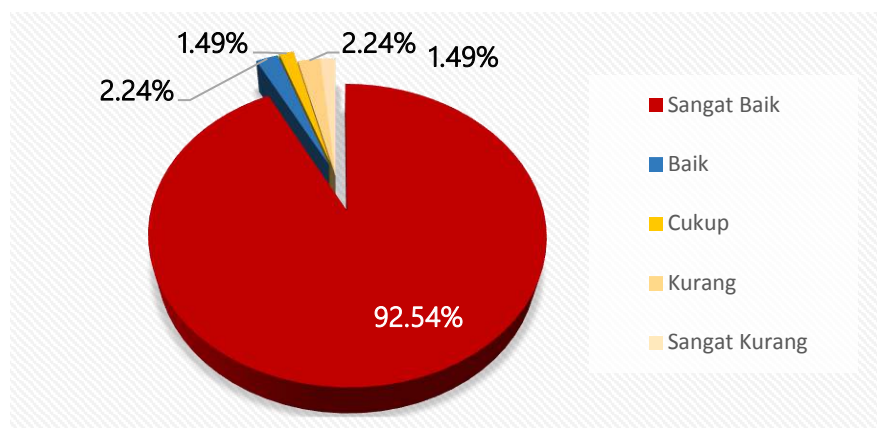


Berdasarkan perhitungan metode rumus baru BPS, dari 134 indikator kinerja sasaran tahun 2016, maka kategori indikator kinerja sesuai dengan persentase capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 59 indikator tercapai melebihi target (>100%) dengan kategori sangat baik
- Sebanyak 49 indikator tercapai sesuai target (=100%) dengan kategori sangat baik
- Sebanyak 26 indikator tidak mencapai target (<100%), dengan rincian dengan rincian kategori sebagai berikut :
 - 16 indikator dengan kategori sangat baik;
 - 3 indikator dengan kategori baik;
 - 2 indikator dengan kategori cukup;
 - 3 indikator dengan kategori kurang; dan
 - 2 indikator dengan kategori sangat kurang.

Secara keseluruhan pengkategorian dari semua indikator kinerja sasaran menunjukkan sebanyak 124 indikator atau 92,54 % termasuk dalam kategori sangat baik, 3 indikator atau 2,24 % dalam kategori baik, 2 indikator atau 1,49 % dalam kategori cukup, 3 indikator atau 2,24 % dengan kategori kurang dan 2 indikator atau 1,49 % dengan kategori sangat kurang.

Grafik 3.11
Pencapaian Indikator Sasaran Berdasarkan Kategori/Predikat dan Perhitungan Metode Baru BPS Tahun 2016



Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 Setelah di Reviu

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
Misi 1 :								
1.1	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	4	101,44					Sangat Baik
1.2	Meningkatnya bu- daya & minat baca	2	118,47					Sangat Baik
	Meningkatnya layanan kesehatan	9	103,65					Sangat Baik
			103,81*					Sangat Baik

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
1.4	Meningkatnya kesehatan lingkungan	1	100					Sangat Baik
1.5	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	1	100					Sangat Baik
1.6	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	2	90,46					Sangat Baik
1.7	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan	2	81,25				Baik	
1.8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	100					Sangat Baik
1.9	Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat	2	99,38					Sangat Baik
1.10	Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari	1	36,24	Sangat Kurang				
1.11	Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	1	100					Sangat Baik

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
1.12	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	100					Sangat Baik
1.13	Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan	2	162,50					Sangat Baik
1.14	Menurunnya PMKS	1	240,09					Sangat Baik
Misi 2 :								
2.1	Meningkatnya kualitas SDM aparat	2	175,52					Sangat Baik
2.2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	7	122,88					Sangat Baik
2.3	Meningkatnya transparansi	1	100					Sangat Baik
2.4	Meningkatnya pelayanan masyarakat	1	195,84					Sangat Baik
2.5	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1	85,55				Baik	
2.6	Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat	2	214,63					Sangat Baik
2.7	Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)	1	133,89					Sangat Baik
2.8	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	2	101,75					Sangat Baik
2.9	Mengembangkan kerjasama	1	200					Sangat Baik

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
	pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi							
Misi 3 :								
3.1	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	3	100,14					Sangat Baik
3.2	Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	2	98,70					Sangat Baik
3.3	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	1	56,08		Kurang			
3.4	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang	1	102,71					Sangat Baik
3.5	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	3	133,50					Sangat Baik
3.6	Meningkatnya RTH yang	2	75,08				Baik	

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
3.7	dikelola Pemerintah							
	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	1	99,92					Sangat Baik
3.8	Meningkatnya kualitas penataan ruang	4	84,21				Baik	
Misi 4 :								
4.1	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	2	96,35					Sangat Baik
4.2	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	6	96,92					Sangat Baik
4.3	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	6	104,70					Sangat Baik
4.4	Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	2	105					Sangat Baik
4.5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat	2	100					Sangat Baik

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
4.6	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	5	107,41					Sangat Baik
			106,70					Sangat Baik
4.7	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	1	100					Sangat Baik
4.8	Meningkatkannya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	26	109,67					Sangat Baik
4.9	Berkembangnya berbagai aktivitas <i>off farm</i> untuk meningkatkan penghasilan petani	3	147,22					Sangat Baik
4.10	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	9	123,40					Sangat Baik
Misi 5 :								
5.1	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	1	799,55					Sangat Baik
5.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	1	124					Sangat Baik

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
	pemerintahan desa							
5.3	Menurunnya jumlah desa tertinggal	1	100					Sangat Baik
5.4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	1	100					Sangat Baik
5.5	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa	1	91,70					Sangat Baik
5.6	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	2	103,33					Sangat Baik

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 47 sasaran menunjukkan sebanyak 24 sasaran tercapai melebihi target (>100%), 10 sasaran tercapai sesuai target (=100%) dan 13 sasaran tidak mencapai target (<100%).

Berkaitan dengan kategori pencapaian sasaran, untuk 13 sasaran yang tidak mencapai target, berdasarkan persentase capaian kinerja dapat dikategorikan sebanyak 7 (tujuh) sasaran termasuk dalam kategori sangat baik (≥90%), 4 sasaran termasuk dalam kategori baik (75%-89,99%), 1 (satu) sasaran

dalam kategori kurang (50%-64,99%) dan 1 (satu) sasaran dalam kategori sangat kurang ($\leq 49,99\%$).

Berdasarkan capaian kinerja dan kategori pencapaian sasaran di atas, diketahui bahwa dari 47 sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016, menunjukkan sebanyak 41 sasaran termasuk dalam kategori sangat baik, 4 sasaran dengan kategori baik, 1 sasaran dengan kategori kurang, dan 1 sasaran dengan kategori sangat kurang.

Rekapitulasi kategori pencapaian sasaran berdasarkan persentase capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran
Tahun 2016

No	Kategori	Persentase Capaian	Jumlah Sasaran
1	Sangat Baik	≥ 90	41
2	Baik	75,00 – 89,99	4
3	Cukup	65,00 – 74,99	0
4	Kurang	50,00 – 64,99	1
5	Sangat Kurang	$\leq 49,99$	1
Jumlah			47

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2016 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Pendidikan Yang Berkualitas

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga dan memberikan dampak positif dalam berbagai aspek

pembangunan. Oleh karenanya, meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu sasaran strategis yang ingin diwujudkan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam bidang pendidikan yaitu program **"CIAMIS CALAKAN"** yang berarti Ciamis Pintar. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi pendidikan masyarakat miskin dengan bantuan pendidikan untuk siswa SMP yang Drop Out (DO) dan rawan Drop Out. Sasaran penerima program ini yaitu siswa SMP dari keluarga miskin (pemegang KKS/KPS, PKH, Anak Panti Asuhan dan Anak Yatim Piatu) diluar siswa yang menerima BSM/KIP).



Melalui kebijakan program **"CIAMIS CALAKAN"**, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah memberikan bantuan pendidikan kepada 500 siswa SMP berupa bantuan uang sebesar Rp.

750.000,- per siswa per tahun. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus bersekolah dan tidak melakukan drop out, sehingga angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis juga meningkat.

Pengukuran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu Indeks Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Partisipasi anak usia dini dalam PAUD, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Layanan Pendidikan Yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pendidikan	Poin	83,37	99,74	83,99	100	84,84	84,84	100
	Indeks Pendidikan)*	Poin					64,49	63,13	97,89
2	RLS	Tahun	7,86	98,74	8,10	98,78	8,36	8,36	100
	RLS)*	Tahun					7,58	7,59	100,13
3	AMH	%	98,85	100	98,98	100,45	99,39	99,39	100
	Harapan Lama Sekolah)*	Tahun					14,12	13,62	96,46
4	Partisipasi anak usia dini dalam PAUD	%	48,7	N/A	53,00	159,40	55,20	55,20	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%		99,49		114,66			100
Rata-rata Capaian Kinerja)*		%							98,62

Keterangan :)* indikator kinerja berdasarkan perhitungan metode baru BPS tahun 2016
(N/A, Not Available) Capaian Kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut dan baru diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas menunjukkan bahwa :

- Pada tahun 2016 capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas adalah berdasarkan perhitungan metode lama adalah sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Jika menggunakan perhitungan metode baru BPS maka capaian kinerja sasaran mencapai 98,62 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, seluruhnya tercapai sesuai dengan target. Jika berdasarkan perhitungan metode baru BPS, capaian

kinerja dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, 1 (satu) indikator tercapai melampaui target, 1 (satu) indikator tercapai sesuai dengan target, dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tahun 2016 dengan tahun 2015 dan tahun 2014 :
- Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tahun 2016 (100 %), lebih rendah atau mengalami penurunan sebesar 14,66 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (114,66 %), dan meningkat sebesar 0,51 % dibanding capaian kinerja tahun 2014 (99,49 %).
 - Realisasi (capaian nyata) dari setiap indikator sasaran (4 indikator) mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi (capaian nyata) pada tahun 2015 dan tahun 2014.
- d. Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016 yang merupakan tahun kedua RPJMD 2014-2019 menunjukkan bahwa semua indikator pada sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas tercapai melebihi target RPJMD Tahun 2016 dengan capaian kinerja sebesar 103,17 % sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Pendidikan	Poin	84,84	84,38	100,54
	Indeks Pendidikan)*	Poin	63,13		
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,36	8,24	101,46
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*	Tahun	7,59		
3.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,39	99,11	100,28

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
	Harapan Lama Sekolah)*	%	13,62		
4.	Partisipasi anak usia dini dalam PAUD	%	55,20	50	110,40
Rata-rata Capaian Kinerja		%			103,17

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, dilaksanakan melalui 6 (enam) program yaitu :

- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- (2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- (3) Program pendidikan menengah;
- (4) Program pendidikan non formal;
- (5) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- (6) Program manajemen pelayanan pendidikan;

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 65.789.376.450,- atau sebesar 94,32 % dari total pagu anggaran Rp. 69.752.606.425,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 99,46 %.

Analisa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Angka Rata-rata Lama Sekolah (*Means Years of Schooling/MYS*) menggambarkan jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 Tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal. RLS dihitung dengan mengolah 2 (dua) variable, yaitu tingkat/kelas yang sedang atau pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sedangkan AMH adalah

persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Dalam proses perhitungan IPM, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberi bobot, yaitu RLS diberi bobot 1/3 dan AMH diberi bobot 2/3, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- Indeks Pendidikan = $\frac{2}{3}$ Indeks AMH + $\frac{1}{3}$ Indeks RLS
- Indeks AMH =
$$\frac{\text{Target AMH} - \text{AMH Minimal (o)}}{\text{AMH Maksimal (100)} - \text{AMH Minimal}} \times 100$$
- Indeks RLS =
$$\frac{\text{Target RLS} - \text{RLS Minimal (o)}}{\text{RLS Maksimal (15)} - \text{RLS Minimal}} \times 100$$

Sedangkan perhitungan untuk AMH dan RLS adalah :

- AMH =
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Th ke atas yang bisa baca tulis}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas}}$$
- RLS =
$$\frac{\sum f_i \cdot J_i}{\sum f_i}$$

f_i : Frekuensi penduduk berumur 15 Tahun ke atas untuk jenjang pendidikan ke i

J_i : Lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang ditamatkan atau tingkat pendidikan yang pernah diikuti.

i : Jenjang pendidikan (tidak pernah sekolah, SD, dst)

Berdasarkan realisasi capaian AMH dan RLS pada tahun 2016, setelah dilakukan perhitungan maka capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2016 adalah sebesar 84,84 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 84,84 dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2015, realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis adalah 83,99 dengan capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan tahun 2014 realisasi Indeks Pendidikan adalah 83,37 dengan capaian kinerja sebesar 99,74 %. Dengan demikian pada tahun 2016 terdapat peningkatan realisasi (capaian nyata) dan capaian kinerja Indeks Pendidikan di Kabupaten Ciamis.

Pada tahun 2016, BPS menggunakan perhitungan metode baru untuk beberapa indikator makro termasuk indikator sasaran Indeks Pendidikan. Cara menghitung Indeks Pendidikan berdasarkan perhitungan rumus baru BPS adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pendidikan} = (\text{Indeks Harapan Lama Sekolah} + \text{Indeks Rata-rata Lama Sekolah}) / 2$$

$$\text{Indeks HLS} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS Minimal (0)}}{\text{HLS Maksimal (18)} - \text{HLS Minimal (0)}} \times 100$$

$$\text{Indeks RLS} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS Minimal (0)}}{\text{RLS Maksimal (15)} - \text{RLS Minimal (0)}} \times 100$$

Sedangkan perhitungan untuk HLS dan RLS adalah :

- HLS (Harapan Lamanya Sekolah) :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^t \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLS : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah Penduduk usia i pada tahun t

i : Usia ($a, a+1, \dots, n$)

FK : Faktor Koreksi Pesantren

- RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)

$$RLS/MYS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

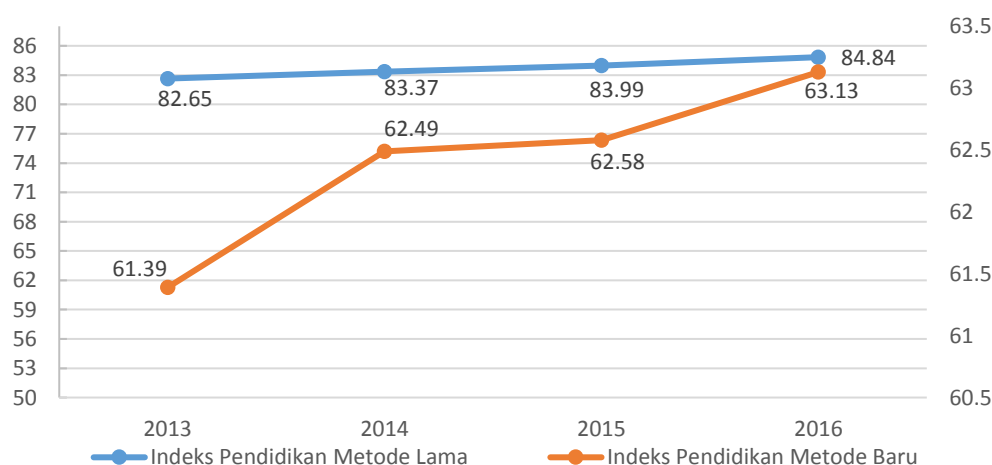
RLS : Rata-rata Lama Sekolah di Suatu Wilayah

Lama Sekolah penduduk i : Lama Sekolah Penduduk ke- i di suatu wilayah

n : Jumlah Penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Berdasarkan realisasi capaian HLS dan RLS pada tahun 2016, setelah dilakukan perhitungan maka capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2016 berdasarkan metode perhitungan baru BPS adalah sebesar 63,13 poin, lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 64,49 poin dengan capaian kinerja sebesar 97,89 % atau dengan kategori sangat baik. Adapun perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2016 berdasarkan perhitungan rumus baru BPS dan berdasarkan perhitungan lama dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.12
Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis
Tahun 2013-2016



Dalam rangka meningkatkan Indeks Pendidikan di Kabupaten Ciamis sehingga dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah meningkatkan pendanaan pendidikan yang harus sudah mencapai 20 %. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain :

- a. Jumlah guru yang pensiun setiap tahun selalu bertambah, sedangkan penambahan guru tidak bisa dilaksanakan karena ada moratorium dari pemerintah, meskipun ada penambahan dari kategori 2 tetapi masih mengalami kekurangan;

- b. Masih rendahnya mutu dan kualitas tenaga pendidik, terutama guru produktif di SMK;
- c. Rusaknya bangunan sekolah yang diakibatkan oleh bencana dan usia bangunan sekolah serta masih minimnya ruang praktek dan sarana praktek terutama di SMK;
- d. Minimnya bantuan kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (diperuntukan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus) .

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu :

- (1) Untuk mengurangi kekurangan guru, maka sekolah mengangkat guru honorer;
- (2) Melakukan pelatihan-pelatihan dan mendorong guru bagi yang belum S1 untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- (3) Mengusulkan rehabilitasi bangunan-bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan membangun ruang praktek bagi SMK yang dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (4) Mengusulkan kepada pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan) untuk memberikan bantuan peralatan bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

Untuk mencapai indikator sasaran Indeks Pendidikan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu : (1) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; (2) Program manajemen pelayanan pendidikan; dan (3) Program pendidikan non formal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.688.293.300,- atau 97,39 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua

jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung dengan mengolah 2 (dua) variable, yaitu tingkat/kelas yang sedang atau pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk menghitung RLS, rumus yang digunakan yaitu :

$$RLS = \frac{\sum f_i \cdot J_i}{\sum f_i}$$

- f_i : Frekuensi penduduk berumur 15 Tahun ke atas untuk jenjang pendidikan ke i
- J_i : Lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang ditamatkan atau tingkat pendidikan yang pernah diikuti
- i : Jenjang pendidikan (tidak pernah sekolah, SD, dst)

Berdasarkan rumus penghitungan di atas, realisasi Angka RLS Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016 mencapai 8,36 Tahun, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 8,36 Tahun, dengan capaian kinerja sebesar 100 % termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan Tahun 2015 realisasi Angka RLS mencapai 8,10 Tahun sedangkan Tahun 2014 Angka RLS adalah 7,86 Tahun. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja Angka RLS tahun 2016 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian RLS Tahun 2016 sebesar 8,36 Tahun menunjukkan bahwa saat ini rata-rata pendidikan penduduk Kabupaten Ciamis adalah SMP Kelas 2.

Pada tahun 2016, BPS menggunakan metode baru untuk menghitung besaran Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Cara menghitung RLS berdasarkan perhitungan rumus baru BPS adalah sebagai berikut :

$$RLS/MYS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

- RLS : Rata-rata Lama Sekolah di Suatu Wilayah
- Lama Sekolah penduduk $_i$: Lama Sekolah Penduduk ke- i di suatu wilayah
- n : Jumlah Penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

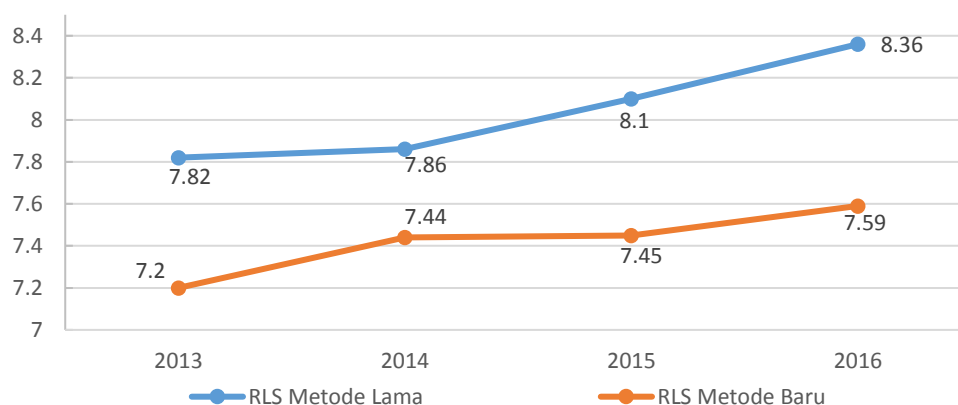
berdasarkan perhitungan tersebut diatas diperoleh nilai RLS sebesar 7,59 Tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebesar 7,58 poin dengan capaian kinerja sebesar 100,13 % atau dengan kategori sangat baik.

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan Angka RLS di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga Angka RLS dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan sehingga pada tahun 2016 angka RLS Kabupaten Ciamis telah mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala/hambatan tersebut antara lain kondisi ekonomi masyarakat kabupaten Ciamis yang tidak merata.

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu atau miskin yang dicanangkan oleh Bupati Ciamis melalui kebijakan program *Ciamis Calakan*, serta pemberian Bantuan Operasional Sekolah, sehingga dapat meringankan beban orang tua siswa.

Perkembangan pencapaian RLS di Kabupaten Ciamis selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.13
Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2013 s.d. Tahun 2016



Untuk mencapai indikator sasaran RLS dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp 32.978.997.864,- atau 82,22 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

3. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, dengan rumus perhitungan :

$$AMH = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Th ke atas yang bisa baca tulis}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas}}$$

- Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis adalah sebanyak 916.605 orang
- Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 924.864 orang

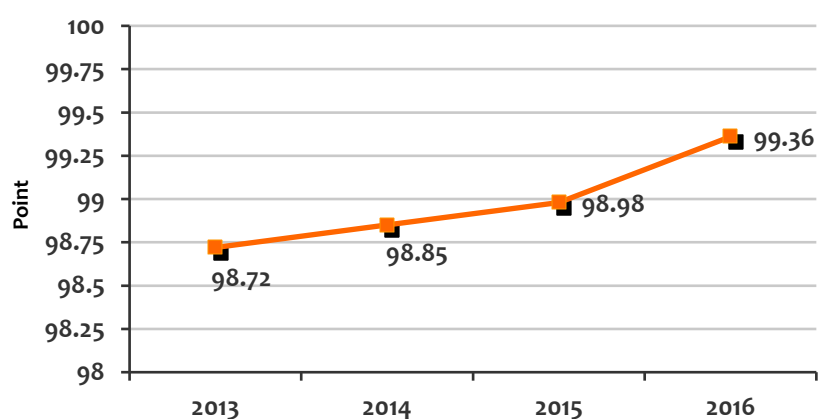
Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa AMH di Kabupaten Ciamis tahun 2016 tercapai sebesar 99,36 % dari target yang ditetapkan sebesar 99,36 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi Angka Melek Huruf (AMH) adalah sebesar 98,98% dan tahun 2014 sebesar 98,85 %. Dengan demikian realisasi (capaian kinerja nyata) AMH di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Dalam rangka meningkatkan AMH di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan program Paket B, dan Paket C terutama bagi penduduk yang diluar usia wajib belajar (15 tahun ke atas) agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga AMH dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain masih adanya penduduk usia yang sudah tua dan tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran tetapi masih dijadikan pembagi dalam AMH. Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu memberikan motivasi agar mengikuti pembelajaran bagi yang masih mampu, dan diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pembelajaran Program Paket B, dan C.

Grafik perkembangan capaian AMH di Kabupaten Ciamis selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.14
Perkembangan AMH Di Kabupaten Ciamis
Tahun 2013 - 2016



Untuk mencapai indikator sasaran AMH dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pendidikan Menengah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.460.764.811,- atau 95,61 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 99,15 %.

Pada tahun 2016, BPS merubah indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan tentunya memiliki cara perhitungan tersendiri. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa datang. HLS dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan

pemerintah yaitu Program Wajib Belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di Pesantren. Munculnya dimensi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk menghitung HLS berdasarkan perhitungan rumus baru BPS adalah sebagai berikut :

- HLS (Harapan Lamanya Sekolah) :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^t \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLS : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

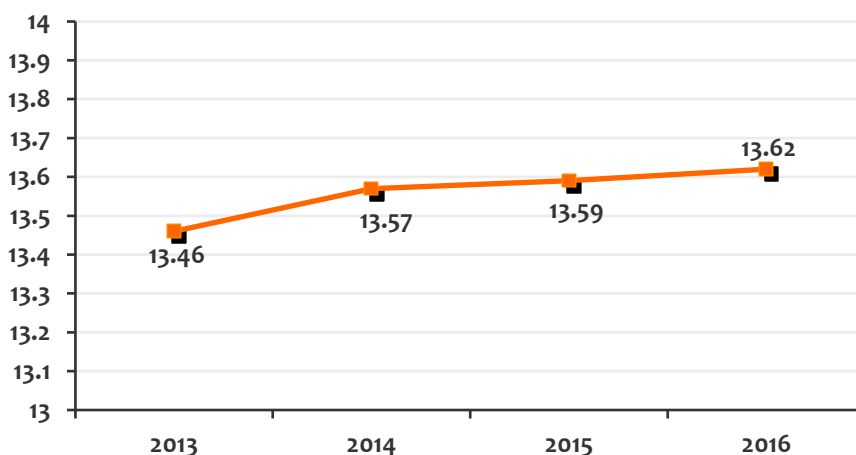
P_i^t : Jumlah Penduduk usia i pada tahun t

i : Usia ($a, a+1, \dots, n$)

FK : Faktor Koreksi Pesantren

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas diperoleh nilai HLS sebesar 13,62 Tahun, lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebesar 14,12 tahun dengan capaian kinerja sebesar 96,46 % atau dengan kategori sangat baik.

Grafik 3.15
Perkembangan HLS Di Kabupaten Ciamis
Tahun 2013 s.d Tahun 2016



4. Partisipasi Anak Usia Dini dalam PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian rangsang pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sehingga PAUD memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia, memberikan kesiapan anak untuk pendidikan lebih lanjut.

Partisipasi anak usia dini dalam PAUD merupakan keikutsertaan anak usia dini dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jenjang TK/RA dan Penitipan Anak. Untuk menghitung indikator partisipasi anak usia dini dalam PAUD menggunakan rumus :

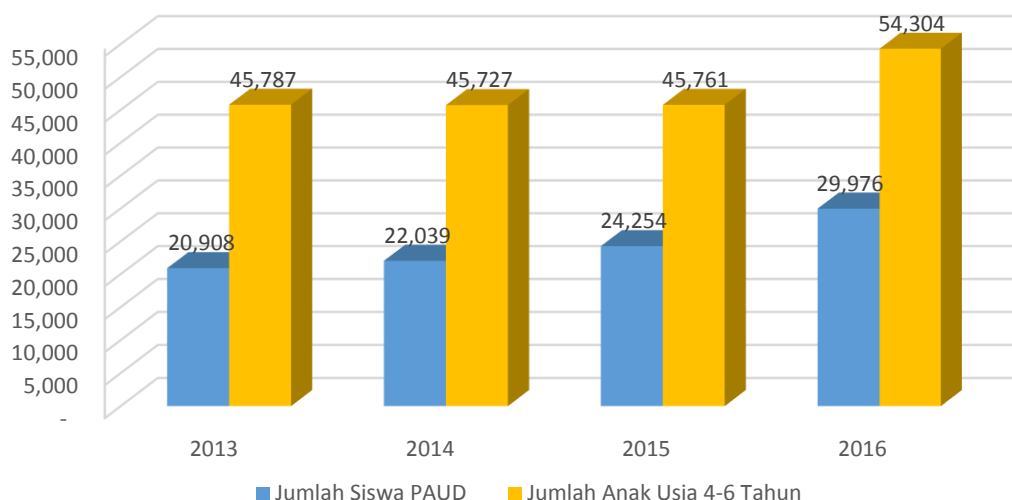
$$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4-6 tahun}} \times 100 \%$$

Target partisipasi anak usia dini dalam PAUD tahun 2015 adalah sebesar 55,20 %. Pada tahun 2016, jumlah siswa PAUD pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak tercatat sebanyak 29.976 orang (anak), sedangkan jumlah anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Ciamis saat ini sebanyak 54.304 orang (anak). Berdasarkan data dan rumus perhitungan tersebut di atas, maka diketahui realisasi indikator partisipasi anak usia dini dalam PAUD adalah sebesar 55,20 % atau tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat baik.

Pada tahun 2016 partisipasi anak usia dini dalam PAUD adalah sebesar 55,20 % atau sebanyak 29.976 orang (anak) dan pada tahun 2015 realisasi nyata mencapai 24.254 Orang (anak) serta pada tahun 2014 sebesar 48,20 % atau sebanyak 22.039 orang (anak). Dengan demikian capaian nyata partisipasi anak usia dini dalam PAUD tahun 2016 lebih tinggi/baik dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian nyata tahun 2015 dan tahun 2014.

Data perbandingan jumlah siswa PAUD dengan jumlah anak usia 4-6 tahun dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.16
Perbandingan Jumlah Siswa PAUD dengan Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun
Tahun 2013-2016



Berdasarkan grafik dan tabel di atas, diketahui bahwa partisipasi anak usia dini dalam PAUD dalam 4 (empat) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan usia dini :

- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- Pemberian bantuan operasional PAUD;
- Adanya tunjangan-tunjangan profesi;
- Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya PAUD.

Kendala/hambatan yang dihadapi :

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAUD;
- Keinginan dari orang tua yang menginginkan pembelajaran di PAUD itu calistung (baca tulis hitung);
- Tidak teranggarkannya insentif bagi tenaga pendidik PAUD non PNS.

Untuk mencapai indikator sasaran Partisipasi anak usia dini dalam PAUD dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.498.800.500,- atau 97,97 % dari total

anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 97,62 %, yang meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu :

- Pengembangan pendidikan anak usia dini;
- Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini;
- Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini;
- Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini;
- Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) pendidikan anak usia dini Kabupaten Ciamis.

Sasaran 2 : Meningkatkan Budaya dan Minat Baca

Peningkatan Budaya dan Minat Baca merupakan salah satu sasaran strategis yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis. Dalam rangka upaya meningkatkan budaya dan minat baca ditetapkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 041/Kpts.290-Huk/2015 tentang Penunjukan Sekolah Dasar Negeri Percontohan

Menumbuhkan Minat Baca Masyarakat Dengan Kegiatan 15 Menit Membaca Untuk Kelas IV ke Bawah. Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor



Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor 041/257/KPUD-041.7/DIKBUD/2015 tentang Kerjasama Menumbuhkan Minat Baca Masyarakat, kegiatan 15 Menit Rindu Membaca dilaksanakan di 35 Sekolah yang meliputi 26 sekolah perwakilan dari 26 UPTD Pendidikan dan Kebudayaan serta 9 sekolah yang ada di sekitar ibukota Kabupaten Ciamis.

Salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan budaya dan minat baca di Kabupaten Ciamis yaitu keberadaan perpustakaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu pengukuran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya budaya dan minat baca dilakukan melalui indikator kapasitas perpustakaan yang meliputi : (1) Jumlah perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling; serta (2) Jumlah pengunjung perpustakaan daerah, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Budaya dan Minat Baca

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kapasitas perpustakaan :								
	a. Jumlah Perpustakaan daerah & perpus-takaan keliling	Buah	175	94,59	210	110,53	210	340	161,90
	b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	orang	34.560	90,82	28.670	98,37	28.813	21.621	75,04
Rata-rata Capaian Kinerja		%		92,71		104,45			118,47

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran di atas diketahui bahwa :

- Pada tahun 2016 capaian kinerja sasaran meningkatnya budaya dan minat baca adalah sebesar 118,47 %, dan termasuk dalam kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melampaui target yaitu Jumlah perpustakaan daerah dan

perpustakaan keliling dengan capaian kinerja indikator sebesar 161,90 %, serta 1 (satu) indikator tidak mencapai target dengan capaian kinerja indikator sebesar 75,04 %.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 (118,47 %), lebih tinggi/meningkat sebesar 14,02 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (104,45 %), dan meningkat sebesar 25,76 % dibanding tahun 2014 (92,71 %).
- d. Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2015 dengan rencana/target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua RPJMD 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Budaya dan Minat Baca Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Kapasitas Perpustakaan				
	a. Jumlah perpustakaan	Buah	340	195	174,36
	b. Jumlah pengunjung perpustakaan perTahun	Orang	21.621	N/A	N/A

Keterangan : (N/A, Not Available) Merupakan indikator tambahan yang tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dari tabel di atas diketahui perbandingan antara realisasi kinerja setiap indikator dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua RPJMD. Untuk indikator Jumlah perpustakaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 174,36 %. Sedangkan indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi merupakan indikator tambahan yang memiliki

relevansi untuk mengukur capaian kinerja sasaran meningkatnya budaya dan minat baca di Kabupaten Ciamis, sehingga ikut diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya budaya dan minat baca dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp.877.031.000,- atau sebesar 99,81 % dari total pagu anggaran Rp. 878.738.000,- dengan capaian output sebesar 189,53 % dan capaian outcome sebesar 104,58%.

Analisa Capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran meningkatnya budaya dan minat baca adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Keliling

Kapasitas Perpustakaan (Jumlah perpustakaan daerah & perpustakaan keliling) adalah jumlah perpustakaan daerah yang berada di desa Kabupaten



Ciamis dan jumlah perpustakaan taman bacaan masyarakat yang tersedia di beberapa desa. Pada tahun 2016 Jumlah perpustakaan di Kabupaten

Ciamis adalah sebanyak 340 buah yang meliputi perpustakaan daerah yang berada di desa Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 175 buah dan jumlah perpustakaan taman bacaan masyarakat yang tersedia sebanyak 40 buah dan

perpustakaan Pondok Pesantren sebanyak 125 buah. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 210, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 161,90 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2016 (161,90 %) mengalami peningkatan sebesar 51,37 % dibanding tahun 2015 (110,53 %) dan mengalami peningkatan sebesar 69,19 % dibanding tahun 2014 (92,71 %). Pada tahun 2016 realisasi jumlah perpustakaan adalah sebanyak 340 buah, tahun 2015 buah sebanyak 210 dan tahun 2014 sebanyak 175 buah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mencapai atau meningkatkan jumlah perpustakaan di Kabupaten Ciamis, adalah dengan melakukan pelayanan mobil unit perpustakaan keliling pada 20 titik layanan. Sehingga jumlah perpustakaan dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

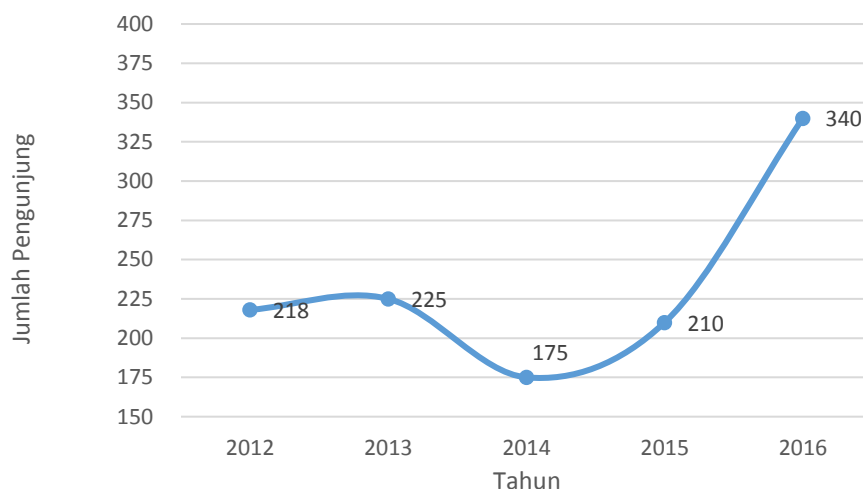
Hambatan atau kendala yang dihadapi antara lain yaitu pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan berjalan sangat lambat termasuk keadaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan masih sangat terbatas.

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu :

- (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan semua jenis perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, bebas biaya dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Kemitraan antara pemerintah kabupaten ciamis dan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan.

Perkembangan jumlah perpustakaan di Kabupaten Ciamis selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

Grafik 3.17
Perkembangan Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2012-2016



Untuk mencapai indikator sasaran Kapasitas perpustakaan (Jumlah Perpustakaan daerah & perpustakaan keliling) dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.877.031.000,- atau sebesar 99,81 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 99,81% dan outcome sebesar 99,81 %.

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah

Kapasitas Pengunjung (Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah) adalah jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum daerah Kabupaten Ciamis. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Ciamis tahun 2016 mencapai sebanyak 21.621 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 28.813 orang dengan capaian kinerja sebesar 75,04% dan termasuk dalam kategori baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 realisasi jumlah pengunjung perpustakaan adalah sebanyak 28.670 orang dengan capaian kinerja sebesar 98,37 % dan tahun 2014 sebanyak 34.560 orang dengan capaian kinerja sebesar 90,82 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah mengalami rehabilitasi total sehingga tidak dapat

melaksanakan pelayanan sebagaimana biasanya. Perpindahan kantor perpustakaan pun mengakibatkan pelayanan perpustakaan kurang optimal karena luas bangunan terlalu sempit sehingga untuk ruangan baca perpustakaan dan fasilitas lainnya pun kurang optimal dalam menunjang pelayanan.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan realisasi dana sebesar Rp.877.031.000,- atau sebesar 99,81 % dari total pagu anggaran Rp. 878.738.000,- dan capaian output sebesar 189,53 % dan capaian outcome sebesar 104,58%.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan adalah dengan melakukan pengadaan bahan pustaka yang *up to date* dan sarana perpustakaan yang nyaman, agar jumlah pengunjung dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan yaitu bahan pustaka yang kurang *up to date*, kurangnya minat membaca masyarakat, dan strategi promosi bidang perpustakaan untuk meningkatkan minat membaca masyarakat belum optimal.

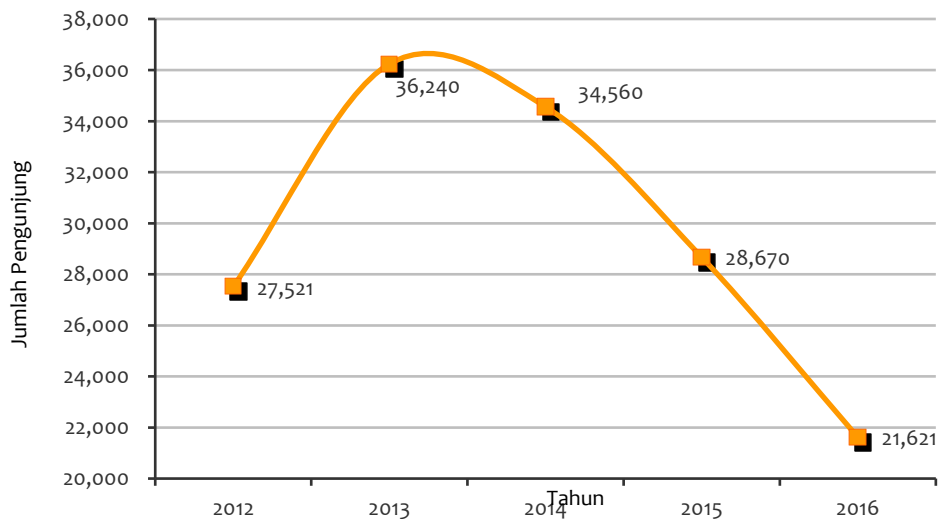
Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu :

- (1) Penayangan promosi layanan perpustakaan melalui media cetak, media elektronik (stasiun televisi lokal, dan internet) serta pembuatan brosur, leaflet dan poster.
- (2) Peningkatan promosi melalui kegiatan workshop, lomba bercerita (*story telling*) dan kegiatan 15 menit rindu membaca yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, dan wisata buku sahabat anak.

Grafik perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Ciamis selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.18

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Kabupaten Ciamis
Tahun 2012-2016



Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Kesehatan



Pembangunan bidang kesehatan khususnya peningkatan layanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu seluruh

komponen terkait harus berperan aktif terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kesehatan khususnya pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat, sejak tahun 2015 yang lalu Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan kebijakan dibidang kesehatan yaitu "CIAMIS WALUYA". Waluya dalam bahasa sunda berarti sehat sepanjang masa. Program "CIAMIS WALUYA"

ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat miskin dengan mengembangkan sistem jaminan kesehatan. Sasaran penerima program ini yaitu masyarakat kurang mampu diluar penerima program jamkesmas/KIS, kelompok PMKS dan bayi baru lahir. Cakupan program ini meliputi seluruh masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kuota jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), pelayanan operasi katarak, khitanan massal dan pemberian makanan tambahan. Alokasi dana yang disediakan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.153.931.200,-. Pada tahun 2016 jumlah masyarakat miskin yang menerima manfaat program Ciamis Waluya adalah sebanyak 12.207 jiwa dengan total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 2.950.442.575,-.

Melalui kebijakan program **"CIAMIS WALUYA"** Pemerintah Kabupaten Ciamis bertekad meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin/kurang mampu untuk mendapat layanan kesehatan yang dibutuhkan, sehingga berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan kesehatan dilakukan melalui 9 (sembilan) indikator dengan hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Layanan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kesehatan	Poin	71,7	100	71,78	100	71,87	71,87	100
	Indeks Kesehatan)*	Poin					77,61	78,29	100,88
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,02	100	68,07	100	68,12	68,12	100
	AHH)*	Tahun					70.45	70.89	100,62
3	AKI	per 1000 KH	21	76,47	15	111,76	16	15	106,25

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4	AKB	Kasus/ bayi	183	123,11	176	120	176	136	122,29
5	Balita gizi buruk	Balita	120	113,04	115	116,67	155	135	112,90
6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	%	75,85	75,85	90,94	146,06	100	90,94	90,94
7	Cakupan level I pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan desa siaga aktif	%	97,7	130,26	100	120	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%		102,08		113,28			103,65
Rata-rata Capaian Kinerja)*		%							103,81

Keterangan)* : menggunakan metoda perhitungan rumus statistik baru (BPS)

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa :

- Pada tahun 2016 capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan kesehatan adalah sebesar 103,65%, dengan kategori sangat baik. Jika menggunakan metode perhitungan baru dari 2 (dua) indikator sasaran diatas maka capaian kinerja sasaran menunjukkan nilai sebesar 103,81 dengan kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 3 (tiga) indikator melampaui target, 5 (lima) indikator tercapai sesuai target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target.

- c. Jika menggunakan metode perhitungan baru dari 2 (dua) indikator sasaran diatas maka dari 9 (Sembilan) indikator kinerja yang diukur, sebanyak sebanyak 5 (lima) indikator melampaui target, 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target.
- d. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2016 dengan tahun 2015 dan tahun 2014 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2016 (103,65 %) lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (113,28 %). Sedangkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 (102,08 %) mengalami peningkatan sebesar 1,57 %.
- e. Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua RPJMD 2014-2019 menunjukkan capaian kinerja sebesar 103,78 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks kesehatan	Poin	71,87	71,78	100,12
	Indeks Kesehatan)*	Poin	78,29	N/A	
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,12	68,12	100
	Angka Harapan Hidup (AHH))*	Tahun	70.89	N/A	
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Bayi	136	210	135,23
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	15	16	106,25
5	Balita Gizi Buruk	Balita	135	137	101,45
6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	%	90,94	100	90,94
7	Cakupan level I pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
8	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100	100
9	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%			103,78
Rata-rata Capaian Kinerja)*		%			

Keterangan)* : Menggunakan metoda perhitungan rumus statistik baru (BPS)

N/A : tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya layanan kesehatan dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) program, yaitu :

- (1) Program obat dan perbekalan kesehatan;
- (2) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- (3) Program standarisasi pelayanan kesehatan;
- (4) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- (5) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD;
- (6) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- (7) Program upaya kesehatan masyarakat;
- (8) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
- (9) Program perbaikan gizi masyarakat;
- (10) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- (11) Program promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- (12) Program pengembangan lingkungan sehat;
- (13) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya layanan kesehatan sebesar Rp 230.393.066.539,- atau sebesar 89,23

% dari total pagu anggaran Rp 258.195.433.986,- dengan capaian output sebesar 99,12 % dan capaian outcome sebesar 98,69 %.

Analisa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan merupakan Indeks Usia Hidup (*Longevity*). Indeks Kesehatan adalah perbandingan Angka Harapan Hidup yang dicapai terhadap angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP/United Nation Development Programme) yang telah menetapkan nilai maksimum



dan minimum untuk Angka Harapan Hidup yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara) di dunia yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Untuk mengetahui indeks pendidikan digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kesehatan} = ((\text{AHH} - \text{AHHmin}) / (\text{AHHmax} - \text{AHHmin})) \times 100$$

$$\begin{aligned} I_{\text{kesehatan}} &= ((\text{AHH} - \text{AHHmin}) / (\text{AHHmax} - \text{AHHmin})) \times 100 \\ &= ((68.12 - 25) / (85 - 25)) \times 100 \\ &= 71,87 \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 Indeks Kesehatan di Kabupaten Ciamis tercapai sebesar 71,87 poin sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2015, Indeks

Kesehatan sebesar 71,78 poin dengan capaian kinerja sebesar 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan pada saat itu. Sedangkan pada tahun 2014 Indeks kesehatan menunjukkan angka sebesar 71,70 poin. Dengan demikian realisasi (capaian nyata) Indeks kesehatan di Kabupaten Ciamis senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka Indeks Kesehatan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,09 poin dari tahun 2015 dan kenaikan sebesar 0,17 poin dari tahun 2014.

Indeks Kesehatan Kabupaten Ciamis sepanjang Tahun 2009-2016 mengalami peningkatan 1,87 poin, yaitu dari sebesar 70 poin pada tahun 2009 menjadi sebesar 71,87 poin pada tahun 2016. Peningkatan capaian Indeks Kesehatan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

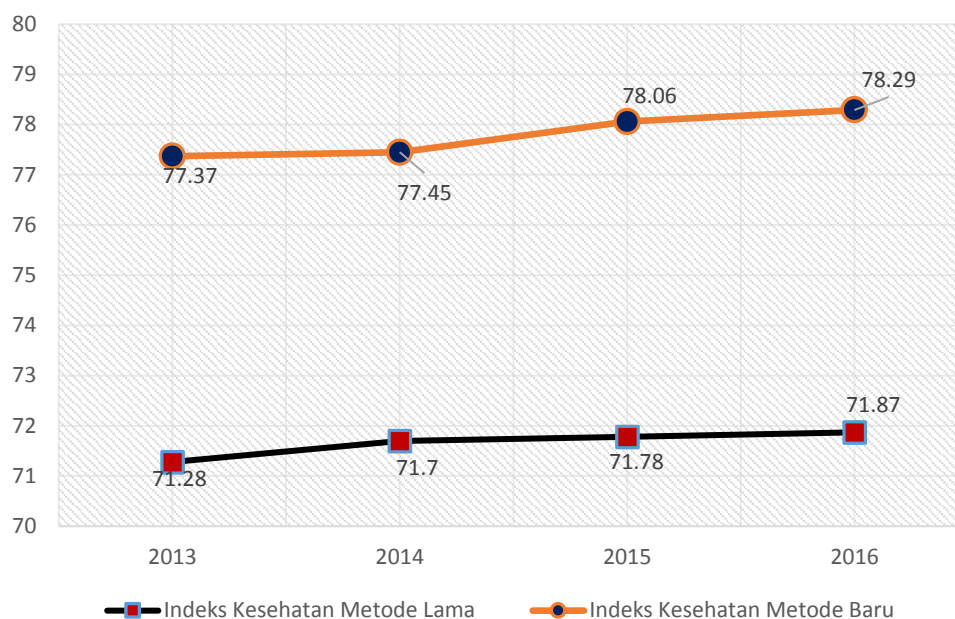
Sedangkan berdasarkan metode perhitungan/rumus baru, cara perhitungan indeks kesehatan pada dasarnya tidak berubah hanya angka harapan hidup minimal (terrendah) yang disepakati 175 negara berubah menjadi 20 tahun dari yang semula angka harapan hidup minimal yang disepakati adalah 25 tahun.

Sehingga berdasarkan perhitungan dengan metode baru dapat dilihat sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 I_{kesehatan} &= ((AHH - AHH_{min}) / (AHH_{max} - AHH_{min})) \times 100 \\
 &= ((70,89 - 20) / (85 - 20)) \times 100 \\
 &= 78,29
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 Indeks Kesehatan di Kabupaten Ciamis berdasarkan perhitungan rumus baru BPS tercapai sebesar 78,29 poin tercapai melampaui target yang ditetapkan sebesar 77,61 tahun, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 103,42 % dalam kategori sangat baik. Perkembangan capaian indeks Kesehatan Kabupaten Ciamis sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.19
Indeks Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2013-2016



Disamping keberhasilan dari capaian indikator indeks kesehatan, masih terdapat beberapa hambatan/masalah yang ditemui seperti belum optimalnya upaya promotif dan prefentif yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dalam merubah perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan sumber daya manusia bidang kesehatan terutama dokter gigi, apoteker, sanitarian, nutrisisionis, analis kesehatan, dan tenaga promosi kesehatan belum sesuai standar.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target indeks kesehatan diawali dengan penguatan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya promotif dan prefentif melalui sumber dana BOK, JKN dan Jampersal dipelayanan kesehatan dasar, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada melalui On The Job Training (OJT) dan integrasi program nusantara sehat.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar, penyediaan sumber daya kesehatan terutama untuk daerah perbatasan dan desa tertinggal terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

2. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur atau rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penyebab panjangnya umur manusia, diluar soal takdir tentunya, tergantung dari penyakit bawaan dari lahir. Mereka yang diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalani hidup lebih panjang adalah orang-orang yang terkait dengan rendahnya penyakit degeneratif. Yaitu penyakit-penyakit yang mengancam kehidupan manusia, seperti penyakit kanker, jantung koroner, diabetes dan stroke. Lingkungan tempat tinggal Stress atau tekanan.

Pada tahun 2016, Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Ciamis sebesar 68,12 tahun sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 68,12 tahun, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% yang berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, dimana UHH Kabupaten Ciamis adalah 68,07 maka pada tahun 2016 AHH mengalami peningkatan sebanyak 0,05 tahun. Apabila dibandingkan dengan AHH tahun 2014 yang menunjukkan angka sebesar 68,02 tahun maka terdapat kenaikan AHH sebanyak 0,10 tahun.

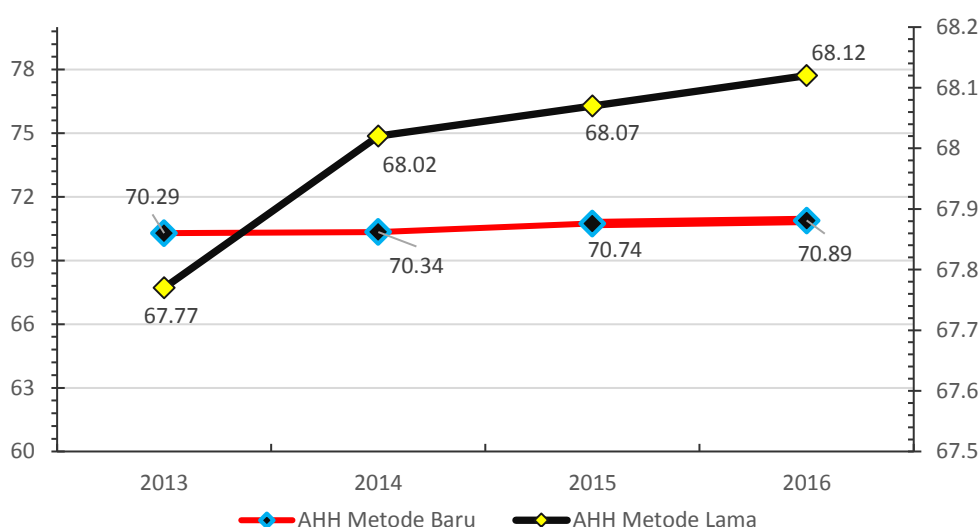
Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2010-2016 mengalami peningkatan 1,12 tahun, yaitu dari sebesar 67 tahun pada tahun 2009 menjadi sebesar 68,12 tahun pada tahun 2016. Peningkatan capaian AHH ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Jika berdasarkan perhitungan metode baru, pada dasarnya Angka Harapan Hidup manusia saat lahir didefinisikan sama, yaitu rata-rata perkiraan

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung berdasarkan hasil Proyeksi SP2010 dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)* atau *Mortpack*. AHH negara berkembang, khususnya di negara Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan AHH negara-negara maju karena AHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi.

Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis berdasarkan perhitungan rumus baru BPS adalah 70,89 tahun tercapai melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,45 tahun, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,62 % dalam kategori sangat baik. Perkembangan AHH Kabupaten Ciamis tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 3.20
Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis
Tahun 2013-2016



Untuk mencapai indikator sasaran Angka Harapan Hidup dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program yaitu : (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; (3) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata; (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; (5) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; (6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; (7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; (8) Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan (9) Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.812.578.036,- atau 85,59 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi AHH diantaranya adalah faktor lingkungan, pelayanan kesehatan, keturunan dan perilaku masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan target Angka Harapan Hidup yaitu melalui pemahaman/edukasi mengenai PHBS yang menjadi pangkal utama pencegahan penyakit, mengatur kebutuhan gizi makanan dan kesehatan lingkungan.

3. Angka Kematian Bayi (AKB)



Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada

dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal; adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Tingkat kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi (sebelum umur satu tahun) yang terjadi pada kelahiran per 1000 bayi. AKB biasanya dijadikan indikator dalam pengukuran kesejahteraan penduduk. Berikut adalah rumus perhitungan Angka Kematian Bayi.

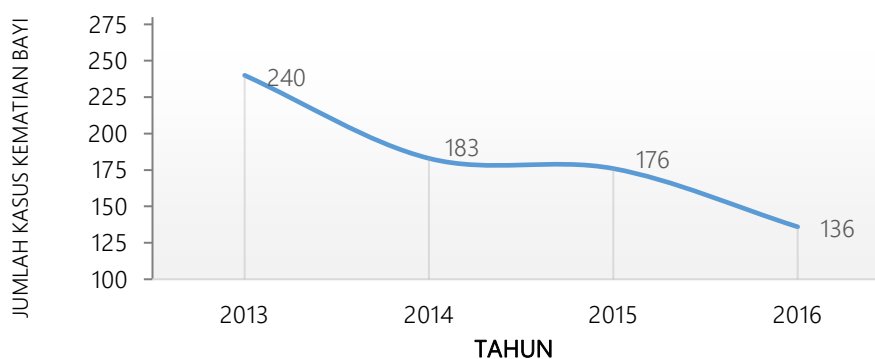
$$\frac{\text{Angka Kematian Bayi}}{\text{Angka Kematian}} = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi sebelum Umur 1 tahun}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dalam waktu yang sama}} \times 1000$$

Kriteria penggolongan tingkat kematian bayi :

- > 125 Sangat Tinggi
- 75-125 Tinggi
- 35-75 Sedang
- < 35 Rendah

Pada tahun 2016 Angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Ciamis menunjukkan angka sebanyak 136 bayi, artinya selama tahun 2016 terdapat 136 kasus kematian bayi di Kabupaten Ciamis. Proyeksi yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 175 kasus. Dengan demikian terdapat penurunan dari proyeksi yang ditetapkan dalam arti positif, sehingga capaian indikator kinerja ini menunjukkan angka sebesar 122,29%, yang berarti menunjukkan predikat sangat baik. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 terdapat sebanyak 176 kasus dan tahun 2014 sebanyak 183 kasus, maka capaian kinerja indikator AKB pada tahun 2016 mengalami peningkatan kinerja. Hal ini menunjukkan upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di sektor kesehatan memiliki kontribusi yang baik dalam upaya menekan Angka Kematian Bayi.

Grafik 3.21
Perbandingan Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016



Angka Kematian Bayi di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan kesiapan tenaga kesehatan untuk memberikan penanganan baik di pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, sistem pelaporan yang telah terkoordinasi dengan baik, dilaksanakannya deteksi dan kawal kasus risti, serta sudah banyak *provider* yang mampu melakukan tatalaksana/penanganan definitif untuk menyelamatkan bayi, serta semakin proporsionalnya anggaran yang dimiliki puskesmas dari pusat dan daerah dalam akselerasi penurunan kematian ibu dan bayi. Implementasi kegiatan dalam penurunan kematian bayi antara lain:

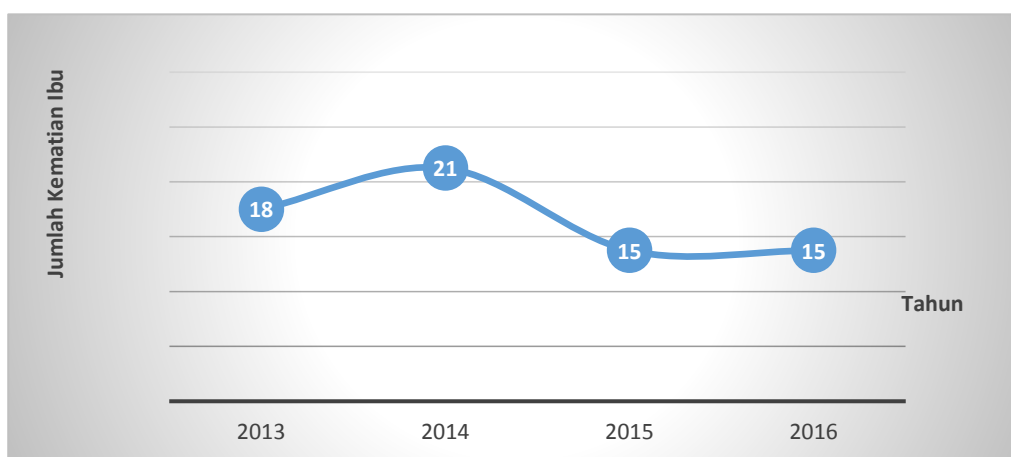
- a. Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan kegagalan bernafas secara spontan pada bayi baru lahir (Asfiksia);
- b. Peningkatan pengetahuan ibu dengan kegiatan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
- c. Pemantauan dan penanganan bayi muda dan bayi sakit melalui pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
- d. Bimbingan teknis pengoperasian alat kegawat daruratan bayi baru lahir (neonatal) di Puskesmas mampu Poned bekerja sama dengan tim Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis;
- e. Peran mitra Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) melalui tim penggerak PKK dan Organisasi Wanita (GOW) dalam melaksanakan sosialisasi tentang 1000 hari pertama kehidupan.
- f. Pengembangan/penguatan seribu hari pertama kehidupan melalui pelatihan edukator dan fasilitator serta implementasinya.

Untuk mencapai indikator sasaran AKB dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu : (1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat; (2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.746.677.895,- atau 80,99 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 15 kasus dari target 16 kasus yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator AKI sebesar 106,25% termasuk kategori sangat baik. Dapat diproyeksikan jika dibandingkan dengan AKI tahun 2014 sebesar 21 kasus maka AKI tahun 2016 menunjukkan adanya penurunan sebesar 6 kasus yang berarti positif. Angka kematian ibu Tahun 2016 sama dengan Tahun 2015 yaitu sebanyak 15 kasus.

Grafik 3.22
Perbandingan Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016



Penurunan jumlah kematian ibu tersebut dikarenakan adanya peningkatan sumber daya *provider* dalam melakukan tatalaksana kasus pra-rujukan dan penanganan definitif untuk penyelamatan ibu pada kasus kegawatdaruratan. Selain itu kegiatan deteksi dan kawal kasus risti (resiko tinggi) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas mampu PONEID sudah melibatkan peran langsung dokter spesialis kebidanan.

Keberhasilan tersebut diatas juga dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta lintas sektor, antara lain :

- a. Upaya promotif melalui kegiatan penyuluhan baik individu maupun masal dalam berbagai kesempatan melalui berbagai media dengan tetap memperhatikan budaya dan kearifan local seperti kegiatan inovatif KUPAT TAHU (Kupas Empat Menit Menjadi Tahu);

- b. Upaya preventif melalui deteksi dini faktor risiko kehamilan baik pencegahan primer, sekunder dan tertier dalam bentuk kegiatan kelas ibu hamil, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pemeriksaan dan konsultasi Ibu Hamil Resti oleh Dokter Spesialis Kebidanan di 10 (Sepuluh) Puskesmas mampu PONED;
- c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan jaringannya.
- d. Pengurangan kasus faktor risiko ibu hamil dengan membidik remaja putri melalui upaya pencegahan anemia dengan pemberian Tablet Tambah Darah. Kegiatan inovatif yang diusung adalah GERSA KONTASI (Gerakan Sadar Konsumsi Tablet Besi).

Untuk mencapai indikator sasaran AKI dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; (3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; dan (4) Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dengan realisasi anggaran sebesar Rp 93.195.095.876,- atau 80,81 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 90,81 % dan outcome sebesar 90,25 %.

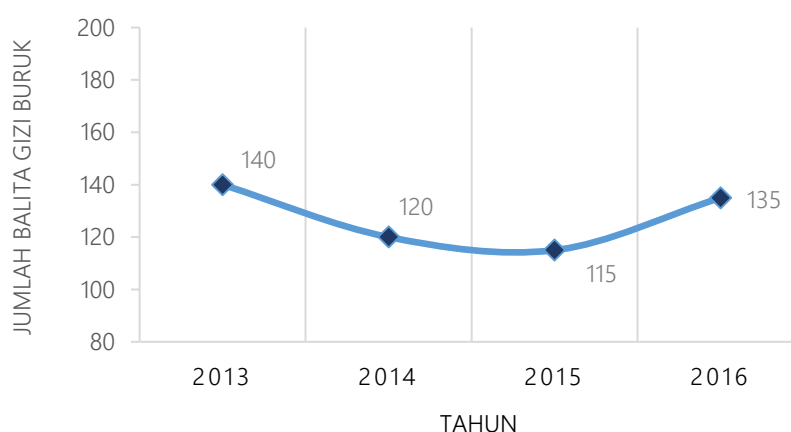
5. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah anak dengan usia 0-59 bulan (balita) dengan tanda klinis gizi buruk dan atau indeks berat badan menurut umur dengan nilai Z-Score < -3 SD. Z score adalah perhitungan pembandingan antara tiga indikator yaitu BB/U (berat badan menurut umur), BB/TB (berat badan menurut tinggi badan) dan TB/U (tinggi badan menurut umur). Jika hasilnya lebih rendah dari -3 (Standar baku) maka balita tersebut dinyatakan mengalami gizi buruk.

Jumlah kasus balita gizi buruk pada tahun 2016 sebanyak 135 kasus dari jumlah kasus yang ditargetkan sebanyak 155 kasus, dan menunjukkan capaian

kinerja sebesar 112,90%. Apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu, jumlah kasus balita gizi buruk pada tahun 2015 adalah sebanyak 115 kasus, maka terjadi peningkatan sebanyak 20 kasus, akan tetapi jika dibandingkan dengan target kinerja, capaiannya melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 120 kasus, maka terjadi peningkatan sebanyak 15 kasus. Dengan demikian setiap tahun di Kabupaten Ciamis terjadi peningkatan realisasi nyata capaian indikator sasaran kasus balita gizi buruk, tetapi secara capaian kinerja mengalami peningkatan yang baik.

Grafik 3.23
Perbandingan Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ciamis
Tahun 2013-2016



Keberhasilan pencapaian Tahun 2016 dipengaruhi oleh integrasi intervensi melalui berbagai sumber anggaran baik dari Pemerintah Daerah maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat serta bantuan operasional kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan dan pemberdayaan masyarakat sadar gizi keluarga. Adapun upaya yang dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2016 untuk menurunkan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Ciamis yaitu:

- a. PMT pemulihan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang terutama keluarga miskin selama 90 hari berturut-turut;

- b. Pemantauan kegiatan pemberian PMT pemulihan melalui pengawasan oleh Tenaga Pelaksana Gizi (TPG), bidan desa dan kader kesehatan;
- c. PMT penyuluhan di posyandu dengan kriteria terdapat penderita gizi buruk;
- d. Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi anak 6-23 bulan (Baduta) dari keluarga miskin selama 90 hari berturut-turut;
- e. Intensitas melakukan pemantauan berat badan dan tinggi badan/panjang badan balita di sarana kesehatan atau upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM).

Untuk mencapai indikator sasaran Balita gizi buruk dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu program perbaikan gizi masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 300.074.300,- atau 99,84 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi;
- b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin;
- c. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemian gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan yodium (Gaky), kekurangan vitamin A (KVA) dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

Output kegiatan tersebut antara lain :

- a. Terlaksananya review bulan penimbangan balita (BPB) dan pemantauan status gizi (PSG) di 37 puskesmas;
- b. Terlaksananya pengadaan PMT pemulihan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang untuk 160 (dana APBD), 180 balita (JKN, dan BOK) dan MP ASI baduta gakin sebanyak 416 (JKN, BOK) baduta gakin;
- c. Terlacaknya kasus Anemia Siswa SMA pra intervensi di 10 SMA.

Outcome kegiatan tersebut antara lain :

- a. Terpantaunya status gizi balita di 37 Puskesmas;
- b. Meningkatnya berat badan balita gizi buruk dan gizi kurang 90% dari sasaran 340 balita gizi buruk dan gizi kurang;
- c. Terpantaunya siswa dengan status anemia di 10 SMA.

Hambatan/masalah yang ditemui dalam penanganan balita gizi buruk antara lain adalah adanya penyakit penyerta, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola gizi seimbang serta kurang tepatnya pola asuh orang tua.



Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai upaya diantaranya peningkatan upaya promotif, preventif melalui pemberian PMT, penanganan kasus gizi buruk di fasilitas pelayanan kesehatan secara

berjenjang, meningkatkan keterlibatan peran swasta dan masyarakat dalam pengentasan kasus gizi buruk.

6. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

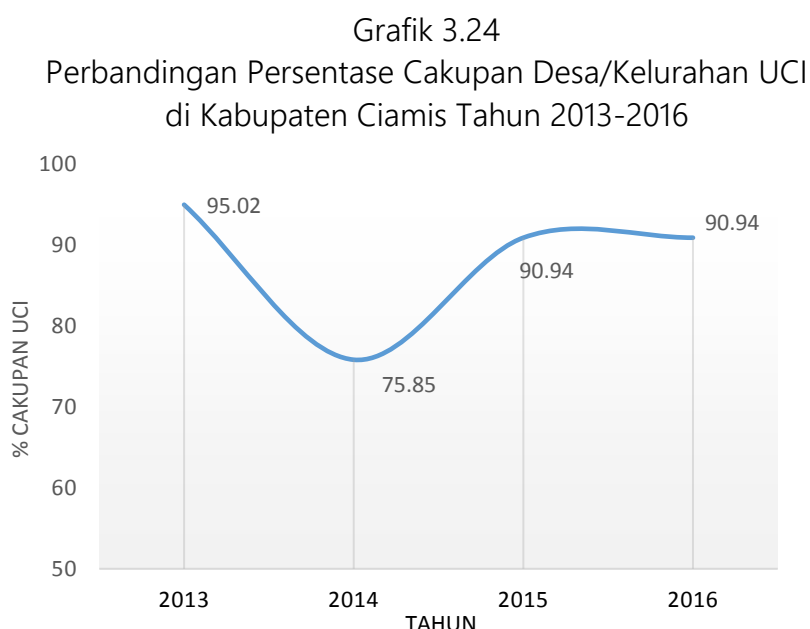
Imunisasi merupakan tindakan efektif untuk mencegah penyakit-penyakit seperti polio, campak, hepatitis B, tetanus, pertusis, difteri, dan TBC, termasuk cacat, kematian dan efek negatif lainnya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit ini. *Universal Child Immunization* (UCI) artinya seorang anak menerima dosis lengkap semua vaksin yang direkomendasikan sebelum ulang tahunnya yang pertama.

Sedangkan Definisi Operasional Desa /kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah Desa atau Kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu satu tahun. Lengkap adalah imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB, 4 dosis Polio, 1 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Penghitungan indikator cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah :

$$\text{Desa/Kel UCI} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan dengan imunisasi lengkap}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Jumlah desa/kelurahan adalah sebanyak 265 desa/kelurahan. Pada tahun 2016 dari 265 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Ciamis, sebanyak 241 desa/kelurahan (90,94%) telah mencapai UCI, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 90,94% dan termasuk dalam predikat/kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 75,85% maka terjadi peningkatan capaian kinerja dan terjadi stagnasi capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar 90,94%.



Untuk mencapai indikator sasaran Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunitation (UCI) dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 427.605.700,- atau 97,66 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 97,66 % dan outcome sebesar 97 %.

Faktor yang mendukung tercapainya Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah semakin terjangkaunya akses pelayanan. Hal ini antara lain terjadi karena tempat pelayanan imunisasi yang semakin terjangkau, jadwal pelayanan teratur dan sesuai dengan kegiatan masyarakat, adanya kader-kader posyandu yang

membantu tenaga medis, tersedianya kartu imunisasi (buku KIA), semakin tingginya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat, serta waktu pemberian imunisasi. Selain faktor budaya dan pendidikan serta kondisi sosial ekonomi ikut mempengaruhi pencapaian UCI desa/kelurahan.

Hambatan/masalah yang ditemui sebagian kecil diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri mengenai manfaat dan pentingnya imunisasi serta Masih adanya masyarakat/kelompok masyarakat di beberapa wilayah Puskesmas yang menolak program imunisasi karena adanya persepsi yang keliru.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai upaya diantaranya melalui peningkatan jejaring kerjasama dengan mengoptimalkan peran serta unit pelayanan kesehatan swasta untuk dapat memberikan laporan/umpan balik tentang kegiatan pelayanan imunisasi, berupaya terus melakukan sosialisasi melalui beberapa media dengan berbagai stakeholder agar masyarakat memiliki pemahaman akan pentingnya imunisasi. Selain itu, dilakukan juga pendekatan secara persuasif dan intensif serta penyampaian informasi imunisasi secara lengkap dengan didampingi oleh tokoh agama setempat untuk memberikan penjelasan dari sisi agama/keyakinan di tiap-tiap wilayah agar seluruh desa/kelurahan mencapai UCI.

7. Cakupan level I pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana kesehatan (RS)

Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi *General Emergency Life Support* (GELS) dan/atau *Advance Trauma Life Support* (ATLS) + *Advance Cardiac Life Support* (ACLS), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi

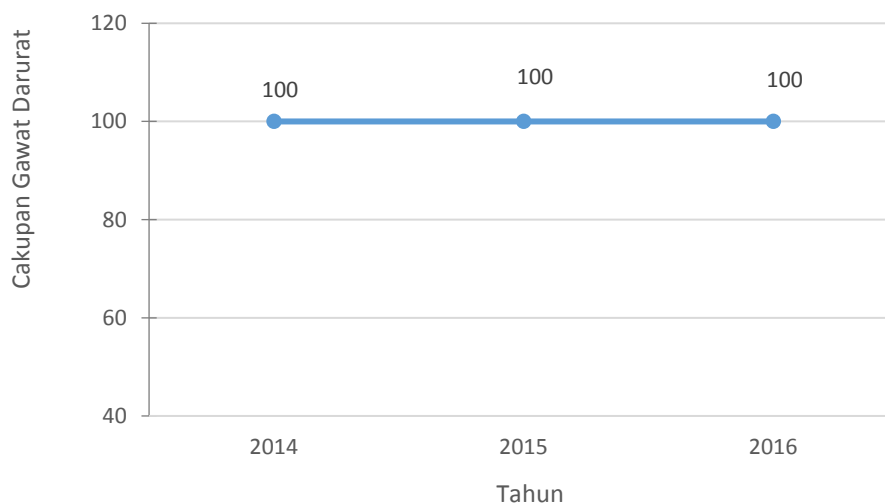
Definisi operasional indikator sasaran ini adalah Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota. Jumlah seluruh pasien yang datang ke gawat darurat yang membutuhkan pelayanan *live*

saving. *Live saving* adalah upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan *Airway, Breath, Circulation*. Rumus perhitungan indikator adalah :

$$\text{Pelayanan Gawat Darurat Level 1} = \frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah Rumah Sakit}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100% dan termasuk dalam predikat/kategori sangat baik.

Grafik 3.25
Perbandingan Persentase Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016



Untuk mencapai indikator sasaran Cakupan level I pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana kesehatan (RS) dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu : (1) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 86.870.483.553,- atau sebesar 95,91 % dari total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.90.576.219.738,- dengan capaian output sebesar 105,26 % dan outcome sebesar 100 %. Jumlah anggaran tersebut bersumber dari Pendapatan Fungsional BLUD RSUD Ciamis dipergunakan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan secara keseluruhan termasuk didalamnya untuk biaya operasional pelayanan kegawat daruratan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Ciamis.

8. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Penghitungan indikator ini menggunakan rumus :

$$\text{Cakupan KLB Desa/Kelurahan yang ditangani < 24 jam} = \frac{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus penghitungan di atas, target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100% dan termasuk dalam predikat/kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 100% maka tidak terjadi penurunan maupun peningkatan capaian kinerja, begitu pula jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan capaian 100% maka tidak ada penurunan ataupun peningkatan capaian kinerja.

Untuk mencapai indikator sasaran Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 427.605.700,- atau 97,66 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 97,66 % dan outcome sebesar 97 %. Output kegiatan tersebut adalah teramatinya penyakit dan penanggulangan wabah di wilayah kerja Puskesmas dengan outcome meningkatnya sistem kewaspadaan dini.

Faktor yang mendukung tercapainya indikator sasaran adalah :

- Semakin baiknya sistem kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu dan jaringannya;
- Aktifnya Tim Gerak Cepat penanganan KLB baik yang ada di Kabupaten maupun tingkat Kecamatan (Puskesmas);

- c. Penggunaan media informasi dan teknologi yang dapat mempercepat penyampaian laporan;
- d. Semakin baik dan berjalannya kerjasama lintas sektor.

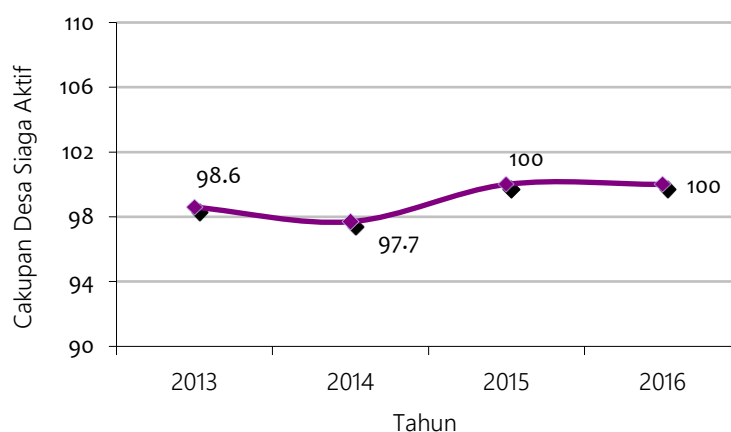
9. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, *surveillance* berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Rumus penghitungan cakupan desa siaga aktif adalah :

$$\text{Cakupan Desa Siaga Aktif} = \frac{\text{Jumlah Desa Siaga yang aktif}}{\text{Jumlah Desa Siaga yang dibentuk}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus penghitungan di atas, target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebesar 265 Desa atau 100% dengan realisasi sebesar 265 Desa atau 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100% dan termasuk dalam predikat/kategori sangat baik. Capaian realisasi nyata tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Tetapi pada tahun lalu capaian kinerja untuk persentase cakupan desa siaga aktif lebih tinggi dari tahun ini, karena adanya perbedaan target dari yang diperjanjikan pada tahun yang bersangkutan.

Grafik 3.26
Perbandingan Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif
Di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016



Untuk mencapai indikator sasaran Cakupan desa siaga aktif dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp 269.210.600,- atau 98,49% dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 98,50 % dan outcome sebesar 98,00 %. Faktor yang mendukung tercapainya indikator disebabkan karena :

- a. Penguatan dari sisi input (anggaran) dan pola integrasi baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat khususnya desa siaga aktif;
- b. Semakin tingginya partisipasi aktif dari Paguyuban Desa Siaga dan peran lintas sektor yang mendukung program tersebut, serta peran Kesatuan Gerak PKK Kesehatan KB melalui 10 Program Pokok PKK.

Capaian kinerja tersebut harus tetap dipertahankan melalui :

- a. Penguatan forum desa siaga aktif;
- b. Peningkatan kualitas desa siaga aktif dengan meningkatkan strata desa siaga aktif minimal strata purnama dan mandiri;
- c. Penguatan forum desa siaga aktif sebagai penggerak kegiatan desa siaga aktif
- d. Peningkatan sumber daya manusia pendukung kegiatan desa siaga aktif seperti pihak puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengambilan kebijakan.

Sasaran 4 : Meningkatkan Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk, dimana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Tujuan utama dari kesehatan lingkungan adalah mewujudkan kualitas lingkungan sehat.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kesehatan lingkungan dilakukan melalui indikator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sanitasi total berbasis masyarakat merupakan pendekatan untuk merubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan sebagai upaya menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pengukuran indikator STBM dihitung dari persentase perbandingan jumlah desa yang melaksanakan STBM dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan di



Kabupaten Ciamis. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Ciamis adalah 265 desa/kelurahan. Pada tahun 2016, jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah sebanyak 265 desa, artinya seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Ciamis telah melaksanakan STBM.

Berdasarkan rumus perhitungan indikator STBM maka realisasi kinerja indikator STBM adalah sebesar 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat baik. Dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatnya kesehatan lingkungan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			RPJMD		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Tahun 2016	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	50	100	200	100	100	100	52	100	192,31

Realisasi indikator kinerja STBM pada tahun 2016 sama dengan tahun yang lalu hanya terdapat perbedaan target kinerja dengan tahun sebelumnya sehingga terlihat seperti terdapat penurunan capaian kinerja sasaran, akan tetapi secara realisasi nyata, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan realisasi.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 192,31 %, dari target sebesar 52 % yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kesehatan lingkungan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu :

(1) Program pengembangan lingkungan sehat;

(2) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan,

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 276,890,400,- atau 97,80 % dari total anggaran yang disediakan Rp. 283,091,550 ,- dengan capaian output sebesar 100% dan outcome sebesar 100%.

Sasaran 5 : Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah Angka perbandingan perubahan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun ini (Pt) dikurangi penduduk

Kabupaten Ciamis tahun lalu (P_{t-1}) dibagi oleh Jumlah Penduduk Tahun Lalu (P_{t-1}), dengan rumus perhitungan :

$$LPP = \frac{p_t - p_{t-1}}{p_{t-1}} \times 100$$

Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2016 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 1.398.346 orang, sedangkan tahun 2015 berjumlah 1.389.414 orang. Berdasarkan rumus perhitungan di atas, dapat diketahui LPP di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 adalah sebesar 0,46 %. Sedangkan target LPP yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebesar 0,46 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran
Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk

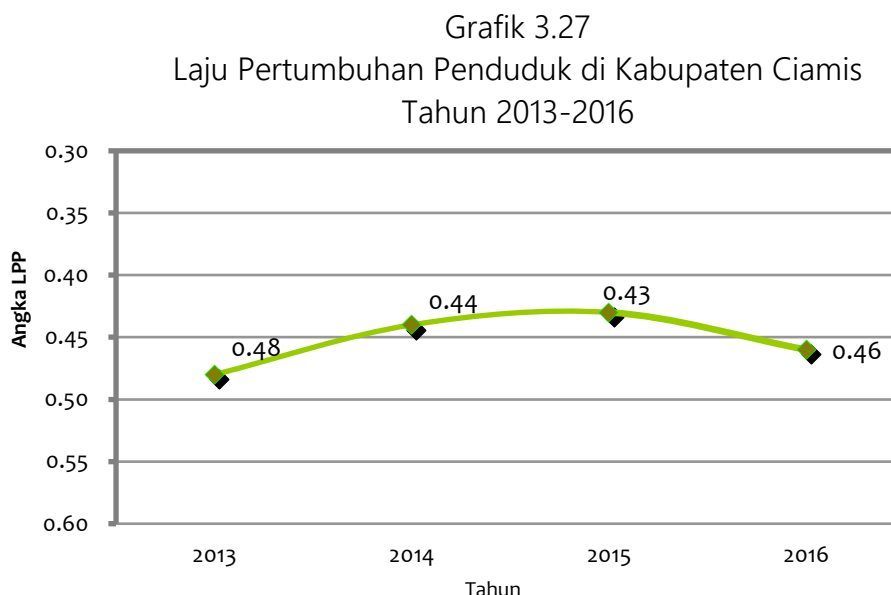
No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	LPP	%	0,44	100	0,43	106,52	0,46	0,46	100

Dari tabel di atas diketahui bahwa LPP Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 adalah sebesar 0,46 % dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 0,46 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2015 LPP Kabupaten Ciamis adalah sebesar 0,43 % dengan capaian kinerja sebesar 106,52 %, sedangkan pada tahun 2014 LPP Kabupaten Ciamis sebesar 0,44 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka LPP tahun 2016 mengalami penurunan capaian nyata sebesar 0,03 % dengan penurunan capaian kinerja sebesar 6,52 %.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, maka LPP mengalami penurunan capaian nyata sebesar 0,02 %, tetapi capaian kinerja tidak mengalami perubahan.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja sasaran LPP tahun 2016 dibandingkan dengan rencana/target dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 95,45 % sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,46	0,44	95,45

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis bukan karena pertumbuhan alami tetapi dipengaruhi oleh adanya faktor migrasi penduduk dari luar daerah. Pertumbuhan alami adalah merupakan selisih jumlah lahir dikurangi jumlah mati, sedangkan migrasi dilihat dari jumlah orang yang datang dan pergi.

Perkembangan Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah di Kabupaten Ciamis selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perkembangan Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah
Di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penduduk lahir	11.800	32.067	19.931	19.095	18.430
2	Penduduk mati	6.117	3.229	6.451	6.194	4.724
3	Penduduk datang	14.717	5.094	20.936	22.025	20.270
4	Penduduk pergi	11.116	7.219	9.741	25.044	15.249

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

Dalam rangka mempertahankan LPP di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis antara lain adalah dengan meningkatkan jumlah peserta KB aktif dan peserta KB baru, baik perempuan maupun laki – laki, sehingga LPP dapat stabil setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain masih rendahnya keikutsertaan Pasangan Usia Subur pada program KB. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu optimalisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat baik yang melalui multimedia ataupun melalui petugas lini lapangan.

Upaya pencapaian sasaran mempertahankan laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu : (1) Program Keluarga Berencana; (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; dan (3) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

5.639.661.255,- atau 93,96 % dari total anggaran yang disediakan Rp. 6.002.396.050,- dengan capaian output sebesar 96,70 % dan outcome sebesar 98,56 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya Partisipasi Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan dilakukan melalui 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Jumlah organisasi kepemudaan; (2) Cakupan Pembinaan terhadap Organisasi Pemuda; dan (3) Prestasi pemuda pelopor, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Partisipasi Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Organisasi	N/A	N/A	100	55,87	100	110	110
2	Cakupan Pembinaan terhadap Organisasi Pemuda	%	N/A	N/A	78	168,21	100	70,91	70,91
Capaian Rata-rata Kinerja				-		124,69			90,46

Keterangan : (N/A, Not Available) Merupakan indikator tambahan yang tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan tahun 2016 adalah sebesar 90,46 %, dalam kategori sangat baik. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator

menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melebihi target dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun



kedua perencanaan menunjukkan capaian indikator kinerja jumlah organisasi kepemudaan sebesar 60,77 %, sedangkan untuk 1 (satu) indikator lainnya tidak dapat dibandingkan karena tidak ditargetkan

dalam RPJMD, tetapi ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebagai indikator tambahan karena memiliki relevansi dalam mengukur capaian kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Partisipasi Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah organisasi kepemudaan	Organisasi	110	181	60,77
2	Cakupan Pembinaan terhadap Organisasi Pemuda	%	70,91	N/A	N/A

Keterangan : (N/A, Not Available) Merupakan indikator tambahan yang tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan dilaksanakan melalui Program Kepemudaan dan Olah Raga, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.603.668.000,- atau 99,92 % dari total

anggaran yang disediakan Rp. 1.605.000.000,- , dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Aanalisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan merupakan wadah pengembangan potensi pemuda berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Jumlah organisasi kepemudaan terdiri dari jumlah organisasi yang terdaftar di KNPI dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam tahun berlaku. Pada tahun 2016 di Kabupaten Ciamis terdapat 110 Organisasi Kepemudaan sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 100 Organisasi Kepemudaan, sehingga capaian kinerjanya menunjukkan capaian sebesar 110 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 jumlah Organisasi Kepemudaan sebanyak 100 dan tahun 2014 sebanyak 86 maka ada peningkatan jumlah Organisasi Kepemudaan untuk tiap tahunnya.

Dalam rangka meningkatkan jumlah dan peran Organisasi Kepemudaan dalam proses pembangunan di Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya diantaranya melaksanakan koordinasi dengan Ormas/Organisasi Pemuda/LSM dan Organisasi Politik sehingga diharapkan adanya sinergitas dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ciamis.

2. Cakupan Pembinaan Terhadap Organisasi Pemuda

Pembinaan organisasi pemuda adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan pemanfaatan generasi muda yang mampu

mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing untuk mencapai prestasi/hasil yang efektif dan efisien.

Cakupan pembinaan terhadap organisasi pemuda merupakan persentase perbandingan antara jumlah organisasi pemuda (kelompok) yang dibina dengan jumlah organisasi pemuda (kelompok). Target cakupan pembinaan terhadap organisasi pemuda adalah sebesar 100 % atau sebanyak 110 organisasi. Pada tahun 2016 jumlah organisasi yang dibina melalui Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 78 organisasi atau sebesar 70,91 % dengan capaian kinerja sebesar 70,91 % atau dengan predikat Cukup. Bentuk pembinaan yang dilakukan antara lain yaitu :

- a. Pembinaan teknik kewirausahaan;
- b. Pembinaan manajemen kewirausahaan;
- c. Pembinaan keahlian (*life skill*) bidang perikanan, peternakan, pengolahan makanan dan perbengkelan (montir);
- d. Pembinaan kelengkapan administrasi organisasi.

Faktor-faktor yang mendorong upaya pembinaan terhadap organisasi pemuda :

- a. Organisasi pemuda Kabupaten Ciamis tidak mau ketinggalan oleh organisasi pemuda daerah lain;
- b. Menumbuhkan rasa percaya diri organisasi untuk maju sesuai bidangnya;
- c. Memacu generasi muda Kabupaten Ciamis untuk lebih mempererat tali persaudaraan diantara generasi muda.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pembinaan organisasi pemuda :

- a. Domisili yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kesulitan akomodasi;
- b. Adanya peraturan yang membatasi mengenai pemberian bantuan/hibah untuk pengembangan organisasi.

Strategi/Solusi yang telah dilakukan dalam pembinaan Organisasi Pemuda :

- Mengikutsertakan unsur organisasi pemuda dalam kegiatan pelatihan kepemudaan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
- Mengikutsertakan pada kegiatan Pameran Kepemudaan di tingkat provinsi;
- Penyuluhan tentang regulasi yang harus diikuti oleh organisasi pemuda.

Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/Kemasyarakatan

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu: (1) Partisipasi perempuan di pasar kerja; dan (2) Partisipasi perempuan dalam partai politik, dengan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/Kemasyarakatan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Partisipasi perempuan di pasar kerja	%	1,02	102	1,05	105	2	2	100
2	Partisipasi perempuan dalam partai politik	%	12	40	12	40	16	10	62,50
Rata-rata Capaian Kinerja				71		72,50			81,25

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan tahun 2016 adalah sebesar 81,25 % dalam kategori baik.

- b. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, capaian kinerja tahun 2016 (81,25 %) lebih tinggi dan mengalami peningkatan sebesar 8,75 % dibanding capaian kinerja tahun 2015 (72,50 %), dan mengalami peningkatan sebesar 10,25 % dibanding tahun 2014 (71 %).
- c. Capaian kinerja dari setiap indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai sesuai dengan target yaitu partisipasi perempuan di pasar kerja (100%) dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target yaitu partisipasi perempuan dalam partai politik (62,50 %).

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Peran Perempuan Dalam
Berpolicy/Kemasyarakatan Tahun 2016
Dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Partisipasi perempuan di pasar kerja	%	2	2	100
2	Partisipasi perempuan dalam partai politik	%	10	N/A	N/A

Keterangan : (N/A, Not Available) Merupakan indikator tambahan yang tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan 1 (satu) indikator tercapai sesuai target dengan capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan 1 (satu) indikator partisipasi perempuan dalam partai politik tidak ditargetkan dalam RPJMD Tahun 2016 sehingga tidak dapat diketahui capaian kinerjanya.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan dilaksanakan melalui program peningkatan peranserta kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 737.589.450,- atau sebesar 98,43 % dari total pagu anggaran Rp. 749.372.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Analisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Perempuan di Pasar Kerja

Angka Perempuan di pasar kerja adalah jumlah penduduk perempuan produktif yang berusia antara 15 sampai dengan 60 tahun yang bekerja di pasar kerja. Persentase partisipasi perempuan di pasar kerja merupakan perbandingan antara jumlah partisipasi perempuan di pasar kerja dibanding jumlah seluruh angkatan kerja perempuan. Yang dimaksud dengan partisipasi perempuan di pasar kerja adalah perempuan yang bekerja selain di lembaga pemerintahan atau yang berwirausaha sendiri, yang melapor dan tercatat pada dinas sosial dan tenaga kerja.

Pada tahun 2016 partisipasi perempuan di pasar kerja berjumlah 9.031 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 451.279 orang. Perhitungan persentase partisipasi perempuan di pasar kerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Partisipasi perempuan di Pasar Kerja} = \frac{\text{Jml partisipasi perempuan di pasar kerja}}{\text{Jml angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dan perhitungan di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 angka partisipasi perempuan di pasar kerja adalah sebesar 2 % sesuai target yang direncanakan, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah partisipasi perempuan di pasar kerja pada tahun 2015 sebanyak 4.571 orang atau 1,05 % dan tahun 2014 sebanyak 4.625 orang atau 1,02 %. Dengan

demikian jumlah partisipasi perempuan di pasar kerja selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tersebut adalah di luar angkatan kerja perempuan yang ada di lembaga pemerintahan maupun yang berada di lembaga swasta atau perempuan yang berwirausaha/wiraswasta sendiri.

Meskipun capaian kinerja tercapai melampaui target, tetapi masih banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja partisipasi perempuan di pasar kerja tersebut diantaranya masih banyaknya para pekerja perempuan yang sudah bekerja namun tidak melapor pada pemangku kebijakan atau dinas/instansi yang terkait dengan pencatatan tenaga kerja. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis secara intensif mengadakan sosialisasi terhadap para perempuan yang sudah bekerja untuk melaporkan dirinya pada instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan di lingkup Kabupaten Ciamis.

Untuk mencapai indikator partisipasi perempuan di pasar kerja dilaksanakan melalui program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.989.100,- atau 99,97 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

2. Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik

Partisipasi perempuan dalam partai politik adalah keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik di Kabupaten Ciamis, yaitu perbandingan antara jumlah keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten Ciamis, dengan rumus perhitungan :

$$\text{Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik} : \frac{\text{Jml Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan DPRD Kab. Ciamis}}{\text{Jml Anggota DPRD Kab. Ciamis}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD sebanyak 5 (lima) orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD sebanyak 50 (lima puluh) orang. Dengan demikian persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis adalah sebesar 10 %. Target yang ditetapkan adalah sebesar 16 %. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran menunjukkan angka sebesar 62,50 % dan termasuk dalam kategori kurang.

Perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis saat ini adalah hasil dari Pemilihan Umum tahun 2013 untuk periode masa jabatan tahun 2014-2019. Pada tahun 2014 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 6 (enam) orang atau sebesar 12 % dari jumlah seluruh anggota DPRD, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) dan adanya pengunduran diri dari salah satu anggota DPRD perempuan. Sehingga pada tahun 2016 jumlah keterwakilan perempuan pada DPRD menjadi sebanyak 5 (lima) orang atau sebesar 10 % dari jumlah seluruh anggota DPRD.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik di Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai upaya diantaranya adalah melalui program pendidikan politik masyarakat, sehingga diharapkan partisipasi perempuan dalam partai politik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Program pendidikan politik masyarakat yang meliputi kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik, khususnya bagi perempuan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang telah memfasilitasi lahirnya Forum Komunitas Perempuan Politik Ciamis (Forkom PPC).

Untuk mencapai indikator sasaran Partisipasi perempuan dalam partai politik dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Pesan Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 737.589.450,- atau sebesar 98,43 % dari total pagu anggaran Rp. 749.372.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 8 : Meningkatnya Prestasi Olahraga

Pengukuran terhadap capaian sasaran meningkatnya prestasi olahraga diukur melalui indikator Jumlah Sarana Olahraga.

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga tentunya perlu didukung oleh sejumlah sarana olahraga. Yang dimaksud dengan jumlah sarana olahraga adalah jumlah sarana olahraga skala kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang di wilayah Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2016 jumlah sarana olahraga adalah sebanyak 1.024 unit sarana olahraga, sedangkan target yang ditetapkan adalah sebanyak 1.024 unit. Dengan demikian indikator jumlah sarana olahraga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Prestasi Olahraga

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016			RPJMD	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Prestasi Olahraga :								
	a. Jumlah sarana olahraga	Unit	1.036	101,87	1.024	1.024	100	1.019	100,49

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa sasaran meningkatnya prestasi olahraga pada tahun 2016 hanya dapat diukur dari indikator jumlah sarana olahraga yang menunjukkan realisasi sebanyak 1.024 unit dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Meskipun terjadi penurunan secara realisasi nyata, akan tetapi indikator sasaran ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,49 %.

Jumlah sarana olahraga di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20
Jumlah Sarana Olahraga Di Kabupaten Ciamis Tahun 2016

No	Jenis/Sarana Olahraga	Jumlah Berdasarkan Skala (unit)			Jumlah
		Desa/Kel	Kec	Kab	
1	Stadion/lapangan Sepakbola	229	29	1	259
2	Basket	105	2	2	109
3	Bola Voli	333	26	-	359
4	Bulutangkis	233	27	-	260
5	Kolam Renang	7	-	1	8
6	Tenis Lapangan	-	13	4	17
7	Lapangan Futsal	-	12	-	12
Jumlah		907	109	8	1.024

Sumber : Diolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, Tahun 2016

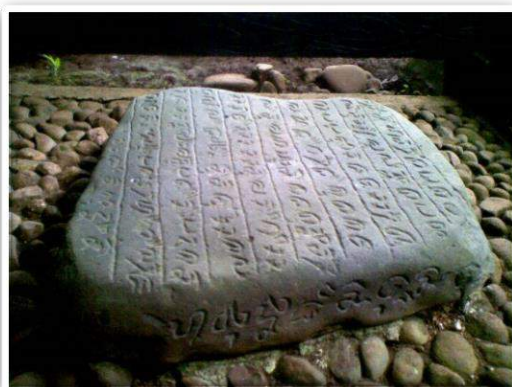
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya prestasi olahraga dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sarana dan prasarana olah raga dengan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.968.862.996,- atau sebesar 98,52 % dari total pagu anggaran Rp. 25.345.163.000,- dengan capaian output sebesar 96,88 % dan capaian outcome sebesar 96,88 %.

Sasaran 9 : Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya Yang Berkembang di Masyarakat

Pengukuran dan penilaian terhadap tingkat pencapaian sasaran Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Jumlah situs seni dan budaya; dan (2) Tempat seni dan budaya. Realisasi dan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :



1. Jumlah Situs Seni dan Budaya



Jumlah situs seni dan budaya adalah jumlah situs budaya yang dipelihara di Kabupaten Ciamis dalam rangka mengembangkan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Pada Tahun 2016, target jumlah situs seni dan

budaya yang dipelihara adalah sebanyak 162 buah dan terealisasi sebanyak sebanyak 160 buah, atau mencapai 98,77%. Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana Tahun 2015 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 156 buah dan tahun 2014 sebanyak 136 buah, maka capaian nyata jumlah situs yang dipelihara pada tahun 2016 lebih tinggi dan senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Faktor yang menjadi penghambat/kendala tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target yaitu sulitnya mendapatkan informasi atau mendata situs-situs seni dan budaya yang ada di Kabupaten Ciamis, dikarenakan sebagian sudah mengalami kerusakan dan mengalami perubahan wilayah. Selain itu, masih kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya juga menjadi kendala. Strategi atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain dengan melakukan seminar dan pelatihan dibidang seni, budaya, sejarah dan kepurbakalaan.

Upaya untuk mencapai realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran jumlah situs seni dan budaya dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- atau 100 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

2. Tempat Seni dan Budaya

Tempat seni dan budaya adalah lokasi atau tempat yang diperuntukan bagi sebuah karya yang diciptakan dengan keterampilan yang luar biasa sehingga membuat sesuatu tersebut menjadi indah dan bernilai. Pada tahun 2016 jumlah tempat seni dan budaya sebanyak 82 buah dari target sebanyak 82



buah atau mencapai 100 %. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi sesuai target yang direncanakan adalah sudah tersedianya informasi yang realistis dan relevan dari masyarakat Kabupaten Ciamis tentang seni dan budaya walaupun dihadapkan pada sedikitnya masyarakat Kabupaten Ciamis yang melestarikan seni dan budaya.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya di Kabupaten Ciamis antara lain yaitu menyiapkan/membangun sarana gedung kesenian yang sangat representatif untuk pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Ciamis.

Upaya untuk mencapai realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran tempat seni dan budaya dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan (2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.321.900.000,- atau 99,99 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya Yang Berkembang Di Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran
Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya yang Berkembang di Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah situs seni dan budaya	Situs	136	86,67	156	55,12	162	160	98,77
2	Tempat seni dan budaya	Unit	-	-	79	43,41	82	82	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%				49,27			99,38

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat tahun 2016 adalah sebesar 99,38 % dengan kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, 1 (satu) indikator sasaran mencapai target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 43,92 % sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya Yang Berkembang di Masyarakat
Tahun 2016 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah situs seni dan budaya;	Situs	160	303	52,81
2	Tempat seni dan budaya	Unit	82	234	35,04
Rata-rata Capaian Kinerja		%			43,92

Upaya pencapaian sasaran pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu : (1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; (2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya; dan (3) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.271.900.000,- atau sebesar 99,99 % dari total pagu anggaran Rp. 2.272.000.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 10 : Pemahaman dan Pengamalan Agama Dalam Kehidupan Sehari-hari



Sasaran ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki komitmen kuat dalam membangun kehidupan beragama bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis. Kerukunan

hidup beragama dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Ciamis berjalan

kondusif dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam menghormati agama masing-masing sesuai keyakinannya. Dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari terhadap umat beragama dilakukan secara periodik dan terprogram melalui kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung.

Pengukuran terhadap capaian sasaran pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari dilakukan melalui indikator jumlah sarana/tempat peribadatan yang diberikan bantuan meliputi masjid, gereja dan kelenteng. Hasil pengukuran capaian indikator sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran
Pemahaman dan Pengamalan Agama Dalam Kehidupan Sehari-Hari

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Tempat ibadah yang menerima bantuan :								
	- Masjid	Unit	807	91,19	207	25,65	745	270	36,24
	- Gereja	Unit	-	-	-	-	4	0	0
	- Kelenteng	Unit	-	-	-	-	1	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja		%		91,19		25,65			36,24

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari pada tahun 2016 adalah sebesar 36,24 % atau dalam kategori sangat kurang.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator sasaran yang diukur belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 (36,24 %) lebih tinggi dan mengalami peningkatan sebesar 9,59 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (26,65 %), tetapi lebih rendah atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 (91,19 %).
- d. Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 36,48 % sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Pemahaman dan Pengamalan Agama Dalam Kehidupan Sehari-Hari Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Tempat ibadah yang menerima bantuan				
	- Mesjid	Unit	270	740	36,48
	- Gereja	Unit	0	4	0
	- Kelenteng	Unit	0	1	0
	Rata-rata Capaian Kinerja	%			36,48

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada sasaran ini adalah berkaitan dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan hibah yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sehingga berdampak pada realisasi penyaluran hibah kepada masyarakat khususnya tempat ibadah (mesjid, gereja, kelenteng) sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk bantuan hibah kepada gereja dan kelenteng tergambarkan nihil, dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan bantuan hibah dari kedua tempat ibadah tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak dapat merealisasikan bantuan.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan lokus dan fokus pada calon penerima bantuan hibah keagamaan melalui Program Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan yang dilaksanakan ke tiap-tiap kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Melalui upaya tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami perlunya legalitas yang berlandaskan yuridis bagi pendirian lembaga kemasyarakatan. Untuk calon penerima hibah keagamaan non-muslim telah diinformasikan mengenai kegiatan bantuan hibah keagamaan, dan apabila memerlukan bantuan hibah keagamaan bagi tempat ibadahnya harus menyampaikan usulan permohonan bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Upaya pencapaian sasaran pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari dilaksanakan melalui Program Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.260.021.300,- atau sebesar 96,43 % dari total pagu anggaran Rp. 1.306.724.700,- dengan capaian output sebesar 96,67 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 11 : Mewujudkan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Kelompok Masyarakat, Inter Umat Beragama Maupun Antar Umat Beragama Serta Pengembangan Toleransi Terhadap Keragaman Agama

Pengukuran terhadap capaian sasaran mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama, dilakukan melalui indikator kasus berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan



(SARA). Kasus berlatar belakang SARA adalah suatu keadaan atau kondisi tertentu yang dilatarbelakangi oleh permasalahan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan yang dihitung dari jumlah kasus yang terjadi dalam 1 (satu) tahun. Hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.25

Capaian Kinerja Sasaran
Mewujudkan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Kelompok Masyarakat,
Inter Umat Beragama Maupun Antar Umat Beragama Serta
Pengembangan Toleransi Terhadap Keragaman Agama

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kasus berlatar belakang SARA	Kasus	0	100	0	100	0	0	100

SARA merupakan pandangan atau tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Biasanya setiap tindakan memakai cara kekerasan, diskriminasi dan

pelecehan yang berdasarkan pada identitas diri atau golongan yang dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini sangat melecehkan kemerdekaan, menginjak-nginjak hak asasi manusia dan sangat mencoreng nama bangsa.

Pada tahun 2016 di Kabupaten Ciamis tidak terdapat kasus yang terjadi karena dilatarbelakangi kepentingan SARA. Target yang ditetapkan adalah 0 (nol) kasus. Dengan demikian kasus berlatarbelakang SARA sebagai indikator untuk mengukur sasaran "Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama" menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat baik. Realisasi dan capaian kinerja ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 dan tahun 2014 juga tidak terdapat kasus yang berlatar belakang SARA.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Mewujudkan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Kelompok Masyarakat,
Inter Umat Beragama Maupun Antar Umat Beragama Serta Pengembangan
Toleransi Terhadap Keragaman Agama Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Kasus berlatar belakang SARA	Kasus	0	0	100

Faktor yang mendukung tidak adanya kasus yang berlatarbelakang SARA di Kabupaten Ciamis antara lain dipengaruhi oleh faktor kehidupan sosial budaya masyarakat, antara lain yaitu situasi dan kondisi masyarakat yang agamis dan santun meskipun mayoritas penduduk Kabupaten Ciamis beragama Islam tetapi

sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, situasi politik yang kondusif dan kondisi ekonomi yang relatif stabil, tidak adanya diskriminasi terhadap kelompok/golongan/agama tertentu dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis antara lain yaitu senantiasa menjalin koordinasi dan komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat, tokoh-tokoh agama maupun aparat penegak hukum serta selalu melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan munculnya kasus SARA.

Upaya pencapaian sasaran mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.708.735.500,- atau sebesar 99,61 % dari total pagu anggaran Rp. 3.723.404.500,- dengan capaian output sebesar 86,97 % dan capaian outcome sebesar 94,76 %.

Sasaran 12 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (*Bappenas, 2004*). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi penduduk miskin adalah mereka yang hanya berpenghasilan Rp. 233.000,- per bulan atau Rp. 7.000,- per hari.

Pengukuran terhadap pencapaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu jumlah penduduk miskin. Indikator jumlah penduduk miskin dihitung dari jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

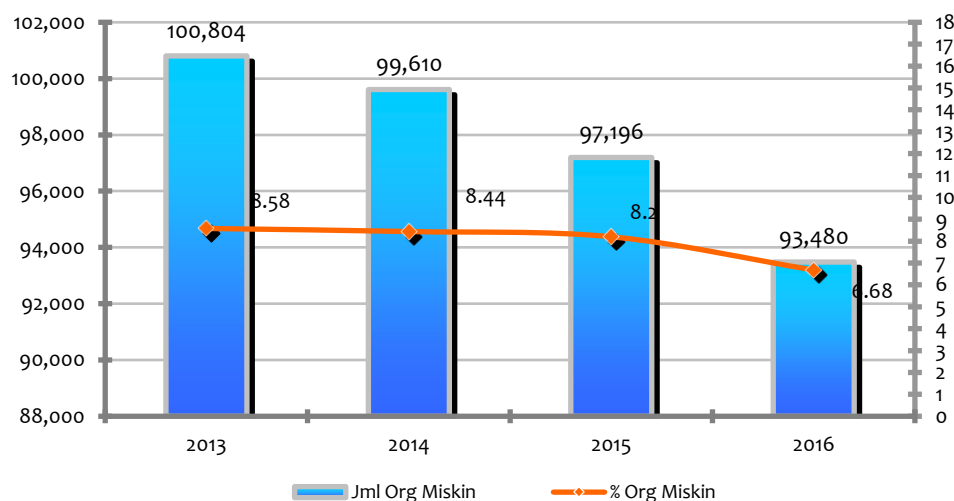
Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah penduduk miskin	Orang (%)	99.610 (8,44)	104,03	97.196 (8,20)	101.22	93.480 (6,68)	93.480 (6,68)	100

Pada tahun 2016 target jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis adalah 93.480 orang. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 adalah sebanyak 93.480 orang atau 6,68 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin adalah sebesar 97.196 orang, sedangkan tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 99.610 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka jumlah penduduk miskin senantiasa mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin berkurang/mengalami penurunan sebesar 1,52 % dibandingkan dengan tahun 2015, dan menurun sebesar 1,76 % dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini menunjukkan perkembangan/kinerja yang positif dalam penanggulangan masalah kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

Grafik 3.28
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016



Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,80 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Menurunnya Tingkat Kemiskinan Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah penduduk miskin	Orang	93.480	93.297	99,80

Penanggulangan kemiskinan merupakan program utama pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten bahkan merupakan salah satu janji politik bupati sehingga menjadi program prioritas. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah diluncurkan antara lain program PKH, BLT, Raskin, Kube perkotaan dan pedesaan dan rutilahu.

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan “inovasi” dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan membentuk lembaga layanan terpadu penanggulangan kemiskinan yang disebut dengan “LTPKD” (Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang merupakan wadah pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka percepatan dan penguatan secara terpadu



dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

Pembentukan LTPKD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014. Keberadaan LTPKD saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan telah dilakukan perbaikan/pembenahan baik berupa restrukturisasi organisasi maupun penguatan regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu mengenai keberadaan LTPKD. Dengan adanya perbaikan/pembenahan ini diharapkan keberadaan lembaga LTPKD dapat berjalan lebih optimal, sehingga program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi dalam penanganan masalah kemiskinan yaitu berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan penanggulangan kemiskinan serta berkaitan dengan data base kemiskinan, misalnya validasi data keluarga miskin penerima program kartu KIS datanya masih banyak yang salah dan penerima masih ada yang tidak tepat sasaran.

Strategi/upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut yaitu: (1) Menggunakan data yang berasal dari Kementerian Sosial yang diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PKH dan TKSK; (2) Senantiasa melakukan validasi dan kartu yang salah dikembalikan ke Pemerintah Pusat dan diusulkan untuk dilakukan penggantian.

Upaya pencapaian sasaran menurunkan tingkat kemiskinan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

- (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- (2) Program Transmigrasi Regional;
- (3) Program Pengembangan Kapasitas Calon Transmigran.

Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan adalah sebesar Rp. 890.754.924,- atau sebesar 99,35 % dari total pagu anggaran Rp. 896.572.500,- dengan capaian output sebesar 99,47 % dan capaian outcome sebesar 83,33 %.

Sasaran 13 : Terlindunginya Perempuan & Anak-anak Dari Tindak Kekerasan

Pengukuran terhadap realisasi dan capaian kinerja sasaran Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak; dan (2) Persentase penanganan KDRT dan *trafficking*, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran
Terlindunginya Perempuan dan Anak-Anak Dari Tindak Kekerasan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak	Kasus	31	172,22	41	227,78	20	45	225
2	Persentase penanganan KDRT dan Trafficking	%	100	100	97	97	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%		136,11		162,39			162,50

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan tahun 2016 adalah sebesar 162,50 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melebihi target (225 %) dan 1 (satu) indikator tercapai sesuai dengan target (100%).
- c. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 (162,50%) lebih tinggi dan mengalami peningkatan sebesar 0,11 % dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015 (162,39 %) dan meningkat sebesar 26,39 % dari tahun 2014 (136,11 %).

Sedangkan perbandingan realisasi pencapaian sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Terlindunginya Perempuan dan Anak-Anak Dari Tindak Kekerasan Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak	Orang	45	16	281,25
2	Persentase penanganan KDRT dan Trafficking	%	100	N/A	N/A

Keterangan : (N/A, Not Available) Merupakan indikator tambahan yang tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dari tabel di atas diketahui perbandingan antara realisasi indikator kinerja tahun 2016 dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua RPJMD. Untuk indikator Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak menunjukkan capaian kinerja sebesar 281,25 %. Sedangkan indikator Persentase penanganan KDRT dan trafficking tidak ditargetkan dalam RPJMD, sehingga tidak bisa diketahui capaian kinerjanya. Tetapi penanganan KDRT dan trafficking merupakan indikator yang memiliki relevansi untuk mengukur pencapaian sasaran terlindunginya

perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Ciamis, sehingga ikut diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Upaya pencapaian sasaran terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

- (1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
- (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak;
- (3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.169.080.250,- atau sebesar 98,17 % dari total pagu anggaran Rp. 1.190.888.400,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 97,22 %.

Analisa penjelasan realisasi dan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah KDRT Terhadap Ibu dan Anak

Jumlah kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat KDRT terhadap perempuan dan anak adalah jumlah kasus KDRT yang terjadi di lingkungan masyarakat yang tercatat dan dilaporkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ciamis. Untuk perhitungan jumlah KDRT terhadap Perempuan dan Anak dihitung dari jumlah kasus yang terakomodir oleh P2TP2A.



Pada Tahun 2016 angka kasus KDRT terhadap Perempuan dan Anak yang tercatat di P2TP2A sebanyak 45 (empat puluh lima) kasus dengan target sebanyak 20 kasus. Dengan demikian capaian kinerja indikator jumlah KDRT terhadap ibu

dan anak pada tahun 2016 mencapai sebesar 225,50 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat tercapai karena kinerja para petugas pelayanan yang langsung turun ke lapangan guna meminimalisir kasus KDRT yang tidak terakomodir oleh lembaga P2TP2A.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa jumlah KDRT terhadap ibu dan anak di Kabupaten Ciamis yang tercatat dan dilaporkan ke P2TP2A relatif melampaui target yang ditetapkan dan relatif meningkat setiap tahunnya. Perbandingan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 225,50 %, tahun 2015 sebesar 227,78 % dan tahun 2014 sebesar 116,67 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator jumlah KDRT terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis terlihat dinamis mengalami peningkatan dan penurunan.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu : (1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan (3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.169.080.250,- atau 98,17 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 97,22 %.

2. Persentase Penanganan KDRT dan Trafficking

Persentase penanganan KDRT dan trafficking adalah Persentase jumlah penanganan terhadap korban KDRT dan trafficking dibandingkan dengan korban KDRT dan trafficking yang membutuhkan pelayanan dan penanganan. Untuk menghitung persentase penanganan KDRT dan trafficking maka menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Penanganan KDRT dan Trafficking} = \frac{\text{Jumlah Korban Terlayani}}{\text{Jumlah Korban Butuh}} \times 100 \%$$

- Jumlah Korban terlayani selama tahun 2016 adalah 45 orang
- Jumlah Korban yang butuh pelayanan selama tahun 2016 adalah 45 orang

Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa indikator kinerja persentase penanganan KDRT dan *trafficking* di Kabupaten Ciamis tahun 2016 tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Penanganan KDRT dan *trafficking* di Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 adalah sebesar 97% dan tahun 2014 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 maka capaian kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan kinerja sebesar 3 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga P2TP2A Kabupaten Ciamis telah mampu bekerja sesuai secara optimal.

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan pelayanan dan penanganan kasus KDRT dan trafficking di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah terus mengoptimalkan lembaga P2TP2A dan senantiasa berupaya menekan angka kasus KDRT terhadap perempuan dan anak dengan cara sosialisasi terhadap lini lapangan dan remaja di tingkat sekolah ataupun di luar sekolah sehingga terjadi penurunan kasus yang pada akhirnya juga berdampak pada penanganan KDRT dan *trafficking* yang lebih optimal.

Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya wawasan dan kepedulian masyarakat untuk melaporkan setiap kasus KDRT dan trafficking ke Lembaga P2TP2 atau pihak yang berwajib. Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan mengoptimalkan lembaga dan petugas P2TP2A untuk senantiasa jemput bola setiap ada informasi tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kasus *trafficking* di Kabupaten Ciamis.

Untuk mencapai indikator tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan realisasi dana sebesar Rp. 280.454.700,- atau 97,40 % dari total anggaran Rp. 287.943.900,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 91,67%.

Sasaran 14 : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai dan wajar.



Penurunan PMKS adalah suatu kondisi dimana berkurangnya jumlah PMKS atau terintervensinya PMKS melalui kegiatan penanganan dan pemberian bantuan sosial.

Contoh penanganan yaitu orang terlantar diperjalanan, pelatihan anak terlantar, penanganan gelandangan dan pengemis, penanganan eks napi, penanganan eks tuna sosial dan sebagainya. Sedangkan contoh pemberian bantuan misalnya Rutilahu, PKH, Kube Perkotaan dan Pedesaan, Sarana Lingkungan Air bersih, UEP dan sebagainya.

Pengukuran terhadap capaian sasaran Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui indikator Penurunan jumlah PMKS. Indikator penurunan jumlah PMKS diukur berdasarkan jumlah PMKS yang tertangani. Pada tahun 2016, berdasarkan hasil pendataan PMKS dan PSKS, jumlah PMKS di Kabupaten Ciamis tercatat sebanyak 134.520 orang. Sedangkan jumlah PMKS yang tertangani adalah sebanyak 36.061 orang.

Hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya PMKS

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penurunan jumlah PMKS	Orang (%)	23.014 (16,29)	102,19	15.866 (11,22)	105,66	15.020	36.061 (26,81)	240,09

Berdasarkan tabel pengukuran realisasi dan capaian sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa capaian kinerja sasaran menurunnya PMKS tahun 2016 yang diukur dari perbandingan antara target dan realisasi indikator penurunan jumlah PMKS dengan target sebesar 15.020 orang dan realisasi sebesar 36.061 orang, menunjukkan capaian kinerja sebesar 240,09 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 (240,09%) lebih tinggi dan mengalami peningkatan sebesar 134,43 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (105,66%), serta meningkat sebesar 137,90 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 (102,19%).

Realisasi kinerja (capaian nyata) jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2016 (36.061 orang) mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian nyata tahun 2015 (15.866 orang). Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penanganan PMKS ini antara lain yaitu :

- (1) Terjadinya musibah banjir di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar sebanyak 5.699 KK (17,097 orang/jiwa) menambah jumlah penanganan PMKS dari target 1200 KK menjadi 6,622 KK.
- (2) Meningkatnya jumlah PMKS yang tertangani dikarenakan adanya peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan dari semula sebanyak 12,093 RTSM/KSM. Setelah dilakukan validasi dan verifikasi ulang pada akhir Desember 2016 oleh kementerian Sosial RI, bertambah

sebanyak 15,706 KSM sehingga pada pencairan tahap IV Bulan Desember menjadi 27,799 KPM (76.145 orang/jiwa) dengan total anggaran dari pencairan tahap I sampai dengan tahap IV sebesar Rp. 26.789.541.815,-.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya PMKS Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Penurunan Jumlah PMKS	Orang (%)	36.061 (26,81)	12.300 (9,14)	293,18

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 293,18 % melampaui dari target yang ditetapkan sebanyak 12.300 sasaran (9,14 %). Jadi dibandingkan dengan target dalam RPJMD terdapat peningkatan capaian sebesar 23.761 orang (17,67 %).

Jenis penanganan dan jumlah PMKS di Kabupaten Ciamis yang tertangani pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.33
Jumlah PMKS yang ditangani di Kabupaten Ciamis
Tahun 2014 – 2016

No	Jenis Penanganan	Jumlah (orang)		
		2014	2015	2016
1	Bantuan kepada Lanjut usia (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar/ASLUT)	100	100	100
2	Penyandang cacat (AODKB)	76	76	76
3	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	655	-	500
4	PKH	17.163	12.869	27.799
5	Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	68	309	479
6	Penanganan orang terlantar di jalan	172	223	181
7	Penanganan korban bencana alam	733	1.174	6.622
8	Pendidikan dan keterampilan terhadap anak remaja putus sekolah/anak terlantar	15	20	20
9	Pemberdayaan penyandang penyakit sosial	-	-	-

No	Jenis Penanganan	Jumlah (orang)		
		2014	2015	2016
10	Penanganan anak jalanan	-	-	-
11	Pemberian makanan/nutrisi bagi penghuni Panti/LKSA	3.493	936	255
12	Bantuan UEP PSAA	-	3	-
13	Pelatihan bagi anak terlantar	-	-	-
14	Bantuan bagi janda perintis kemerdekaan	4	5	5
15	Bantuan UEP bagi LKS Lansia	-	50	-
16	Bantuan asistensi sosial LKSA dalam keluarga	-	43	-
17	Bantuan perlindungan sosial anak terlantar luar balai	-	18	-
18	Bantuan hibah PSAA/LKSA	8	14	2
19	Bantuan hibah organisasi/KT	30	22	21
20	Bantuan sarana lingkungan perbatasan	-	4	1
21	Bantuan hibah Tagana	27	-	-
22	Bantuan Asuransi Sosial Keluarga Miskin (Askesoskin)	425	-	--
23	Penanganan melalui balai pelatihan	45	35	-
	Jumlah	11.401	23.014	36.061

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Faktor yang mendukung dalam upaya pencapaian kinerja sasaran antara lain yaitu :

- (1) Pemberian bantuan dari Pemerintah Pusat melalui berbagai program antara lain : Program PKH, Kube Perkotaan dan Pedesaan, Jaminan sosial AODK, ASLUT, Rutilahu Perkotaan dan Pedesaan, UEP, Permakanan/Nutrisi anak panti asuhan dan sebagainya.
- (2) Pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah berupa Subsidi Raskin, program Ciamis Waluya, Ciamis Walagri, Ciamis Calakan, Bantuan Sosial Rutilahu, Bantuan hibah untuk organisasi sosial/KT, Bantuan perjalanan bagi orang terlantar di perjalanan, Bantuan Sosial berupa uang kadeueueh bagi transmigran, dan Bantuan sosial korban bencana alam.

Permasalahan yang menjadi kendala dalam upaya pencapaian sasaran ini yaitu :

- (1) Masih rendahnya alokasi anggaran pendampingan untuk PKH dikarenakan adanya peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program

Keluarga Harapan dari target tahun 2016 sebanyak 12.093 RTSM/KPM meningkat menjadi 27.799 RTSM/KPM dengan total anggaran dari pencairan tahap I s/d IV sebesar Rp 26.789.541.815,- sesuai hasil validasi dan verifikasi pada akhir Desember 2016 oleh Kementerian Sosial RI.

- (2) Program Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Usaha Ekonomis Produktif (UEP) ataupun melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) khususnya untuk keluarga miskin dengan sumber dana APBD Kabupaten belum terealisasi dan masih mengandalkan bantuan Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Masih banyaknya PMKS yang belum tertangani, dari 26 permasalahan sosial yang populasinya cukup banyak adalah fakir miskin sebanyak 94.378 KK dan Keluarga Berumah Tidak Layak Huni sebanyak 21.133 KK. Sampai dengan Tahun 2016 sudah terintervensi/terrehabilitasi sebanyak 1006 KK.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu:

- (1) Pengusulan KSM baru untuk Program PKH sebanyak 15.706 KSM, peningkatan Bansos Rutilahu pada tahun 2016 sebanyak 300 KK, penambahan subsidi Raskin dari Rp. 800,- jadi Rp. 1.000,- per-kilogram.
- (2) Melakukan prioritas penanganan PMKS seperti gelandangan psikotik melalui kerjasama wilayah perbatasan, pengamen, Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Penyandang cacat, lanjut usia dan tuna sosial lainnya.

Upaya pencapaian sasaran menurunnya PMKS dilaksanakan melalui 5 (lima) program, yaitu :

- (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.
- (2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- (3) Program Pembinaan Anak Terlantar;
- (4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
- (5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

Dengan total penyerapan anggaran (realisasi) sebesar Rp. 1.234.632.424,- atau sebesar 99,17 % dari total pagu anggaran Rp. 1.244.940.000,- dengan capaian output sebesar 99,68 % dan capaian outcome sebesar 87,2 %.

Sasaran 15 : Meningkatkan Kualitas SDM Aparat

Pengukuran terhadap capaian sasaran Meningkatkan kualitas SDM aparat dilakukan melalui indikator Kapasitas aparat yang meliputi : (1) PNS berijazah S1, S2, S3; dan (2) Keikutsertaan dalam diklat, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.34
Capaian Kinerja sasaran
Meningkatnya Kualitas SDM Aparat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kapasitas aparatur:								
	a. PNS berijazah S1,S2,S3	%	53,50	100	54,71	104,57	55,54	57,41	103,37
	b. Keikutsertaan dalam diklat	orang	4.906	100	5.168	555,70	1.120	2.774	247,68
Rata-rata Capaian Kinerja		%		100		330,13			175,52

Berdasarkan hasil pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas SDM aparat tahun 2016 adalah sebesar 175,52 % atau dalam kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 (330,13 %) mengalami penurunan sebesar 154,61 % serta mengalami peningkatan 75,52 % dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014 (100 %).
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, semuanya tercapai melampaui target yang ditetapkan.

- c. Realisasi (capaian nyata) indikator PNS yang berijazah S1, S2 dan S3 pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 172 orang atau 2,7 % dari tahun 2015. Sedangkan indikator Keikutsertaan PNS dalam diklat pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 2.394 orang.
- d. Perbandingan realisasi capaian sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 179,04 % sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Aparat
Tahun 2016 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Kapasitas Aparatur				
	a. PNS berijazah S1, S2, S3	%	57,41	52	110,40
	b. Keikutsertaan dalam Diklat	orang	2.774	1.120	247,68
Rata-rata Capaian Kinerja		%			179,04

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas SDM aparat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

- (1) Program pendidikan kedinasan;
- (2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat;
- (3) Program fasilitas pindah/purna tugas PNS;
- (4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.603.589.523,- atau sebesar 98,09 % dari total pagu anggaran Rp. 7.751.793.275,- dengan capaian output sebesar 217,76 % dan capaian outcome sebesar 112,76 %.

Analisa Capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran meningkatnya kualitas SDM aparat adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Aparatur (PNS Berijazah S1, S2, S3)

Kapasitas aparatur (PNS berijazah S1, S2, S3) adalah kompetensi SDM aparatur melalui pendidikan lanjutan/formal PNS melalui tugas belajar dan ijin belajar sehingga mendapatkan ijazah, yang dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$PNS \text{ berijazah } S1, S2, S3 = \text{Capaian Tahun Lalu} + \left[\frac{(\text{Jumlah Mahasiswa TB} + \text{SK IB}) \times 100}{\text{Jumlah PNS}} \right]$$

Keterangan :

- TB : Tugas Belajar
- IB : Ijin Belajar
- Capaian Tahun lalu adalah sebesar 54,71%
- Jumlah mahasiswa Tugas Belajar sebanyak 35 orang
- Jumlah SK Ijin Belajar sebanyak 289 SK
- Jumlah PNS sebanyak 12.000 orang

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas diketahui pada tahun 2016 jumlah PNS berijazah S1, S2, S3 di Kabupaten Ciamis menunjukkan realisasi (capaian nyata) sebesar 57,41 % dari target yang ditetapkan sebesar 55,54 % dengan capaian kinerja sebesar 103,37 % dan termasuk kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi PNS berijazah S1, S2, S3 adalah sebesar 54,71% dan pada tahun 2014 sebesar 53,50%. Dengan demikian pada tahun 2016 realisasi (capaian nyata) PNS berijazah S1, S2, S3 di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan sebesar 2,7 % atau sebanyak 172 orang pegawai dibandingkan dengan tahun 2015 dan 3,91 % atau sebanyak 192 Jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas aparatur PNS yang berijazah S1, S2, S3 di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu :

- (1) Memfasilitasi ijin belajar dan tugas belajar bagi PNS di Kabupaten Ciamis;

- (2) Mengelola informasi beasiswa bagi PNS Kabupaten Ciamis dari lembaga-lembaga, sehingga PNS berijazah S1, S2, S3 dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan yaitu masih terbatasnya Lembaga pendidikan di Kabupaten Ciamis serta masih adanya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma akademik.

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut anatara lain :

- (1) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi melalui ijin belajar dan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Memberikan bantuan biaya bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.

Untuk mencapai indikator sasaran Kapasitas aparatur (PNS berijazah S1,S2,S3) dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu : (1) Program Pendidikan Kedinasan; (2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan (3) Program fasilitas pindah/purna tugas PNS dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.862.521.775,- atau sebesar 97,52 % dari total pagu anggaran Rp. 3.960.867.075,- dengan capaian output sebesar 246,83 % dan capaian outcome sebesar 101,43 %.

2. Keikutsertaan Dalam Diklat

Kapasitas aparatur (keikutsertaan dalam diklat) yaitu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kedinasan dalam bentuk diklat, bimbingan teknis dan pelatihan. Keikutsertaan aparatur di Kabupaten Ciamis dalam mengikuti diklat pada tahun 2016 mencapai 2.774 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 1.120 orang dengan capaian kinerja 247,68 %

dan termasuk kategori sangat baik.

Dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2015 realisasi aparatur yang ikut serta dalam diklat sebanyak 5.186 orang dan tahun 2014



sebanyak 4.906 orang. Dengan demikian realisasi (capaian nyata) keikutsertaan aparatur dalam diklat di Kabupaten untuk tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan banyak kegiatan diklat yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan kapasitas aparatur (keikutsertaan dalam diklat) di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu :

- Menyebarluaskan informasi diklat ke setiap OPD di lingkup Kabupaten Ciamis;
- Menyelenggarakan diklat di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain yaitu Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan diklat.

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

- Mencari informasi diklat-diklat yang dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBN untuk diikuti oleh PNS Kabupaten Ciamis;
- Menyelenggarakan diklat prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kapasitas aparatur.

Untuk mencapai indikator sasaran Kapasitas aparatur (Keikutsertaan dalam diklat) dilaksanakan melalui 3 (dua) program yaitu : (1) Program Pendidikan Kedinasan; (2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.421.319.623,- atau 98,09 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 108,82 % dan outcome sebesar 114,15 %.

Sasaran 16 : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi

Evaluasi penilaian terhadap tingkat pencapaian sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi dilakukan melalui 4 (empat) indikator kinerja, dengan rincian hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Database:									
	a. Persentase ketersediaan SOP	%			40	200	40	96,36	240,90
	b. Pengadaan arsip secara baku	%	100	100	100	108,77	100	100	100
2	Ketersediaan berbagai dokumen perencanaan		Ada	100	Ada	100	Ada	Ada	100
3. Prestasi:									
	a. Penilaian LAKIP		CC		CC	89,43	B (60,01)	CC (54,49)	90,81

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	b. Predikat penilaian LPPD		Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
	c. Opini BPK		WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP ^{*)}	100
4	Presentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	%	36,50		73,02	162,54	73,01	93,76	128,42
Rata-rata Capaian Kinerja						122,96			122,88

Keterangan : *) Asumsi akhir sementara

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi tahun 2016 adalah sebesar 122,88 %, dan termasuk dalam kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator menunjukkan sebanyak 2 (dua) indikator tercapai melampaui target, 4 (empat) indikator tercapai sesuai target, dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target.
- Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 122,88% sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 122,96 % atau mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 0,08 %.

Sedangkan perbandingan realisasi pencapaian sasaran sampai dengan Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37
Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2016
Dibandingkan Dengan Rencana Yang Tercantum Dalam RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Database:				
	a. Persentase ketersediaan SOP	%	96,36	40	240,90
	b. Pengadaan arsip secara baku	%	100	100	100
2	Ketersediaan berbagai dokumen perencanaan		Ada	Ada	100
3	Prestasi:				
	a. Penilaian LAKIP		CC	B	90,81
	b. Predikat penilaian LPPD		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
	c. Opini BPK		WTP	WTP	100
4	Persentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	%	N/A	N/A	-
Rata-rata Capaian Kinerja					121,95

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 121,95 %.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi dilaksanakan melalui 30 (tiga puluh) program, yaitu :

- (1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
- (2) Program Pengembangan data/informasi;
- (3) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- (4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
- (5) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- (6) Program perencanaan pembangunan daerah;
- (7) Program perencanaan pembangunan ekonomi;
- (8) Program perencanaan sosial budaya;
- (9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
- (10) Program dan Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Perekonomian;

- (11) Program Fasilitas Koordinasi Pembangunan Daerah;
- (12) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ WKDH;
- (13) Program Fasilitas Kegiatan Keprotokolan;
- (14) Program Penataan Daerah Otonom;
- (15) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- (16) Program Pelayanan Fasilitas KDH/WKDH;
- (17) Program Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa;
- (18) Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
- (19) Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan keuangan desa;
- (20) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- (21) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- (22) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- (23) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- (24) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- (25) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan;
- (26) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- (27) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- (28) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (29) Program peningkatan disiplin aparat;
- (30) Program peningkatan sarana dan prasarana aparat.

Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi sebesar Rp 189.901.655.479,- atau sebesar 96,47 % dari total pagu anggaran Rp 196.853.731.812,- dengan capaian output sebesar 113,18 % dan capaian outcome sebesar 112,32 %.

Analisa penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Database :

a. Persentase Ketersediaan SOP

SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SOP dijadikan sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Dengan adanya penerapan SOP ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seseorang aparatur pemerintah atau pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hal tersebut, maka ketersediaan SOP sangat menunjang terhadap upaya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Ciamis. Dalam rangka mengukur ketersediaan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka digunakan indikator kinerja persentase ketersediaan SOP yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Persentase Ketersediaan SOP} = \frac{\text{Jumlah Realisasi SOP SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap keberadaan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat 53 SKPD yang sudah menetapkan SOP. Data ketersediaan SOP pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.38
Data Ketersediaan SOP di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ciamis Tahun 2016

No	Nama SKPD	Jumlah (buah SOP)
1	Sekretariat Daerah	1
2	Sekretariat DPRD	1
3	Inspektorat	3
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18
5	Dinas Kesehatan	15
6	Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM	3
7	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	8
8	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	1
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5
10	Badan KB dan PP	5
11	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	2
12	BP4K dan Ketahanan Pangan	15
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2
15	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	1
16	Kantor Perpustakaan Umum & Kearsipan Daerah	2
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	3
18	Satuan Polisi Pamong Praja	8
19	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2
22	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22
23	Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat	1
24	BPBD	4
25	Kesbangpol	2
26	RSUD	12
27	Kecamatan Ciamis	12
28	Kecamatan Cikoneng	12
29	Kecamatan Cijeungjing	12
30	Kecamatan Sadananya	12
31	Kecamatan Cidolog	12
32	Kecamatan Cimaragas	12
33	Kecamatan Baregbeg	12
34	Kecamatan Sindangkasih	12

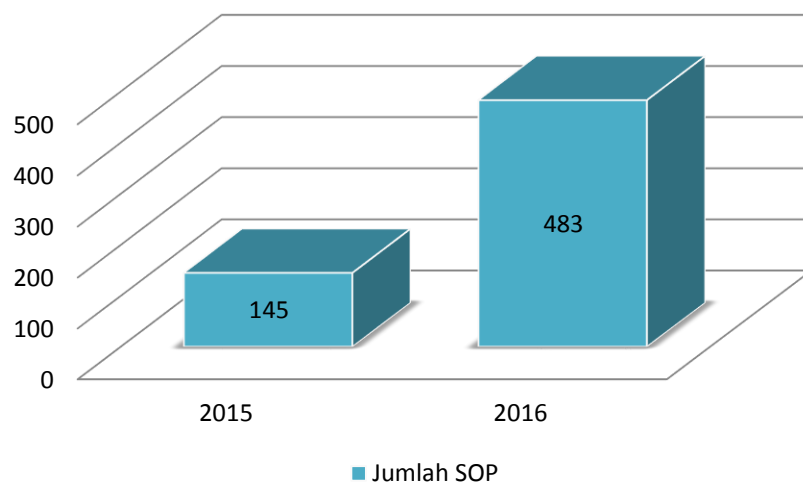
No	Nama SKPD	Jumlah (buah SOP)
35	Kecamatan Cihaubeuti	12
36	Kecamatan Panumbangan	12
37	Kecamatan Panjalu	12
38	Kecamatan Sukamantri	12
39	Kecamatan Lumbung	12
40	Kecamatan Kawali	16
41	Kecamatan Panawangan	12
42	Kecamatan Cipaku	12
43	Kecamatan Ciamis	12
44	Kecamatan Rajadesa	12
45	Kecamatan Rancah	12
46	Kecamatan Tambaksari	12
47	Kecamatan Cisaga	12
48	Kecamatan Sukadana	12
49	Kecamatan Banjarsari	12
50	Kecamatan Lakbok	12
51	Kecamatan Purwadadi	12
52	Kecamatan Pamarican	12
	JUMLAH	483

Jumlah SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, yakni sebanyak 55 unit terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas daerah sebanyak 13 unit, Lembaga Teknis Daerah sebanyak 9 unit, Kecamatan sebanyak 26 unit, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain sebanyak 3 unit.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap jumlah SOP SKPD dan jumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka diketahui persentase ketersediaan SOP tahun 2016 sebesar 96,36% (53 SKPD), dengan capaian kinerja sebesar 240,9%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 capaian kinerja persentase ketersediaan SOP adalah sebesar 200 % (22 SKPD). Hal ini menunjukkan bahwa capaian

kinerja persentase ketersediaan SOP di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan. Data perkembangan jumlah SOP lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

Grafik 3.29
Perkembangan Jumlah SOP Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun 2015-2016



Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kesadaran para aparatur pemerintah mengenai pentingnya penerapan SOP pada SKPD masing-masing. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target persentase ketersediaan SOP antara lain melalui sosialisasi tentang SOP dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan monitoring dan evaluasi SOP sebagai bagian dari kegiatan perumusan, penyusunan dan evaluasi kebijakan ketatalaksanaan.

Untuk mencapai indikator sasaran database (persentase ketersediaan SOP) dilaksanakan melalui program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp

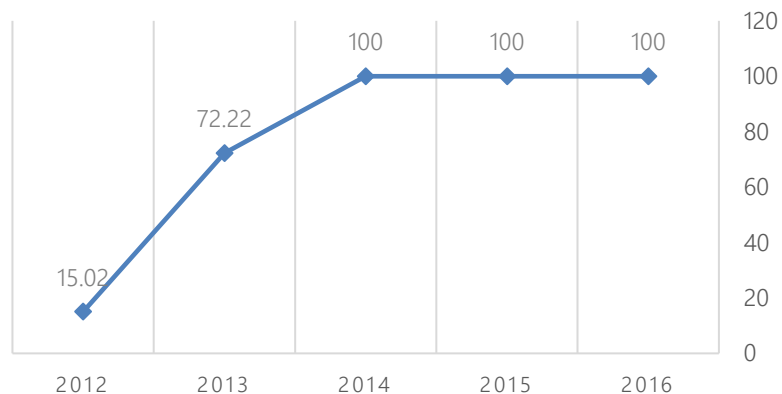
1.233.999.450,- atau 99,97 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100,00 % dan outcome sebesar 100,00 %.

b. Pengadaan Arsip Secara Baku

Pengadaan Arsip Secara Baku adalah adalah tata pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan. Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa capaian indikator database pengadaan arsip secara baku di Kabupaten Ciamis tahun 2016 mencapai sebesar 100% dari target yang direncanakan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 capaian kinerja pengadaan arsip secara baku adalah sebesar 108,77% dan tahun 2014 sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja pengadaan arsip secara baku di Kabupaten Ciamis tiap tahunnya senantiasa mengalami peningkatan dan penurunan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mencapai atau meningkatkan database (pengadaan arsip secara baku) di Kabupaten Ciamis, adalah dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai tata kelola kearsipan ke setiap SKPD, kecamatan dan kelurahan, sehingga database (pengadaan arsip secara baku) dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kendala atau hambatan yang dihadapi yaitu ada beberapa SKPD, kecamatan dan kelurahan yang belum menerapkan tata kelola kearsipan secara baku. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai tata kelola kearsipan ke setiap SKPD, kecamatan dan kelurahan harus tetap dilakukan pembinaan secara kontinyu. Perkembangan capaian pengadaan arsip secara baku di Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.30
Capaian Pengadaan Arsip Secara Baku
Di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016



Untuk mencapai indikator sasaran Database (Pengadaan arsip secara baku) dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 186.724.600,- dengan capaian output sebesar 100,00 % dan outcome sebesar 100,00 %.

2. Ketersediaan Berbagai Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan adalah suatu dokumen yang dihasilkan melalui suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran meningkatnya efektivitas dan efisiensi birokrasi adalah ketersediaan berbagai dokumen perencanaan. Yang dimaksud dengan ketersediaan dokumen perencanaan dalam indikator sasaran ini yaitu dokumen perencanaan daerah Kabupaten Ciamis yang telah disusun pada tahun 2016. Dalam RPJMD, tercantum ada dokumen perencanaan yang harus disusun dalam rangka perencanaan pembangunan daerah tahunan. Pada tahun 2016 yang merupakan tahun kedua RPJMD tahun 2014-2019, telah dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan

tahunan sehingga terdapat dokumen yang disusun pada tahun anggaran 2016 untuk perencanaan tahun 2017. Dokumen perencanaan yang dimaksud ditetapkan pada tahun 2016 adalah RKPD. RKPD yang disusun pada Tahun Anggaran 2016 terdiri atas 3 dokumen, yaitu:

- a. RKPD Tahun 2017, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017, yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2016.
- b. Perubahan RKPD Tahun 2016, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016, yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2016.
- c. Draft Rancangan Awal RKPD Tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka pencapaian indikator ketersediaan berbagai dokumen perencanaan menunjukkan nilai capaian kinerja sebesar 100 %. Upaya pencapaian sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program perencanaan pembangunan daerah dengan beberapa kegiatan yaitu :

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- (2) Monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- (3) Sinergitas perencanaan pembangunan kabupaten ciamis;
- (4) Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana;
- (5) Forum data dan analisis perencanaan pembangunan daerah;
- (6) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- (7) Koordinasi dan fasilitasi bidang libang dan statistik;
- (8) Monitoring MUSRENBANG Kecamatan;
- (9) Penyusunan perubahan RPJMD;
- (10) Koordinasi penyusunan LKPJ Tahun 2015, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016;
- (11) Sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2016.

Untuk mencapai indikator ketersediaan berbagai dokumen perencanaan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yaitu : Program pengembangan data/informasi; Program perencanaan pembangunan daerah; Program perencanaan pembangunan ekonomi; Program perencanaan sosial budaya; Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.507.805.084,- atau 99,64 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

3. Prestasi :

a. Penilaian LKIP

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan indikator prestasi Penilaian LKIP adalah penilaian atas implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPANRB.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai angka sebesar 54,49 atau kategori CC (Cukup). Sedangkan untuk evaluasi dan penilaian LKIP tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai angka sebesar 53,66 atau kategori

CC (Cukup). Walaupun dalam kategori CC (Cukup) akan tetapi secara nilai terdapat peningkatan realisasi nyata sebesar 0,83.

Untuk mencapai indikator sasaran penilaian LAKIP dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah melalui kegiatan Penyusunan LKIP dengan realisasi anggaran Rp. 150.938.700,- atau 100% dari pagu anggaran yang disediakan. (2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 117.385.000 atau 100 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %

b. Penilaian LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota adalah Laporan Wajib Kepala Daerah kabupaten/kota yang disusun setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun metode penyusunan LPPD Tahun 2015 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat sedangkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Capaian kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan atau hasil EKPPD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap LPPD Kabupaten Ciamis Tahun 2015 memperoleh skor 3,0922 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi (ST). Tercapainya sasaran predikat penilaian terhadap LPPD dimaksud merupakan sebuah gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan lancar serta kerjasama dan koordinasi antar susunan pemerintahan di Kabupaten Ciamis telah terjalin dengan baik. Selain itu dukungan, kebersamaan dan kekompakan seluruh SKPD dalam pengumpulan dan kelengkapan data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dapat difasilitasi dan tersedia dengan lengkap sesuai capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai indikator sasaran Predikat penilaian LPPD dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu : Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/WKDH; Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan; Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; dan Program Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.908.376.253,- atau 90,81 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 96,83 % dan outcome sebesar 95,52 %.

c. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ciamis tahun 2016, belum mendapat penilaian/opini dari BPK, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan atas LKPD tahun 2016. Sedangkan pada

LKPD tahun 2015 dan LKPD tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan opini WTP. WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pada tahun 2016, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis belum mendapat opini BPK karena masih dalam proses audit BPK RI, sedangkan tahun 2015 mendapat Opini WTP. Faktor yang mempengaruhi pencapaian opini WTP adalah pengelolaan keuangan daerahnya semakin akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dengan kata lain, semua pencatatan keuangan daerahnya dilakukan secara wajar, termasuk didalamnya penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah/aset tetap. Laporan keuangan itu bisa menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, telah dilaksanakan kegiatan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan pendataan/inventarisasi barang-barang kekayaan daerah pagu anggaran sebesar Rp. 891.460.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 869.916.800,- dan capaian output sebesar 97,58%.

Hambatan/masalah yang ditemui adalah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jumlah aset tetap yang dimiliki Kabupaten Ciamis sangatlah banyak dan tersebar di setiap unit kerja. Penatausahaan barang milik daerah sangatlah kompleks karena menyangkut pengelolaan barang daerah mulai dari pendataan sampai dengan mutasi, penyusutan, dan penghapusan aset tetap. Dalam penatausahaan dan pelaporan aset tetap ini disadari masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi dan dilengkapi yang diakibatkan karena masih terdapatnya pengurus barang

yang kurang memahami penatausahaan aset tetap yang benar dan komprehensif.

Strategi dan upaya pemecahan masalah terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum optimal, Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap dan segera menertibkan penatausahaan aset tetap pada masing-masing SKPD sesuai tanggungjawab setiap SKPD dengan melakukan inventarisasi, penilaian, dan kodifikasi aset tetap yang melibatkan seluruh unit kerja dan pengurus barang. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan rekonsiliasi barang daerah terhadap seluruh SKPD setiap bulan dan pengembangan serta pendampingan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA-BMD) dengan dilaksanakannya pelatihan penatausahaan aset tetap terhadap para pengurus barang seluruh SKPD.

Untuk mencapai indikator sasaran Opini BPK dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program yaitu : (1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; (2) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (3) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan; (4) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; (5) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; (6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; (7) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; (8) Program pelayanan administrasi perkantoran; dan (9) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.074.746.289 atau 97,12 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100,48 % dan outcome sebesar 100,48 %.

4. Persentase Jumlah Bangunan Pemerintah Dalam Kondisi Baik

Persentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik adalah perbandingan antara bangunan/gedung SKPD kondisi baik dengan jumlah seluruh gedung SKPD di Kabupaten Ciamis dikali 100 %. Jumlah gedung SKPD kondisi baik adalah sebanyak 481 gedung, sedangkan jumlah gedung SKPD total sebanyak 513 gedung.

Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 persentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis sebesar 93,76 % dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 93,76 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi persentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik adalah sebanyak 46 gedung atau sebesar 73,02% dan tahun 2014 sebanyak 23 gedung atau sebesar 36,50 %. Dengan demikian realisasi (capaian nyata) jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah dengan membangun/merehabilitasi gedung pemerintah secara berkelanjutan sehingga jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain anggaran yang terbatas. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu setiap tahunnya direncanakan dan dianggarkan untuk membangun/ merehabilitasi gedung pemerintah yang ada.

Untuk mencapai indikator persentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik dilaksanakan melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 83.114.879.471,- atau 96,22 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 98,92 % dan outcome sebesar 98,41 %.

Sasaran 17 : Meningkatnya Transparansi



Transparansi (keterbukaan) adalah merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, yaitu informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Berkaitan dengan hal di atas untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Transparansi diperlukan adanya sarana informasi, salah satunya yaitu berupa

Website. Oleh karena itu dalam mengukur capaian kinerja sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kepemilikan web pemerintah.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Transparansi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Transparansi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kepemilikan website pemerintah	Unit	1	100	1	100	1	1	100

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja sasaran meningkatnya transparansi tahun 2016 yang diukur dari perbandingan antara target dan realisasi indikator kepemilikan web pemerintah dengan target sebanyak 1 (satu) buah dan realisasi sebanyak 1 (satu) buah, menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Transparansi Tahun 2016 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Kepemilikan Website Pemerintah	Unit	1	1	100

Website Pemerintah Daerah merupakan sarana informasi yang sangat penting pada era keterbukaan informasi publik pada saat ini. Melalui website yang dimiliki, Pemerintah Daerah dapat menginformasikan kepada publik/masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga publik/masyarakat dapat mengetahui segala informasi dan perkembangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis. Selain website Pemerintah Daerah, beberapa SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis juga memiliki website tersendiri, sehingga informasi yang berkaitan dengan program, kegiatan, tugas dan fungsi SKPD dapat diketahui oleh masyarakat melalui website ini.

Domain website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu www.ciamiskab.go.id. Sedangkan Website SKPD sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan subdomain dari Website Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dalam Website SKPD menyediakan berita, profil SKPD, informasi Pembangunan dan lain-lain.

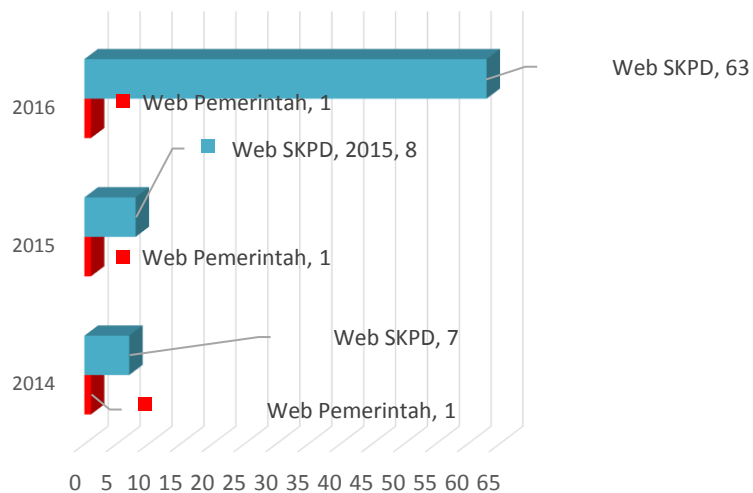
Pada tahun 2016 seluruh SKPD di Kabupaten Ciamis sudah memiliki website yaitu sebanyak 63 (Enampuluh tiga) SKPD dari yang ditargetkan sebanyak 5 (lima) SKPD, Pembuatan/kepemilikan website oleh setiap SKPD merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan transparansi atas berbagai informasi kepada masyarakat serta sebagai salah satu program Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka menuju Smart City . Website SKPD dimaksud adalah:

1. <https://setda.ciamiskab.go.id>
2. <https://setwan.ciamiskab.go.id>
3. <https://inspektorat.ciamiskab.go.id>
4. <https://disdikbud.ciamiskab.go.id>
5. <https://dinkes.ciamiskab.go.id>
6. <https://dinsosnakertrans.ciamiskab.go.id>
7. <https://disdukcapil.ciamiskab.go.id>
8. <https://disparek.ciamiskab.go.id>
9. <https://dishubkominfo.ciamiskab.go.id>
10. <https://dbmsdaesdm.ciamiskab.go.id>
11. <https://dckktr.ciamiskab.go.id>

12. <https://diskoperindag.ciamiskab.go.id>
13. <https://distantp.ciamiskab.go.id>
14. <https://disnakan.ciamiskab.go.id>
15. <https://dishutbun1.ciamiskab.go.id>
16. <https://dppkad.ciamiskab.go.id>
17. <https://bappeda.ciamiskab.go.id>
18. <https://bp4kkp.ciamiskab.go.id>
19. <https://bkbpp.ciamiskab.go.id>
20. <https://bpmpd.ciamiskab.go.id>
21. <https://bkdd.ciamiskab.go.id>
22. <https://bplh.ciamiskab.go.id>
23. <https://satpolpp.ciamiskab.go.id>
24. <https://bpptpm.ciamiskab.go.id>
25. <https://bpbd.ciamiskab.go.id>
26. <https://kesbangpol.ciamiskab.go.id>
27. <https://perpusipda.ciamiskab.go.id>
28. <https://rsud.ciamiskab.go.id>
29. <https://korpri.ciamiskab.go.id>
30. <https://kecamatan-ciamis.ciamiskab.go.id>
31. <https://kecamatan-cikoneng.ciamiskab.go.id>
32. <https://kecamatan-sindangkasih.ciamiskab.go.id>
33. <https://kecamatan-cihaubeuti.ciamiskab.go.id>
34. <https://kecamatan-panumbangan.ciamiskab.go.id>
35. <https://kecamatan-sukamantri.ciamiskab.go.id>
36. <https://kecamatan-panjalu.ciamiskab.go.id>
37. <https://kecamatan-lumbung.ciamiskab.go.id>
38. <https://kecamatan-kawali.ciamiskab.go.id>
39. <https://kecamatan-panawangan.ciamiskab.go.id>
40. <https://kecamatan-rajadesa.ciamiskab.go.id>
41. <https://kecamatan-jatinagara.ciamiskab.go.id>
42. <https://kecamatan-cipaku.ciamiskab.go.id>
43. <https://kecamatan-baregbeg.ciamiskab.go.id>
44. <https://kecamatan-sadananya.ciamiskab.go.id>
45. <https://kecamatan-cijeungjing.ciamiskab.go.id>
46. <https://kecamatan-sukadana.ciamiskab.go.id>
47. <https://kecamatan-cisaga.ciamiskab.go.id>
48. <https://kecamatan-cimaragas.ciamiskab.go.id>
49. <https://kecamatan-cidolog.ciamiskab.go.id>
50. <https://kecamatan-rancah.ciamiskab.go.id>
51. <https://kecamatan-tambaksari.ciamiskab.go.id>
52. <https://kecamatan-pamarican.ciamiskab.go.id>
53. <https://kecamatan-lakbok.ciamiskab.go.id>
54. <https://kecamatan-purwadadi.ciamiskab.go.id>

55. <https://kecamatan-banjarsari.ciamiskab.go.id>
56. <https://kecamatan-banjaranyar.ciamiskab.go.id>
57. <https://kelurahan-ciamis.ciamiskab.go.id>
58. <https://kelurahan-kertasari.ciamiskab.go.id>
59. <https://kelurahan-cigembor.ciamiskab.go.id>
60. <https://kelurahan-benteng.ciamiskab.go.id>
61. <https://kelurahan-linggasari.ciamiskab.go.id>
62. <https://kelurahan-sindangrasa.ciamiskab.go.id>
63. <https://kelurahan-maleber.ciamiskab.go.id>

Grafik 3.31
Kepemilikan Website Kabupaten dan Website SKPD
Di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016



Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi melalui website pemerintah di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah meningkatkan operasional website secara optimal dengan cara meningkatkan fasilitas *Hardware, Software, Brainware, updating data content* serta *maintenance* sehingga website pemerintah pelayanannya dapat maksimal.

Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain kurangnya sarana dan prasarana Website serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai tentang Teknologi Informasi. Adapun strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola website melalui bimbingan teknis, studi banding ke daerah lain yang

telah menerapkan *e-government* serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang website.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya transparansi dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu :

- (1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- (2) Program kerjasama informasi dan media massa.

Penyerapan realisasi anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 891.363.373,- atau sebesar 99,38 % dari total pagu anggaran Rp. 896.934.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 18 : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat

Pelayanan publik/masyarakat adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan



publik. Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik / masyarakat telah mampu memenuhi harapan masyarakat maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu

memperbaiki dan meningkatkan pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat pada saat ini.

Salah satu bentuk upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik/masyarakat adalah melakukan survei kepuasan masyarakat,

sehingga diketahui tingkat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan masyarakat di Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat pada beberapa SKPD/Unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik langsung ke masyarakat. Pada tahun 2016 jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan langsung terhadap masyarakat adalah sebanyak 76 SKPD/Unit kerja. Target jumlah SKPD/Unit Kerja yang disurvei adalah sebanyak 43 % atau 33 SKPD/Unit kerja. Pada tahun 2016 jumlah SKPD/Unit kerja yang di survei adalah sebanyak 64 SKPD/Unit kerja atau 84,21 % dari jumlah seluruh SKPD/Unit kerja. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 195,84 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks kepuasan masyarakat (Jumlah SKPD yang Melaksanakan Survey)	%	3,13	99,37	47,27	109,93	43	84,21	195,84

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan masyarakat tahun 2016 yang diukur dari indikator indeks kepuasan masyarakat menunjukkan realisasi sebesar 84,21 % dan capaian kinerja sebesar 195,84 % dengan kategori sangat baik. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 lebih tinggi dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (109,93 %) dan tahun 2014 (99,37 %).

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 147,74 %, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,21	57	147,74

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan masyarakat dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.233.999.450,- atau sebesar 99,97 % dari total pagu anggaran Rp. 1.234.300.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Nilai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei IKM yang dilaksanakan, khususnya seluruh kecamatan dan puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.43
 Nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada SKPD/Unit Kerja Kecamatan
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016

No	Nama SKPD Dan Unit Kerja	IKM	Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Kecamatan Banjarsari	8.29	92.11	A	Sangat Puas
2	Kecamatan Lakkok	7.65	85.11	A	Sangat Puas
3	Kecamatan Pamarican	6.10	67.89	A	Sangat Puas
4	Kecamatan Cidolog	6.92	76.89	A	Sangat Puas
5	Kecamatan Cimaragas	7.36	81.78	A	Sangat Puas
6	Kecamatan Cijeungjing	7.19	79.78	A	Sangat Puas
7	Kecamatan Cisaga	6.96	77.33	A	Sangat Puas
8	Kecamatan Tambaksari	7.79	86.44	A	Sangat Puas
9	Kecamatan Rancah	7.05	78.22	A	Sangat Puas
10	Kecamatan Rajadesa	7.98	88.78	A	Sangat Puas
11	Kecamatan Sukadana	8.38	93	A	Sangat Puas
12	Kecamatan Ciamis	7.11	79	A	Sangat Puas
13	Kecamatan Cikoneng	8.54	94.89	A	Sangat Puas
14	Kecamatan Cihaurbeuti	7.92	88	A	Sangat Puas
15	Kecamatan Sadananya	8.03	89.22	A	Sangat Puas
16	Kecamatan Cipaku	7.68	85.33	A	Sangat Puas
17	Kecamatan Jatinagara	7.54	83.78	A	Sangat Puas
18	Kecamatan Panawangan	7.23	80.33	A	Sangat Puas
19	Kecamatan Kawali	8.33	92.56	A	Sangat Puas
20	Kecamatan Panjalu	8.49	94.33	A	Sangat Puas
21	Kecamatan Panumbangan	8.80	97.78	A	Sangat Puas
22	Kecamatan Sindangkasih	7.30	81.11	A	Sangat Puas
23	Kecamatan Baregbeg	7.01	78	A	Sangat Puas
24	Kecamatan Lumbung	8.09	90	A	Sangat Puas
25	Kecamatan Purwadadi	8.05	83.78	A	Sangat Puas
26	Kecamatan Sukamantri	8.04	89.33	A	Sangat Puas
27	Kecamatan Banjaranyar	7.13	79.22	A	Sangat Puas
JUMLAH		7.65	84.96	A	Sangat Puas

Sumber : Bagian Organisasi Setda kabupaten Ciamis Tahun 2016

Tabel 3.44
 Nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada SKPD/Unit Kerja Puskesmas
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016

No	Nama SKPD Dan Unit Kerja	IKM	Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Puskesmas Banjarsari	7.42	82.44	A	Sangat Puas
2	Puskesmas Baregbeg	7.55	84	A	Sangat Puas
3	Puskesmas Ciamis	8.29	91.89	A	Sangat Puas
4	Puskesmas Cidolog	7.37	81.89	A	Sangat Puas
5	Puskesmas Cieurih	6.91	76.89	A	Sangat Puas
6	Puskesmas Cigayam	7.62	84.44	A	Sangat Puas
7	Puskesmas Cihaubeuti	7.51	83.44	A	Sangat Puas
8	Puskesmas Cijeungjing	8.35	92.78	A	Sangat Puas
9	Puskesmas Cikoneng	7.94	88.22	A	Sangat Puas
10	Puskesmas Cimaragas	7.21	80.22	A	Sangat Puas
11	Puskesmas Cipaku	7.77	86.33	A	Sangat Puas
12	Puskesmas Cisaga	8.55	95	A	Sangat Puas
13	Puskesmas Ciulu	7.28	81	A	Sangat Puas
14	Puskesmas Gardujaya	7.64	85.11	A	Sangat Puas
15	Puskesmas Handapherang	7.22	80.22	A	Sangat Puas
16	Puskesmas Imbanagara	7.15	85.33	A	Sangat Puas
17	Puskesmas Jatinagara	7.56	84	A	Sangat Puas
18	Puskesmas Kawali	7.53	83.89	A	Sangat Puas
19	Puskesmas Kawalimukti	7.77	86.33	A	Sangat Puas
20	Puskesmas Kertahayu	7.63	84.78	A	Sangat Puas
21	Puskesmas Lakbok	8.06	89.44	A	Sangat Puas
22	Puskesmas Lumbung	8.14	90.44	A	Sangat Puas
23	Puskesmas Pamarican	7.97	88.56	A	Sangat Puas
24	Puskesmas Panawangan	7.80	86.67	A	Sangat Puas
25	Puskesmas Panjalu	7.54	83.67	A	Sangat Puas
26	Puskesmas Panumbangan	7.52	83.56	A	Sangat Puas
27	Puskesmas Payungsari	7.49	83.22	A	Sangat Puas
28	Puskesmas Purwadadi	7.74	86	A	Sangat Puas
29	Puskesmas Rajadesa	8.05	89.44	A	Sangat Puas
30	Puskesmas Rancah	7.76	86.22	A	Sangat Puas
31	Puskesmas Sadananya	7.53	83.67	A	Sangat Puas
32	Puskesmas Sidaharja	7.15	79.44	A	Sangat Puas
33	Puskesmas Sindangkasih	7.89	87.67	A	Sangat Puas
34	Puskesmas Sukadana	7.83	86.89	A	Sangat Puas
35	Puskesmas Sukamantri	7.51	83.44	A	Sangat Puas
36	Puskesmas Sukamulya	7.76	86.22	A	Sangat Puas
37	Puskesmas Tambaksari	7.94	88.22	A	Sangat Puas
JUMLAH		7.68	85.28	A	Sangat Puas

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IKM adalah banyaknya unsur-unsur pelayanan yang memperoleh skor diatas nilai rata-rata. Hal ini turut dipengaruhi dengan adanya langkah dan upaya nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang mempunyai nilai rendah pada tahun-tahun sebelumnya.

Hambatan/masalah yang ditemui adalah masih terdapatnya unsur-unsur pelayanan yang mempunyai skor rendah. Strategi/upaya pemecahan masalah dimaksud dilakukan melalui upaya nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang mempunyai nilai rendah yaitu dengan mengintervensi beberapa unsur-unsur pelayanan yang dapat dilakukan secara swakelola seperti pembakuan sistem dan tahapan pelayanan melalui penetapan ukuran/tahapan/standar yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan seperti standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) dan diumumkan/disosialisasikan secara jelas, penyediaan ruang tunggu yang memadai dan representatif ditinjau dari aspek ukuran (ketersediaan ruangan) maupun aspek K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) dan mengupayakan terdapat prasarana penunjang lain di ruang tunggu seperti ketersediaan kursi, nomor antrian dan sarana informasi seperti papan informasi/televisi/surat kabar/majalah/pamflet/brosur dan sejenisnya sepanjang dimungkinkan.

Sasaran 19 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan serta

kewenangan melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Oleh karena itulah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Sesuai dengan RPJMD 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, pengukuran terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan diukur melalui indikator persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kepemilikan KTP	%	80,78	85.03	80,43	84,66	100	85,55	85,55

Persentase kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP sampai dengan tahun 2016 dibagi jumlah penduduk usia wajib KTP pada tahun 2016, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Kepemilikan KTP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP s.d Th. 2016}}{\text{Jumlah Penduduk usia wajib KTP Th. 2016}} \times 100 \%$$

Jumlah penduduk yang memiliki KTP sampai dengan Tahun 2016 adalah sebanyak 905.453 orang, sedangkan jumlah penduduk usia wajib KTP adalah sebanyak 1.058.340 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang belum memiliki KTP pada tahun 2016 adalah sebanyak 152.887 orang.

Apabila dilakukan perhitungan berdasarkan data dan rumus di atas maka hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan tahun 2016 yang diukur dari indikator kepemilikan KTP

menunjukkan capaian kinerja sebesar 85,55 %, dengan kategori baik. Capaian kinerja sasaran ini diukur dari perbandingan antara target dan realisasi indikator kepemilikan KTP dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 85,55%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 (85,55 %) lebih



tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (84,66 %) dan tahun 2014 sebesar (85,03%). Meskipun capaian kinerja persentase kepemilikan KTP

cenderung mengalami penurunan, tetapi jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2016 mengalami kenaikan/peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.46

Data Kepemilikan KTP Di Kabupaten Ciamis
Tahun 2013 - 2016

Tahun	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Usia Wajib KTP (orang)	1.091.582	1.029.564	1.044.117	1.058.340
Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP (orang)	1.075.269	831.715	839.803	905.453

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 85,55 % dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.47

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Layanan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Kepemilikan KTP	%	85,55	100	85,55

Faktor penyebab yang menjadi hambatan/kendala dalam pencapaian indikator kinerja antara lain yaitu :

- (1) Perangkat pelayanan KTP-el sudah banyak yang rusak dan kurang berfungsi secara optimal;
- (2) Alokasi blanko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri tidak sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pengolahan data kependudukan belum optimal, hal ini disebabkan Desa jarang menyampaikan Laporan Lahir Mati Pindah Datang (LAMPID) secara rutin tiap bulan, sehingga memungkinkan terdapat perbedaan database kependudukan di Dinas dan data yang dimiliki oleh Desa;
- (4) Pelayanan keliling dokumen kependudukan ke Kecamatan, terutama ke Desa-Desa masih belum maksimal, hal ini antara lain disebabkan kondisi jaringan komunikasi data di tiap Kecamatan/Desa kualitasnya belum merata untuk pelayanan yang optimal.

Solusi/upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengatasi hambatan/kendala tersebut antara lain yaitu :

- (1) Mengusulkan penggantian atau penambahan perangkat pelayanan ke Kemendagri dan melakukan pengadaan melalui APBD, khususnya printer KTP-el.
- (2) Mengeluarkan Surat Keterangan Perekaman sebagai pengganti KTP-el bagi penduduk yang membutuhkan.

- (3) Melakukan pengarahan melalui Kecamatan sebagai mitra kerja pengelola SIAK terpadu untuk menyampaikan ke Desa-Desa mengenai pentingnya data kependudukan dan mengirimkan laporan LAMPID secara rutin.
- (4) Pelayanan dilakukan secara optimal dan menggunakan pilihan *service provider*/ penyedia jaringan sesuai kondisi di daerah.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.336.023.212,- atau sebesar 99,75% dari total pagu anggaran Rp. 1.339.353.350,- dengan capaian output sebesar 177,56 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 20 : Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sasaran ini menggambarkan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan halini perlu diawali dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sinergi dengan peraturan perundang-



undangan sederajat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan

guna meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta hak azasi manusia dalam setiap sendi kehidupan.

Pengukuran terhadap realisasi dan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Jumlah produk hukum yang dilegalkan yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dan (2) Jumlah desa sadar hukum, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.48
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah produk hukum yang dilegalkan :								
	- Peraturan Daerah	buah	21	N/A	15	150	10	19	190
	- Peraturan Bupati	buah	61	N/A	64	106,7	20	80	400
	- Keputusan Bupati	buah	793	N/A	724	91,6	600	771	128,5
2	Jumlah desa sadar hukum	desa	35	N/A	70	233,3	50	70	140
Rata-rata Capaian Kinerja		%				145,40			214,63

Keterangan : (N/A, Not Available) Capaian Kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut dan mulai ditargetkan dalam PK tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tahun 2016 adalah sebesar 214,63%, dan termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan tingkat capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur semuanya tercapai melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 172,78 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.49
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat
Tahun 2016 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah produk hukum yang dilegalkan				
	- Peraturan Daerah (Perda)	buah	19	10	190
	- Peraturan Bupati (Perbup)	buah	80	N/A	N/A
	- Keputusan Bupati	buah	771	N/A	N/A
2	Jumlah desa sadar hukum	Desa	70	45	155,55
Rata-Rata Capaian Kinerja		%			172,78

Keterangan : (N/A, Not Available) Merupakan indikator yang tidak ditargetkan dalam RPJMD tetapi ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu : (1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan (2) Program pendidikan politik masyarakat, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.854.451.677,- atau sebesar 99,46 % dari total pagu anggaran Rp. 1.864.524.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Analisa capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Produk Hukum yang Dilegalkan

Yang dimaksud dengan produk hukum daerah yang dilegalkan adalah produk hukum yang meliputi Peraturan Daerah (perda), Peraturan Bupati (perbup) dan Keputusan Bupati yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

a. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan persetujuan bersama Bupati Ciamis. Pada tahun 2016 terealisasi sebanyak 19 (sembilan belas) Perda. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 terdapat peningkatan, dimana pada tahun tersebut terealisasi sebanyak 15 (lima belas) Perda atau meningkat sebesar 4 (empat) Perda dan dibandingkan dengan tahun 2014 terealisasi 21 (dua puluh satu) Perda atau menurun sebanyak 2 (dua) Perda.

b. Peraturan Bupati (Perbup)

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati Ciamis tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2016 terrealisasi sebanyak 80 (delapan puluh) Perbup. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 terdapat peningkatan, dimana pada tahun tersebut terealisasi sebanyak 64 (enam puluh empat) Perbup atau meningkat sebanyak 16 (enam belas) Perbup dan dibandingkan dengan tahun 2014 terealisasi 61 (enam puluh satu) Perbup atau meningkat sebanyak 19 (sembilan belas) buah Perbup.

c. Keputusan Bupati

Keputusan Bupati yaitu penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. Pada tahun 2016 terealisasi sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) keputusan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 terdapat peningkatan, dimana pada tahun tersebut terealisasi sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) keputusan atau meningkat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah keputusan dan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 terealisasi sebanyak 793 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga) keputusan atau menurun sebanyak 22 (dua puluh dua) buah Keputusan Bupati.

Untuk mencapai indikator jumlah produk hukum yang dilegalkan dilaksanakan melalui program penataan peraturan perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.461.687.227,- atau sebesar 99,53 % dari total pagu anggaran Rp. 1.468.609.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

2. Jumlah Desa Sadar Hukum

Desa sadar hukum adalah desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum. Program desa sadar hukum merupakan kelanjutan dari program Kadarkum dan merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam suatu desa selain juga berfungsi sebagai tolok ukur hasil penyuluhan hukum kualitatif. Disebut desa sadar hukum karena desa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai desa sadar hukum yaitu seluruh anggota masyarakat dalam desa tersebut:

- a) Telah membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90%;
- b) Tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan undang-undang perkawinan;
- c) Tidak terdapat tindak kriminal atau tindak kriminalnya rendah.

Pada tahun 2016 dari target Perjanjian Kerja sebanyak 50 (lima puluh) desa sadar hukum terealisasi sebanyak 70 (tujuh puluh) desa dengan capaian kinerja sebesar 140%. Pada tahun 2015 jumlah desa sadar hukum adalah sebanyak 70 desa, dan pada tahun 2014 sebanyak 35 desa. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka realisasi jumlah desa sadar hukum tahun 2016 (70 desa) sama dengan realisasi tahun 2015 (70 desa), dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 (35 desa) mengalami peningkatan sebesar 200%.

Untuk mencapai indikator jumlah desa sadar hukum dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program penataan peraturan perundang-undangan; dan (2) Program pendidikan politik masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.854.451.677,- atau sebesar 99,46 % dari total pagu anggaran Rp. 1.864.524.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 21 : Terciptanya Supremasi Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) dilakukan melalui indikator cakupan penegakan Perda dan/atau Perkada.

Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah adalah jumlah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah mengikuti proses pendidikan dan pelatihan serta memiliki Skep dari Kementerian Hukum dan HAM dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan penertiban, penyidikan dan penegakan hukum atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kabupaten Ciamis.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Capaian Kinerja Sasaran
Terciptanya Supremasi Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan penegakan perda dan/atau perkada	kasus	350	100	384	104,63	360	482	133,89

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut diketahui bahwa capaian kinerja sasaran terciptanya supremasi hukum dan perlindungan HAM tahun 2016 yang diukur dari indikator cakupan penegakan perda dan/atau

perkada menunjukkan capaian nyata (realisasi) sebanyak 482 kasus dari target sebanyak 360 kasus dengan capaian kinerja sebesar 133,89 %, dalam kategori sangat baik.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, realisasi cakupan penegakan pada tahun 2015 sebanyak 384 kasus dan tahun 2014 sebanyak 350 kasus, dengan demikian capaian nyata (realisasi) dan capaian kinerja pada tahun 2016 lebih baik dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun

kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 15,47 %. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena tingginya target yang ditetapkan dalam RPJMD.



Berdasarkan hasil pengukuran ini maka perlu adanya reuiu/evaluasi kembali terhadap penetapan target RPJMD.

Tabel 3.51
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Terciptanya Supremasi Hukum dan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)
Tahun 2016 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perkada	kasus	482	3.116	15,47

Berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah selama tahun 2016 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dapat melakukan penegakan, penindakan dan menyelesaikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sebanyak 482 Kasus, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.52
Data Penegakan Perda dan/atau Perkada Di Kabupaten Ciamis Tahun 2016

No	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut Penyelesaian (Kasus)		
		Tanpa Pengadilan	Pengadilan	Lainnya
1.	Perda Nomor 22 Tahun 2000 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	2	0	0
2.	Perda Nomor 20 Tahun 2000 jo Perda No. 8 Tahun tentang Ijin Gangguan (HO)	202	0	0
3.	Perda No 21 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan	133	0	0
4.	Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran	38	0	0
5.	Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	0	0
6.	Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	47	0	0
7.	Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	10	0	0
8.	Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	8	0	0
9.	Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	16	0	0
10.	Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan	2	0	0
11.	Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Reklame	14	0	0
12.	Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7	0	0
Jumlah		482	0	0

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 482 kasus dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dapat diselesaikan tanpa melalui proses sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma baru Satuan Polisi Pamong Praja yang telah meninggalkan pendekatan refresif dan lebih mengutamakan pendekatan preventif. Pada umumnya para pelanggar Perda setelah dilakukan pemanggilan dan diberikan pembinaan serta pemahaman tentang Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Ciamis mereka siap memenuhi segala kewajibannya, sehingga penyidik memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan kewajibannya dan menyerahkan bukti ijin-ijin yang telah ditempuh ke Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila selama kurun waktu tersebut tidak ada tindak lanjut dan itikad baik untuk menyelesaikan pelanggaran, proses penyidikan dilanjutkan ke pemberkasan berita acara untuk kemudian di proses ke pengadilan.

Upaya penegakan Perda dan/atau Perkada dilaksanakan dengan meningkatkan volume pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat yang terdindikasi melanggar Perda dan/atau Perkada. Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi antara lain terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan terbatasnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP sebagai lembaga yang memiliki fungsi penegakan perda dan/atau perkada telah mengajukan usulan ke BKDD Kabupaten Ciamis untuk menambah pegawai dan mengadakan pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Upaya pencapaian sasaran terciptanya supremasi hukum dan perlindungan hak azasi manusia (HAM) dilaksanakan melalui Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.218.900.000,- atau sebesar 100 % dari total pagu anggaran Rp.2.218.900.000,- dengan capaian output sebesar 94,2 % dan capaian outcome sebesar 87,77%.

Sasaran 22 : Terkendalnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pengukuran terhadap realisasi dan capaian kinerja sasaran Terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk, dan (2) Rasio Pos siskamling per desa/kelurahan, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.53

**Capaian Kinerja Sasaran
Terkendalnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk	Orang	45	95,74	45	100	45	44	97,78
2	Rasio pos siskamling per desa/kelurahan	Unit	36	100	36	100	35	37	105,71
Rata-rata Capaian Kinerja				97,87		100			101,74

Berdasarkan hasil pengukuran capaian sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,74 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator, terdapat 1 (satu) indikator menunjukkan capaian melebihi target yang direncanakan dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target yang direncanakan.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2016 (101,74 %) lebih tinggi atau meningkat sebesar 1,74 % jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 (100 %) dan meningkat sebesar 3,87 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 (97,87 %).

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 93,23 % sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.54
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk	Orang	44	45	97,78
2	Rasio pos siskamling per desa/ kelurahan	Unit	37	42	88,09
Rata-rata Capaian Kinerja		%			92,93

Upaya pencapaian sasaran terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu :

- (1) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- (2) Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.170.439.000,- atau sebesar 98,60 % dari total pagu anggaran Rp. 1.187.054.000,- dengan capaian output sebesar 95,16 % dan capaian outcome sebesar 95,16 %.

Analisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Linmas Per 10.000 Penduduk

Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk merupakan proporsi ideal anggota Linmas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis, dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Linmas}}{\text{Per 10.000 Penduduk}} = \frac{\text{Jumlah Anggota Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$$

Pada tahun 2016 jumlah anggota Linmas di Kabupaten Ciamis tercatat sebanyak 6.180 orang, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebanyak 1.398.346 orang.



Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk tahun 2016 adalah sebanyak 44 orang. sedangkan target yang

direncanakan adalah 45 orang, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 98,89 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk adalah sebesar 45 orang dan tahun 2014 sebesar 45 Orang. Dengan demikian jumlah anggota Linmas di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 berkurang/menurun sebanyak 1 (satu) orang anggota per 10.000 penduduk.

Penurunan ini disebabkan selain karena adanya penambahan jumlah penduduk juga adanya anggota Linmas yang mengundurkan diri dikarenakan faktor usia yang sudah tua maupun karena meninggal dunia.

Dalam rangka meningkatkan jumlah anggota Linmas, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kualitas anggota SatLinmas serta melakukan pembentukan dan pengangkatan anggota Linmas baru. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut diantaranya adalah berkurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melaksanakan sistem keamanan swakarsa, berkurangnya minat masyarakat menjadi anggota Linmas. Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu dengan melakukan pembinaan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 942.515.000,- atau 98,26 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 90,32 % dan outcome sebesar 90,32 %.

2. Rasio Pos Siskamling Per Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling adalah tingkat perbandingan antara jumlah pos siskamling dengan jumlah desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Ciamis, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pos Siskamling} = \frac{\text{Jumlah Pos Siskamling}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}}$$

Jumlah pos siskamling yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 9.765 buah. Jumlah desa dan kelurahan sebanyak 265 desa/kelurahan.

Berdasarkan data dan rumus di atas diketahui perhitungan indikator rasio pos siskamling di Kabupaten Ciamis tahun 2016 adalah sebanyak 37 unit per desa dan kelurahan melampaui target yang direncanakan yaitu sebanyak 35 unit, sehingga indikator ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 105,71 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2015 realisasi rasio pos siskamling adalah sebesar 36 unit. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) unit.

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan rasio pos siskamling, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan aparatur di wilayah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan sistem keamanan lingkungan. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut diantaranya adalah berkurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melaksanakan sistem keamanan swakarsa. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu dengan melakukan pembinaan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan.

Untuk mencapai indikator sasaran Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; dan (2) Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.936.659.500,- atau 99,63 % dari total anggaran Rp. 3.951.343.500,- dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Sasaran 23 : Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah bahwa yang dimaksud dengan kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau

gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 22 Tahun 2009, kerjasama daerah meliputi 2 (dua) kerjasama yaitu kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga.



Dalam rangka pengukuran capaian kinerja sasaran Mengem-bangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi dilakukan melalui 1

(satu) indikator yaitu Jumlah kerjasama, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.55

Capaian Kinerja Sasaran
Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Masyarakat Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah kerjasama	Buah	1	-	4	100	2	4	200

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 capaian kinerja sasaran mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi, yang diukur dari perbandingan antara target dan realisasi indikator jumlah kerjasama dengan target sebanyak 2 (empat) buah dan realisasi sebanyak 4

(empat) buah menunjukkan capaian kinerja sebesar 200 %, dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan antara realisasi (capaian nyata) tahun 2016 dengan tahun sebelumnya menunjukkan realisasi (capaian nyata) tahun 2016 sama dengan realisasi (capaian nyata) tahun 2015 sebanyak 4 (empat) buah kerjasama. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 bertambah sebanyak 3 (tiga) buah.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 400 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Masyarakat Dunia Usaha Dan Perguruan Tinggi Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Kerjasama	Buah	4	1	400

Target jumlah kerjasama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 maupun dalam RPJMD 2014-2019 adalah jumlah Kerjasama antar daerah. Dalam perkembangannya Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak hanya melaksanakan Kerjasama Antar Daerah saja tetapi juga Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kerjasama Antar Daerah yang meliputi 9 (sembilan) buah kerjasama, serta kerjasama dengan Pihak Ketiga sebanyak 29 (duapuluh sembilan) buah kerjasama, baik dengan Perguruan Tinggi, BUMN, Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal, Swasta dan Masyarakat/perorangan. Objek kerja sama daerah adalah

seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

Kerjasama Antar Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.57
Kerjasama Antar Daerah di Kabupaten Ciamis
Yang Dilaksanakan sampai dengan Tahun 2016

No	Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	Daerah yang Diajak Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil Kerjasama
1	No. 595/1212/2013 No. 181/20-Huk/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi SP 2 Amohola Desa Wawondengi Kec. Moramo	Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara	Transmigrasi	sampai dengan berakhirnya masa pembinaan (5 tahun)	Mendapatkan target penempatan transmigrasi untuk Kab. Konawe Selatan
2	No. 595/Nakertrans/III/2013 No. 181/21-Huk/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Ayumoligo Kec. Pulubala	Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo	Transmigrasi	sampai dengan berakhirnya masa pembinaan (5 tahun)	Mendapatkan target penempatan transmigrasi untuk Kab. Gorontalo sebanyak 5 KK
3	No. 595/DTKT/IV/2013 No. 181/5.B-Huk/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi	Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	Transmigrasi	sampai dengan berakhirnya masa pembinaan (5 tahun)	Mendapatkan target penempatan transmigrasi untuk Kab. Boalemo
4	Peraturan Bersama: No. 073/1140/Otdaksm No. 6 Tahun 2013 No. 31 A Tahun 2012 No. 07 A Tahun 2012 No. 01 Tahun 2012 No. 58 Tahun 2012	Kerjasama kawasan perbatasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi	- Bidang Sosial dan Pemerintahan - Bidang Ekonomi - Bidang Infrastruktur		Sinergitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan

No	Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	Daerah yang Diajak Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil Kerjasama
	No. 030 AB Tahun 2012 No. 3 A Tahun 2012 Keputusan Bersama No. 073/1137/Otdaksm No. 019.6/4 Tahun 2013 No. 01 Tahun 2012 No. 01 Tahun 2012 No. 134/01-Huk/2012 No. 100/221/03/2012 No. 134/Kpts.69a-Huk/2012 No. 173 A Tahun 2012	Jawa Tengah, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Ciamis, Kab. Cilacap, Kota Banjar, Kab. Brebes dan Kab. Majalengka (Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama)	dan Lingkungan Hidup		Porsenitas perbatasan anggota BKAD (Badan Kerjasama Antar Daerah)
5	Perjanjian Kerjasama : No. 181/18-Huk/2015 tentang Sinergitas Penanganan Permasalahan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Psikotik Jalanan secara Terpadu di Wilayah Perbatasan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat.	Gubernur Jabar dan Jateng, 15 Kabupaten dan 4 Kota	Penanganan permasalahan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT)	1 tahun	Tertanganinya permasalahan PGOT di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah
6	Kesepakatan Bersama : No. 073/KSD.Mou.46-Pem/III/2015	Pemkab. Tasikmalaya, Kab. Garut dan Pangandaran serta Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar	1. Implementasi kegiatan pembangunan tematik kewilayahan Jawa Barat di Wil. Priangan Timur. 2. Dukungan atas kebijakan pembangunan Jalan Tol Bandung-Pangandaran guna menunjang kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan prasarana transportasi darat yang	1 tahun	Pembangunan di wilayah Priangan Timur

No	Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	Daerah yang Diajak Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil Kerjasama
			memadai. 3. Dukungan atas kebijakan pengembangan pangkalan Udara Wiradinata Tasikmalaya sebagai Bandar Udara yang melayani penerbangan sipil dan atau komersial. 4. Dukungan atas kebijakan pengembangan bandar udara Nusawiru Pangandaran		
7	Pernyataan Bersama : No. 181/15-Huk/2015	Pemkab Pangandaran	Kepemilikan Bersama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran		Investasi dalam kepemilikan modal PD BPR hasil Konsolidasi melalui penyertaan modal
8	Kesepakatan Bersama : No. 181/15-Huk/2015	Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya	Kesepakatan bersama meliputi 1. Bidang Sosial dan pemerintahan 2. Bidang Infrastruktur 3. Bidang Ekonomi	1 tahun	• Sinergitas pembangunan di wilayah perbatasan • Terkoordinasi-kannya perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan

No	Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	Daerah yang Diajak Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil Kerjasama
9.	No. 800/1238/UMPEG-BPBD/XII/2016 No. 019.6/7688/2016 No. PKS/38/2016 No. 360/Kpts.692-Huk/2016 No. 360/74/39/2016 No. 360/PKS.11-KPBD/2016 No. 19 Tahun 2016 No. 360/02857/2016 No. 073/Kjs.23a-Huk/2016 No. 11 Tahun 2016 No.380/1420.N/Umum/2016	BPBD Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Kuningan, Ciamis, Cilacap, Brebes, Majalengka, Pangandaran dan Kota Banjar, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon serta Dinas Sosial Pemkab Cirebon	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah	5 tahun	Terselenggaranya sinergitas penanggulangan bencana secara terpadu, sistematis, cepat, tepat, akurat, terkoordinatif, berkesinambungan dan akuntabel pada tahapan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Ciamis, Tahun 2016

Memperhatikan capaian kerjasama yang telah dilakukan, baik kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain keberadaan Tim yang terhimpun dalam TKKSD senantiasa melakukan koordinasi dan melaksanakan rapat-rapat dengan SKPD teknis terkait serta konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, demikian pula SKPD yang terlibat dalam lingkup Kerjasama secara teknis, senantiasa proaktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kerjasama daerah.

Upaya pencapaian sasaran mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.750.000,- atau sebesar 99,99 % dari total pagu anggaran Rp. 82.749.123,- dengan capaian output sebesar 183,33 % dan capaian outcome sebesar 183,33 %.

Sasaran 24 : Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Kemantapan jalan kabupaten; (2) Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas; dan (3) Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum, dengan hasil pengukuran sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.58

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kemantapan jalan kabupaten	%	58,19	100	63,09	101,44	66,50	66,78	100,42
2	Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas	Ruas	1	100	4	133,33	7	7	100
3	Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum	Ruas	9	112,50	11	122,22	11	11	100
Rata-rata Capaian Kinerja				104,17		119			100,14

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi tahun 2016 adalah sebesar 100,14 %, termasuk dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur, terdapat 1 (satu) indikator tercapai melampaui target dan 2 (dua) indikator tercapai sesuai target yang direncanakan.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2016 (100,14 %) lebih rendah/mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (119 %) dan Tahun 2014 (104,17 %).

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 117,57 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana Transportasi
Tahun 2016 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Kemantapan jalan kabupaten	%	66,78	59,25	112,71
2	Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas	Ruas	7	5	140
3	Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum	Ruas	11	11	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%			117,57

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program, yaitu :

- (1) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- (2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- (3) Program Pembangunan turap/talud/brojong;
- (4) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- (5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- (6) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- (7) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas;
- (8) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- (9) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- (10) Program peningkatan pelayanan angkutan;

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 205.242.232.754,- atau sebesar 95,44 % dari total pagu anggaran Rp. 215.050.420.300,- dengan capaian output sebesar 103,39 % dan capaian outcome sebesar 100,31 %.

Analisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kemantapan Jalan Kabupaten

Kemantapan jalan kabupaten adalah perbandingan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan. Pada tahun 2016, panjang jalan Kabupaten Ciamis dalam kondisi baik adalah 566,553 km, sedangkan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 620/KPTS.588–Huk/2014 tentang Jalan Kabupaten, yang ditetapkan pada tanggal 11 Nopember 2014, adalah sepanjang 848,296 km.

Berdasarkan data dan perhitungan di atas, maka realisasi (capaian nyata) kemantapan jalan pada tahun 2016 adalah sebesar 66,78 % dari target perjanjian

kinerja sebesar 66,50 %, dengan capaian kinerja sebesar 100,42 %. Dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 59,25 %, maka capaian kinerja menunjukkan angka sebesar 112,71%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka capaian indikator kemantapan jalan kabupaten mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 panjang jalan kabupaten ketika Kabupaten Pangandaran belum berpisah dengan Kabupaten Ciamis adalah sepanjang 772,31 km, dengan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 308,03 km, sehingga proporsinya adalah sebesar 39,88%. Tetapi setelah Kabupaten Pangandaran berpisah pada akhir tahun 2013, panjang jalan Kabupaten Ciamis adalah sepanjang 478,11 km, dengan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 211,55 sehingga proporsinya adalah sebesar 44,25%.

Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis, panjang jalan kabupaten keseluruhan adalah 848,29 km, dengan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 493,59 km sehingga proporsinya

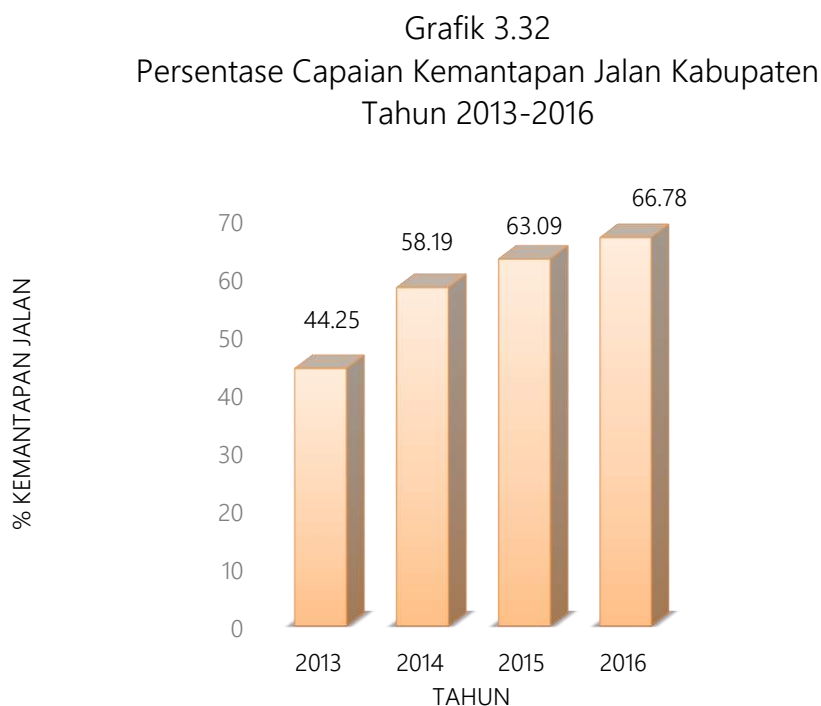


sebesar 58,19%. Dan pada tahun 2015 kemantapan jalan kabupaten adalah sebesar 63,09%, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 66,78% maka kenaikan nilai kemantapan jalan kabupaten adalah sebesar 3,69%.

Faktor yang mendukung peningkatan kemantapan jalan kabupaten selain dipengaruhi oleh besarnya kenaikan anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya, juga dipengaruhi oleh terjadinya perubahan status jalan kabupaten yang

semula sepanjang 772,31 km, kemudian menjadi sepanjang 478,11 km dan akhirnya menjadi sepanjang 848,296 km, disamping itu juga karena pada tahun 2014, 2015 dan 2016 banyak pekerjaan penanganan jalan yang menggunakan konstruksi aspal *hotmix* dan *rigid* (beton), sehingga umur dan kekuatan jalan menjadi semakin meningkat.

Grafik capaian kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Ciamis selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Untuk mencapai indikator kemantapan jalan kabupaten dilaksanakan melalui 5 (lima) program yaitu : (1) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan; (2) Program pembangunan jalan dan jembatan; (3) Program pembangunan turap/talud/brojong; (4) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; dan (5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 196.667.229.150,- atau 95,37 % dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 206.214.034.800,- dengan capaian output sebesar 106,78 % dan outcome sebesar 100,62 %.

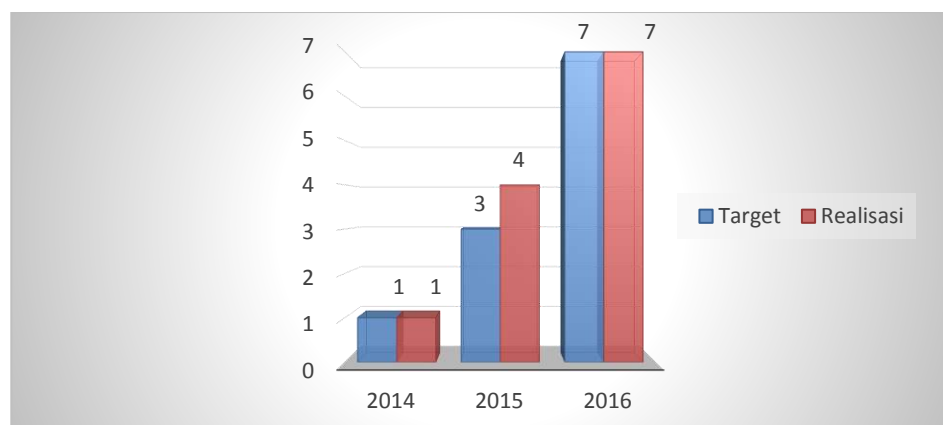
2. Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang Sudah Dilengkapi Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas adalah ruas-ruas jalan di Kabupaten Ciamis yang dilengkapi dengan rambu-rambu keselamatan lalu lintas, yaitu Rambu Petunjuk Pengatur Jalan (RPPJ). Kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas diperlukan dalam rangka menciptakan tertib lalu lintas serta mencegah/meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pada tahun 2016, target yang direncanakan terkait ruas jalan yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas adalah sebanyak 7 (tujuh) ruas jalan dengan realisasi 7 (tujuh) ruas jalan atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat baik. Ruas jalan tersebut yaitu :

- (1) Ruas jalan Cirahong
- (2) Ruas jalan Murod Idrus (Surungdayung)
- (3) Ruas jalan Nasol
- (4) Ruas jalan Kujang
- (5) Ruas jalan Komplek Venue BMX, Cigembor
- (6) Ruas jalan Iwa Kusumasumantri (perlintasan rel Kereta Api dan Pertigaan Rumah Sakit Permata Bunda)
- (7) Ruas jalan Panjalu – Sukamantri

Grafik 3.33
Ruas Jalan Kabupaten yang Sudah Dilengkapi Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016



Dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruas-ruas jalan khususnya jalan kabupaten dilakukan melalui rekayasa jalan, rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas dengan melakukan perbaikan terhadap peraturan lalu lintas yang diberlakukan pada ruas-ruas jalan tertentu yang rawan terhadap kecelakaan lalu lintas serta memberikan sosialisasi, arahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang keselamatan lalu lintas.

Faktor yang menghambat upaya menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di ruas-ruas jalan kabupaten adalah kondisi jalan yang rusak sehingga menyulitkan dalam pemasangan rambu serta marka jalan, sebagian masyarakat belum paham terhadap makna dan arti penting aksi keselamatan jalan serta kurangnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas keselamatan jalan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal rekayasa jalan, sosialisasi program aksi keselamatan jalan serta pemasangan rambu-rambu lalu lintas di daerah rawan kecelakaan lalu lintas khususnya ruas jalan kabupaten.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan (2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.871.689.054,- atau 98,87 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

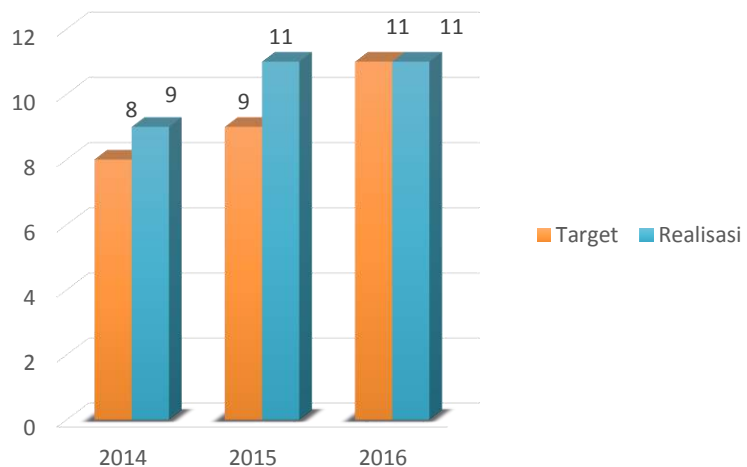
3. Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang Dilalui Angkutan Penumpang Umum

Definisi operasional indikator ini adalah jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilalui angkutan penumpang umum (angkutan kota, angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan).

Pada tahun 2016 target yang direncanakan adalah sebanyak 11 (sebelas) ruas jalan, realisasinya mencapai 11 (sebelas) ruas jalan atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %. Ruas jalan yang sudah dilalui angkutan penumpang umum tersebut yaitu :

- (1) Ruas jalan Sadananya;
- (2) Jalan Siliwangi;
- (3) Jalan Yos Sudarso;
- (4) Jalan RSU;
- (5) Jalan Iwa Kusumasumantri;
- (6) Jalan Letnan Samudji;
- (7) Jalan KH. Ahmad Dahlan;
- (8) Jalan Ciptomangunkusumo;
- (9) Jalan Cokroaminoto;
- (10) Jalan Tentara Pelajar;
- (11) Ruas Jalan Benteng.

Grafik 3.34
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten
Yang Sudah Dilalui Angkutan Penumpang Umum Tahun 2014-2016



Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum adalah dengan membuka jaringan-jaringan trayek baru khususnya pada ruas-ruas jalan kabupaten.

Hambatan dalam upaya meningkatkan jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum adalah kondisi jalan yang rusak, kurangnya permintaan masyarakat (*demand*) terhadap layanan angkutan umum serta minat pengusaha angkutan umum untuk mengisi jaringan trayek baru.

Strategi dalam upaya meningkatkan jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum adalah bekerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas jalan-jalan kabupaten, mengevaluasi jaringan-jaringan trayek yang sudah ada serta meningkatkan peran pengusaha angkutan umum untuk meningkatkan pelayanan.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; dan (2) Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 858.255.000,- atau 99,82 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Sasaran 25 : Meningkatnya Keandalan Sistem Jaringan Infrastruktur Sumberdaya Air dan Pengelolaan Sumberdaya Air

Pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumberdaya air dan pengelolaan sumberdaya air dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu: (1) Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik, dan (2) Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.60

**Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Keandalan Sistem Jaringan Infrastruktur Sumber Daya Air
dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	m/ha	21,095	151,87	28,598	134,02	29,230	29,554	100,11

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2	Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir	%	88,47	100	88,47	100	88,46	85,18	96,29
Rata-rata Capaian Kinerja		%		125,94		117,01			98,70

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja sasaran tersebut diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air pada tahun 2016 adalah sebesar 98,19 %, dan termasuk dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melampaui target, dan 1 (satu) indikator belum sesuai target yang direncanakan.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja (capaian nyata) dan capaian kinerja sasaran tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan :
 - Capaian kinerja sasaran tahun 2016 (98,19 %) lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2015 (117,01 %), dan tahun 2014 (125,94%).
 - Capaian nyata (realisasi) Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya, Tahun 2016 (29,554 m/ha), Tahun 2015 (28,598 m/ha) dan Tahun 2014 (21,095 m/ha). Sedangkan Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir cenderung stabil di tahun 2014 dan 2015 dengan capaian nyata sebesar 88,47 % atau sebanyak 3 (tiga) kecamatan, sedangkan di tahun 2016 terdapat penambahan 1 kecamatan yang mengalami banjir, dibanding

tahun-tahun sebelumnya, yaitu Kecamatan Banjarsari, dimana tahun sebelumnya Kecamatan yang mengalami banjir adalah Kecamatan Lakkok, Purwadadi & Pamarican, sehingga proporsi Kecamatan yang bebas banjir tahun 2016 adalah 23 kecamatan dari jumlah 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 114,425 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.61
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Keandalan Sistem Jaringan Infrastruktur Sumber Daya Air
Tahun 2016 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	m/ha	29,554	21.641	136,56
2	Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir	%	85,18	92,3	92,29
Rata-rata Capaian Kinerja		%			114,42

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu :

- (1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- (2) Program pengendalian banjir.

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.812.842.083,- atau sebesar 97,53% dari total pagu anggaran Rp. 71.580.182.700,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 106,95 %.

Analisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas areal pertanian untuk irigasi teknis, sedangkan Rasio Jaringan Dalam Kondisi Baik adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dengan luas area pertanian. Pada tahun 2016, panjang saluran irigasi teknis dalam kondisi baik adalah 44,13 % dari total panjang saluran sepanjang 343.896 m, sedangkan luas areal pertanian irigasi teknis adalah 5.134,813 Ha.

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas, maka Capaian kinerja Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah sebesar 29,554 m/Ha, apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 29,230 m/ha, maka capaian realisasinya adalah sebesar 100,10%, secara perhitungan realisasi nyata, rasio jaringan irigasi mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena area jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan, walaupun area jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan banyak yang mengalami kerusakan karena bencana alam, tetapi karena yang dihitung hanya area dalam kondisi baik, maka capaian rasio nyata mengalami peningkatan.

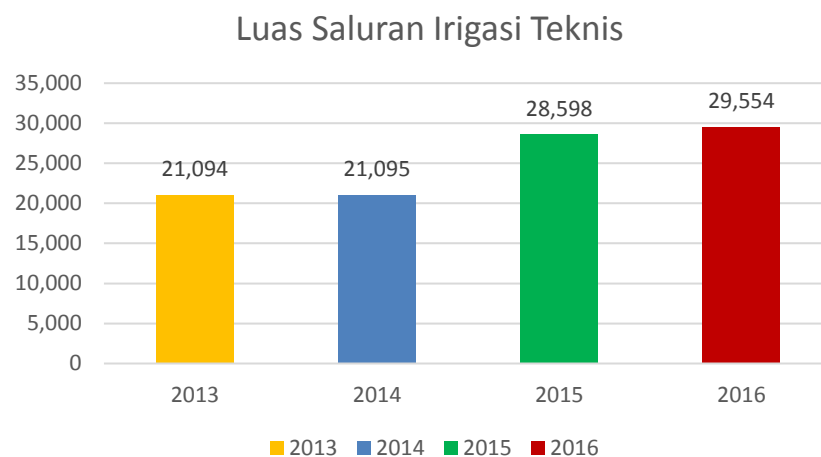
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang menunjang pada indikator ini, dengan kenaikan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2014 luas irigasi teknis setelah dipisahkan dari Kabupaten Pangandaran seluas 5.134,813 Ha dengan panjang saluran sepanjang 343.896 m dan persentase irigasi teknis kondisi baik sebesar 30,94% sehingga capaiannya sebesar 20,727 m/Ha.

Pada tahun 2014 luas irigasi teknis seluas 5.134,813 Ha dengan panjang saluran sepanjang 343.896 m dan prosentase saluran irigasi teknis kondisi baik sebesar 31,49% sehingga capaiannya sebesar 21,095 m/Ha. Pada tahun 2015 luas

irigasi teknis masih tetap seluas 5.134,813 Ha dengan panjang saluran sepanjang 343.896 m dan prosentase saluran irigasi teknis kondisi baik sebesar 42,69% sehingga capaiannya sebesar 28,598 m/Ha. Pada tahun 2016 luas irigasi teknis masih tetap seluas 5.134,813 Ha dengan panjang saluran juga masih tetap sepanjang 343.896 m dan prosentase saluran irigasi teknis kondisi baik sebesar 44,13 % sehingga capaiannya sebesar 29,554 m/Ha

Grafik Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis selama tiga tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.35
Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Ciamis
Tahun 2013-2016



Untuk mencapai indikator sasaran Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.967.687.933,- atau 97,03 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

2. Proporsi Jumlah Kecamatan Yang Bebas Banjir

Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir adalah jumlah kecamatan yang bebas banjir tahunan dibagi dengan jumlah kecamatan keseluruhan dikali 100%, atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Jml Kec. yang Bebas Banjir} = \frac{\text{Jumlah Kecamatan yang Bebas Banjir}}{\text{Jumlah Seluruh Kecamatan}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2016, jumlah kecamatan di Kabupaten Ciamis sebanyak 27 kecamatan. Jumlah kecamatan yang bebas banjir sebanyak 23 kecamatan, sedangkan 4 kecamatan merupakan daerah rawan banjir yaitu Kecamatan Lakkok, Purwadadi, Banjarsari dan Pamarican.



Dari data dan rumus perhitungan di atas, maka diketahui Target jumlah kecamatan yang bebas banjir tahun 2016 adalah sebesar 88,46% atau 24 kecamatan dari total

27 kecamatan, hal ini mengalami penurunan dengan target yang direncanakan, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 85,18 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2016 lebih rendah capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu sebesar 100 %.

Pada tahun 2016 terjadi pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Banjaranyar yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Banjarsari, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Ciamis bertambah menjadi 26 kecamatan. Hal tersebut tentunya akan merubah capaian realisasi nyata, karena pada rumus tersebut dicantumkan jumlah seluruh kecamatan.

Sesuai kondisi di lapangan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Ciamis masih ada 3 kecamatan yang belum bebas banjir, yaitu Kecamatan Lakkok, Purwadadi dan Pamarican, hal ini karena pada ketiga kecamatan

ini terdapat aliran sungai dengan debit yang sangat besar, serta banyak terdapat rawa-rawa, sedangkan pada tahun 2016 terdapat bencana alam banjir bandang yang berlokasi di Kecamatan Banjarsari, sehingga di tahun 2016 terdapat 4 kecamatan yang mengalami Banjir. Untuk meminimalisir hal ini, maka kegiatan pembuatan proteksi tebing dan normalisasi sungai di daerah-daerah rawan tersebut terus dilakukan secara kontinyu.

Untuk mencapai indikator sasaran Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program pengendalian banjir dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.845.154.150,- atau 98,58 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 113,90 %.

Sasaran 26 : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman dilakukan melalui indikator cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.62
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana & Prasarana Dasar Permukiman

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman	%	7,17	-	7,17	13,53	40,37	22,64	56,08

Cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman adalah persentase perbandingan jumlah desa dengan akses sarana prasarana permukiman dibagi jumlah total desa, dengan rumus perhitungan :

$$\text{Cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman} = \frac{\text{Jml Desa dengan Akses Sarana Prasarana Permukiman}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2016 jumlah desa dengan akses sarana prasarana permukiman adalah sebanyak 60 desa dari jumlah total desa sebanyak 265 desa. Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui realisasi indikator cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman (untuk air bersih dan sanitasi) di Kabupaten Ciamis Tahun 2016 tercapai sebesar 22,64 % dari target yang ditetapkan sebesar 40,37 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman yang diukur melalui indikator cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 56,08 %.



Pada tahun 2015 realisasi cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman adalah sebesar 7,17 % dengan capaian kinerja sebesar 13,53 %. Dengan demikian realisasi cakupan desa/kelurahan dengan akses

sarana prasarana dasar permukiman di Kabupaten Ciamis tahun 2016 (22,64 %) mengalami peningkatan sebesar 15,47 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2015

(7,17 %) dengan peningkatan capaian kinerja sebesar 42,55 %, meskipun pada tahun 2016 belum mencapai target yang direncanakan.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 39,58 % sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.63
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana
dan Prasarana Dasar Permukiman Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman	%	22,64	57,2	39,58

Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai atau meningkatkan cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman antara lain masih banyaknya rumah tangga yang rawan air bersih dan sanitasi serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana air bersih yang telah dibangun.

Strategi/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah dengan meningkatkan jumlah desa yang terfasilitasi oleh sarana prasarana air bersih dan sanitasi sehingga jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan akses sarana prasarana dasar permukiman dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya, serta memperkuat kelembagaan pengelola system air bersih perdesaan dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat paska pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

Upaya pencapaian sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu :

- (1) Program Pengembangan Perumahan;
- (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- (3) Program Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;
- (4) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- (5) Program Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan.

Realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 17.413.995.282,- atau sebesar 87,93 % dari total pagu anggaran Rp. 19.803.749.700,- dengan capaian output sebesar 94,04 % dan capaian outcome sebesar 93,34 %.

Sasaran 27 : Meningkatkan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi, Ketenagalistrikan dan Pembinaan Usaha Tambang

Pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang dilakukan melalui 3 (tiga) indikator yaitu Rasio elektrifikasi rumah tangga dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.64

Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi,
Ketenagalistrikan dan Pembinaan Usaha Tambang

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016			RPJMD		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Tahun 2016	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	80,19	106,92	80	82,17	102,71	N/A	102,71	-
Rata-rata Capaian Kinerja		%		147,70			102,71			

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang tahun 2016 adalah sebesar 102,71%, dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur, 1 (satu) indikator tercapai melampaui target sedangkan 2 (dua) indikator lainnya tidak dapat diukur karena tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, tetapi ditargetkan pada RPJMD.
- c. perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan sebanyak 2 (dua) indikator tercapai melampaui target yang direncanakan dan 1 (satu) indikator yaitu rasio elektrifikasi rumah tangga tidak dapat diukur capaian kinerjanya karena tidak ada target dalam RPJMD, tetapi merupakan indikator tambahan dan di perjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang memiliki relevansi dalam mencapai sasaran Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu :

- (1) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- (2) Program Pembinaan dan pengembangan Bidang energi;
- (3) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.799.963.740,- atau sebesar 99,51 % dari total pagu anggaran Rp. 5.828.300.000,00,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Analisa/penjelasan capaian kinerja dari indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

Rasio elektrifikasi rumah tangga adalah persentase perbandingan rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah rumah tangga keseluruhan, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga} &= \frac{\text{Jml Rumah Tangga Pengguna Listrik}}{\text{Jml Rumah Tangga Keseluruhan}} \times 100 \% \\ &= \frac{387.789}{471.958} \times 100 \% = 82,17 \% \end{aligned}$$

Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Ciamis sebanyak 387.789 rumah tangga dari jumlah rumah tangga secara keseluruhan yaitu



sebanyak 471.958 rumah tangga.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan bantuan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat pra keluarga sejahtera (pra-KS) sebanyak 458 sambungan. Disamping dari

pemerintah Kabupaten Ciamis, ada juga bantuan pemasangan listrik gratis yang bersumber dari instansi dan lembaga lain.

Akumulasi dari kegiatan tersebut, ditambah dengan kegiatan dari PLN dan masyarakat umum yang melakukan penyambungan listrik sendiri memberikan dampak yang signifikan bagi rasio elektrifikasi di Kabupaten Ciamis, sehingga dari target capaian sebesar 80 % terlampaui menjadi 82,17%, maka capaian realisasi kinerjanya sebesar 102,71 %

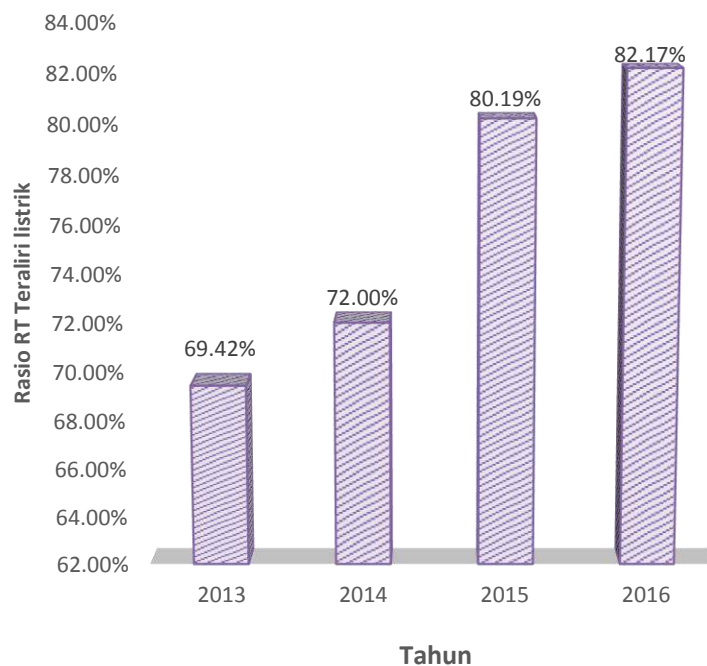
Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

dengan anggaran sebesar Rp. 5.178.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.154.339.600,- atau sebesar 99,54 % dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100%.

Grafik capaian Persentase rumah tangga yang sudah mempunyai sambungan listrik (Rasio elektrifikasi) Kabupaten Ciamis selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.36

Persentase Rumah Tangga yang Sudah Mempunyai Sambungan Listrik
(Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga) Tahun 2013-2016



Sasaran 28 : Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

- (1) Persentase luas kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah;
- (2) Pencapaian status mutu sungai dengan tingkat cemar sedang;
- (3) Cakupan layanan persampahan;

dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.65
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase luas kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah	%	40,06	N/A	40,69	100,32	41,05	41,26	100,51
2	Pencapaian status mutu sungai dengan tingkat cemaran sedang	%	0	200	0	200	10	0	200
3	Cakupan layanan persampahan	%	3,92	N/A	4,08	93,36	5,07	5,07	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%				131,23			133,50

Keterangan : (N/A, Not Available) Capaian Kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut dan baru diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan tahun 2016 adalah sebesar 133,50 %, dan termasuk dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai sesuai target dan 2 (dua) indikator tercapai melampaui target.
- c. Realisasi kinerja (capaian nyata) tahun 2016 dibandingkan dengan tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi (capaian nyata) tahun 2016 dari setiap indikator, 2

(dua) indikator mengalami peningkatan dan 1 (satu) indikator tidak mengalami peningkatan dan penurunan apabila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.66
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase luas kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah	%	41,26	39,59	104,22
2	Pencapaian status mutu sungai dengan tingkat cemar sedang	%	0	20	200
3	Cakupan layanan persampahan	%	5,07	N/A	-

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan 2 (dua) indikator tercapai melebihi target dan 1 (satu) indikator tidak dapat dibandingkan, karena pada RPJMD tidak ada target indikator kinerja dimaksud.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dilaksanakan melalui 8 (delapan) program, yaitu :

- (1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- (2) Program rehabilitasi hutan dan lahan;
- (3) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
- (4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

- (5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- (6) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Cadangan Sumber Daya Alam;
- (7) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- (8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.724.642.721,- atau sebesar 97,54 % dari total pagu anggaran Rp. 7.919.102.950,- dengan capaian output sebesar 112,21 % dan capaian outcome sebesar 95,73 %.

Analisa capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Persentase Luas Kawasan Lindung dan Berfungsi Lindung Terhadap Luas Wilayah

Pengertian Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Persentase luas kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah adalah merupakan perbandingan antara luas kawasan lindung hutan dan kawasan lindung non hutan yang berfungsi lindung dibagi luas wilayah Kabupaten Ciamis, atau yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase luas kawasan lindung} \\
 \text{dan berfungsi lindung terhadap} \\
 \text{luas wilayah} &= \frac{\text{Luas kawasan lindung hutan dan non hutan}}{\text{Luas wilayah Kabupaten Ciamis}} \times 100 \% \\
 &= \frac{59.161,48 \text{ Ha}}{143.387 \text{ Ha}} \times 100 \% = 41,26 \%
 \end{aligned}$$

Target luas kawasan lindung yang berfungsi lindung tahun 2016 seluas 58.852,62 Ha atau 41,05 % yang meliputi Luas kawasan lindung hutan di Kabupaten Ciamis 5.576 Ha yang merupakan hutan konservasi, dan Luas kawasan lindung non hutan adalah 53.287,62 Ha yang mencakup lokasi yang sesuai untuk hutan lindung,

resapan air, perlindungan mata air, sempadan dan karst, rawan gerakan tanah, serta rawan banjir. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 143.387 Ha.

Pada Tahun 2016 Luas kawasan lindung yang berfungsi lindung adalah 59.161,48 Ha atau 41,26 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,51 % dengan kategori sangat baik.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 luas kawasan lindung adalah 58.341,67 ha dan pada tahun 2014 seluas 57.447,92 ha. Dengan demikian dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penambahan seluas 819,81 Ha dan seluas 1.713,56 Ha pada tahun 2014. Faktor yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu adanya kegiatan penghijauan lingkungan seluas 274,10 Ha, kegiatan pembuatan persemaian 271,91 Ha dan kegiatan pembuatan hutan rakyat pola pengkayaan tanaman seluas 273,90 Ha.



Untuk mencapai indikator sasaran Persentase luas kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu : (1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam; (2) Program rehabilitasi hutan dan lahan; dan (3) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.668.591.150,- atau 97,86 % dari total anggaran Rp. 2.727.041.000,- dengan capaian output sebesar 92,22 % dan outcome sebesar 90,62 %.

2. Pencapaian Status Mutu Sungai Dengan Tingkat Cemar Sedang

Pencapaian status mutu sungai dengan tingkat cemar sedang merupakan persentase perbandingan antara jumlah sungai dengan status cemar sedang dibagi jumlah sungai yang dipantau, yang dihitung berdasar rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sungai dengan status cemar sedang}}{\text{Jumlah sungai yang dipantau}} \times 100\%$$

Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian status mutu sungai dengan tingkat cemar sedang target yang ditetapkan adalah sebesar 10 % dari jumlah sungai yang dipantau sebanyak 10 (sepuluh) sungai. Dari jumlah 10 sungai yang dilakukan pemantauan semuanya tidak ada yang berstatus cemar sedang (0), akan tetapi berstatus cemar ringan dan memenuhi baku mutu, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 200% atau dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan kualitas sungai lebih baik dari yang ditargetkan.

Adapun data pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu Tahun 2014 dan Tahun 2015 juga menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) sungai yang dipantau, tidak ada yang berstatus cemar sedang karena sudah beralih status menjadi sungai yang berstatus cemar ringan. Pada tahun 2016, dilakukan pemantauan pada 10 sungai dengan 2 (dua) kali pemantauan dan/atau pengulangan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Berstatus memenuhi baku (13)
- Berstatus cemar ringan (37)
- Berstatus cemar sedang (0)
- Berstatus cemar berat (0)

Tabel 3.67
Hasil Pemantauan Kondisi Sungai (10 Titik) di Kabupaten Ciamis Tahun 2016

No	Nama Sungai	Lokasi/Koordinat											Periode/ Tanggal			Status Mutu Air
													Tgl	Bln	Thn	
A.	Pemantauan 1															
1.	Cirende, titik 1	E	108	35	868	S	07	28	662	441	dpl	11	05	2016	Memenuhi	
	Cirende, titik 2	E	108	29	554	S	07	19	862	125	dpl	11	05	2016	Ringan	
2.	Cipalih, titik 1	E	108	17	219	S	07	15	897	497	dpl	28	03	2016	Memenuhi	
	Cipalih, titik 2	E	108	18	078	S	07	18	924	284	dpl	28	03	2016	Ringan	
	Cipalih, titik 3	E	108	22	045	S	07	20	534	148	dpl	28	03	2016	Ringan	
3.	Cibuyut, titik 1	E	108	19	822	S	07	13	754	479	dpl	02	06	2016	Ringan	
	Cibuyut, titik 2	E	108	26	098	S	07	20	084	129	dpl	02	06	2016	Ringan	
4.	Ciliung, titik 1	E	108	29	661	S	07	12	110	407	dpl	20	04	2016	Ringan	
	Ciliung, titik 2	E	108	30	223	S	07	19	141	135	dpl	20	04	2016	Ringan	
	Ciliung, titik 3	E	108	29	707	S	07	20	532	121	dpl	20	04	2016	Ringan	
5.	Ciputrahaji, titik 1	E	108	39	489	S	07	27	037	64	dpl	02	05	2016	Memenuhi	
	Ciputrahaji, titik 2	E	108	35	865	S	07	28	670	100	dpl	02	05	2016	Ringan	
6.	Ciseel, titik 1	E	108	29	706	S	07	20	532	121	dpl	26	04	2016	Ringan	
	Ciseel, titik 2	E	108	31	638	S	07	24	550	112	dpl	26	04	2016	Ringan	

No	Nama Sungai	Lokasi/Koordinat											Periode/ Tanggal			Status Mutu Air
													Tgl	Bln	Thn	
	Ciseel, titik 3	E	108	39	225	S	07	27	891	601	dpl	26	04	2016		Ringan
7.	Cimuntur, titik 1	E	108	26	212	S	07	20	329	126	dpl	13	04	2016		Memenuhi
	Cimuntur, titik 2	E	108	22	060	S	07	10	314	441	dpl	13	04	2016		Ringan
	Cimuntur, titik 3	E	108	22	062	S	07	10	313	441	dpl	13	04	2016		Ringan
8.	Cikembang, titik 1	E	108	27	039	S	07	23	613	143	dpl	28	05	2016		Ringan
	Cikembang, titik 2	E	108	30	443	S	07	24	188	114	dpl	25	05	2016		Ringan
9.	Cigede, titik 1	E	108	30	132	S	07	20	683	12	dpl	18	05	2016		Ringan
	Cigede, titik2	E	108	23	320	S	07	04	574	525	dpl	18	05	2016		Ringan
10.	Cileueur, titik 1	E	108	18	533	S	07	14	692		dpl	05	04	2016		Ringan
	Cileueur, titik 2	E	108	21	177	S	07	19	390	155	dpl	05	04	2016		Ringan
	Cileueur, titik 3	E	108	26	216	S	07	20	329	126	dpl	05	04	2016		Ringan
B. Pemantauan 2																
1.	Cirende, titik 1	E	108	35	868	S	07	28	662	441	dpl	27	10	2016		Ringan
	Cirende, titik 2	E	108	29	554	S	07	19	862	125	dpl	27	10	2016		Ringan
2.	Cipalih, titik 1	E	108	17	219	S	07	15	897	497	dpl	08	09	2016		Memenuhi
	Cipalih, titik 2	E	108	18	078	S	07	18	924	284	dpl	08	09	2016		Ringan
	Cipalih, titik 3	E	108	22	045	S	07	20	534	148	dpl	08	09	2016		Memenuhi
3.	Cibuyut, titik 1	E	108	19	822	S	07	13	754	479	dpl	10	11	2016		Memenuhi
	Cibuyut, titik 2	E	108	26	098	S	07	20	084	129	dpl	10	11	2016		Ringan
4.	Ciliung, titik 1	E	108	29	661	S	07	12	110	407	dpl	06	10	2016		Memenuhi
	Ciliung, titik 2	E	108	30	223	S	07	19	141	135	dpl	06	10	2016		Ringan
	Ciliung, titik 3	E	108	29	707	S	07	20	532	121	dpl	06	10	2016		Ringan
5.	Ciputrahaji, titik 1	E	108	39	489	S	07	27	037	64	dpl	20	11	2016		Ringan
	Ciputrahaji, titik 2	E	108	35	865	S	07	28	670	100	dpl	20	11	2016		Ringan
6.	Ciseel, titik 1	E	108	29	706	S	07	20	532	121	dpl	13	10	2016		Memenuhi
	Ciseel, titik 2	E	108	31	638	S	07	24	550	112	dpl	13	10	2016		Ringan
	Ciseel, titik 3	E	108	39	225	S	07	27	891	601	dpl	13	10	2016		Ringan
7.	Cimuntur, titik 1	E	108	26	212	S	07	20	329	126	dpl	29	09	2016		Ringan
	Cimuntur, titik 2	E	108	22	060	S	07	10	314	441	dpl	29	09	2016		Ringan
	Cimuntur, titik 3	E	108	22	062	S	07	10	313	441	dpl	29	09	2016		Ringan
8.	Cikembang, titik 1	E	108	27	039	S	07	23	613	143	dpl	16	11	2016		Memenuhi
	Cikembang, titik 2	E	108	30	443	S	07	24	188	114	dpl	16	11	2016		Ringan
9.	Cigede, titik 1	E	108	30	132	S	07	20	683	12	dpl	03	11	2016		Ringan
	Cigede, titik2	E	108	23	320	S	07	04	574	525	dpl	03	11	2016		Ringan
10.	Cileueur, titik 1	E	108	18	533	S	07	14	692		dpl	15	09	2016		Memenuhi
	Cileueur, titik 2	E	108	21	177	S	07	19	390	155	dpl	15	09	2016		Memenuhi
	Cileueur, titik 3	E	108	26	216	S	07	20	329	126	dpl	15	09	2016		Memenuhi

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Untuk mencapai indikator pencapaian status mutu sungai dengan tingkat cemar sedang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu : (1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; (2) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan (3) Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.047.054.231,- atau 98,61 % dari total anggaran Rp. 2.075.897.500,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

3. Cakupan Layanan Persampahan

Cakupan layanan persampahan merupakan persentase perbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah kabupaten, yang dirumuskan dengan perhitungan :

$$\text{Cakupan Layanan Persampahan} = \frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah kabupaten}} \times 100 \%$$

- Volume sampah yang ditangani adalah sebanyak 62.640 m³
- Volume produksi sampah kabupaten sebanyak 1.235.563,2 m³.

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa cakupan layanan persampahan di Kabupaten Ciamis tahun 2016 tercapai sebesar 5,07 % dari target yang ditetapkan sebesar 5,07 % dengan capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi cakupan layanan persampahan adalah sebesar 4,08% dan tahun 2014 sebesar 3,92%.



Dalam rangka mencapai atau meningkatkan cakupan layanan persampahan di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah dengan meningkatkan luas layanan persampahan sehingga volume sampah yang ditangani dapat mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, belum optimalnya pemahaman dan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan penyediaan, penambahan dan rehabilitasi sarana prasarana pengelolaan sampah dan dilakukannya sosialisasi pengelolaan sampah dalam upaya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.086.164.450,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.979.177.340,- atau sebesar 96,53 % dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 94 %.

Sasaran 29 : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Dikelola Pemerintah



Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola pemerintah dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola

Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan; dan (2) Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.68

Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya RTH yang Dikelola Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	%	0,78	N/A	2,07	156,82	3,01	3,01	100
2	Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	%	0,052	N/A	0,016	28,57	0,323	0,162	50,15
Rata-rata Capaian Kinerja		%		-		92,70			75,08

Keterangan : (N/A, Not Available) Capaian Kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut dan baru diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya RTH yang dikelola pemerintah tahun 2016 adalah sebesar 75,08 % dan termasuk dalam kategori baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melampaui target dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target.
- c. Perbandingan capaian kinerja sasaran jika dibandingkan dengan tahun 2015 terlihat lebih rendah, akan tetapi jika dilihat dari capaian realisasi sasaran nyata, tahun 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.69
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya RTH yang Dikelola Pemerintah Daerah Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	%	3,01	1,35	222,96
2	Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	%	0,162	0,059	274,58
Rata-rata Capaian Kinerja		%			248,77

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 248,77 %.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya RTH yang dikelola pemerintah dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu : (1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau, dan (2) Program pengelolaan areal pemakaman, dengan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.729.148.060,- atau sebesar 99,11 % dari total pagu anggaran Rp. 3.762.646.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Adapun analisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan

Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan merupakan perbandingan jumlah luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki dan dikelola Pemerintah daerah di wilayah perkotaan dengan jumlah luas total RTH di wilayah perkotaan.

- Jumlah luas RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan adalah seluas 44,45 Ha;
- Jumlah luas total RTH di Wilayah Perkotaan seluas 4.684 Ha.

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016 tercapai sebesar 3,01 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,01 % dengan capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi adalah sebesar 2,07% dan tahun 2014 sebesar 0,78%. Dengan demikian realisasi (capaian nyata) persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah di wilayah perkotaan di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Namun demikian dalam pelaksanaan juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain keterbatasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau yang dikelola dan dimiliki pemerintah serta keterbatasan lahan untuk pemakaman. Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan optimalisasi, penambahan dan penetapan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki pemerintah daerah.

Untuk mencapai indikator sasaran Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.966.323.810,- atau 99,30 % dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.987.165.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

2. Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk adalah perbandingan antara luas wilayah pemakaman dengan jumlah penduduk, dengan rumus perhitungan :

$$\text{Persentase TPU Per Satuan Penduduk} = \frac{\text{Luas Wilayah Pemakaman}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$$

- Luas wilayah pemakaman adalah seluas 226,1075 Ha
- Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis sebanyak 1.398.346 orang

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa persentase Tempat Pemakaman Umum Per satuan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016 tercapai sebesar 0,162 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,323 % dengan capaian kinerja sebesar 50,02 % dan termasuk dalam kategori kurang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi adalah sebesar 0,016 % dan tahun 2014 sebesar 0,052 %. Dengan demikian realisasi (capaian nyata) persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk di Kabupaten Ciamis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya senantiasa meningkat walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan pemakaman yang di kelola pemerintah. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan optimalisasi, penambahan dan penetapan Tempat Pemakaman Umum yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.

Untuk mencapai indikator sasaran Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program pengelolaan areal pemakaman dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 762.824.250,- atau sebesar 98,37 % dari total pagu anggaran Rp. 775.481.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 30 : Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat

Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat dilakukan melalui indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran. Cakupan pelayanan bencana kebakaran merupakan persentase perbandingan antara jumlah desa dengan akses sarana prasarana

permukiman dibagi dengan jumlah seluruh desa di Kabupaten Ciamis dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pelayanan bencana kebakaran} = \frac{\text{Jumlah Luas WMK Kabupaten (km}^2\text{)}}{\text{Jumlah Luas Kabupaten (km}^2\text{)}} \times 100\%$$

Pada tahun 2016 jumlah luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) yaitu sebesar 176,26 km², sedangkan Luas Kabupaten Ciamis adalah 1.433,1 km². Target Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 sebesar 12,30 % dan terealisasi sebesar 12,29 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.70
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	12,33	100	12,33	100	12,30	12,29	99,92



Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatkan penang-gulangan bencana dan perlindungan masyarakat tahun 2016 yang diukur dari

perbandingan antara target dan realisasi indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan target sebesar 12,30 % dan realisasi sebesar 12,29 %, menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,92 % dengan kategori sangat baik.

Realisasi tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan jumlah kecamatan bertambah menjadi 27 Kecamatan.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 (99,92 %) lebih rendah dan mengalami penurunan yang sangat kecil yaitu sebesar 0,08 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2014 yang tercapai sebesar 100 %. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Ciamis masih relatif stabil.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.71
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	12,29	12,33	99,67

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,67 %.

Hambatan/masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Ciamis adalah jumlah pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ciamis baru berjumlah 1 (satu) pos tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Ciamis, keterbatasan personil/aparatur pemadam kebakaran, kurangnya sarana prasarana dimana sampai saat ini Kabupaten Ciamis baru memiliki 3 (tiga) unit mobil damkar untuk melayani 27 kecamatan.

Strategi/upaya pemecahan masalah yaitu menambah jumlah pos pemadam kebakaran yang disertai dengan penambahan armada dan personil, agar wilayah manajemen kebakaran dapat meningkat.

Upaya pencapaian sasaran meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu (1) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; dan (2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan realisasi anggaran se-besar Rp. 2.448.211.250,- atau 98,47 % dari total pagu anggaran Rp. 2.486.210.250,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 31 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang dilakukan melalui 4 (empat) indikator yaitu :

- (1) Jumlah rencana tata ruang;
- (2) Kawasan pertanian berkelanjutan yang harus dipertahankan;
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan;
- (4) Kawasan hutan produktif tetap yang harus dipertahankan;

dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.72
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Rencana Tata Ruang	dokumen	1	33,33	7	175	19	7	36,84
2	Kawasan pertanian berkelanjutan yang harus dipertahankan	Ha	17.815	100	17.815	106,03	18.000	18.000	100
3	Kawasan Hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan	Ha	2.509,74	100	2.509,74	100	2.509,74	2.509,74	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4	Kawasan hutan produktif tetap yang harus dipertahankan	Ha	9.910,72	100	9.910,72	100	9.910,72	9.910,72	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%		83,33		120,26			84,21

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang tahun 2016 adalah sebesar 84,21 % dengan kategori baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tidak mencapai target dan 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target.
- c. Perbandingan realisasi (capaian nyata) dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun lalu :
 - (1) Capaian kinerja dari 4 (empat) indikator menunjukkan sebanyak 2 (dua) indikator memiliki capaian kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya dan 2 (dua) indikator memiliki capaian lebih rendah dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya :
 - Indikator jumlah rencana tata ruang mengalami penurunan sebesar 138,16 % dibanding tahun 2015 dan mengalami peningkatan sebesar 3,51 % dari tahun 2014;
 - Indikator kawasan pertanian berkelanjutan yang harus dipertahankan mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 6,03 % dibanding tahun 2015. Namun demikian capaian nyata (realisasi) dari indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2014;

- Indikator kawasan hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan dan Kawasan hutan produktif tetap yang harus dipertahankan memiliki capaian kinerja yang sama dengan tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu sebesar 100 %.

(2) Realisasi (capaian nyata) indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 menunjukkan 3 (tiga) indikator memiliki realisasi (capaian nyata) yang sama dengan tahun 2015 dan tahun 2014, yaitu indikator : (1) Jumlah rencana tata ruang; (2) Kawasan hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan; (3) Kawasan hutan produktif tetap yang harus dipertahankan. Sedangkan 1 (satu) indikator kawasan pertanian berkelanjutan yang harus dipertahankan menunjukkan realisasi (capaian nyata) yang lebih baik/tinggi dari tahun 2015 dan 2014.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.73
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Rencana Tata Ruang	dokumen	7	6	116,67
2	Kawasan pertanian berkelanjutan yang harus dipertahankan	Ha	18.000	17.815	101,04
3	Kawasan Hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan	Ha	2.509,74	10.711	23,43
4	Kawasan hutan produktif tetap yang harus dipertahankan	Ha	9.910,72	18.450	53,72
Rata-rata Capaian Kinerja		%			73,71

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 73,71%. Berkaitan dengan capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan target RPJMD perlu diketahui hal sebagai berikut :

- a. Untuk target kawasan hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan yang ada di RPJMD seluas 10.711 ha adalah luas kawasan hutan produksi terbatas sebelum adanya pemekaran daerah otonom (sebelum pembentukan Kabupaten Pangandaran). Jadi setelah adanya pembentukan Kabupaten Pangandaran maka luas kawasan hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan di Kabupaten Ciamis yaitu 2.509,74 ha. Jadi bila dilihat dari kondisi nyata yang ada di Kabupaten Ciamis maka capaiannya menunjukkan angka sebesar 100%.
- b. Untuk target kawasan hutan produktif tetap yang harus dipertahankan yang ada di RPJMD seluas 18.450 ha adalah luas kawasan hutan produksi tetap sebelum adanya pemekaran daerah otonom (sebelum pembentukan Kabupaten Pangandaran). Jadi setelah adanya pembentukan Kabupaten Pangandaran maka luas kawasan hutan produksi tetap yang harus dipertahankan di Kabupaten Ciamis yaitu 9.910,72 ha. Jadi bila dilihat dari kondisi nyata yang ada di Kabupaten Ciamis maka capaiannya menunjukkan angka sebesar 100%.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu : (1) Program perencanaan tata ruang, dan (2) Program pengendalian pemanfaatan ruang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.473.837.500,- atau sebesar 97,12 % dari total pagu anggaran Rp. 1.517.577.500,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Analisa capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Rencana Tata Ruang

Yang dimaksud dengan jumlah rencana tata ruang adalah jumlah dokumen rencana tata ruang yang di susun pada tahun 2016. Jumlah dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Ciamis yang disusun pada Tahun 2016 adalah sebanyak 7 (tujuh) dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 19 (sembilan belas) dokumen, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 36,84% dan termasuk dalam kategori sangat kurang.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi dokumen rencana tata ruang yang disusun adalah sebanyak 7 (tujuh) dokumen dan tahun 2014 sebanyak 4 (empat) dokumen. Dengan demikian realisasi (capaian nyata) jumlah produk rencana tata ruang yang disusun Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Namun demikian dalam pelaksanaan juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain : (1) Penyusunan RDTR Kecamatan di Kabupaten Ciamis dari 26 kecamatan yang telah mempunyai RDTR atau rencana rincinya yaitu Kawasan Perkotaan Kecamatan Ciamis, Kawasan Perkotaan Kecamatan Kawali dan Kawasan Perkotaan Kecamatan Banjarsari; (2) Pemahaman dan ketaatan masyarakat mengenai Peraturan Penataan Ruang masih kurang sehingga dalam pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mengindahkan aturan tata ruang.

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain Sosialisasi tentang pemahaman tata ruang di masyarakat, penyusunan RDTR Kawasan Strategis atau RDTR Kecamatan perlu dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya tata ruang dan pemanfaatannya.

Untuk mencapai indikator jumlah rencana tata ruang dilaksanakan Program perencanaan tata ruang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.403.837.500 atau 96,98 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

2. Kawasan Pertanian Berkelanjutan Yang Harus Dipertahankan

Kawasan pertanian berkelanjutan yang harus dipertahankan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan



cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan yang tidak boleh dialihfungsikan.

Dalam rangka mengoptimalkan produksi pertanian daerah khususnya produksi tanaman pangan, diperlukan ketersediaan lahan yang memadai dalam rangka mencapai target produksi daerah. Dikaitkan implementasi UU no. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dimana daerah wajib memiliki lahan yang dipertahankan keberlanjutannya baik itu lahan yang sudah ada maupun lahan cadangan maka lahan yang berpotensi untuk dijadikan kawasan LP2B diantaranya adalah lahan irigasi pedesaan yaitu seluas 17.815 Ha yang merupakan irigasi pedesaan dan lahan tadah hujan yang dimungkinkan untuk dialiri irigasi pedesaan.

Walaupun belum dijadikan kawasan LP2B secara resmi sesuai dengan kriteria penetapan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, namun upaya untuk mempertahankan lahan tersebut telah dilakukan setiap tahunnya melalui berbagai kegiatan yang dikategorikan pemberian insentif terhadap lahan tersebut melalui program/kegiatan penunjang baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

Pada tahun 2016, target kawasan pertanian berkelanjutan yang harus dipertahankan di Kabupaten Ciamis dalam perjanjian kinerja tahun 2016 adalah seluas 18.000 ha dan terealisasi seluas 18.000 ha sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori/predikat sangat baik.

Tercapainya realisasi tersebut dikarenakan pada setiap tahunnya lokasi tersebut merupakan lokasi pengembangan pertanian tanaman pangan khususnya padi dan palawija serta kegiatan pengembangan infrastruktur pertanian dalam hal ini rehabilitasi jaringan irigasi desa (Jides), pengembangan dam parit, embung, pompanisasi, optimasi lahan dan kegiatan penunjang lainnya.

Faktor yang mendukung upaya pencapaian indikator sasaran tersebut antara lain yaitu pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani dengan berupa :

- a. Pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. penyediaan sarana produksi pertanian;

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mempertahankan kawasan pertanian yang berkelanjutan antara lain yaitu adanya potensi alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi misalnya untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta faktor kebutuhan ekonomi dari pemilik lahan.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan/kendala tersebut yaitu dengan melakukan pengendalian alih fungsi lahan dan penerapan insentif kepada petani dalam rangka perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Untuk mencapai indikator kawasan pertanian berkelanjutan yang harus dipertahankan dilaksanakan melalui program perencanaan tata ruang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.403.837.500 atau 96,98 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Yang Harus Dipertahankan

Pengertian kawasan hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan secara terbatas.

Pada tahun 2016, realisasi (capaian nyata) luas kawasan hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan di Kabupaten Ciamis adalah seluas 2.509,74 ha. Hal tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016 yaitu seluas 2.509,74 ha, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %. Sedangkan untuk target yang ada di RPJMD seluas 10.711 ha adalah luas kawasan hutan produksi terbatas sebelum adanya pemekaran daerah otonom (sebelum pembentukan Kabupaten Pangandaran). Jadi setelah adanya pembentukan Kabupaten Pangandaran maka luas kawasan hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan di Kabupaten Ciamis yaitu 2.509,74 ha.

Kawasan hutan produksi terbatas merupakan hutan negara yang keberadaannya harus dipertahankan atau ditambah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengisyaratkan bahwa luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya. Kondisi saat ini di Kabupaten Ciamis luas kawasan hutan yang ada adalah seluas 18.003,83 ha atau sebesar 12,56 % dari luas wilayah kabupaten yang sebagiannya merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Dengan

kondisi seperti ini dan sesuai amanat Undang-Undang maka luas kawasan hutan yang ada harus dipertahankan.

Program dan kegiatan yang mendukung upaya pencapaian sasaran tersebut adalah program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan kegiatan optimalisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dengan kegiatan sosialisasi perundang-undangan bidang kehutanan dan perkebunan.

Untuk mencapai indikator kawasan hutan produksi terbatas yang harus dipertahankan dilaksanakan melalui program pengendalian pemanfaatan ruang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- atau 100 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

4. Kawasan Hutan Produktif Tetap Yang Harus Dipertahankan

Pengertian kawasan hutan produktif tetap yang harus dipertahankan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pada tahun 2016, realisasi (capaian nyata) luas kawasan hutan produksi tetap yang harus dipertahankan di Kabupaten Ciamis adalah 9.910,72 ha, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yaitu seluas 9.910,72 ha, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %. Sedangkan untuk target yang ada di RPJMD seluas 18.450 ha adalah luas kawasan hutan produksi tetap sebelum adanya pemekaran daerah otonom (sebelum pembentukan Kabupaten Pangandaran). Jadi setelah adanya pembentukan Kabupaten Pangandaran maka luas kawasan hutan produksi tetap yang harus dipertahankan di Kabupaten Ciamis yaitu 9.910,72 ha.

Kawasan hutan produksi tetap merupakan hutan negara yang keberadaannya harus dipertahankan atau ditambah. Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan mengisyaratkan bahwa luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan/atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya. Kondisi saat ini di Kabupaten Ciamis luas kawasan hutan yang ada adalah seluas 18.003,83 ha atau sebesar 12,56 % dari luas wilayah kabupaten yang sebagiannya merupakan kawasan hutan produksi tetap. Dengan kondisi seperti ini dan sesuai amanat Undang-Undang maka luas kawasan hutan yang ada harus dipertahankan.

Program dan kegiatan yang mendukung upaya pencapaian sasaran tersebut adalah program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan kegiatan optimalisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dengan kegiatan sosialisasi perundang-undangan bidang kehutanan dan perkebunan.

Kawasan hutan di Kabupaten Ciamis terdiri dari hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan konservasi.

- Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan secara terbatas.
- Hutan konservasi adalah kawasan hutan dan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Sasaran 32 : Meningkatnya Peran Koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Non Perbankan Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat

Sasaran ini menggambarkan upaya untuk meningkatkan peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam ikut serta mengembangkan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor mikro terutama dalam penyediaan pembiayaan.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Jumlah koperasi aktif; dan (2) Jumlah UMKM, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.74

**Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah koperasi aktif	Unit (%)	289 (42,94)	102,24	325 (48,29)	107,26	319 (43,40)	292 (39,73)	91,54
2	Jumlah UMKM	Unit	1,153	99.83	14.311	357,78	14.377	14.545	101,17
Rata-rata Capaian Kinerja		%		101,04		232,52			96,35

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran meningkatnya peran koperasi, UMKM dan Lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat tahun 2016 adalah sebesar 96,35 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang belum optimal khususnya pada jumlah koperasi aktif.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2016 (96,35 %), menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 (232,52 %) dan capaian kinerja tahun 2014 (101,04 %).

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.75
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah koperasi aktif	Unit (%)	292 (39,73)	319 (43,40)	91,54
2	Jumlah UMKM	Unit	14.545	3.833	379,47
Rata-rata Capaian Kinerja		%			235,50

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 235,50 % atau lebih tinggi dari capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Hal ini karena adanya perbedaan target indikator jumlah UMKM yang ada di Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan target RPJMD Tahun 2016.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat

dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu : (1) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, dan (2) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 324.915.000,- atau sebesar 99,97 % dari total pagu anggaran Rp. 325.000.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Analisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah koperasi aktif adalah jumlah koperasi yang aktif menjalankan usahanya dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun. Pada tahun 2016 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 735 unit. Dari jumlah seluruh koperasi tersebut, yang aktif menjalankan usahanya dan melakukan RAT setiap tahun ada sebanyak 121 unit koperasi atau 16,46 % dari jumlah seluruh koperasi. Target yang direncanakan pada tahun 2016 adalah sebanyak 319 unit atau 43,40 % dari jumlah seluruh koperasi, sehingga terdapat penurunan realisasi (capaian nyata) sebanyak 27 unit atau 3,67 % dari target yang ditetapkan sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 91,54% termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2015 realisasi (capaian nyata) jumlah koperasi aktif adalah sebanyak 325 unit (45,02%) dengan capaian kinerja sebesar 107,26 %. Sedangkan tahun 2014 menunjukkan realisasi (capaian nyata) sebanyak 289 unit (42,94%) dengan capaian kinerja sebesar 102,24 %. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi (capaian nyata) dan capaian kinerja tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan lebih baik/tinggi dari tahun 2014. Penyebab menurunnya capaian kinerja indikator jumlah koperasi aktif dikarenakan :

- a. Pendidikan koperasi tidak didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi anggota atau kesamaan kegiatan usaha anggota sehingga koperasi mengalami kesulitan dalam menentukan kegiatan usaha yang seharusnya memiliki

kepentingan langsung dengan kepentingan ekonomi anggotanya atau kegiatan usaha anggota.

- b. Tingkat partisipasi anggota dalam permodalan sangat rendah sehingga koperasi kesulitan dalam menyediakan modal awal untuk membiayai kegiatan usahanya.

Solusi/upaya perbaikan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan program/kegiatan.
- b. Mensinergikan program/kegiatan secara vertikal baik dengan kementerian maupun OPD terkait di tingkat provinsi.
- c. Melibatkan pihak-pihak terkait baik dari pemerintahan, swasta, masyarakat maupun dunia pendidikan sehingga dapat melaksanakan program/kegiatan sesuai keinginan dan kebutuhan pelaku koperasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah koperasi aktif dan kualitas koperasi yang ada.

Untuk mencapai indikator jumlah koperasi aktif dilaksanakan melalui program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 295.000.000,- atau 100% dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

2. Jumlah UMKM

Jumlah UMKM adalah jumlah potensi usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Ciamis. Jumlah UMKM dihitung berdasarkan data jumlah potensi usaha mikro,



kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 yaitu sebanyak 14.545 unit UMKM.

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan yaitu sebanyak 14.377 unit, sehingga capaian kinerja indikator menunjukkan angka sebesar 101,17 %. Faktor yang mendukung keberhasilan atau peningkatan capaian kinerja indikator ini yaitu :

- a. Adanya dukungan fasilitasi program/kegiatan yang anggarannya berasal baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN Pusat. Sehingga UMKM dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan baik, dimana produknya dapat bersaing di pasaran dan laku terjual, yang pada akhirnya UMKM di Kabupaten Ciamis dapat berkembang dengan baik.
- b. Adanya dukungan pembinaan oleh aparatatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dekopinda Kabupaten Ciamis; Universitas Galuh; SKPD-SKPD terkait baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat kepada para pelaku UMKM sehingga dapat berkembang dan setiap tahunnya akan tumbuh pelaku-pelaku UMKM baru.

Untuk mencapai indikator jumlah UMKM dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; dan (2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 324.915.000,- atau 99,97 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Sasaran 33 : Meningkatnya Investasi Yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Investasi yang berbasis potensi unggulan lokal dilakukan melalui indikator : (1) Lama proses perijinan, dan (2) Jumlah investasi yang meliputi : jumlah investor PMA, jumlah

PMDN, jumlah non PMA/PMDN, nilai investasi PMA, nilai investasi PMDN dan nilai investasi Non PMA/PMDN, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.76

Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Investasi Yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Lama proses perijinan	Hari	10	100	10	100	10	10	100
2	Jumlah investasi:								
	a. Jumlah investor PMA	Buah/perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
	b. Jumlah PMDN	Buah/perusahaan	763	99,09	2	200	800	703	87,88
	c. Nilai investasi PMA	Milyar Rp.	-	-	-	-	-	-	-
	d. Nilai investasi PMDN	Milyar Rp.	151	102,72	48.361.185.000	100,75	173	178	102,89
	e. Nilai investasi Non PMA/PMDN	Milyar Rp.	0	0	173,275	105,65	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja				60,36		84,11			96,92

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal tahun 2016 adalah sebesar 96,92 atau termasuk dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melebihi target, 1 (satu) indikator tercapai sesuai target,

1 (satu) indikator tidak mencapai target dan sisanya tidak ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2016.

- c. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu secara umum menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2016 lebih tinggi atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 84,11 % dan tahun 2014 sebesar 60,36 %.

Sedangkan perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.77

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Investasi Yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Lama proses perijinan	Hari	10	10	100
2	Jumlah investasi:				
	a. Jumlah investor PMA	Buah/ perusahaan	0	1	0
	b. Jumlah PMDN	Buah/ perusahaan	703	1	70300
	c. Jumlah Non PMA/ PMDN	Perusahaan	0	991	0
	d. Nilai investasi PMA	Milyar Rp.	0	1	0
	e. Nilai investasi PMDN	Milyar Rp.	178	0	-
	f. Nilai investasi Non PMA/ PMDN	Milyar Rp.	0	173	0

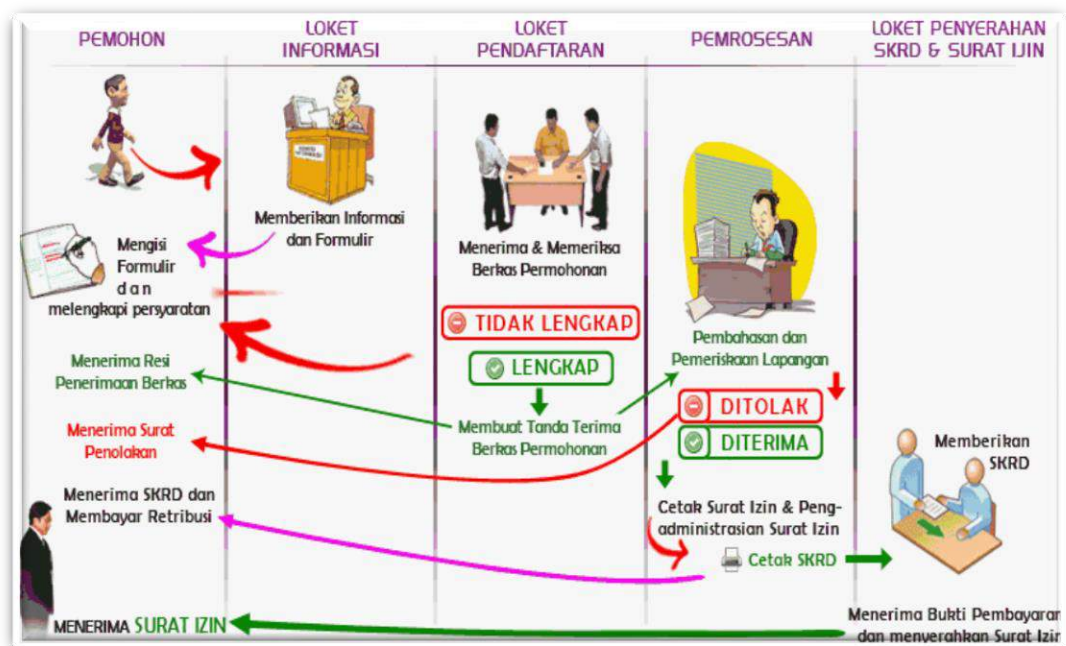
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu : (1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi, dan (2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.742.107.450,- atau sebesar 99,37 % dari total pagu anggaran Rp. 1.753.147.450,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk memproses perijinan terhitung mulai berkas lengkap diterima sampai terbitnya ijin. Pada tahun 2016 lama proses perijinan mencapai 10 hari sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori/predikat sangat baik. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015 dan 2014.



Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain adalah iklim perijinan yang kondusif serta komitmen dari Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan yang baik di bidang perijinan. Sedangkan hambatan/kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan perijinan antara lain yaitu masih ditemukan adanya kekurangan terhadap kelengkapan berkas permohonan izin yang disampaikan oleh pemohon.

Strategi/upaya yang dilakukan yaitu memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan perijinan dan melaksanakan proses perijinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, sehingga perijinan dapat diterbitkan tidak melebihi jangka waktu selama 10 hari. Khusus untuk perijinan SIUP berdasarkan Permendagri No.46 Tahun 2009 pasal 12 untuk proses SIUP tidak melebihi 3 hari setelah berkas dinyatakan lengkap.

Untuk mencapai indikator sasaran Lama proses perijinan dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.025.235.900,- atau 98,93 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

2. Jumlah Investasi

a. Jumlah investor PMA

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang disebut sebagai "Penanaman Modal Asing", harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- (1) Merupakan kegiatan menanam modal
- (2) Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Dilakukan oleh penanam modal asing
- (4) Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan rumusan diatas diketahui bahwa PMA di Kabupaten Ciamis dari tidak ditargetkan karena :

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk industri Menengah dan besar belum dibuat.
- (2) Sumber daya Alam dan Sarana Prasarana infrastuktur belum memadai.

b. Jumlah PMDN

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.

Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang penanaman modal.

Jumlah investor PMDN yang menjadi target pada tahun 2015 sebanyak 800 buah perusahaan dapat terealisasi sebesar 703 buah dengan tingkat capaian sebesar 87,88 % dan termasuk dalam kategori baik.

Dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah investor PMDN adalah sebanyak 765 buah perusahaan, sehingga apabila diakumulasikan/ditambah dengan realisasi (capaian nyata) tahun 2016 maka jumlah investor PMDN pada tahun 2016 mengalami peningkatan.

c. Jumlah non PMA/PMDN

Perusahaan Non PMA/PMDN adalah perusahaan diluar PMA dan PMDN, termasuk di dalamnya perusahaan mikro kecil dan menengah yang modalnya berkisar 1 juta sd. 10 Milyar. Pada tahun 2016 jumlah investor Non PMDN/PMA tidak ditargetkan dalam perjanjian kinerja.

d. Nilai investasi PMA

Pada tahun 2016 Nilai investasi PMA yang direncanakan di Kabupaten Ciamis adalah sebesar Rp. 1 Milyar. Target ini tidak dapat dicapai karena pada tahun 2016 tidak ada Perusahaan/investor asing yang masuk ke Kabupaten Ciamis, sehingga capaian kinerja menunjukkan angka 0 %. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 sama dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Kondisi yang menjadi kendala atau hambatan antara lain adalah :

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk industri Menengah dan besar belum dibuat.
- (2) Sumber daya Alam dan Sarana Prasarana infrastruktur yang belum memadai.

e. Nilai investasi PMDN

Pada tahun 2016 Jumlah nilai investasi PMDN di Kabupaten Ciamis adalah sebesar Rp. 178 Milyar atau melampaui dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 173 Milyar dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103 % dan termasuk dalam kategori/predikat sangat baik.

Dibandingkan dengan dengan realisasi nyata 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2014, maka capaian realisasi nyata nilai investasi PMDN di Kabupaten Ciamis dapat dikatakan mengalami peningkatan meskipun ada penurunan pada tahun 2015.

f. Nilai investasi non PMA/PMDN

Pada tahun 2016, indikator Nilai Investasi non PMA/PMDN dalam perjanjian kinerja tidak ditargetkan.

Untuk mencapai indikator kinerja jumlah investasi dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 716.871.550,- atau 100 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Sasaran 34 : Meningkatnya Investasi Yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dilakukan melalui 6 (enam) indikator yaitu:

- (1) Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- (2) Jumlah komoditas unggulan pertanian bersertifikat;
- (3) Dokumen potensi daerah;
- (4) Jumlah kunjungan wisatawan;
- (5) Jumlah pameran produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (6) Jumlah objek wisata rintisan baru;

dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.78
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Daya Saing Potensi Unggulan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016			RPJMD		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Tahun 2016	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	IKM	10	100	11	11	100	11	11	100
2	Jumlah komoditas unggulan pertanian bersertifikat	Jenis	1	50	3	3	100	3	3	100
3	Dokumen potensi daerah	Dok	1	100	1	1	100	1	1	100
4	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	450.000	88,02	500.000	640.941	128,19	500.000	640.941	128,19

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016			RPJMD		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Tahun 2016	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
5	Jumlah pameran produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif	Kali	7	100	9	9	100	6	9	150
6	Jumlah objek wisata rintisan baru	Lokasi	5	80	4	4	100	6	4	66,67
Rata-rata Capaian Kinerja		%		86,34			104,70			107,48

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah tahun 2016 adalah sebesar 104,70 %, dengan kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 5 (lima) indikator tercapai sesuai target, dan 1 (satu) indikator tercapai melampaui target.
- Capaian kinerja sasaran tahun 2016 lebih tinggi dari pada tahun 2015. pada tahun 2015 capaian kinerja sasaran mencapai 89,67 % dan pada tahun 2016 mencapai 107,48 %, sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 15,03 %.
- Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 107,48 %. Tingkat

capaian dari 6 (enam) indikator sasaran tersebut yaitu: 2 (dua) indikator tercapai melampaui target, 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target RPJMD Tahun 2016.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dilaksanakan melalui 8 (delapan) program, yaitu :

- (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- (2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- (3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
- (4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK
- (5) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya
- (6) Program Pengembangan Kemitraan
- (7) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- (8) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.458.737.163,- atau sebesar 99,06 % dari total pagu anggaran Rp. 4.501.080.863,- dengan capaian output sebesar 98,96 % dan capaian outcome sebesar 97,78 %.

Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Produk Yang Telah Dilindungi Oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Yang dimaksud dengan indikator jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sedang dalam proses agar produknya dapat dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada kurun waktu 1 (satu) tahun.

Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dihitung berdasarkan data jumlah IKM yang sedang dalam proses agar

produknya dapat dilindungi oleh HAKI. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 11 ikm sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, sehingga menunjukkan capaian kinerja indikator sebesar 100 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan capaian kinerja indikator ini yaitu:

- a. Fasilitasi pembuatan perijinan dan legalitas usaha serta undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga dapat berkembang dan bersaing dalam kegiatan perekonomian baik di daerah, provinsi maupun secara nasional.
- b. Adanya dukungan pembinaan oleh aparaturnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Bappeda Kabupaten Ciamis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Hukum dan HAM RI kepada pelaku Industri, Kecil dan Menengah (IKM) sehingga dalam proses pembuatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dapat berjalan dengan baik.

2. Jumlah Komoditas Unggulan Pertanian Bersertifikat

Salah satu aktivitas yang diperlukan sebagai media dalam meningkatkan pembangunan pertanian yaitu adanya komoditas unggulan bersertifikat atau dalam arti lain sudah diakui keberadaannya sehingga produk tersebut memiliki identitas yang mewakili daerah tersebut.

Target Perjanjian Kinerja tahun 2016 terkait dengan indikator jumlah komoditas unggulan pertanian bersertifikat yang telah diproses adalah sebanyak 3 (tiga) jenis dan terealisasi 3 (tiga) jenis. Komoditas unggulan tersebut merupakan produk olahan hasil pertanian dalam hal ini tepung singkong dari Gapoktan Nusajaya Desa Margamulya Kecamatan Kawali, sertifikat halal beras organik dari Kelompok Tani Margamukti Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican dan proses sertifikat organik untuk Durian Si Helm dari Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis.

Meskipun cukup banyak persyaratan yang harus ditempuh/dipenuhi bagi sebuah produk untuk dapat diakui keberadaannya sampai dengan dimunculkannya sertifikat sesuai dengan jenis sertifikatnya oleh instansi/lembaga yang ditunjuk, tetapi target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 ini dapat terealisasi/tercapai seluruhnya. Beberapa indikator yang harus dimiliki diantaranya adalah dokumen sistem manajemen mutu, register kebun, standar operasional prosedur dan langkah lain yang ditempuh sampai dengan dikeluarkannya sertifikasi terhadap produk tersebut.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah komoditas unggulan pertanian bersertifikat dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan; dan (2) Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.224.469.800,- atau 97,19 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 91,11 %.

3. Dokumen Potensi Daerah

Potensi Daerah yang dimaksud adalah potensi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada tahun 2015 dokumen potensi daerah yang tersusun adalah 1 (satu) dokumen sesuai dengan target yang direncanakan. Dokumen tersebut yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2015 – 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan pariwisata daerah yang memuat data potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Ciamis dan rencana pengembangannya untuk jangka waktu sepuluh tahunan. Dengan demikian capaian kinerja indikator Dokumen Potensi Daerah menunjukkan capaian sebesar 100 %, termasuk dalam kategori sangat baik. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator yang baru, baik dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 maupun dalam RPJMD 2014-2019, sehingga pencapaian indikator ini tidak dapat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini karena didorong dengan adanya pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran, dimana sebagian besar potensi pariwisata beralih ke Kabupaten Pangandaran. Sehingga dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Ciamis pasca pemekaran daerah disusunlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ciamis.

Untuk mencapai indikator sasaran Dokumen potensi daerah dilaksanakan melalui 5 (lima) program yaitu : (1). Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK; (2). Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya; (3). Program Pengembangan Kemitraan; (4). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; (5). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.151.742.363,- atau 99,78 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 98,33 % dan outcome sebesar 100 %.

4. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan adalah perhitungan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2016, target kunjungan wisatawan di Kabupaten Ciamis sebanyak 500.000 orang. Target jumlah kunjungan tersebut tercapai 640.941 orang atau mencapai 128,19% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan antara lain yaitu dengan melakukan perbaikan-perbaikan sarana prasarana obyek pariwisata serta menggali potensi obyek-obyek wisata lainnya serta melakukan promosi dalam berbagai *event* maupun pameran.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah kunjungan wisatawan dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata; (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 2.163.968.863,- atau 99,90 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

5. Jumlah Pameran Produk Unggulan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pameran produk unggulan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pameran, keikutsertaan dan/atau mengirimkan peserta dalam pameran produk unggulan Kabupaten Ciamis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau *event organizer*.

Pada tahun 2016 dari indikator target jumlah pameran produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 9 (sembilan) kali kegiatan terlaksana 9 (sembilan) kali atau mencapai 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Kegiatan pameran yang diikuti/dilaksanakan bertempat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Bandung (BITT dan BITRA), Yogyakarta, Malang, Bali, Jakarta *Convention Centre*, Surabaya dan Ciamis.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah banyaknya *event* yang diikuti pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menampilkan beberapa produk unggulan di berbagai kota-kota besar. Kegiatan tersebut merupakan *moment* yang tepat karena Kabupaten Ciamis berusaha mempromosikan potensi-potensi unggulan yang dapat menarik minat masyarakat.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah pameran produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.054.150.363 atau 99,96 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

6. Jumlah Obyek Wisata Rintisan Baru

Perintisan obyek wisata adalah sebuah proses pengembangan dari sesuatu "potensi wisata" menjadi obyek wisata yang dikelola berdasarkan manajemen obyek wisata yang baik. Perintisan obyek wisata juga dapat dilakukan untuk obyek wisata

yang awalnya tidak ada sama sekali menjadi terbangunnya suatu obyek wisata. Dengan demikian pengertian jumlah obyek wisata yang dirintis adalah jumlah potensi wisata yang dirintis menjadi obyek wisata dan/atau penciptaan obyek wisata dari yang semula tidak ada menjadi ada.



Pada tahun 2016, jumlah obyek wisata rintisan baru yang terus dikembangkan adalah sebanyak 4 (empat) lokasi/obyek wisata sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga indikator ini menunjukkan

capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Obyek Wisata Rintisan tersebut yakni :

- (1) Obyek Wisata Situ Wangi di Kecamatan Kawali;
- (2) Obyek Wisata Situ Cibubuhan di Kecamatan Sukamantri;
- (3) Obyek Wisata Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing; dan
- (4) Arung Jeram di Kecamatan Cijeungjing.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini dapat tercapai sesuai target adalah adanya kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata rintisan baru sehubungan berkurangnya potensi obyek wisata Kabupaten Ciamis karena berpindah ke Kabupaten Pangandaran sebagai akibat adanya pemekaran daerah.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah objek wisata rintisan baru dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan (2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.163.968.863,- atau 99,90 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Sasaran 35 : Terwujudnya Sentra-Sentra Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal

Sasaran ini menggambarkan upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan jumlah sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal dalam ikut serta mengembangkan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor industri terutama dalam peningkatan daya saing dan pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan potensi unggulan lokal.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Jenis komoditi industri, dan (2) Jumlah kluster industri, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.79

Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Sentra-Sentra Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jenis komoditi industri	Jenis	28	100	30	103,45	30	33	110
2	Jumlah kluster industri	Kluster	1	100	1	100	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%		100		101,73			105

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal tahun 2016 adalah sebesar 105 %, dengan kategori sangat baik.

- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melampaui target dan 1 (satu) indikator tercapai sesuai target.
- c. Perbandingan realisasi (capaian nyata) masing-masing indikator pada tahun 2016 menunjukkan :
- Realisasi (capaian nyata) Jenis komoditi industri tahun 2016 tercapai sebanyak 33 jenis, mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2015 sebanyak 30 jenis dan tahun 2014 sebanyak 28 jenis. Sedangkan realisasi (capaian nyata) jumlah kluster industri cenderung tidak ada peningkatan selama 3 (tiga) tahun cenderung sama yaitu sebanyak 1 (satu) kluster.
 - Capaian kinerja tahun 2016 (105 %) lebih tinggi dan mengalami peningkatan sebesar 3,27 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (101,73 %) dan meningkat sebesar 5 % dibandingkan tahun 2014 (100 %).

Sedangkan perbandingan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 105 % sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.80
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Terwujudnya Sentra-Sentra Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Potensi
Unggulan Lokal Tahun 2016 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jenis komoditi industri	Jenis	33	30	110
2	Jumlah kluster indutri	kluster	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%			105

Program pembangunan yang mendukung upaya pencapaian sasaran terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal yaitu: (1) Program pengembangan industri kecil dan menengah, dan (2) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan realisasi penyerapan anggaran program tersebut sebesar Rp. 1.832.983.000,- atau sebesar 99,77 % dari total pagu anggaran Rp. 1.837.150.000,- dengan capaian output sebesar 98,42 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Adapun analisa penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jenis Komoditi Industri

Yang dimaksud dengan indikator jenis komoditi industri adalah jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya secara berlebihan.

Jenis komoditi industri dihitung berdasarkan data jumlah jenis komoditi industri yang termasuk potensi IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Ciamis sampai tahun 2016 yaitu sebanyak 33 jenis komoditi



industri. Sedangkan target tahun 2016 sebanyak 30 jenis komoditi industri, sehingga capaian indikator kinerja sasaran menunjukkan angka sebesar 110%.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

- a. Melakukan upaya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) sehingga kendala yang dihadapi seperti keterbatasan modal kerja, sarana mesin dan peralatan produksi yang kurang memadai, teknologi yang digunakan masih sederhana, kemasan produk masih sederhana dan lain-lain dapat teratasi, sehingga IKM dapat tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya jumlah komoditi industri di Kabupaten Ciamis dapat terus berkembang dan bertambah jumlah komoditinya.
- b. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN. Untuk merekomendasikan agar mendapatkan bantuan fasilitasi tersebut maka pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) harus dipersiapkan dan terus mendapatkan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan agar dapat memenuhi dan sesuai syarat untuk mendapatkan bantuan fasilitasi baik dari APBD Provinsi maupun dari APBN.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan jenis komoditi industri antara lain yaitu :

- a. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan program/kegiatan;
- b. Melaksanakan sinergitas program/kegiatan dengan instansi vertikal yaitu dengan Provinsi maupun Pusat;
- c. Melibatkan pihak-pihak terkait baik dari pemerintahan, swasta, masyarakat maupun dunia pendidikan sehingga dapat melaksanakan program/kegiatan sesuai keinginan dan kebutuhan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang pada akhirnya dapat meningkatkan jenis komoditi industri di Kabupaten Ciamis.

Untuk mencapai indikator Jenis komoditi industri dilaksanakan melalui program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.268.083.000,- atau 99,68 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 96,83 % dan outcome sebesar 100 %.

2. Jumlah Kluster Industri

Jumlah kluster industri adalah jumlah kluster industri yang ditetapkan pemerintah dan akan dijadikan sebagai objek pembinaan baik dari pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Jumlah kluster industri dihitung berdasarkan data jumlah kluster industri yang ada di Kabupaten Ciamis pada tahun ini yaitu sebanyak 1 (satu) kluster industri. Dengan target tahun 2016 sebanyak 1 (satu) kluster industri maka capaian kinerja indikator sasaran tercapai sesuai target sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

- a. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN. Untuk merekomendasikan agar mendapatkan bantuan fasilitasi tersebut maka pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) harus dipersiapkan dan terus mendapatkan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan agar dapat memenuhi dan sesuai syarat untuk mendapatkan bantuan fasilitasi baik dari APBD Provinsi maupun dari APBN.
- b. Melakukan upaya pembinaan bagi SDM pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan diberikan pembinaan dan pelatihan mengenai manajemen usaha, manajemen produksi, dll dapat teratasi sehingga IKM dapat tumbuh dan berkembang, pada akhirnya jumlah kluster industri yang ada di Kabupaten Ciamis dapat terus berkembang dan bertambah jumlah klusternya.

Untuk mencapai indikator Jumlah kluster industri dilaksanakan melalui program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 564.900.000,- atau 100 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100,00 %.

Sasaran 36 : Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Terwujudnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Jumlah pasar pemda, dan (2) Jumlah pasar desa, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.81
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah pasar pemda	Unit	4	100	4	100	4	4	100
2	Jumlah pasar desa	Unit	48	100	48	100	48	48	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%		100		100			100

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat tahun 2016 adalah sebesar 100 %, dengan kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, keduanya tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan tahun lalu menunjukkan realisasi dan capaian kinerja yang sama sebesar 100 %.

- d. Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua



perencanaan menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % dengan 2 (dua) indikator tercapai sesuai dengan target RPJMD tahun 2016, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.82
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat Tahun 2016
Dengan Rencana RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah pasar pemda	Unit	4	4	100
2	Jumlah pasar desa	Unit	48	48	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%			100

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.587.006.600,- atau sebesar 97,87 % dari total pagu anggaran Rp. 3.665.141.600,- dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Penjelasan/analisa capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pasar Pemda

Jumlah pasar pemda adalah jumlah pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Jumlah pasar pemda dihitung berdasarkan data jumlah pasar yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 yaitu sebanyak 4 (empat) buah pasar. Dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) buah pasar, maka capaian kinerja indikator sasaran ini tercapai sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

- a. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN. Untuk merekomendasikan agar mendapatkan bantuan fasilitasi tersebut maka pelaku pasar tradisional harus dipersiapkan dan terus mendapatkan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan agar dapat memenuhi dan sesuai syarat untuk mendapatkan bantuan fasilitasi baik dari APBD Provinsi maupun dari APBN.
- b. Melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap pasar tradisional sehingga pasar menjadi tertata rapi, bersih dan nyaman. Setelah itu diharapkan banyak konsumen yang berbelanja ke pasar tradisional. Sehingga pasar pemda dapat tumbuh dan berkembang, pada akhirnya jumlah pasar pemda yang ada di Kabupaten Ciamis dapat terus berkembang dan bertambah jumlah pasarnya.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah pasar pemda dilaksanakan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.587.006.600,- atau sebesar 97,87 % dari total pagu anggaran Rp. 3.665.141.600,- dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

2. Jumlah Pasar Desa

Jumlah pasar desa adalah jumlah pasar yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Ciamis. Jumlah pasar desa dihitung berdasarkan data jumlah pasar yang dimiliki dan dikelola pemerintah desa di Kabupaten Ciamis sampai tahun ini yaitu sebanyak 48 pasar desa. Dengan target

tahun 2016 sebanyak 48 pasar desa maka menunjukkan capaian kinerja indikator sebesar 100 %.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu:

- a. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN. Untuk merekomendasikan agar mendapatkan bantuan fasilitasi tersebut maka pelaku pasar tradisional harus dipersiapkan dan terus mendapatkan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan agar dapat memenuhi dan sesuai syarat untuk mendapatkan bantuan fasilitasi baik dari APBD Provinsi maupun dari APBN.
- b. Melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap pasar tradisional sehingga pasar menjadi tertata rapi, bersih dan nyaman. Setelah itu diharapkan banyak konsumen yang berbelanja ke pasar tradisional. Sehingga pasar desa dapat tumbuh dan berkembang, pada akhirnya jumlah pasar desa yang ada di Kabupaten Ciamis dapat terus berkembang dan bertambah jumlah pasarnya.

Untuk mencapai indikator sasaran Jumlah pasar desa dilaksanakan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.587.006.600,- atau sebesar 97,87 % dari total pagu anggaran Rp. 3.665.141.600,- dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Sasaran 37 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Menurunnya Disparitas Pendapatan

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan dilakukan melalui 5 (lima) indikator yaitu :

- (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
- (2) PDRB Per kapita (AdHB);
- (3) Paritas daya beli (PPP) (x1000);
- (4) Inflasi;
- (5) Pengangguran;

dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.83

Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Menurunnya Disparitas Pendapatan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	LPE	%	5,02	100	5,04	100	5,02	5,02	100
	LPE)*	%	5,07		5,58		5,17	5,17	100
2	PDRB Per kapita (AdHB)	Rupiah	15.909.888,51	105,57	18.713.332,86	100	20.721.066	20.721.066	100
	PDRB Per kapita (AdHB)*	Rupiah	17.550.491,64	-	19.582.937,83	-	21.861.913	20.711.779	94,74
3	Paritas Daya Beli (PPP) (x 1000)	Rupiah	64.208	100	64.225	100,01	64.326	64.326	100
	Daya Beli Masyarakat)*	Rupiah	8.162.139	-	8.295.757	-	8.244.200	8.382.032	101,67
4	Inflasi	%	7,47	100	3,51	150,14	4,37	2,75	137,07
5	Pengangguran	%	5,39	100	6,99	73,83	5,30	5,30	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%		100,23		104,79			107,41
Rata-rata Capaian Kinerja)*		%							106,70

Keterangan)* : Menggunakan metode perhitungan/rumus baru berdasarkan BPS

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan tahun 2016 adalah sebesar 107,41 %, dalam kategori sangat baik. Apabila indikator kinerja sasaran menggunakan metode

perhitungan baru BPS maka capaian kinerja sasaran sebesar 106,70 % atau dengan kategori sangat baik.

- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melampaui target dan 4 (empat) indikator tercapai sesuai target.
- c. Capaian kinerja masing-masing indikator apabila menggunakan metode perhitungan baru BPS maka dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 2 (dua) indikator tercapai melampaui target, 1 (satu) indikator tercapai sesuai dengan target dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target.
- d. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 (107,41 %), mengalami peningkatan sebesar 2,62 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (104,79 %) juga mengalami peningkatan sebesar 5,18 % dibanding capaian kinerja tahun 2014 (102,23 %).

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.84

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
dan Menurunnya Disparitas Pendapatan Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	LPE	%	5,02	5,07	99,01
	<i>LPE)*</i>	%	5,02	-	
2	PDRB Per kapita (AdHB)	Rupiah	20.721.066	20.570.752	100,73
	<i>PDRB Per kapita (AdHB)*</i>	Rupiah	20.711.779	-	

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
3	Paritas Daya Beli (PPP) (x 1000)	Rupiah	64.326	64.236	100,14
	<i>Daya Beli Masyarakat</i>)*	Rupiah	8.382.032	-	
4	Inflasi	%	2,75	7,13	161,43
5	Pengangguran	%	5,30	5,47	103,11
Rata-rata Capaian Kinerja					112,88

Keterangan)*: Menggunakan metode perhitungan/rumus baru berdasarkan BPS

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 112,88 %. Perhitungan dengan metode perhitungan baru BPS tidak dapat dilihat sampai dengan capaian kinerja dikarenakan tidak di targetkan dalam RPJMD.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

- (1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- (2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 812.883.713,- atau sebesar 99,83 % dari total pagu anggaran Rp. 814.256.713.000,- dengan capaian output sebesar 99,07 % dan capaian outcome sebesar 95,67 %.

Adapun penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, yang digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan. Diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. LPE dapat dihitung dengan rumus :

$$R = \frac{PDRBAdHKt - PDRBAdHKt1}{PDRBAdHKt1} \times 100$$

Keterangan :

r = pertumbuhan ekonomi tahunan pada tahun t terhadap tahun t-1

PDRBAdHKt = Produk Domestik Regional Brutto atas dasar Harga Konstan tahun t

PDRBAdHKt1 = Produk Domestik Regional Brutto atas dasar Harga Konstan tahun t-1

Pada tahun 2016, PDRBAdHKt sebesar (Juta Rp.) 7.233.976,73 dan PDRBAdHKt1 sebesar (Juta Rp.) 6.887.986,77 sehingga realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,02 % dari target sebesar 5,02 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat Sangat Baik. Namun jika membanding realisasi dan target pada RPJMD maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 99,01%.

Capaian kinerja tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014 senantiasa tetap. Sedangkan realisasi kinerja indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2016 sebesar 5,02% menunjukkan penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 5,04% dan tetap apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,02%.

Jika menggunakan metode perhitungan baru berdasarkan BPS pada dasarnya tidak berubah hanya perhitungan PDRB AdHK yang berbeda, maka nilainya pun berbeda. Dengan perhitungan metode baru, nilai PDRB AdKht adalah sebesar Rp. 18.672.176,44 sedangkan PDRBAdHKt1 sebesar Rp. 17.779.804,41. Berdasarkan angka tersebut maka dihasilkan nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,02%

Percepatan laju pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya beberapa indikator produksi yang memberikan kontribusi cukup berpengaruh bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis seperti sektor Industri Pengolahan, Bangunan, Perdagangan Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa.

2. PDRB Per Kapita (AdHB)

PDRB Per Kapita ADH berlaku adalah salah satu turunan dari angka PDRB yang dijadikan indikator kesejahteraan suatu wilayah (daerah), menunjukkan jumlah rata-rata nilai tambah yang bisa dinikmati oleh setiap penduduk dan dapat dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{PDRB per kapita AdHB, t} &= \frac{\text{PDRB AdHB}}{\text{Jumlah Penduduk Tengah Tahun, t}} \\ \text{Jumlah Penduduk Tengah Tahun, t} &= \frac{\text{Jml Pnddk Akhir Thn, t} - \text{Jml Pnddk Awal Thn, t}}{2} \end{aligned}$$

Pada tahun 2016, realisasi PDRB per kapita Atas dasar Harga Berlaku adalah sebesar (Juta Rp.) 24.355.312,90 dan jumlah penduduk tengah tahun sebanyak 1.175.389 jiwa, sehingga realisasi PDRB per kapita AdHB sebesar Rp. 20.721.066,- dari target sebesar Rp. 20.721.066,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 %, dengan predikat Sangat Baik.

Capaian kinerja tahun 2016 sama bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 100 %, dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 105,57 %. Sedangkan realisasi kinerja indikator PDRB per kapita Atas dasar Harga Berlaku tahun 2016 sebesar Rp. Rp. 20.721.066,- senantiasa menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar Rp. 18.713.332,86,- dan tahun 2014 sebesar Rp. 15.909.888,51,-.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016, maka realisasi kinerja indikator PDRB per kapita Atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 20.721.066,- dari target sebesar Rp. 20.570.752,- dengan persentase capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 sebesar 100,73 % dengan predikat Sangat Baik. Namun demikian apabila capaian RPJMD ini dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016 lebih tinggi dikarenakan terdapatnya kenaikan target yang ditetapkan pada setiap tahunnya.

Jika menggunakan metode perhitungan baru berdasarkan BPS pada dasarnya tidak berubah, hanya perhitungan PDRB AdHB yang berbeda, maka nilainya pun berbeda. Dengan perhitungan metode baru, nilai PDRB AdHB adalah sebesar Rp. 24.344.397.780.000 sedangkan jumlah penduduk pertengahan tahun adalah sebesar 1.175.389 jiwa. Berdasarkan angka tersebut maka dihasilkan nilai PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku (AdHB) sebesar Rp. 20.711.779,49. Dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2016 sebesar Rp. 21.861.913,61 maka capaian kinerja indikator PDRB Per Kapita AdHB adalah 94,74 %.

3. Paritas Daya Beli (PPP) (x 1000)

Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Manfaatnya adalah untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson, yang memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten/kota.

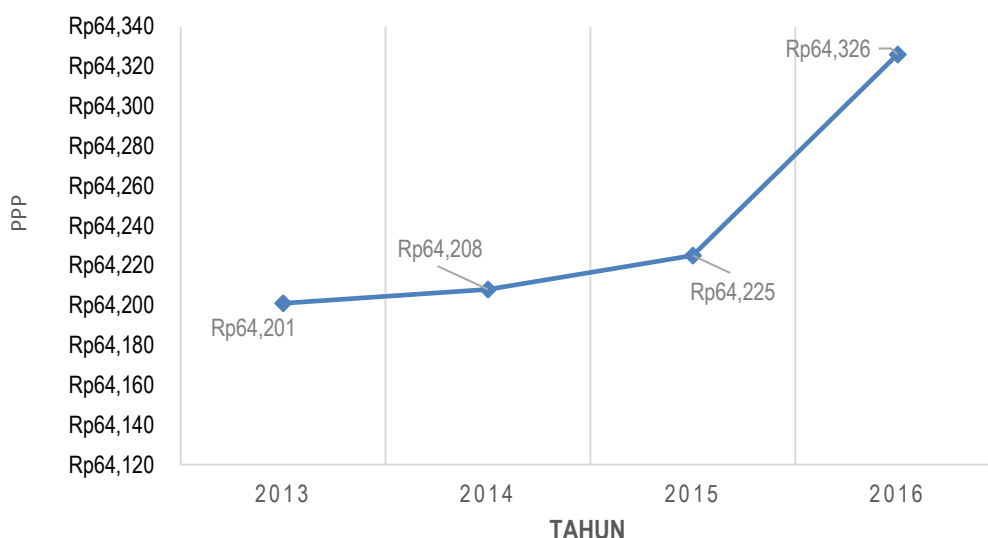
Pada tahun 2016, paritas daya beli masyarakat mencapai sebesar Rp. 64.326,- dari target Rp. 64.326,- sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %

dengan predikat Sangat Baik. Paritas daya beli masyarakat tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015 (Rp. 64.225,-) maka terdapat peningkatan sebesar Rp. 101,- dan bila dibanding dengan tahun 2014 (Rp. 64.208,-) maka terdapat peningkatan sebesar Rp. 118,-.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016, maka capaian kinerja paritas daya beli masyarakat mencapai sebesar Rp. 64.326 dari target Rp. 64.236 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,14%, lebih daripada target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Peningkatan daya beli masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena daya beli masyarakat pergerakannya tidak terlepas dari dinamika kinerja ekonomi yang saling terkait dengan kondisi perekonomian regional, nasional, dan internasional yang membaik.

Grafik 3.37
Perkembangan Paritas Daya Beli Masyarakat (*Purchasing Power Parity*)
Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2016 (Ribu Rp.)



Jika menggunakan metode perhitungan baru berdasarkan BPS, indikator sasaran ini bukan lagi bernama Paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). BPS merubah nama Paritas Daya Beli menjadi Daya Beli masyarakat yang perhitungannya didasarkan pada :

- a. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli;
- b. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100;
- c. Menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan, dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode perhitungannya menggunakan Metode Rao.

Realisasi indikator daya beli masyarakat berdasarkan metode perhitungan baru adalah Rp. 8.382.032,- dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 8.244.200,- . Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 101,67% atau dengan kategori sangat baik.

4. Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu, sehingga tingkat inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum yang pengukurannya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rate of inflation (year } t) = \frac{\text{Price level (year } t) - \text{Price level (year } t-1)}{\text{Price level (year } t-1)}$$

Pada tahun 2016, realisasi laju inflasi di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 2,75% dari target 4,37% sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 137,07 % termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian kinerja tahun 2016 (137,07 %) mengalami penurunan capaian kinerja bila dibandingkan dengan tahun 2015 (150,14 %), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 (100 %). Apabila realisasi kinerja laju inflasi tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 161,43 %. Namun demikian Capaian kinerja RPJMD lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran dikarenakan perbedaan target dari keduanya.

Capaian nyata (realisasi) Laju inflasi pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2015 (3,51 %) maka laju inflasi tahun 2016 menurun/mengalami perlambatan sebesar 0,76 %, artinya pengendalian laju inflasi di Kabupaten Ciamis tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2015.

Faktor - faktor yang mempengaruhi Inflasi, antara lain :

a. *DemandPull Inflation*

Timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat, juga dapat dipengaruhi oleh :

1) *Domestic Inflation*

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri.

2) *Imported Inflation*

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang import secara umum.

b. *Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation*

Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif.

5. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi, apabila ada orang yang tidak bekerja, tetapi dia tidak aktif mencari pekerjaan, dia tidak bisa dikatakan pengangguran.

Pengangguran merupakan salah satu turunan dari angka PDRB yang dijadikan indikator kesejahteraan suatu wilayah (daerah), menunjukkan rasio

antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2016, realisasi jumlah angka pengangguran mencapai 30.209 orang sedangkan jumlah angkatan kerja mencapai 569.974 orang, sehingga realisasi tingkat pengangguran pada tahun 2016 sebesar 5,30 % dari target sebesar 5,30 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan persentase capaian kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2016 adalah sebesar 5,45%, sehingga apabila realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 102,75 %.

Realisasi (capaian nyata) jumlah pengangguran di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 (5,30 %) lebih kecil dibanding dengan tahun 2015 (6,99 %) artinya jumlah pengangguran di Kabupaten Ciamis dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi yang mana apabila membandingkan tahun 2015 dengan tahun 2016 tingkat pengangguran di Kabupaten Ciamis menurun sebesar 1,69%. Sedangkan apabila membandingkan antara tahun 2014 dan tahun 2015 tingkat pengangguran bertambah sebesar 1,60 %.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran serta memfasilitasi para pencari kerja, antara lain yaitu :

- a. Berbagai Pelatihan keterampilan baik yang diperuntukan bagi pencari kerja maupun bagi masyarakat seperti:
 - 1) Pelatihan berbasis kompetensi (SPM) sebanyak 258 orang atau 85.54 % berlokasi di Kecamatan Ciamis (UPTD KLIK) dan Kecamatan Panawangan;
 - 2) Pelatihan berbasis masyarakat (SPM) sebanyak 48 orang atau 80% berlokasi di Kecamatan Lakhok dan Kecamatan Ciamis;

3) Pelatihan kewirausahaan (SPM) sebanyak 52 orang atau 80% di Kecamatan Ciamis, Lakkok dan Tambaksari:

- b. Pemberian kerja sementara untuk mengatasi pengangguran dalam bentuk kegiatan Perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran melalui padat karya infrastruktur pedesaan di Desa Kaso Kecamatan Tambaksari sebanyak 900 HOK
- c. Berbagai pelatihan keterampilan Tahun 2016 yang dilaksanakan dengan sumber dana :
 - 1) APBD Kabupaten Ciamis sebanyak 4 kegiatan;
 - 2) APBD Propinsi Jawa Barat (Bantuan Provinsi) 1 kegiatan 5 jenis;
 - 3) APBN sebanyak 9 kegiatan

Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan Tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis sebanyak 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ciamis.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelatihan keterampilan yaitu keterbatasan sarana prasarana yang ada. Balai Kursus Latihan Kerja (KLK) KLK sebagai pusat pelatihan keterampilan di Kabupaten Ciamis saat ini kondisinya kurang memadai dan mengalami rusak berat, sedangkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Ciamis masih terbatas. Untuk itu dilakukan pengusulan rehab/pembangunan KLK melalui APBD Provinsi Jawa Barat, dan untuk peningkatan keterampilan diusulkan melalui sumber dana lain seperti Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.

Sasaran 38 : Terjaminnya Lahan Pertanian Berkelanjutan

Sasaran ini memberi gambaran bahwa Kabupaten Ciamis sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan di Jawa Barat. Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri dapat menyebabkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan

fragmentasi lahan pertanian pangan. Untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Ciamis maka perlu adanya jaminan terhadap penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.



Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS keberadaan dan ketersediaan luas areal lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2016 luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis adalah seluas 18.000 Ha sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana didalamnya terdiri dari luas lahan irigasi teknis, $\frac{1}{2}$ teknis dan irigasi sederhana PU.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan yang diukur melalui indikator luas tanah pertanian pangan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.85
Capaian Kinerja Sasaran
Terjaminnya Lahan Pertanian Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Luas tanah pertanian pangan berkelanjutan	Ha	16.802,29	100	16.802,29	100	18.000	18.000	100

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa capaian kinerja sasaran terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %, dengan kategori sangat baik. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu menunjukkan bahwa realisasi tahun ini lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya. sedangkan capaian kinerja tahun 2016 sama dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2014.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 107,12 %, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.86
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Terjaminnya Lahan Pertanian Berkelanjutan Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Luas tanah pertanian pangan berkelanjutan	%	18.000	16.802,29	107,12

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2016, lahan tersebut telah dioptimalkan pada sektor pertanian tanaman pangan dengan menjadi lahan inti pengembangan padi di Kabupaten Ciamis dan telah mendapatkan alokasi kegiatan pada lahan tersebut diantaranya alokasi pupuk bersubsidi, pengembangan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) serta pengembangan SRI dan optimasi lahan untuk padi sawah. Mengingat lahan ini mayoritas terdapat pada daerah irigasi teknis maka dalam pemeliharaannya dilaksanakan oleh instansi terkait yang berwenang menangani dan dalam pembinaan kelompok tani yang tergabung di dalam P3A Mitra Cai dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Ciamis dengan instansi terkait yang menangani pengairan. Selain itu, pada tahun 2014-2016 terjadi perluasan areal sawah seluas 120 Ha.

Hambatan yang dikhawatirkan timbul dari lahan tersebut diantaranya potensi alih fungsi lahan yang cukup tinggi terutama dikaitkan dengan kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang cukup tinggi serta alih fungsi ke bidang lainnya misalnya industri dan perdagangan serta fasilitas umum lainnya yang berpotensi terhadap berkurangnya areal tersebut.

Strategi/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mengantisipasi potensi masalah tersebut diantaranya yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan secara terkoordinasi, penerapan system insentif dan dis insentif serta penetapan LP2B oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta optimalisasi kegiatan-kegiatan penunjang oleh SKPD terkait di bidang pertanian dan pengairan guna meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan tersebut.

Upaya pencapaian sasaran terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan. Penyerapan/realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp. 3.628.836.937,- atau sebesar 99,59 % dari total pagu anggaran Rp. 3.643.892.800,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 39 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan dilakukan melalui 3 (tiga) indikator yaitu :

- (1) Kinerja sektor pertanian;
- (2) Kontribusi setiap sub sektor di sektor pertanian terhadap PDRB;
- (3) Konsumsi Ikan.

dengan hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.87
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian, Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kinerja sektor pertanian:								
	a. Produksi padi per tahun	Ton	505,299	93,93	463,405	85,29	436,417	530.496	121,56
	b. Produksi jagung	Ton	19,330	89,77	23,601	108,15	21,972	36.022	163,95
	c. Produktivitas padi	ku/Ha	64,54	N/A	66,51	101,34	65	66,04	101,6
	d. Produktivitas jagung	Ku/Ha	68,64	N/A	66,18	96,26	66	72,16	109,33
	e. Produksi Kelapa dalam	Ton	19,418.49	102,4	19.718	100,04	19.907,54	19.995,64	100,44
	f. Produksi kakao	Ton	298.42	70,48	298,50	100	336,65	350,09	103,99
	g. Produksi cengkeh	Ton	58,06	N/A	58,67	100,29	59	60,36	102,31
	h. Produksi karet	Ton	118,77	N/A	120,37	100,31	120,08	120,49	100,34
	i. Produksi teh	Ton	255,01	N/A	261,72	101,44	348,5	346	99,28

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	j. Produksi kopi	Ton	646,15	N/A	658,31	100,50	660,20	668,15	101,20
	k. Produksi daging	Kg	71.286	100,23	73.329	101,26	73.287,354	119.640	163,25
	l. Produksi telur	Kg	6.698	100,33	8.718	127,14	7.046,699	13.162	186,78
	m. Produksi ikan	Kg	27.086	103,14	42.221	103,14	50.836	52.432	103,14
2	Kontribusi setiap subsektor di sektor pertanian terhadap PDRB :								
	a. Tanaman Bahan Makanan	%	20,44	96,94	20,66	100,78	17,71	17,71	100
	b. Tanaman Pangan*	%					10,06	9,51	94,53
	c. Tanaman Holtikultura Semusim*	%					3,50	3,31	94,57
	d. Tanaman perkebunan	%	1,98	84,20	1,83	100,55	1,84	1,67	100
	e. Perkebunan*						3,40	3,17	93,24
	f. Peternakan dan hasil-hasilnya	%	3,43	100	3,44	100	3,45	3,45	100
	g. Peternakan*	%					3,66	3,86	105,46
	h. Jasa Pertanian & Perburuan *	%					0,37	0,37	100
	i. Kehutanan	%	0,26	100	0,25	100	0,25	0,25	100
	j. Kehutanan & Penebangan Kayu*	%					0,26	0,26	100
	k. Perikanan	%	0,89	100	0,89	100	0,91	0,91	100
	l. Perikanan	%					1,99	2,10	105,53
3	Konsumsi ikan	kg/kap / tahun	16,53	101,97	17,41	101,22	17,56	17,72	100,91
Rata-rata Capaian Kinerja		%		95,65			101,45		109,67

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan tahun 2016 adalah sebesar 109,67 %, dalam kategori sangat baik. Jika termasuk indikator kie
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 15 (lima belas) indikator tercapai melebihi target, 7 (tujuh) indikator tercapai sesuai target dan 4 (empat) indikator tidak mencapai target.
- c. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 (109,67 %) lebih tinggi dan mengalami peningkatan sebesar 12,13 % dibanding capaian kinerja tahun 2015 (101,45 %) serta meningkat sebesar 17,93 % dibanding capaian kinerja tahun 2014 (95,65 %).

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 111,84 %, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.88

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian, Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan Tahun 2016 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Kinerja sektor pertanian:				
	a. Produksi padi per tahun	Ton	530.496	549,134	96,61
	b. Produksi jagung	Ton	36.022	21,972	163,95
	c. Produktivitas padi	ku/Ha	66,08	64,52	102,36
	d. Produktivitas jagung	Ku/Ha	72,16	68,75	104,96

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
	e. Produksi kelapa dalam	Ton	19.995,64	19.344,09	103,37
	f. Produksi kakao	Ton	350,09	324,93	107,74
	g. Produksi cengkeh	Ton	60,36	58,57	103,06
	h. Produksi karet	Ton	120,49	61,12	196,85
	i. Produksi the	Ton	346	345,37	100,18
	j. Produksi kopi	Ton	668,15	658,49	101,47
	k. Produksi daging	Ton	119.640	N/A	-
	l. Produksi telur	Ton	13.162	N/A	-
	m. Produksi ikan	Ton	52.432	N/A	-
2	Kontribusi setiap sub-sektor di sektor pertanian terhadap PDRB :				
	a. Tanaman bahan makanan	%	17,71	20,82	85,06
	b. Tanaman Pangan *)	%	9,51	N/A	
	c. Tanaman Holtikultura Semusim *)	%	3,31	N/A	
	d. Tanaman perkebunan	%	1,84	1,67	110,18
	e. Perkebunan *)	%	3,17	N/A	
	f. Peternakan dan hasil-hasilnya	%	3,45	3,43	100,58
	g. Peternakan *)	%	3,86	N/A	
	h. Jasa Pertanian dan Perburuan *)	%	0,37	N/A	
	i. Kehutanan	%	0,25	0,23	108,70
	j. Kehutanan dan Penebangan Kayu *)	%	0,26	N/A	
	k. Perikanan	%	0,91	0,88	103,41
	l. Perikanan *)	%	2,10	N/A	
3	Konsumsi ikan	kg/kap / tahun	17,72	17,56	100,91
Rata-rata Capaian Kinerja					111,84

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan dilaksanakan melalui 8 (delapan) program, yaitu :

- (1) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
- (2) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan ikan;
- (3) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- (4) Program pengembangan budidaya perikanan;
- (5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- (6) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- (7) Program perencanaan dan pengembangan hutan;
- (8) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.

dengan penyerapan/realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 17.557.715.556,- atau sebesar 95,35 % dari total pagu anggaran Rp. 18.434.526.114,- dengan capaian output sebesar 107,18 % dan capaian outcome sebesar 96,40 %.

Analisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Sektor Pertanian :

a. Produksi Padi per-Tahun

Produksi padi per tahun adalah Jumlah total produksi komoditas padi sawah dan ladang selama satu tahun di wilayah Kabupaten Ciamis dalam satuan ton yang dihitung dari perkalian antara "Produktivitas per hektar x Luas areal panen".

Pada tahun 2016, jumlah rata-rata produktivitas padi per hektar adalah 6,608 ton/hektar/tahun sedangkan luas areal panen adalah seluas 80.277 Hektar. Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 produksi padi di Kabupaten Ciamis

adalah sebesar 530.496 ton dari target sebesar 436,417 ton, dengan pencapaian terhadap target sebesar 121,56 %.

Faktor penyebab terjadinya kondisi tersebut yaitu :

- (1) Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim terkendali dengan baik.



- (2) Ketersediaan sumber air yang memadai;
- (3) Penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dilaksanakan dengan baik.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target produksi pada musim tanam berikutnya upaya yang akan ditempuh diantaranya adalah :

- (1) Optimalisasi pemanfaatan saluran irigasi desa dan penggunaan pompa air pada musim kemarau;
- (2) Peningkatan luas tambah tanam padi;
- (3) Pengendalian OPT melalui penerapan teknologi Pengendalian Hama Terpadu serta pengaturan jadwal tanam dan pengembangan teknologi SRI (*system of Rice Intensification*);
- (4) Pengembangan penggunaan bahan organik/pupuk organik pada lahan pertanian.

Sedangkan strategi secara umum yang akan diterapkan dalam rangka pencapaian target produksi padi di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

- (1) Intensifikasi pertanian melalui Penerapan Sistem PTT padi sawah tersebut terdiri dari pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam, pemilihan varietas unggul, penanaman benih bermutu, sistem tanam berdasarkan Pengelolaan Tanaman Terpadu, pengairan lahan sawah yang dilakukan berselang, pemupukan berimbang, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit terpadu, serta pengontrolan masa panen dan masa pasca panen;
- (2) Ekstensifikasi (perluasan areal / lahan) pertanian di lokasi potensial yang memiliki sumber air memadai dan secara agroklimat dan teknis layak untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian;
- (3) Pengembangan sumber air buatan dalam hal ini melalui pembuatan embung, sumur resapan serta ditunjang oleh konservasi lahan di daerah hulu.

b. Produksi Jagung



Produksi jagung per tahun adalah Jumlah total produksi komoditas jagung selama satu tahun di wilayah Kabupaten Ciamis dalam satuan ton

yang dihitung dari perkalian antara " Produktivitas per hektar x Luas areal panen".

Pada tahun 2016, jumlah rata-rata produktivitas jagung per hektar adalah 7,216 ton/hektar/tahun sedangkan luas areal panen adalah seluas 4.992 Hektar.

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 produksi jagung di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 36.022 ton dengan pencapaian terhadap target sebesar 163,95 % dari target sebesar 21,972 ton.

Kondisi tersebut didukung oleh adanya optimalisasi pemanfaatan lahan kering di Kabupaten Ciamis yang dipergunakan untuk penanaman jagung sehingga produksinya meningkat. Selain itu adanya peluang pasar yang cukup baik sebagai bahan baku pakan ternak merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan minat petani dalam pengembangan jagung di Kabupaten Ciamis.

Dalam rangka pengembangan jagung di Kabupaten Ciamis, ada beberapa strategi yang dilakukan yaitu :

- (1) Optimasi / perluasan areal tanam / kawasan pengembangan jagung;
- (2) Optimalisasi mekanisasi/alat mesin pertanian penunjang pengembangan jagung;
- (3) Optimalisasi penyediaan sarana / bahan organik / bahan penunjang lahan pengembangan jagung.

c. Produktivitas padi

Produktivitas padi adalah rata-rata produktivitas padi yang dihasilkan dari seluruh luas panen di Kabupaten Ciamis dalam satuan konversi ke kuintal per hektar dengan rumus perhitungan :

$$\text{Produktivitas padi} = \frac{\text{Jumlah produksi padi pada tahun 2016}}{\text{Luas areal panen padi pada tahun 2016}}$$

Jumlah produksi padi pada tahun 2016 di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 530.496 ton dengan luas panen keseluruhan seluas 80.277 Hektar. sehingga apabila diformulasikan maka untuk tahun 2016, jumlah rata-rata produktivitas padi di kabupaten Ciamis per hektar adalah 6,608 ton/hektar/tahun dan dikonversikan menjadi 66,08 kuintal/hektar.

Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 64,74 ku/Ha, maka persentase realisasi pencapaian target adalah sebesar 101,6%.

Faktor yang menjadi pendukung terhadap pencapaian target tersebut yaitu melalui penerapan teknologi PTT yang dilakukan oleh para petani telah dilaksanakan dengan baik. Penggunaan sarana produksi sesuai anjuran serta pengendalian organisme pengganggu tanaman yang tepat dosis mengakibatkan produktivitas panen padi secara rata-rata meningkat.

Faktor lainnya adalah adanya peningkatan produktivitas lahan melalui penggunaan bahan organik secara optimal di beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis sehingga kondisi kesuburan lahan meningkat sehingga berpengaruh terhadap produktivitas padi yang ditanam

d. Produktivitas Jagung

Produktivitas jagung adalah rata-rata produktivitas jagung yang dihasilkan dari seluruh luas panen di Kabupaten Ciamis dalam satuan konversi ke kuintal per hektar dengan rumus perhitungan :

$$\text{Produktivitas jagung} = \frac{\text{Jumlah produksi jagung pada tahun 2016}}{\text{Luas areal panen jagung pada tahun 2016}}$$

Jumlah produksi jagung pada tahun 2016 di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 36.022 ton dengan luas panen keseluruhan seluas 4.992 Ha sehingga apabila diformulasikan maka untuk tahun 2016, jumlah rata-rata produktivitas jagung di Kabupaten Ciamis per hektar adalah 7,216 ton/hektar/tahun dan dikonversikan menjadi 72,16 kuintal/hektar. Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 66 ku/Ha, maka persentase realisasi pencapaian target adalah sebesar 109,33%. Faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian target tersebut yaitu masih sudah optimalnya perlakuan terhadap lahan kering/lahan darat yang dipergunakan oleh tanaman jagung. Selain itu faktor pengolahan lahan yang sudah dioptimalkan pada lahan tersebut juga menjadi penyebab

kesuburan dari pertanaman jagung itu sendiri sehingga penggunaan teknologi dan peralatan mendukung dalam pengolahan lahan.

e. Produksi Kelapa Dalam

Produksi kelapa dalam adalah jumlah produksi kelapa yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam satu tahun dalam satuan kopra kering, dengan rumus perhitungan :

$$\text{Produksi Kelapa} = \text{Jumlah produktivitas kelapa per hektar per tahun} \times \text{jumlah luas tanaman kelapa menghasilkan}$$

Pada tahun 2016 Produktivitas Kelapa di Kabupaten Ciamis adalah 0,8399 ton/ha/tahun, sedangkan Luas Tanaman Menghasilkan yaitu 23.807,17 Ha. Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2016 Produksi kelapa dalam di Kabupaten Ciamis sebesar 19.995,64 ton melebihi target yang direncanakan sebesar 19.907,54 ton, sehingga capaian kinerja produksi kepala dalam menunjukkan capaian sebesar 100,44 %.

Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain :

- (1) Kegiatan intensifikasi tanaman melalui pemupukan yang intensif sehingga produktivitas yang semula 0,83 ton/ha/tahun naik menjadi 0,84 ton/ha/tahun.;
- (2) Pembangunan Dem Plot kelapa yang dibiayai dari anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- (3) Pembagian bibit tanaman kelapa yang bersumber dari persemaian Dinas Kehutanan dan Perkebunan tersebar di beberapa lokasi kecamatan.

f. Produksi Kakao

Produksi kakao adalah jumlah produksi kakao yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam satu tahun dalam satuan biji kering, dengan rumus perhitungan :

Produksi Kakao = Jumlah produktivitas kakao per hektar/tahun x jumlah luas tanaman kakao menghasilkan

Pada tahun 2016 Produktivitas Kakao di Kabupaten Ciamis adalah 0,2500 ton/ha/tahun, sedangkan Luas Tanaman Kakao Menghasilkan yaitu 1.400,35 ha.

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2016 Produksi kakao di Kabupaten Ciamis terealisasi sebesar 350,09 ton, melebihi target yang direncanakan, sehingga produksi kakao menunjukkan capaian kinerja sebesar 103,99 %. Produksi yang meningkat pada komoditas kakao dikarenakan adanya upaya intensifikasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang dipacu dengan meningkatnya harga kakao ditingkat petani.

g. Produksi Cengkeh

Produksi cengkeh adalah jumlah produksi cengkeh yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam satu tahun dalam satuan bunga kering, dengan rumus perhitungan :

Produksi Cengkeh = Jumlah produktivitas cengkeh per hektar/tahun x jumlah luas tanaman cengkeh menghasilkan.

Pada tahun 2016 Produktivitas Cengkeh di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 0,1600 ton/ha , sedangkan Luas Tanaman Menghasilkan yaitu 377,24 ha.

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2016 Produksi Cengkeh di Kabupaten Ciamis terealisasi sebesar 60,36 ton melebihi target yang direncanakan sebesar 59 Ton, sehingga produksi cengkeh menunjukkan capaian kinerja sebesar 102,31 %.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator produksi cengkeh yaitu didukung oleh tingginya harga pada tingkat petani sehingga berakibat pada tingginya minat petani untuk memelihara tanaman yang berdampak pada meningkatnya produktivitas komoditas tanaman

cengkeh. Tingginya minat petani pada komoditas tanaman tersebut didukung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis melalui penyediaan bibit tanaman cengkeh.

h. Produksi karet

Produksi karet jumlah produksi karet yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam satu tahun dalam satuan shet, dengan rumus perhitungan :

Produksi Karet = Jumlah produktivitas karet per hektar/tahun x jumlah luas tanaman karet menghasilkan.

Pada tahun 2016 Produktivitas Karet di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 0,5899 ton/ha, sedangkan Luas Tanaman Karet Menghasilkan yaitu 204,26 ha.

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas maka dapat diketahui pada Tahun 2016 Produksi Karet di Kabupaten Ciamis terealisasi sebesar 120,49 ton melebihi target yang direncanakan sebesar 120,08 ton, sehingga produksi karet menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,34 %.

Produksi karet meningkat dikarenakan adanya mutasi tanaman dari tanaman belum menghasilkan kepada tanaman menghasilkan, serta didukung dengan pemeliharaan tanaman yang dilakukan petani semakin baik.

Program kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program adalah kegiatan demplot peremajaan tanaman karet yang bersumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

i. Produksi teh

Produksi teh adalah jumlah produksi teh yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam satu tahun dalam satuan daun basah, dengan rumus perhitungan :

Produksi Teh = Jumlah produktivitas teh per hektar/tahun x jumlah luas tanaman teh menghasilkan.

Pada tahun 2016 Produktivitas Teh di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 4 ton/ha, sedangkan Luas Tanaman Teh Menghasilkan yaitu 86,5 ha.

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas maka dapat diketahui pada Tahun 2016 Produksi Teh di Kabupaten Ciamis terealisasi sebesar 346 ton melebihi target yang direncanakan sebesar 348 ton, sehingga produksi teh menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,28 %.

Hal ini disebabkan, secara umum kondisi tanaman teh pada umumnya sudah tua sehingga perlu dilakukan peremajaan, selain hal tersebut sulitnya pemasaran yang disebabkan tidak adanya pabrik pengolahan teh mengakibatkan menurunnya harga pada tingkat petani sehingga menurunkan minat petani untuk memelihara tanaman teh. Selain hal tersebut untuk mencapai produksi yang optimal diperlukan tingkat curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, namun demikian pada tahun 2016 terjadi musim kemarau yang cukup panjang sehingga menurunkan produktivitas tanaman teh. Solusi untuk meningkatkan produksi tanaman teh dapat ditempu melalui kegiatan recovery tanaman teh yang diselenggarakan di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

j. Produksi kopi

Produksi kopi adalah jumlah produksi kopi yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam satu tahun dalam satuan biji berasan kering, dengan rumus perhitungan :

$$\text{Produksi Kopi} = \text{Jumlah produktivitas kopi per hektar/tahun} \times \text{jumlah luas tanaman kopi menghasilkan.}$$

Pada tahun 2016 Produktivitas kopi di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 0,8300 ton/ha/tahun, Luas Tanaman Kopi Menghasilkan yaitu 805 ha .

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas maka dapat diketahui pada Tahun 2016 Produksi kopi di Kabupaten Ciamis terealisasi sebesar

668,15 ton melebihi dari target yang direncanakan sebesar 660,20 ton, sehingga produksi teh menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,20 %.

Program kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator diantaranya kegiatan optimalisasi lahan tanaman kopi seluas 250 ha. Disamping itu kondisi pada komoditas tanaman kopi relatif stabil baik tingkat harga pada petani maupun serapan pasar yang tersedia, sehingga minat petani untuk menanam kopi masih cukup tinggi.

k. Produksi daging

Produksi Daging jumlah total produksi daging ternak besar, kecil dan unggas yang berasal dari peternakan rakyat selama satu tahun di wilayah Kabupaten Ciamis, yang meliputi : Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, dan Ayam Ras Pedaging.

- Produksi daging sapi potong merupakan jumlah pemotongan dikalikan dengan berat karkas ditambah jeroan, dengan rumus berikut :

Sapi Potong = jumlah pemotongan (ekor) X (berat karkas + berat jeroan (kg))

- Produksi daging kerbau merupakan jumlah pemotongan dikalikan dengan berat karkas ditambah jeroan, dengan rumus berikut :

Kerbau = jumlah pemotongan (ekor) X (berat karkas + berat jeroan (kg))

- Produksi daging kambing merupakan jumlah pemotongan dikalikan dengan berat karkas ditambah jeroan, dengan rumus berikut :

Kambing = jumlah pemotongan (ekor) X (berat karkas + berat jeroan (kg))

- Produksi daging domba merupakan jumlah pemotongan dikalikan dengan berat karkas ditambah jeroan, dengan rumus berikut :

Domba = jumlah pemotongan (ekor) X (berat karkas + berat jeroan (kg))

- Produksi daging ayam buras merupakan jumlah dari hasil perkalian populasi dikalikan dengan karkas ditambah jeroan dikalikan dengan persentase potong terhadap populasi, dengan rumus berikut :

Ayam buras = Populasi (ekor) X (berat karkas + jeroan (kg)) X % potong thd populasi

- Produksi daging ayam ras petelur merupakan jumlah dari hasil perkalian populasi dikalikan dengan karkas ditambah jeroan dikalikan dengan persentase potong terhadap populasi, dengan rumus berikut :

Ayam ras petelur = Populasi (ekor) X (berat karkas+jeroan (kg)) X % potong thd populasi

- Produksi daging ayam ras pedaging merupakan jumlah dari hasil perkalian populasi dikalikan dengan karkas ditambah jeroan dikalikan dengan persentase potong terhadap populasi, dengan rumus berikut :

Ayam ras pedaging = Populasi(ekor) X (berat karkas+jeroan(kg)) X % potong thd populasi

- Produksi daging itik merupakan jumlah dari hasil perkalian populasi dikalikan dengan karkas ditambah jeroan dikalikan dengan persentase potong terhadap populasi, dengan rumus berikut :

Itik = Populasi (ekor) X (berat karkas + jeroan (kg)) X % potong thd populasi

Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa Produksi daging di Kabupaten Ciamis tahun 2016 tercapai sebesar 119.640 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 73.287,35 Ton dengan capaian kinerja sebesar 163,25 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi produksi daging adalah sebesar 73.329 ton dan tahun 2014 sebesar 71.268 ton. Realisasi produksi daging tahun 2016 lebih tinggi dari pada tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini menunjukkan suatu keberhasilan dan kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2013 produksi daging jauh berbeda dikarenakan pada saat itu Kabupaten Ciamis masih bersatu dengan Kabupaten Pangandaran.

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan Produksi daging di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan pencarian akseptor baru guna mensukseskan program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) bagi peternak yang

diharapkan akan ada peningkatan populasi setiap tahunnya, khususnya ternak sapi potong.

Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau



hambatan antara lain mahalnya harga sapi bakalan dan adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya lahan pengangonan sebagai sumber Hijauan Makanan Ternak (HMT). Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu menyarankan kepada para peternak untuk memelihara sapi betina siap kawin ataupun sapi betina bunting dan pemeliharaan ternak disertai dengan pembibitan. Disamping itu pola integrasi tanaman pangan dengan ternak terus digalakan dalam rangka mendukung penyediaan HMT.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut untuk tahun 2016 dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu: (1) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; (2) Program peningkatan produksi hasil peternakan.

I. Produksi Telur

Produksi telur adalah jumlah total produksi telur unggas yang berasal dari peternakan rakyat selama satu tahun di wilayah Kabupaten Ciamis. Telur Unggas terdiri dari :

- Produksi telur ayam buras merupakan jumlah dari hasil perkalian populasi dikalikan dengan persentase betina produktif dikalikan dengan produksi telur pertahun dikalikan dengan berat telur per butir, dengan rumus berikut :

$$\text{Ayam buras} = \text{Populasi (ekor)} \times \% \text{ betina produktif} \times \text{produksi telur pertahun (butir)} \times \text{berat telur perbutir (gram)}$$

- Produksi telur ayam ras petelur merupakan jumlah dari hasil perkalian populasi dikalikan dengan persentase betina produktif dikalikan dengan produksi telur pertahun dikalikan dengan berat telur per butir, dengan rumus berikut :

$$\text{Ayam ras petelur} = \text{Populasi (ekor)} \times \% \text{ betina produktif} \times \text{produksi telur pertahun (butir)} \times \text{berat telur perbutir (gram)}$$

- Produksi telur itik merupakan jumlah dari hasil perkalian populasi dikalikan dengan persentase betina produktif dikalikan dengan produksi telur pertahun dikalikan dengan berat telur per butir, dengan rumus berikut :

$$\text{Itik} = \text{Populasi (ekor)} \times \% \text{ betina produktif} \times \text{produksi telur pertahun (butir)} \times \text{berat telur perbutir (gram)}$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa produksi telur di Kabupaten Ciamis tahun 2016 tercapai sebesar 13.162 ton dari target



yang ditetapkan sebesar 7.046 ton dengan capaian kinerja sebesar 186,80 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi produksi telur adalah sebesar 8.718 ton dan tahun 2014 sebesar 6.698 ton. Dengan demikian realisasi (capaian

nyata) produksi telur di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan produksi telur di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah dengan memfasilitasi pendirian Paguyuban Peternak Ayam Petelur Ciamis (P2APC) dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi antar peternak ayam petelur dalam meningkatkan produksi telur di wilayah Kabupaten Ciamis. Selain itu juga dengan adanya paguyuban ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga telur dan menjaga pasokan telur dipasaran.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut untuk tahun 2016 dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; (2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

m. Produksi Ikan

Produksi Ikan adalah jumlah total produksi ikan yang berasal dari aktifitas budidaya dan penangkapan selama satu tahun di wilayah Kabupaten Ciamis, yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Produksi Ikan} = \frac{\text{jumlah benih yang ditebar} \times \text{SR (Survival Rate)}}{\text{Target Panen (ekor/Kg)}} + \text{Target Hasil Tangkap}$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa produksi ikan di Kabupaten Ciamis tahun 2016 mencapai 52.432 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 50.836 Ton dengan capaian kinerja sebesar 103,14 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 sebesar 42.221 kg dan pada tahun 2014 realisasi produksi ikan adalah sebesar 27.086 kg. Dengan demikian realisasi (capaian kinerja nyata) produksi ikan di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka meningkatkan produksi ikan adalah membangun sarana pembenihan ikan di masyarakat seperti pembangunan unit pembenihan rakyat (UPR) sehingga produksi ikan dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain Kurangnya ketersediaan benih dan induk yang berkualitas baik di masyarakat. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu bekerjasama dengan balai perikanan provinsi dan pusat untuk mendapatkan jaminan induk bersertifikat yang akan dibudidayakan oleh masyarakat.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut untuk tahun 2016 dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

Produksi daging, telur dan ikan di Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.89
Produksi Daging, Telur dan Ikan Di Kabupaten Ciamis
Tahun 2014 – 2016

Komoditas	2014			2015			2016		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Daging	71.125	71.286	100,23	72.418	73.329	101,26	73.287	119.640	163,25
Telur	6.676	6.698	100,33	6.857	8.718	127,14	7.046	13.162	168,80
Ikan	26.262	27.086	103,14	40.935	42.220	103,13	50.836	52.432	103,14

2. Kontribusi Setiap Sub-Sektor Di Sektor Pertanian Terhadap PDRB

a. Tanaman Bahan Makanan

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor tanaman bahan makanan) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB AdHB adalah besaran persentase jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi kelompok sektor atau lapangan usaha pertanian sub sektor tanaman bahan makanan terhadap total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi keseluruhan kelompok sektor atau lapangan usaha (total nilai PDRB) Atas dasar Harga Berlaku, yang dihitung dengan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Kontribusi sektor} \\ \text{pertanian (sub} \\ \text{sektor Tabama} \\ \text{terhadap PDRB} \\ \text{AdHB (\%)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian} \\ \text{(sub sektor Tabama) (Rp)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah PDRB (Rp)} \end{array}} \times 100 \%$$

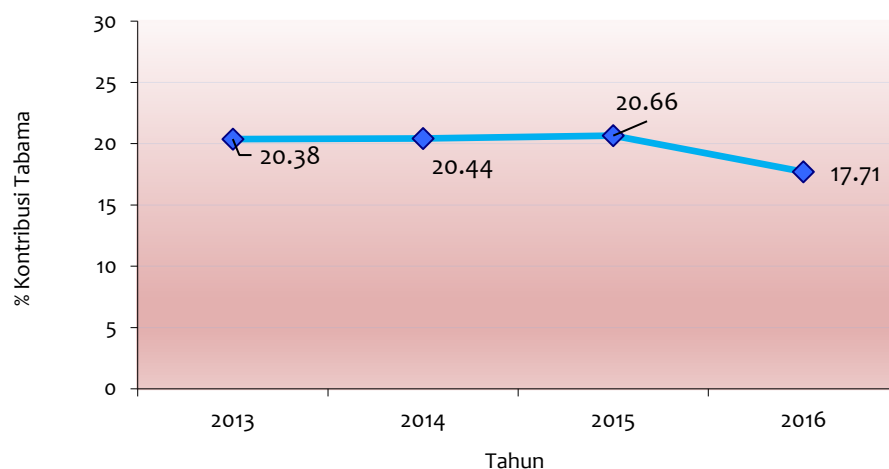
Berdasarkan perhitungan pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Tabama) sebesar Rp. 4.313.325,91 sedangkan Total Nilai Tambah seluruh sektor sebesar Rp. 24.355.312,90 sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB AdHB sebesar 17,71% dari target sebesar 17,71 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100, dengan predikat Sangat Baik dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 100,78%, dan lebih tinggi dari pada tahun 2014 sebesar 96,94%. Sedangkan realisasi kinerja indikator Kontribusi Sektor Pertanian Sub Sektor Tabama terhadap PDRB AdHB tahun 2016 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 20,66% dan tahun 2014 sebesar 20,44%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB AdHB tahun 2016 adalah terutama karena adanya penurunan produksi tanaman bahan makanan yang disebabkan tidak

tepatnya pola dan waktu tanam dan menurunnya area tanam yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan serta terkena serangan hama.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 maka realisasi Kontribusi Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB AdHB sebesar 17,71% dari target sebesar 20,82% dengan persentase capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 sebesar 80,56 %, dengan predikat Baik. Namun demikian apabila capaian RPJMD ini dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016 lebih rendah dikarenakan terdapatnya perbedaan target yang ditetapkan yaitu sebesar 17,71 pada target perjanjian kinerja dan sebesar 20,82 pada target RPJMD Tahun 2016.

Grafik 3.38
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian
(Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB AdHB
Tahun 2013 s.d. 2016



b. Tanaman Pangan)*

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB AdHB merupakan indikator baru hasil perbaikan BPS untuk beberapa sector yang mendukung PDRB AdHB. Distribusi persentase sub sector tanaman pangan adalah Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang

dihasilkan oleh sub kategori tanaman pangan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu satu tahun.

$$\begin{array}{l} \text{Kontribusi sektor} \\ \text{pertanian (sub} \\ \text{sektor Tanaman} \\ \text{Pangan terhadap} \\ \text{PDRB AdHB (\%)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian} \\ \text{(sub sektor Tanaman Pangan) (Rp)} \end{array}}{\text{Jumlah PDRB (Rp)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan metode baru BPS pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Tanaman Pangan) adalah sebesar Rp. 2.315.152,23 sedangkan Jumlah PDRB berdasarkan perhitungan baru tahun 2016 adalah sebesar Rp. 24.344.397,78 sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB AdHB sebesar 9,51 % dari target sebesar 10,06 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 94,51 dengan predikat Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMD karena indikator ini baru di targetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

c. Tanaman Holtikultura Semusim)*

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor tanaman holtikultura semusim) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor tanaman holtikultura dalam satu musim terhadap PDRB AdHB merupakan indikator baru hasil perbaikan BPS untuk beberapa sektor yang mendukung PDRB AdHB. Distribusi persentase sub sektor tanaman holtikultura semusim adalah Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sub kategori tanaman holtikultura semusim di wilayah Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu satu tahun.

$$\begin{array}{l} \text{Kontribusi sektor} \\ \text{pertanian (sub sektor} \\ \text{Tanaman Holtikultura} \\ \text{semusm terhadap} \\ \text{PDRB AdHB (\%)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Nilai PDRB sektor Pertanian} \\ \text{(sub sektor Tanaman Holtikultura} \\ \text{Semusim) (Rp)} \end{array}}{\text{Jumlah PDRB (Rp)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan metode baru BPS pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Tanaman Holtikultura Semusim) adalah sebesar Rp. 805.799,57 sedangkan Jumlah PDRB berdasarkan perhitungan baru tahun 2016 adalah sebesar Rp. 24.344.397,78 sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Tanaman Holtikultura Semusim terhadap PDRB AdHB sebesar 3,31 % dari target sebesar 3,50 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 94,51 dengan predikat Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMD karena indikator ini baru di targetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

d. Tanaman Perkebunan

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor tanaman perkebunan) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB AdHB adalah besaran persentase jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi kelompok sektor atau lapangan usaha pertanian sub sektor tanaman perkebunan terhadap total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi keseluruhan kelompok sektor atau lapangan usaha (total nilai PDRB) Atas dasar Harga Berlaku, yang dihitung dengan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Kontribusi sektor} \\ \text{pertanian (sub} \\ \text{sektor Perkebunan} \\ \text{terhadap PDRB} \\ \text{AdHB (\%)} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian} \\ \text{(sub sektor Perkebunan) (Rp)}}{\text{Total Nilai Tambah seluruh sektor (Rp)}} \times 100 \%$$

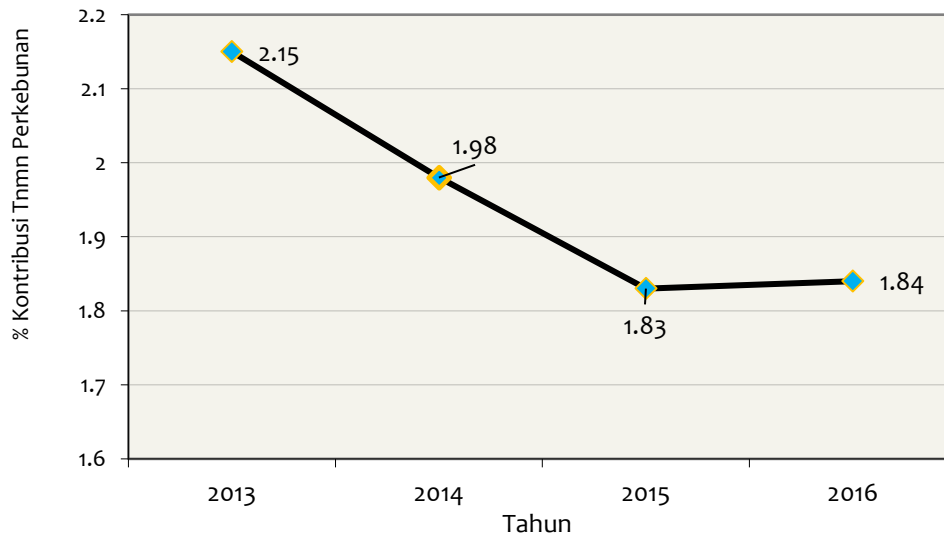
Berdasarkan perhitungan pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Tanaman Perkebunan) sebesar Rp. 448.137,76 sedangkan Total Nilai Tambah seluruh sektor sebesar Rp. 24.355.312,90

sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB AdHB sebesar 1,84% dari target sebesar 1,84% dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, dengan predikat Sangat Baik dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2016 sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 100,40%, dan lebih tinggi dari pada tahun 2014 sebesar 84,20%. Sedangkan realisasi kinerja indikator Kontribusi Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB AdHB tahun 2016 menunjukkan sedikit peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 1,83% dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,98%.

Kontribusi sub sektor tanaman perkebunan kedepan cenderung akan terus menurun terhadap PDRB Kabupaten Ciamis. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu dikarenakan sub sektor tanaman perkebunan diarahkan pada proses pengolahan pasca panen yang sebelumnya ditekankan pada tingkat produktifitas. Selain hal tersebut berkurangnya kontribusi sub sektor perkebunan juga dikarenakan adanya kecenderungan laju pertumbuhan sektor tanaman perkebunan lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor lainnya terutama sektor industri dan perdagangan.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 maka realisasi Kontribusi Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB AdHB sebesar 1,84% dari target sebesar 1,67% dengan persentase capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 sebesar 110,18%, dengan predikat Sangat Baik, sehingga apabila capaian RPJMD ini dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016 hasilnya lebih tinggi dikarenakan terdapatnya perbedaan target yang ditetapkan.

Grafik 3.39
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian
(Sub Sektor Tanaman Perkebunan) terhadap PDRB AdHB
Tahun 2013 s.d. 2016



e. Perkebunan Semusim)*

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor perkebunan semusim) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor perkebunan dalam satu musim terhadap PDRB AdHB merupakan indikator baru hasil perbaikan BPS untuk beberapa sektor yang mendukung PDRB AdHB. Distribusi persentase sub sektor perkebunan semusim adalah Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sub kategori perkebunan semusim di wilayah Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu satu tahun.

$$\text{Kontribusi sektor pertanian (sub sektor Perkebunan Semusim terhadap PDRB AdHB (\%))} = \frac{\text{Jumlah Nilai PDRB sektor Pertanian (sub sektor Perkebunan Semusim) (Rp)}}{\text{Jumlah PDRB (Rp)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan metode baru BPS pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Perkebunan Semusim) adalah sebesar Rp. 771.717,41 sedangkan Jumlah PDRB berdasarkan perhitungan baru tahun 2016 adalah sebesar Rp. 24.344.397,78 sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Semusim terhadap PDRB AdHB adalah sebesar 3,17

% dari target sebesar 3,40 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 93,34 dengan predikat Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMD karena indikator ini baru di targetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

f. Peternakan Dan Hasil – Hasilnya

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB AdHB adalah besaran persentase jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi kelompok sektor atau lapangan usaha pertanian sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi keseluruhan kelompok sektor atau lapangan usaha (total nilai PDRB) Atas dasar Harga Berlaku, yang dihitung dengan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Kontribusi sektor} \\ \text{pertanian (sub sektor} \\ \text{peternakan dan hasil-} \\ \text{hasilnya terhadap} \\ \text{PDRB AdHB (\%)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian} \\ \text{(sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya) (Rp)} \end{array}}{\text{Total Nilai Tambah seluruh sektor (Rp)}} \times 100 \%$$

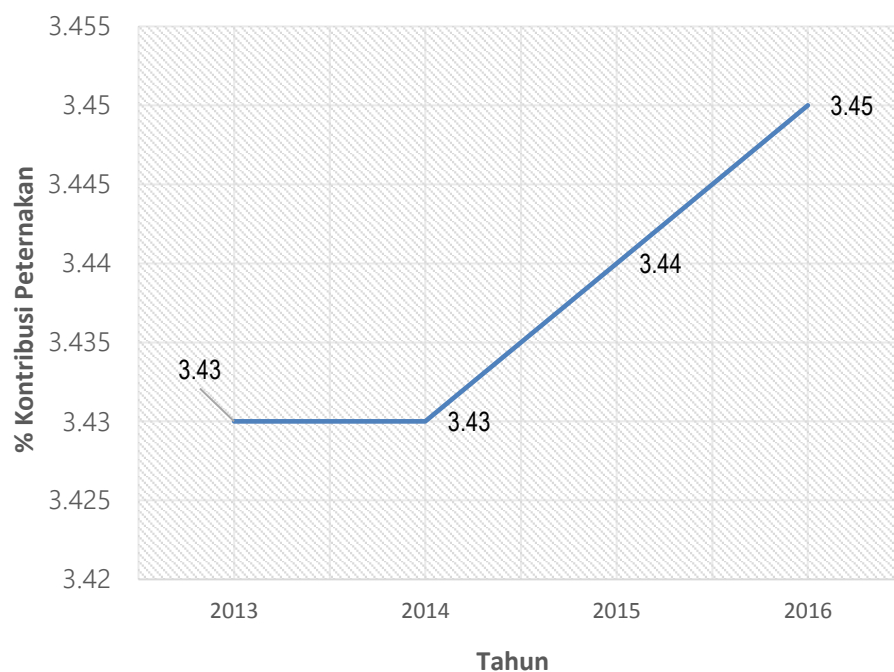
Berdasarkan perhitungan pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya) sebesar Rp. 840.258,30,- sedangkan Total Nilai Tambah seluruh sektor sebesar Rp. 24.355.312,90,- sehingga realisasi kontribusi sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB AdHB sebesar 3,45 % dari target sebesar 3,45 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat Sangat Baik dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2016 sama dengan tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu 100%. Sedangkan realisasi kinerja indikator kontribusi sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB AdHB tahun 2016

menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 3,44% dan tahun 2014 sebesar 3,43%.

Kontribusi sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya kedepan harus terus ditingkatkan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu dikarenakan sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya diarahkan pada proses peningkatan produktifitas.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 maka realisasi kontribusi sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB AdHB sebesar 3,45% dari target sebesar 3,43% dengan persentase capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 sebesar 100,58%, dengan predikat Sangat Baik, sehingga apabila capaian RPJMD ini dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016 hasilnya lebih tinggi dikarenakan terdapatnya perbedaan target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,45 pada perjanjian kinerja dan 3,43 pada RPJMD.

Grafik 3.40
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian
(Sub Sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya) terhadap PDRB AdHB
Tahun 2013 s.d 2016



g. Peternakan)*

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor peternakan) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor peternakan terhadap PDRB AdHB merupakan indikator baru hasil perbaikan BPS untuk beberapa sektor yang mendukung PDRB AdHB. Distribusi persentase sub sektor peternakan adalah Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sub kategori peternakan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu satu tahun.

$$\text{Kontribusi sektor pertanian (sub sektor Peternakan terhadap PDRB AdHB (\%))} = \frac{\text{Jumlah Nilai PDRB sektor Pertanian (sub sektor Peternakan) (Rp)}}{\text{Jumlah PDRB (Rp)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan metode baru BPS pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Peternakan) adalah sebesar Rp. 939.693,75 sedangkan Jumlah PDRB berdasarkan perhitungan baru tahun 2016 adalah sebesar Rp. 24.344.397,78 sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB AdHB adalah sebesar 3,86 % dari target sebesar 3,66 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 105,54 dengan predikat Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMD karena indikator ini baru di targetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

h. Jasa Pertanian dan Perburuan)*

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan terhadap PDRB AdHB merupakan indikator baru hasil perbaikan BPS pada tahun 2016 untuk beberapa sektor yang mendukung PDRB AdHB. Distribusi persentase sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan

adalah Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sub kategori Jasa Pertanian dan Perburuan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu satu tahun.

$$\begin{array}{l} \text{Kontribusi sektor} \\ \text{pertanian (sub} \\ \text{sektor Jasa} \\ \text{Pertanian dan} \\ \text{Perburuan} \\ \text{terhadap PDRB} \\ \text{AdHB (\%)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Nilai PDRB sektor Pertanian} \\ \text{(sub sektor Jasa Pertanian dan} \\ \text{Perburuan) (Rp)} \end{array}}{\text{Jumlah PDRB (Rp)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan metode baru BPS pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan) adalah sebesar Rp. 90.074,27 sedangkan Jumlah PDRB berdasarkan perhitungan baru tahun 2016 adalah sebesar Rp. 24.344.397,78 sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan terhadap PDRB AdHB adalah sebesar 0,37 % dari target sebesar 0,37 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMD karena indikator ini baru di targetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

i. Kehutanan

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor kehutanan) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor kehutanan terhadap PDRB AdHB adalah besaran persentase jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi kelompok sektor atau lapangan usaha pertanian sub sektor kehutanan terhadap total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi keseluruhan kelompok sektor atau lapangan usaha (total nilai PDRB) Atas dasar Harga Berlaku, yang dihitung dengan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Kontribusi} \\ \text{sektor pertanian} \\ \text{(sub sektor} \\ \text{Kehutanan} \\ \text{terhadap PDRB} \\ \text{AdHB (\%)} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian} \\ \text{(sub sektor Kehutanan) (Rp)}}{\text{Total Nilai Tambah seluruh sektor (Rp)}} \times 100 \%$$

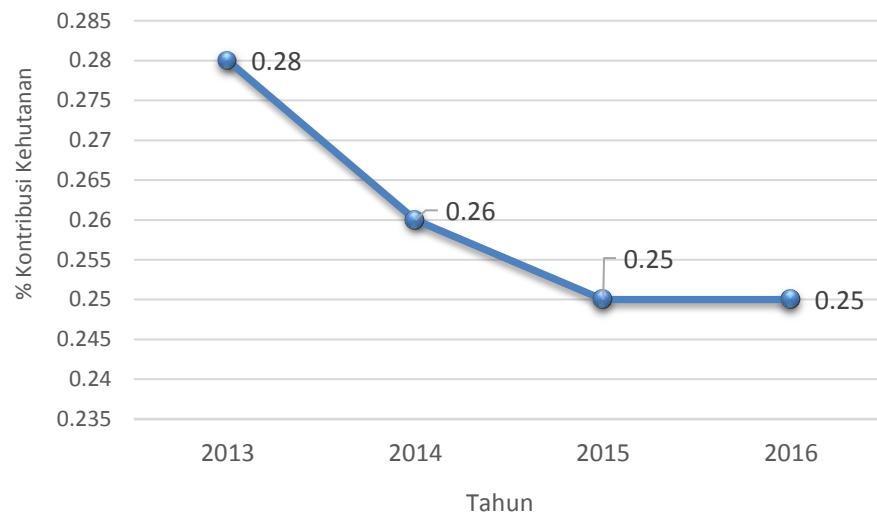
Berdasarkan perhitungan pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Kehutanan) sebesar Rp. 60.888,28 sedangkan Total Nilai Tambah seluruh sektor sebesar Rp. 24.355.312,90 sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB AdHB sebesar 0,25% dari target sebesar 0,25% dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat Sangat Baik dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2016 sama bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu 100%. Sedangkan realisasi kinerja indikator Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB AdHB tahun 2016 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2014 sebesar 0,01% dan tetap jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Kecilnya peran sub sektor kehutanan dalam PDRB Kabupaten Ciamis bukan berarti bahwa sektor kehutanan tidak memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Ciamis, namun demikian hal ini dikarenakan proses perekonomian dari sub sektor kehutanan sudah bergeser dari barang mentah dalam hal ini penjualan log kayu menjadi barang setengah jadi melalui proses industri kehutanan seperti kayu pertukangan maupun furniture, sehingga nilai ekonominya tidak masuk lagi dalam nilai ekonomi sub sektor kehutanan dalam PDRB kabupaten Ciamis namun masuk ke dalam PDRB sektor industri dan perdagangan.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 maka realisasi Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB AdHB sebesar 0,25% dari target sebesar 0,23 % dengan persentase capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 sebesar 108,70 % dengan predikat Sangat Baik.

Grafik 3.41

Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian
(Sub Sektor Kehutanan) terhadap PDRB AdHB
Tahun 2013 s.d. 2016



j. Kehutanan dan Penebangan Kayu)*

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB AdHB merupakan indikator baru hasil perbaikan BPS pada tahun 2016 untuk beberapa sektor yang mendukung PDRB AdHB. Distribusi persentase sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu adalah Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu di wilayah Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu satu tahun.

$$\text{Kontribusi sektor pertanian (sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB AdHB (\%))} = \frac{\text{Jumlah Nilai PDRB sektor Pertanian (sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu) (Rp)}}{\text{Jumlah PDRB (Rp)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan metode baru BPS pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu) adalah sebesar Rp. 63.295,43 sedangkan Jumlah PDRB berdasarkan

perhitungan baru tahun 2016 adalah sebesar Rp. 24.344.397,78 sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB AdHB adalah sebesar 0,26 % dari target sebesar 0,26 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMD karena indikator ini hanya di targetkan pada dokumen Perjanjian Kinerja.

k. Perikanan

Kontribusi sektor pertanian (sub sektor perikanan) terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor perikanan terhadap PDRB AdHB adalah besaran persentase jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi kelompok sektor atau lapangan usaha pertanian sub sektor perikanan terhadap total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi keseluruhan kelompok sektor atau lapangan usaha (total nilai PDRB) Atas dasar Harga Berlaku, yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Kontribusi sektor pertanian (sub sektor perikanan terhadap PDRB AdHB (\%))} = \frac{\text{Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor perikanan) (Rp)}}{\text{Total Nilai Tambah seluruh sektor (Rp)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor perikanan) sebesar Rp. 221.633,35 sedangkan Total Nilai Tambah seluruh sektor sebesar Rp. 24.355.312,90 sehingga realisasi kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB AdHB sebesar 0,91% dari target sebesar 0,91 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat Sangat Baik dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2016 sama dengan tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu 100%. Sedangkan realisasi kinerja indikator kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB AdHB tahun 2016

menunjukkan peningkatan sebesar 0,02 % dibanding tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu masing-masing sebesar 0,89%.

Kecilnya peran sub sektor perikanan dalam PDRB Kabupaten Ciamis turut dipengaruhi oleh pergeseran proses perekonomian dari sub sektor perikanan itu sendiri dalam hal ini output dari sub sektor perikanan sudah bergeser dari barang mentah menjadi barang setengah jadi melalui proses home industri seperti abon, kerupuk maupun makanan ringan lainnya, sehingga nilai ekonominya tidak masuk lagi dalam nilai ekonomi sub sektor sub sektor perikanan dalam PDRB kabupaten Ciamis namun masuk ke dalam PDRB sektor industri dan perdagangan.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 maka realisasi kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB AdHB sebesar 0,91 % dari target sebesar 0,88 % dengan persentase capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 sebesar 103,41 % dengan predikat Sangat Baik.

I. Perikanan)*

Kontribusi sektor pertanian sub sektor Perikanan)* terhadap PDRB AdHB, atau distribusi persentase sub sektor Perikanan terhadap PDRB AdHB merupakan indikator hasil perbaikan BPS pada tahun 2016 untuk beberapa sektor yang mendukung PDRB AdHB. Distribusi persentase sub sektor Perikanan adalah Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sub kategori Perikanan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu satu tahun.

$$\text{Kontribusi sektor pertanian (sub sektor Perikanan Kayu terhadap PDRB AdHB (\%))} = \frac{\text{Jumlah Nilai PDRB sektor Pertanian (sub sektor Perikanan) (Rp)}}{\text{Jumlah PDRB (Rp)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan metode baru BPS pada tahun 2016, Jumlah Nilai Tambah sektor Pertanian (sub sektor Perikanan) adalah sebesar Rp.

511.232,35 sedangkan Jumlah PDRB berdasarkan perhitungan baru tahun 2016 adalah sebesar Rp. 24.344.397,78 sehingga realisasi Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB AdHB adalah sebesar 2,10 % dari target sebesar 1,99 % dengan persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 105,55 % dengan predikat Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMD karena indikator ini baru di targetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

3. Konsumsi Ikan

Konsumsi Ikan adalah total produksi ikan ditambah ikan yang masuk ke Kabupaten dikurangi ikan yang keluar dari Kabupaten dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 1.000 kilogram, yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{(\text{Total prod. ikan} + \text{ikan yang masuk kab.}) - \text{ikan yang keluar kab.}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000 \text{ kg}$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Ciamis tahun 2016 mencapai 17,72 kg/kapita/tahun dari target yang ditetapkan sebesar 17,56 kg/kapita/tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,91% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi konsumsi ikan adalah sebesar 17,41 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2014 realisasi konsumsi ikan mencapai 16,53 kg/kapita/tahun. Dengan demikian realisasi (capaian kinerja nyata) konsumsi ikan di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka peningkatan konsumsi ikan per kapita pertahun dengan cara mengikuti even promosi hasil olahan perikanan lingkup Kabupaten Ciamis dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani yang berasal dari ikan. Namun demikian dalam pelaksanaanya ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain kurangnya keberagaman produk olahan hasil

perikanan. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya melaksanakan bimbingan teknis untuk para pelaku pengolahan ke pabrik pengolahan yang telah memiliki keberagaman produk olahan hasil perikanan.

Sasaran 40 : Berkembangnya Berbagai Aktivitas Off Farm Untuk Meningkatkan Penghasilan Petani

Off farm adalah suatu kegiatan yang dilakukan diluar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usaha tani. Aktivitas *off farm* dimaksudkan untuk mengenalkan produk-produk hasil pertanian/perkebunan, peternakan dan kehutanan kepada masyarakat umum supaya mereka tahu dan mengenal produk



yang dihasilkan serta berminat menjadi konsumen terhadap produk usaha tani yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan petani. Oleh karena itu salah satu sasaran yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu berkembangnya berbagai aktivitas *off farm* untuk meningkatkan penghasilan petani.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Berkembangnya berbagai aktivitas *off farm* untuk meningkatkan penghasilan petani dilakukan melalui indikator Jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan, peternakan dan kehutanan, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.90

Capaian Kinerja Sasaran
Berkembangnya Berbagai Aktivitas *Off Farm*
Untuk Meningkatkan Penghasilan Petani

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016			RPJMD		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Tahun 2016	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah promosi hasil :									
	a. Pertanian/perkebunan	Kali	7	233,33	3	5	166,67	4	5	125
	b. Peternakan	Kali	6	150	4	5	125	4	5	125
	c. Kehutanan	Kali	3	300	2	3	150	1	3	300
	Rata-rata Capaian Kinerja			227,78			147,22			183,33

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran berkembangnya berbagai aktivitas *off farm* untuk meningkatkan penghasilan petani tahun 2016 adalah sebesar 147,22 %, dengan kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan dari indikator kinerja yang diukur, seluruhnya tercapai melampaui target yang ditetapkan.
- Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 183,33 % atau lebih tinggi dari capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Upaya pencapaian sasaran berkembangnya berbagai aktivitas *off farm* untuk meningkatkan penghasilan petani dilaksanakan melalui 5 (lima) program, yaitu :

- (1) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- (2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan Perikanan;
- (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- (4) Program Peningkatan Kesejahteraan Kehutanan;
- (5) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
- (6) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Penyerapan/realisasi anggaran program secara keseluruhan sebesar Rp. 2.302.032.600,- atau sebesar 97,91 % dari total pagu anggaran Rp. 2.351.173.700,- dengan capaian output sebesar 100,01 % dan capaian outcome sebesar 98,57 %.

Adapun uraian penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan

Salah satu aktivitas yang diperlukan sebagai media dalam meningkatkan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan, baik sub sektor tanaman pangan/hortikultura dan perkebunan, diantaranya melalui partisipasi dalam even pameran / ekpose yang menampilkan hasil produksi pertanian dari petani sebagai media promosi supaya lebih dikenal oleh calon konsumen. Dalam rangka meningkatkan promosi hasil pertanian di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah mengikuti berbagai even yang diselenggarakan di lingkup Kabupaten Ciamis ataupun mengikutsertakan produk pada even tingkat provinsi ataupun nasional.

Yang dimaksud dengan jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan adalah banyaknya *event* promosi bidang pertanian/perkebunan yang diikuti selama satu tahun. Pada tahun 2016 terdapat 5 (lima) *event* promosi hasil pertanian dan perkebunan yang diikuti dari target sebanyak 3 (tiga) *event*. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian kinerja sebesar 166,67%. Jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 *event* promosi hasil pertanian/perkebunan yang dilaksanakan/diikuti adalah sebanyak 7 (tujuh) *event* dan tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) *event*.

Adapun *event* promosi yang diikuti untuk bidang pertanian dan perkebunan yaitu :

- a. *Event* promosi di Kabupaten Ciamis, meliputi :
 - (1) *Event* promosi pada Hari Krida Pertanian di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
 - (2) *Event* promosi pada Hari Jadi Kabupaten Ciamis;
 - (3) Gelar produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kecamatan Lakbok;
 - (4) Pameran dalam rangka pelaksanaan PON IX Jawa Barat Tahun 2016.
- b. *Event* promosi tingkat Regional atau di luar Kabupaten Ciamis, yaitu gebyar wisata, perdagangan dan investasi nasional tahun 2016 di Bandung;

Faktor yang menjadi pendorong untuk melaksanakan/mengikuti *event* promosi hasil pertanian/perkebunan yaitu :

- a. Kabupaten Ciamis memiliki ragam produk hasil pertanian/perkebunan yang layak untuk dipromosikan diantaranya komoditas sayuran, beras, manggis dan produk olahan produk petani seperti kripik pisang, cabe bubuk, saus cabe, sale pisang, kripik singkong dan lainnya.
- b. Cukup banyaknya *event* yang ada sehingga berpotensi menjadi ajang promosi produk hasil pertanian/perkebunan di Kabupaten Ciamis
- c. Adanya kemauan petani/kelompok tani untuk menampilkan hasil produksinya untuk menarik minat calon konsumennya.

Untuk mencapai indikator jumlah promosi hasil (pertanian/perkebunan) dilaksanakan melalui program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 325.930.000,- atau 99,92 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

2. Jumlah Promosi Hasil Peternakan

Jumlah promosi hasil peternakan adalah banyaknya *event*/kegiatan promosi bidang peternakan yang diikuti selama jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 5 (lima) *event* promosi yang diikuti oleh Kabupaten Ciamis dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 4 *event* menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 125 %.

Adapun *event* promosi bidang peternakan yang diikuti, antara lain yaitu :

- (1) Pameran Pembangunan atau *Ciamis Fair* tanggal 19 Mei sampai dengan 5 Juni 2016 bertempat di Jalan Koperasi Kelurahan Kertasari Ciamis;
- (2) Bazar Ramadhan tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Kecamatan Panumbangan, tanggal 21 Juni 2016 di Kecamatan Panjalu dan tanggal 28-29 Juni 2016 di Halaman Pendopo Kabupaten Ciamis;
- (3) Pameran Hari Krida Pertanian tanggal 23 Mei sampai 26 Mei 2016 bertempat di Kecamatan Panumbangan;
- (4) Festival Ternak tanggal 18-19 Oktober 2016 bertempat di Desa Cisontrol Kecamatan Rancah;
- (5) Kontes Ternak Tingkat Kabupaten tanggal 18-19 Oktober 2016 bertempat di Desa Cisontrol Kecamatan Rancah, Kontes Ternak Tingkat Provinsi tanggal 10-11 Agustus 2016 di Kabupaten Karawang ;

Faktor yang menjadi pendorong untuk melaksanakan/mengikuti *event* promosi hasil peternakan yaitu :

- (1) Kabupaten Ciamis memiliki ragam produk yang layak untuk dipromosikan diantaranya komoditas produk olahan hasil peternakan (dendeng, abon, telur asin dan susu) dan produk olahan hasil perikanan (nugget, otak-otak dan ikan bandeng presto).
- (2) Cukup banyaknya *event* yang ada sehingga berpotensi menjadi ajang promosi produk hasil peternakan dan perikanan di kabupaten Ciamis
- (3) Adanya kemauan kelompok tani (peternak) untuk menampilkan hasil produksinya untuk menarik minat calon konsumen.

Masalah yang dihadapi diantaranya kemasan dari hasil olahan masih sederhana, sehingga diperlukan suatu inovasi yang tepat agar menjadi daya tarik bagi konsumen guna meningkatkan daya jual produknya. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan bimbingan teknis untuk para pelaku pengolahan ke pabrik pengolahan yang telah memiliki standar kemasan yang higienis dan efisien.

Untuk mencapai indikator jumlah promosi hasil (peternakan) dilaksanakan melalui program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan perikanan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 351.799.000,- atau 99,94 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

3. Jumlah Promosi Hasil Kehutanan

Jumlah promosi hasil kehutanan dan perkebunan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Pada tahun 2016 promosi hasil kehutanan yang dilaksanakan/diikuti adalah sebanyak 3 (tiga) kali dari target yang ditetapkan sebanyak 2 (satu) kali, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 150 %. Tercapainya pelaksanaan promosi dimaksud didukung oleh program rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan promosi pembangunan kehutanan dan perkebunan, *event* promosi dimaksud antara lain yaitu :

- a) Promosi pada Hari Krida Pertanian (komoditas Kehutanan dan Perkebunan);
- b) Promosi pada Hari Jadi Ciamis (komoditas Kehutanan dan Perkebunan);
- c) Promosi pada Hari Krida Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung (komoditas kehutanan dan perkebunan).

Untuk mencapai indikator jumlah promosi hasil (kehutanan) dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; dan (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Kehutanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.198.117.600 atau 97,49 % dari total anggaran yang disediakan, dengan capaian output sebesar 100,04 % dan outcome sebesar 100 %.

Sasaran 41 : Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan dilakukan melalui 9 (sembilan) indikator, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.91

**Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Ketersediaan:								
	a. Cadangan pangan daerah dan masyarakat;	Ton	366,5	122,17	424,80	89,81	424,8	428,52	100,88
	b. Jumlah lumbung pangan masyarakat;	LPM	257	129	259	108,37	255	259	101,57
	c. Besarnya cadangan padi/ beras di lumbung;	Ton	555	122,17	414,60	91,52	415,45	410,53	98,82
	d. Besarnya cadangan gabah daerah	Ton	-	-	16,2	50,82	9,35	17,99	192,41
2	Distribusi dan akses pangan :								
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90	100	100	111,11	100	100	100
3	Penganeekaragaman dan keamanan pangan :								
	a. Tingkat konsumsi pangan berbasis non-beras;	%	17,38	-	33,54	83,85	33,54	22,98	68,52

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	b. Skor pola pangan harapan	%	74,1	84,49	81,10	109,45	70	76,2	108,86
4	Penanganan kerawanan pangan:								
	a. Penurunan rumah tangga rawan pangan;	%	34,6	76,89	65,38	163,45	45	74,07	164,60
	b. Daerah rawan pangan tertangani	Lokasi	8	100	12	100	16	28	175,00
Rata-rata Capaian Kinerja				104,96		100,93			123,40

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan tahun 2016 adalah sebesar 123,40%, dalam kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (100,93%) maka capaian kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 22,47 %. Selanjutnya dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 (104,96 %) maka capaian kinerja tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 18,44 %.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator menunjukkan dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 6 (enam) indikator melampaui target, 1 (satu) indikator tercapai sesuai target, dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target.
- Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) indikator kinerja, secara umum menunjukkan rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Namun demikian terdapat beberapa capaian kinerja indikator sasaran yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut baru dilakukan pengukuran pada tahun 2015.

Sedangkan perbandingan realisasi pencapaian sasaran sampai dengan Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.92

Perbandingan Realisasi KinerjaSasaran
Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan
Kelembagaan Pangan Tahun 2016 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Ketersediaan Cadangan pangan daerah dan masyarakat :				
	a. Jumlah lumbung pangan masyarakat;	Unit	259	225	101,57
	b. Besarnya cadangan padi/beras di lumbung;	Ton/Th	410,53	65	631,58
	c. Besarnya cadangan gabah daerah	Ton/Th	17,99	40	44,98
2	Distribusi dan akses pangan :				
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	90	111,11
3	Penganekaragaman dan keamanan pangan :				
	a. Tingkat konsumsi pangan berbasis non-beras;	%	22,98	45	51,07
	b. Skor pola pangan harapan	%	76,2	70	108,86
4	Penanganan kerawanan pangan:				
	a. Penurunan rumah tangga rawan pangan;	%	74,07	45	164,60
	b. Daerah rawan pangan tertangani	Lokasi	28	14	155,56
Capaian Rata-rata Kinerja					171,17

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016, yang merupakan tahun kedua perencanaan, menunjukkan capaian kinerja sebesar 171,17%. Capaian kinerja pada RPJMD Tahun

2016 ini lebih tinggi dibandingkan capaian dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dikarenakan ada beberapa indikator dalam RPJMD yang memiliki target lebih rendah daripada target yang ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan sebesar Rp. 3.628.836.937,- atau sebesar 99,59 % dari total pagu anggaran Rp. 3.643.892.800,- dengan capaian output sebesar 106,16 % dan capaian outcome sebesar 106,08 %.

Penjelasan/analisa capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan : Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasokan pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan daerah dan masyarakat merupakan penjumlahan antara cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan daerah adalah cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui kegiatan pengadaan beras berdasarkan harga penjualan beras di luar penugasan pemerintah yang telah ditetapkan dari perusahaan umum (Perum) BULOG. Sedangkan Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola oleh Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Dengan demikian, secara matematis ketersediaan cadangan pangan daerah dan masyarakat dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Cadangan pangan daerah dan masyarakat} &= \text{Cadangan pangan daerah} + \text{Cadangan pangan masyarakat} \\
 &= 17,99 \text{ Ton} + 410,53 \text{ Ton} \\
 &= 428,52 \text{ Ton}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa cadangan pangan daerah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis tahun 2016 adalah sebesar 428,52 ton beras dari target yang ditetapkan sebesar 424,8 ton beras, dengan capaian kinerja sebesar 100,88% atau kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 (424,8 ton), jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,72 ton beras atau sebesar 0,88%.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mencapai atau meningkatkan cadangan pangan daerah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis adalah melalui :

- a. Pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan;
- b. Pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan);
- c. Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya;
- d. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan mengoptimalkan peran Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut, terdapat kendala atau hambatan yang ditemui antara lain :

- a. Terbatasnya cadangan pangan daerah untuk mengatasi kondisi darurat bencana alam (terdapat 10 ton beras dari target SPM 60 ton beras);
- b. Terbatasnya SDM pengelola lumbung dalam menguatkan kelembagaan lumbung pangan .

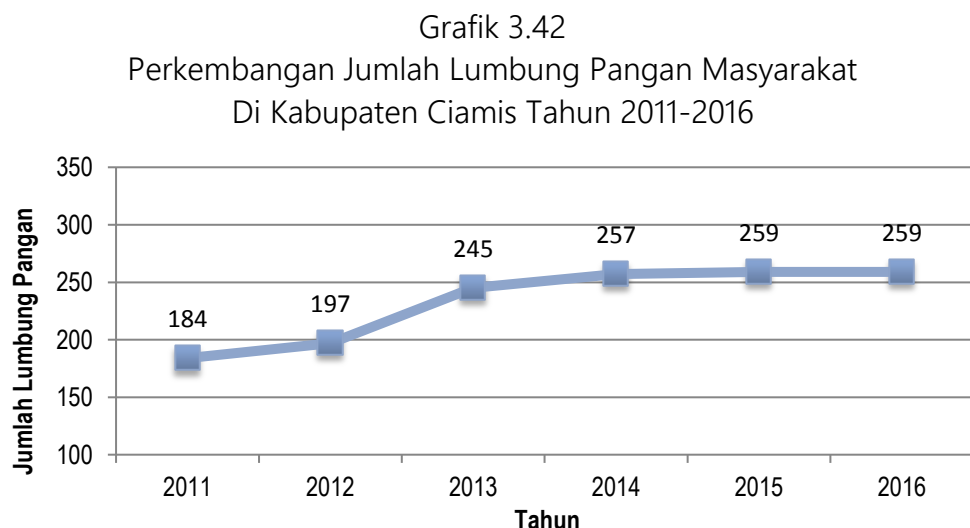
Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras mengacu kepada target SPM serta mengadakan pelatihan dan pembinaan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.

2. Ketersediaan : Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat

Lumbung Pangan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

Pada tahun 2016, jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 259 unit atau mencapai 101,57% dengan kategori sangat baik, dari target yang ditetapkan sebesar 255 unit. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 259 unit dan tahun 2014 sebesar 257 unit. Dengan demikian jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis tahun 2016 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2015 dan mengalami peningkatan dari tahun 2014.

Grafik perkembangan jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :



Dalam rangka meningkatkan efektifitas keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah Inventarisasi Kelembagaan Lumbung Pangan, Identifikasi Kelembagaan Lumbung Pangan, Penguatan Kelembagaan, Fasilitas Permodalan, Pengembangan Jaringan Usaha dan Monitoring dan Evaluasi.

Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain rendahnya jiwa kewirausahaan para pengelola lumbung, belum adanya kesamaan persepsi tentang pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan terutama dalam hal pengalokasian Dana PMUK, laporan rutin bulanan dari kelompok tentang perkembangan dana PMUK masih sering terlambat sehingga menyulitkan dalam merekap laporan secara keseluruhan, terbatasnya Dana PMUK yang tersedia sehingga belum dapat menjangkau seluruh kelembagaan lumbung pangan yang ada, dan masih banyak kelembagaan lumbung pangan yang belum melaksanakan kemitraan usaha.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu peningkatan kualitas SDM pengelola lumbung melalui pelatihan kewirausahaan dan study banding ke kelompok yang telah maju, sosialisasi SK Mendagri dan Otda No. 6 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Kelembagaan Lumbung Pangan dan penjelasan tentang Pedum Pemberdayaan Lumbung Pangan, peningkatan intensitas pembinaan kepada kelompok, mengupayakan Dana PMUK dari APBD Kabupaten dan meng-efektifkan pola perguliran, serta melaksanakan kegiatan temu usaha melalui kegiatan Forum Komunikasi Ketahanan Pangan.

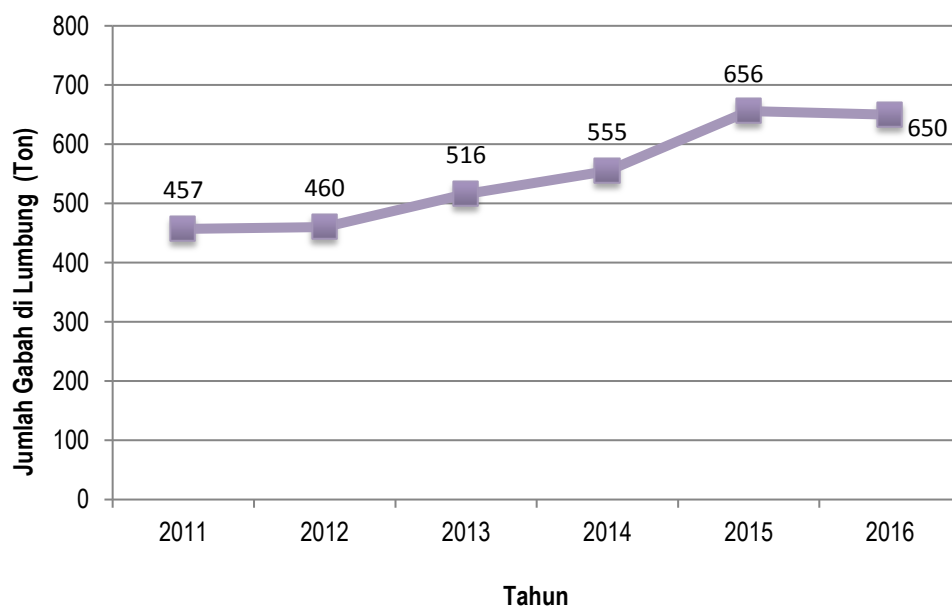
3. Ketersediaan : Besarnya Cadangan Padi/ Beras Di Lumbung

Cadangan padi/beras di lumbung adalah jumlah padi/beras yang ada di lumbung pangan masyarakat (LPM) berdasarkan data laporan kecamatan setiap bulannya selama satu tahun berjalan. Cadangan padi/beras di lumbung merupakan bagian dari Cadangan Pangan Masyarakat.

Pada tahun 2016, jumlah Cadangan padi/beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) se-Kabupaten Ciamis sebesar 410,53 Ton beras (setara dengan 649,57 ton gabah) dari target yang ditetapkan sebesar 415,45 Ton Beras (setara dengan 657,36 ton gabah), dengan capaian kinerja sebesar 98,82% dengan kategori/predikat sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 jumlah Cadangan padi/ beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 656 ton gabah atau setara dengan 414,6 ton beras, tahun 2014 sebesar 555 ton gabah atau setara dengan 350,76 ton beras dan tahun 2013 sebesar 516 ton gabah atau setara dengan 326,112 ton beras. Dengan demikian jumlah Cadangan padi/ beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis setiap tahun relatif menunjukkan peningkatan, meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,85 ton (0,21%) beras dari capaian tahun 2015.

Grafik perkembangan Cadangan padi/ beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.43
Perkembangan Cadangan Padi/Beras di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2016



Dalam rangka mencapai atau meningkatkan Cadangan gabah/beras di lumbung pangan masyarakat (LPM), upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan serta optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya sehingga Cadangan gabah/beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut antara lain :

- (1) Kecenderungan petani berperilaku konsumtif. Di negara berkembang, masyarakatnya cenderung lebih suka berbelanja daripada menabung. Hasil panen yang berlimpah kadang mendorong petani hanya berpikir bagaimana bisa segera menjualnya dan mendapatkan uang;
- (2) Masuknya model-model kelembagaan lain yang banyak berkembang. Banyak lembaga keuangan yang memberikan fasilitas perkreditan dengan syarat mudah bagi petani. Petani cenderung berpikir praktis tanpa berusaha belajar mengelola permodalan usahataniya sendiri;
- (3) Adanya petani yang terjerat dengan sistem ijon. Terdesak kebutuhan dan keinginan hidup, petani rela menjual komoditasnya sebelum panen kepada tengkulak. Akibatnya, ketika panen tidak ada komoditas yang bisa dikelola bisnisnya oleh lumbung pangan desa;
- (4) Sikap petani yang cenderung apatis. Eksistensi lumbung pangan desa sebenarnya didasari pada sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desa. Seiring pudarnya nilai-nilai tersebut akibat dampak globalisasi maka lambat tapi pasti lumbung pangan desa akan ditinggalkan.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain :

- (1) Meningkatkan potensi sumberdaya manusia petani, melalui berbagai pelatihan dan pendidikan melalui penyuluhan pertanian, agar mereka tahu, mau dan mampu mengembangkan potensi lumbung pangan dengan meningkatkan produksi pertanian terutama pangan dengan sistem agribisnis secara berkelanjutan;
- (2) Penguatan modal usaha tani, agar petani mampu mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai kapasitas ketahanan pangan masyarakat;
- (3) Membangun hubungan kemitraan yang lebih efektif dan efisien antara kelembagaan lumbung pangan desa dengan Badan Urusan Logistik (BULOG). Kemitraan tersebut bisa melalui mekanisme jual beli beras dari lumbung ke Bulog dengan harga yang sesuai;
- (4) Mengembangkan sistim Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*). Dengan sistem ini, petani ataupun pemilik tidak perlu menjual komoditinya sewaktu harga rendah, tetapi masih mendapatkan dana dari perbankan melalui Resi Gudang yang diterima dari penyimpanan.

4. Ketersediaan : Besarnya Cadangan Gabah Daerah

Cadangan gabah daerah atau cadangan pangan daerah adalah cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui kegiatan pengadaan beras berdasarkan harga penjualan beras di luar penugasan pemerintah yang telah ditetapkan dari perusahaan umum (Perum) BULOG. Besar kecilnya cadangan ini sangat tergantung kepada jumlah anggaran tersedia untuk CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) dan harga jual beras di luar penugasan pemerintah yang telah ditetapkan dari perusahaan umum (Perum) BULOG.

Pada tahun 2016, jumlah pengadaan CPPD sebesar 9,35 ton beras atau setara dengan 14,79 ton gabah. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah pengadaan CPPD sebesar 10,24 ton beras atau setara dengan 16,2 ton gabah. Dengan demikian total pengadaan CPPD pada tahun 2015-2016 di Kabupaten Ciamis sebesar 19,59 ton beras atau setara dengan 30,99 ton gabah.

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2016, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyalurkan bantuan berupa Beras CPPD tersebut kepada Korban Bencana Banjir di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar, sebanyak 1.600 kg. Bantuan disalurkan kepada 5.699 KK yang tersebar di 15 Desa. Dengan adanya penyaluran tersebut, maka jumlah CPPD di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 sebesar 17,99 ton beras atau setara dengan 28,47 ton gabah.

Berdasarkan kondisi tersebut, capaian kinerja besarnya cadangan gabah daerah baru mencapai 44,98% dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 40

ton beras atau setara dengan 63,29 ton gabah.

Meksipun demikian, bila dibandingkan dengan jumlah CPPD tahun 2015 (10,24



ton), jumlah CPPD tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,75 ton beras atau setara dengan 12,27 ton gabah (75,68%).

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan cadangan pangan daerah di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan daerah setiap tahun, sehingga cadangan pangan daerah dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain terbatasnya anggaran dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah, sehingga target SPM sebesar 60 ton beras pada tahun 2016 belum dapat dicapai (baru terealisasi sebesar

17,99 ton). Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras mengacu kepada target SPM.

5. Distribusi dan Akses Pangan (Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan)

Stabilisasi harga dan pasokan pangan menggambarkan fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga dan pasokan selama kurun waktu tertentu. Semakin kecil fluktuasi harga pada kurun waktu tersebut, maka kondisi harga dikatakan stabil dan sebaliknya. Fluktuasi harga/pasokan dapat diukur dengan nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV maka harga/pasokan semakin stabil. Indikator stabilitas harga dan pasokan pangan digunakan untuk memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.

- 1) Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SK_i}{n}$$

Keterangan :

K = $\begin{cases} \text{H untuk Harga} \\ \text{P untuk Pasokan} \end{cases}$

SH_i = Stabilitas Harga komoditas ke i

SP_i = Stabilitas Pasokan komoditas ke i

i = 1,2,3...n

n = jumlah komoditas

dimana :

Stabilitas Harga (SH) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

Stabilitas Pasokan (SP) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

- 2) Stabilitas harga dan pasokan komoditas ke i dihitung dengan menggunakan rumus :

$$SK_i = \left[2 - \frac{CV_{K Ri}}{CV_{K Ti}} \times 100\% \right]$$

Keterangan :

K = $\begin{cases} \text{H untuk Harga} \\ \text{P untuk Pasokan} \end{cases}$

CV_{K Ri} = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

CV_{K Ti} = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

3) CVK_{Ri} dihitung dari rumus sebagai berikut :

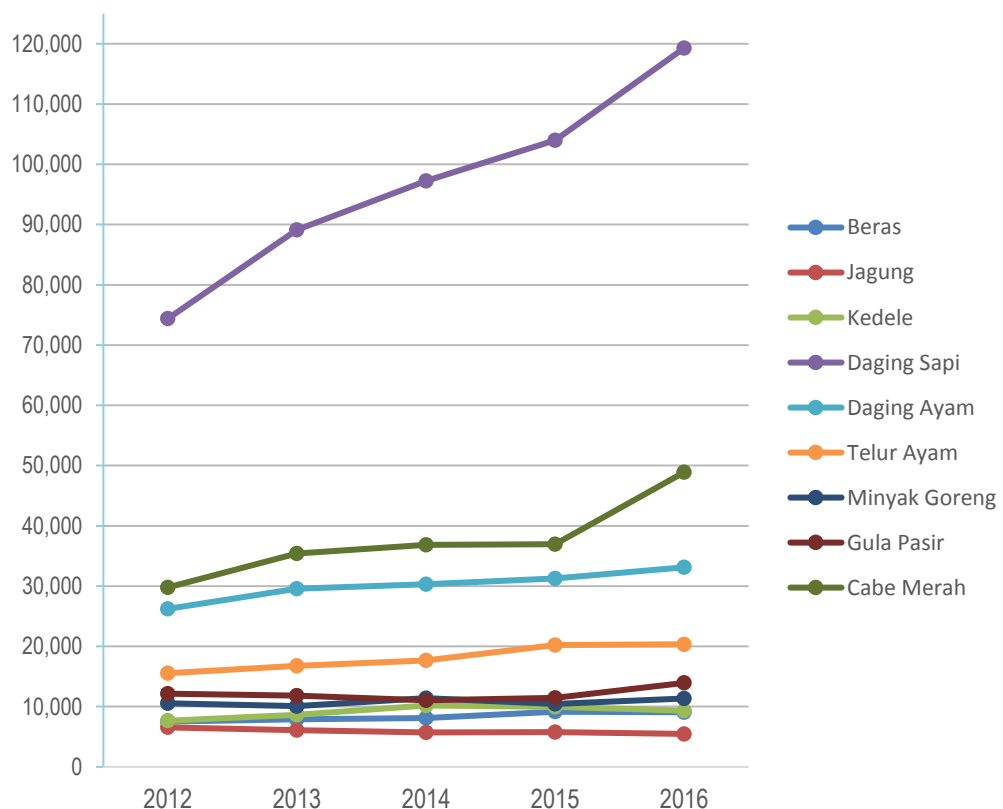
$$CVK_{Ri} = \frac{SDK_{Ri}}{HK_{Ri}} \times 100\%$$

Pada tahun 2016, Stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Ciamis menunjukkan angka 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 Stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 100% dan tahun 2014 sebesar 100%. Dengan demikian kondisi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa stabil.

Grafik perkembangan Stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.44

Perkembangan Harga dan Pasokan Pangan
Di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016



Dalam rangka mencapai atau meningkatkan Stabilisasi harga dan pasokan pangan, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melakukan pemantauan terhadap pasokan dan harga pangan guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga sehingga Stabilisasi harga dan pasokan pangan dapat tercapai setiap tahunnya.

Beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut antara lain belum terdapat cara pengumpulan data dan pemantauan pasokan bahan pangan antar wilayah yang memenuhi kriteria tepat, cepat dan akurat. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui koordinasi dan kerjasama antar berbagai instansi terkait karena secara umum masalah distribusi dan stabilitas harga pangan adalah merupakan masalah yang memerlukan penanganan bersama.

6. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan (Tingkat Konsumsi Pangan Berbasis Non-Beras)

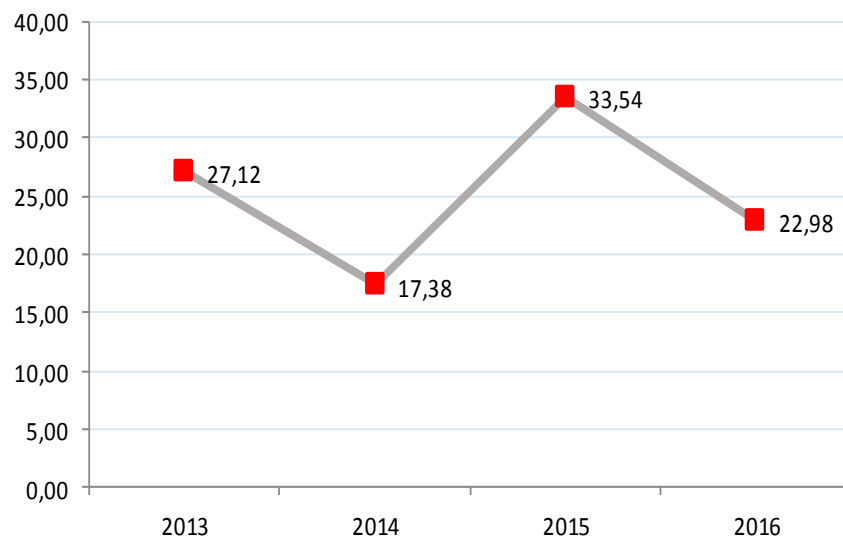
Tingkat konsumsi pangan non beras adalah persentase jumlah pangan non beras (umbi-umbian) dibandingkan dengan jumlah konsumsi pangan yang termasuk ke dalam sumber karbohidrat.

$$\text{Tk Konsumsi Pangan Non Beras} = \frac{\text{Total Konsumsi Pangan Non Beras (Umbi-umbian)}}{\text{Total Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat}} \times 100\%$$

Pada tahun 2016, tingkat konsumsi pangan non beras masyarakat Kabupaten Ciamis baru mencapai 22,98%, dengan capaian kinerja sebesar 68,52 % dengan kategori cukup, dari target yang ditetapkan sebesar 33,54%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 tingkat konsumsi pangan non beras masyarakat Kabupaten Ciamis adalah sebesar 33,54% dan tahun 2014 sebesar 17,38%. Tingkat konsumsi pangan non beras masyarakat Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 2014-2016 mengalami tren yang bervariasi

yaitu mengalami penurunan pada tahun 2014, mengalami peningkatan di tahun 2015 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2016. Grafik perkembangan Tingkat konsumsi pangan non beras masyarakat Kabupaten Ciamis selama empat tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.45
Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan Non Beras (%) Tahun 2013-2016



Dalam rangka mencapai atau meningkatkan konsumsi pangan non beras masyarakat, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melalui kegiatan pengembangan pangan lokal sehingga tingkat konsumsi pangan non beras masyarakat dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain :

- (1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsumsi pangan lokal sesuai dengan pola menu beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
- (2) Belum adanya teknologi tepat guna yang secara langsung mengarah kepada keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat dalam mengolah pangan lokal non beras;

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu :

- (1) Melaksanakan sosialisasi dan promosi pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat.
- (2) Berkenaan dengan teknologi diupayakan dengan mencari teknologi yang berkembang baik yang bersumber dari Litbang, Perguruan Tinggi maupun dari pengalaman petani yang terbaik.

7. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan (Skor Pola Pangan Harapan)

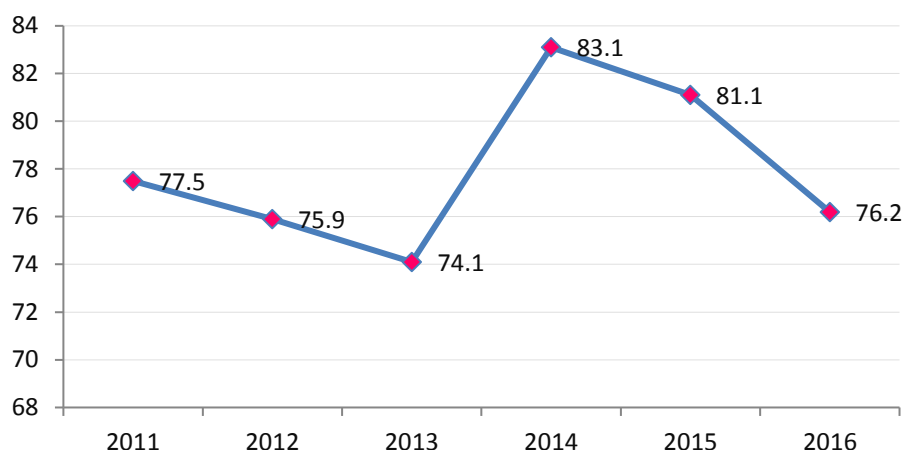
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang dari tercermin dari tingkat keberagaman dan keberimbangan pola konsumsi pangan masyarakat. Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

$$\text{Peningkatan Skor PPH} = \% \text{ AKG} \times \text{Bobot Masing-masing Kelompok Pangan}$$

Pada tahun 2016, nilai capaian peningkatan skor PPH sebesar 76,2 % dari target yang ditetapkan sebesar 70% dengan capaian kinerja sebesar 108,86 % dan menunjukkan predikat/kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 nilai capaian skor PPH Kabupaten Ciamis adalah sebesar 81,1% dan tahun 2014 sebesar 83,1%. Dengan demikian nilai capaian skor PPH Kabupaten Ciamis setiap tahun cenderung menunjukkan penurunan, meskipun pada tahun 2014 terjadi peningkatan PPH yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2013.

Grafik perkembangan nilai capaian skor PPH Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.46
Perkembangan Skor PPH Tahun 2011-2016



Pencapaian skor PPH pada tahun 2016 sebesar 76,2% menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Ciamis cukup beragam dan berimbang. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, yakni sebesar 81,1%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dalam metode pengumpulan data yakni semula terdapat 213 jenis makanan yang disample sekarang menjadi 112 jenis makanan. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap nilai keanekaragaman makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat (PPH). Secara umum tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu masih relatif tinggi. Oleh karena itu, konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, gula, kacang-kacangan, sayuran dan buah, serta buah/biji berminyak perlu terus ditingkatkan. Meskipun demikian, tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Ciamis sudah melebihi nilai standar yakni 2063,6 kkal/kapita/hari.

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan skor PPH konsumsi pangan masyarakat, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melalui kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Ciamis, yang sudah dimulai sejak tahun 2010. Sejalan dengan perkembangan informasi, teknologi dan kondisi sosial masyarakat, kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, yang terdiri dari sosialisasi kegiatan pemanfaatan pekarangan dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada

kelompok wanita tani. Sampai tahun 2016 kelompok wanita yang sudah difasilitasi sebanyak 90 KWT dari total KWT sebanyak 268 KWT. Dalam perkembangannya, kegiatan optimalisasi lahan pekarangan tersebut semakin diperbaiki dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. Adapun kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan dilaksanakan untuk mengetahui nilai capaian PPH sebagai indikator penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain sulitnya mengubah pola pikir masyarakat mengenai pengembangan pola konsumsi pangan yang lebih beragam dengan memanfaatkan hasil pekarangan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu dengan pangan lokal.

Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu dengan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pola konsumsi pangan B2SA kepada anak sekolah, kelompok wanita tani ataupun kepada masyarakat luas lainnya melalui media promosi seperti leaflet, banner, dan pameran produk pangan lokal pada momen peringatan Hari Pangan Sedunia.

8. Penanganan Kerawanan Pangan (Penurunan Rumah Tangga Rawan Pangan)

Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga

sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami). Penurunan rumah tangga rawan pangan adalah penurunan jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi pangan di bawah angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.150 Kalori.

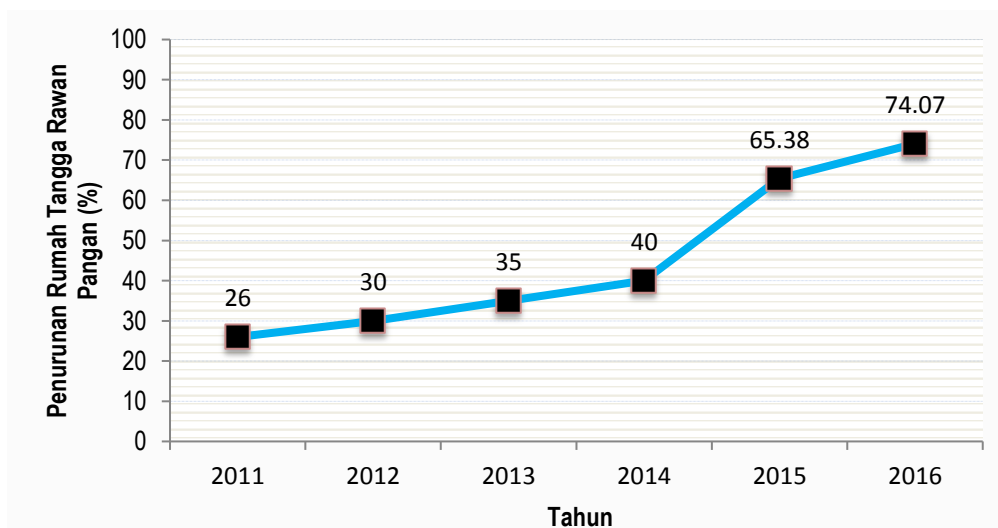
Penurunan Rumah

$$\text{Tangga Rawan Pangan} = \frac{\text{Jumlah Kecamatan Rawan Pangan yang tertangani s.d th. 2016}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2016, Penurunan rumah tangga rawan pangan di Kabupaten Ciamis sebesar 74,07% dari target yang ditetapkan sebesar 45% dengan capaian kinerja sebesar 164,60 % atau dengan kategori/predikat sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 penurunan rumah tangga rawan pangan di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 65,38 % dan tahun 2014 sebesar 34,6 %. Dengan demikian Penurunan rumah tangga rawan pangan di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Grafik perkembangan penurunan rumah tangga rawan pangan di Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.47
Penurunan Rumah Tangga Rawan Pangan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2011 - 2016



Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Penurunan rumah tangga rawan pangan pada tahun 2016 antara lain melalui penyaluran bantuan beras CPPD kepada korban bencana banjir di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar serta melalui kegiatan piloting pemanfaatan lahan pekarangan di Kecamatan Pamarican. Selain itu, upaya lainnya yang dilakukan antara lain melalui : (1) Pengamatan dan kajian dengan menggunakan beberapa indikator yang sesuai urutan kejadian, sebagai bahan untuk mengambil keputusan tindakan preventif dan kuratif; serta (2) Peningkatan kapasitas pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi melalui pengelolaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dengan menetapkan Tim/Pokja Pangan Kabupaten Ciamis oleh Bupati Ciamis sehingga Penurunan rumah tangga rawan pangan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

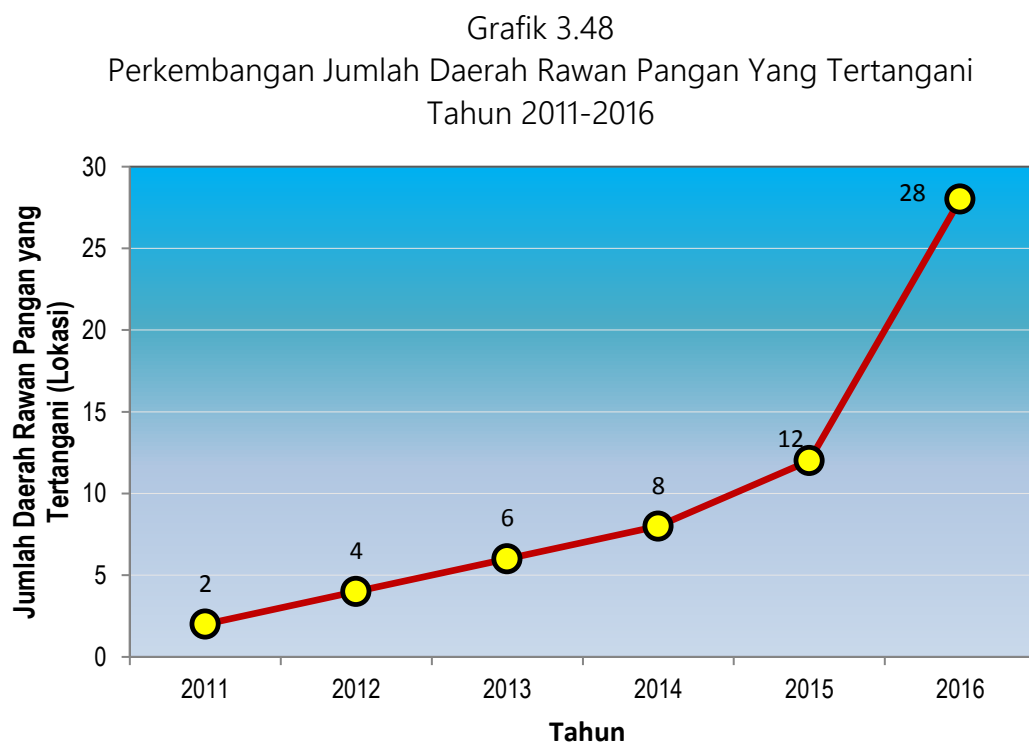
Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain kurangnya kemampuan SDM dalam pengkajian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Provinsi.

9. Penanganan Kerawanan Pangan (Daerah Rawan Pangan Tertangani)

Daerah rawan pangan yang tertangani adalah daerah rawan pangan yang telah mendapatkan intervensi (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat). Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani tahun 2016 merupakan jumlah kumulatif daerah rawan pangan yang tertangani dari kondisi awal RPJMD 2014-2019 sampai dengan tahun 2016.

Sampai dengan tahun 2016, jumlah daerah rawan pangan yang tertangani di Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lokasi dari target yang ditetapkan sebanyak 16 (enam belas) lokasi, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 175 % dan menunjukkan predikat sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 jumlah daerah rawan pangan yang tertangani di Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 12 (dua belas) lokasi dan tahun 2014 sebanyak 8 (delapan) lokasi. Dengan demikian jumlah daerah rawan pangan yang tertangani di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Grafik perkembangan jumlah daerah rawan pangan yang tertangani di Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :



Peningkatan capaian yang cukup signifikan pada tahun 2016 dapat terjadi karena adanya bencana banjir di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar yang menyebabkan lokasi tersebut dinyatakan sebagai daerah rawan pangan transien. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2016, Pemerintah Kabupaten

Ciamis telah menyalurkan bantuan berupa Beras CPPD kepada Korban Bencana Banjir di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar, sebanyak 1.600 kg. Bantuan disalurkan kepada 5.699 KK yang tersebar di 15 Desa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga memfasilitasi pelaksanaan Piloting Pemanfaatan Lahan Pekarangan di lokasi daerah rawan pangan, Desa Bantarsari, Kecamatan Pamarican.

Secara umum upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mencapai atau meningkatkan jumlah daerah rawan pangan yang tertangani antara lain :

- (1) Kegiatan SKPG yang menghasilkan analisis/peta situasi pangan dan gizi digunakan untuk rekomendasi bagi pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan;
- (2) Penyaluran CPPD kepada daerah rawan pangan;
- (3) Investigasi yang merupakan kegiatan peninjauan ke tempat kejadian rawan pangan untuk melihat langsung dan melakukan *cross check* terhadap kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat, serta jenis bantuan yang diperlukan;
- (4) Intervensi yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat. Sehingga jumlah daerah rawan pangan yang tertangani semakin meningkat setiap tahunnya.

Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain terbatasnya anggaran untuk intervensi daerah rawan pangan. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu permohonan anggaran penanganan daerah rawan pangan dari APBD Provinsi maupun APBN.

Sasaran 42 : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pemerintah Desa dan BPD



Kapasitas sumberdaya aparatur Pemerintah Desa dan BPD adalah kemampuan aparatur Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur Pemerintah Desa dan BPD maka salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur Pemerintah Desa dan BPD dilakukan melalui indikator aparatur desa yang mengikuti diklat. Yang dimaksud dengan diklat dalam indikator sasaran ini adalah kegiatan pendidikan, pelatihan maupun bimbingan teknis yang diikuti oleh aparatur Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil pengukuran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.93

Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016			RPJMD 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Aparatur desa yang mengikuti diklat	Orang	999	1248,75	308	2.401	779,55	100	2.401	2401

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran di atas diketahui bahwa Capaian kinerja sasaran Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa dan BPD Tahun 2016 yang diukur dari perbandingan antara target dan realisasi indikator jumlah aparatur desa yang mengikuti diklat dengan target sebanyak 308 orang dan realisasi sebanyak 2.401 orang, menunjukkan capaian kinerja sebesar 779,55 %, dengan kategori sangat baik. Capaian kinerja tahun 2016 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun lalu, akan tetapi jika dilihat dari realisasi/capaian nyata terlihat ada peningkatan yang sangat signifikan. Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 2401 %.

Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis selama Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.94

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun 2016

No	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Peserta	Jumlah (orang)
1	Pelatihan Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak	Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Ciamis	Kepala Desa	76

No	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Peserta	Jumlah (orang)
2	Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur	BPMPD Provinsi Jawa Barat	- Sekretaris Desa - Kaur Keuangan	516
3	Pelatihan Penataan Aset Desa	BPMPD Kabupaten Ciamis	- Sekretaris Desa - Kaur Umum	100
4	Pelatihan Manajemen BUMDes	BPMPD Kabupaten Ciamis	- Kepala - Direktur BUMDes - Sekretaris BUMDes	78
5	Pelatihan Pembentukan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	BPMPD Kabupaten Ciamis	Sekretaris Desa	76
6	Pelatihan Pengisian Data Profil Desa/Kelurahan	BPMPD Kabupaten Ciamis	Kasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	265
7	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	BPMPD Kabupaten Ciamis	- Kaur Umum - Kaur Keuangan - Bendahara	774
8	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	BPMPD Kabupaten Ciamis	- Kepala Desa - Sekretaris Desa	516
Jumlah				2.401

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis, Tahun 2016

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran antara lain yaitu :

- Komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan urusan Pemerintahan Desa yang sebelumnya menjadi satu dengan OPD yang menangani urusan KB dan Pemberdayaan Perempuan. Sehingga penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa lebih fokus tertangani.
- Banyaknya kegiatan diklat yang diselenggarakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD

Kabupaten dan juga APBDesa, sehingga capaian realisasi aparatur desa yang mengikuti diklat melebihi dari target yang telah ditentukan.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

- (1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- (2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
- (3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD sebesar Rp. 3.840.049.900,- atau sebesar 99,91 % dari total pagu anggaran Rp. 3.843.323.400,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 43 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdesaan

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberian pelayanan masyarakat perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan menjadi target sasaran yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Salah satu sarana prasarana yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kondisi bangunan desa.

Berkaitan hal tersebut, pengukuran terhadap tingkat pencapaian sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan dilakukan melalui indikator persentase kantor desa/bangunan desa dalam kondisi baik yang diukur dari perbandingan antara jumlah bangunan desa dalam kondisi baik dibagi jumlah desa di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan terhadap kondisi kantor pemerintahan desa (bangunan kantor desa), pada tahun 2016 jumlah seluruh desa di Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 258 desa dengan jumlah bangunan desa dalam kondisi baik adalah sebanyak 224 bangunan (86,43 %) dan kondisi rusak ringan sebanyak 34 bangunan (13,57 %).



Dari data tersebut diketahui persentase bangunan desa dalam kondisi baik adalah sebesar 86,43 % dari seluruh jumlah desa. Sedangkan target yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja tahun 2016 adalah sebesar 69,7 %. Dengan demikian realisasi kinerja melampaui target sebesar 16,73 %, dengan capaian kinerja sasaran ini menunjukkan angka sebesar 124 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan yang diukur dari indikator jumlah bangunan desa dalam kondisi baik adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.95
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdesaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016			RPJMD Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bangunan desa dalam kondisi baik	%	62,40	89,44	69,7	86,43	124	73,64	86,43	117,37

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdesaan tahun 2016 yang diukur dari perbandingan antara target dan realisasi indikator bangunan desa dalam kondisi baik dengan target sebesar 69,7 % dengan realisasi sebesar 86,43 % menunjukkan capaian sebesar 124 %, dengan kategori sangat baik. Capaian kinerja sasaran tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebesar 34,56 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 atau meningkat sebanyak 63 bangunan. Sedangkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 117,4 %.

Keberhasilan dalam pencapaian target merupakan wujud dari optimalnya penggunaan Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan sarana prasarana desa serta bantuan keuangan infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten sehingga pemenuhan kebutuhan sarana prasarana desa semakin optimal.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu (1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan (2) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.060.587.353,- atau sebesar 82,86 % dari total pagu anggaran Rp. 20.589.906.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 44 : Menurunnya Jumlah Desa Tertinggal

Desa Tertinggal adalah Daerah dalam lingkup desa yang masyarakatnya serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan desa lainnya dalam skala nasional dengan memakai pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan nilai/skor/angka pada setiap variabel dalam kriteria utama yang dijadikan dasar penilaian.

Pengukuran terhadap capaian sasaran Menurunnya jumlah desa tertinggal dilakukan melalui indikator jumlah desa tertinggal, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.96
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Menurunnya Jumlah Desa Tertinggal

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	27	100	27	100	27	27	100

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja sasaran menurunnya jumlah desa tertinggal tahun 2016 menunjukkan capaian sebesar 100 %, dengan kategori sangat baik.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja (capaian nyata) dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan :
 - Capaian nyata jumlah Desa tertinggal di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 sama dan tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu sebanyak 27 desa.
 - Capaian kinerja sasaran antara tahun 2016, tahun 2015 dan tahun 2014 tidak mengalami peningkatan/penurunan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100 %.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.97
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Jumlah Desa Tertinggal
Tahun 2016 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah desa tertinggal	desa	27	27	100

Jumlah desa tertinggal di Kabupaten Ciamis dari target tahun 2016 sebanyak 27 desa dan berdasarkan hasil kajian desa tertinggal tahun 2008 di Kabupaten Ciamis (27 kecamatan) adalah 27 desa.

1. Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi;
2. Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan;
3. Desa Buana Mekar Kecamatan Panumbangan;
4. Desa Purwasari Kecamatan Kawali;
5. Desa Janggala Kecamatan Cidolog;
6. Desa Sukaharja Kecamatan Rajadesa;
7. Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara;
8. Desa Sukanagara Kecamatan Jatinagara;
9. Desa Bangunjaya Kecamatan Panawangan;
10. Desa Maparah Kecamatan Panjalu;
11. Desa Hujungtiwu Kecamatan Panjalu;
12. Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu;
13. Desa Bahara Kecamatan Panjalu;
14. Desa Tenggeraharja Kecamatan Panjalu;
15. Desa Mekarwangi Kecamatan Panjalu;
16. Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga;
17. Desa Sukahurip Kecamatan Cisaga;
18. Desa Girimukti Kecamatan Cisaga;
19. Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga;

20. Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga;
21. Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga;
22. Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican;
23. Desa Sukamukti Kecamatan Pamarican;
24. Desa Margajaya Kecamatan Pamarican;
25. Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari;
26. Desa Wangunsari Kecamatan Rancah;
27. Desa Cikupa Kecamatan Lumbung.

Pada Tahun 2016 di Kabupaten Ciamis dibentuk SKPD Teknis yang membidangi Desa yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sehingga secara teknis kajian Desa Tertinggal seyogyanya dilaksanakan oleh SKPD tersebut, akan tetapi kajian Desa Tertinggal belum dapat dilaksanakan karena berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan bahwa tipologi desa dan kelurahan terdiri dari:

- a. tipologi desa dan kelurahan persawahan;
- b. tipologi desa dan kelurahan perladangan;
- c. tipologi desa dan kelurahan perkebunan;
- d. tipologi desa dan kelurahan peternakan;
- e. tipologi desa dan kelurahan nelayan;
- f. tipologi desa dan kelurahan pertambangan/galian;
- g. tipologi desa dan kelurahan kerajinan dan industri kecil;
- h. tipologi desa dan kelurahan industri sedang dan besar; dan
- i. tipologi desa dan kelurahan jasa dan perdagangan.

Untuk klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan terdiri dari swasembada, swakarya dan swadaya. Mengacu pada ketentuan tentang tipologi dan klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan tersebut, pada tahun 2016 belum dilakukan kembali kegiatan kajian desa tertinggal.

Selanjutnya berdasarkan Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengklasifikasi Desa dalam 5 (lima) status yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Berdasarkan hal ini diharapkan ke depan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dimungkinkan untuk melaksanakan kajian desa tertinggal.

Sasaran 45 : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa adalah kemampuan kelembagaan masyarakat yang ada di desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pembangunan. Salah satu kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan yang memiliki peran dan fungsi penting dalam pembangunan desa/kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. LPM merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Tugas LPM adalah menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah desa, menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan memantau pelaksanaan pembangunan. Fungsi LPM adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan serta sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Berkaitan hal tersebut, keberadaan LPM (jumlah LPM aktif) menjadi indikator dalam pengukuran tingkat pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas

kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa. Yang dimaksud dengan LPM aktif yaitu LPM yang menjalankan perannya sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2016 jumlah LPM yang ada di Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 265 lembaga yang meliputi 258 LPM di Desa dan 7 di Kelurahan. Dari jumlah 265 LPM di Desa dan Kelurahan tersebut semuanya merupakan LPM yang aktif dalam menjalankan perannya sebagai mitra Pemerintah Desa/kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.98
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah LPM aktif	Lembaga	265	100	265	100	265	265	100

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa tahun 2016 yang diukur dari perbandingan antara target dan realisasi indikator jumlah LPM aktif menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, dengan kategori sangat baik.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun yang lalu menunjukkan bahwa realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 sama dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2014 dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.99
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah LPM aktif	Lembaga	265	263	100,76

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,76 %, artinya bahwa capaian kinerja pada tahun 2016 relatif lebih rendah dari capaian kinerja dalam RPJMD. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan target antara target dalam RPJMD dan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016, dimana target dalam Perjanjian Kinerja lebih tinggi dari target dalam RPJMD tahun 2016, sehingga berpengaruh terhadap besarnya persentase capaian kinerja.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.322.254.750,- atau sebesar 99,92 % dari total pagu anggaran Rp. 1.323.297.400,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 46 : Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa dilakukan indikator Jumlah UPPKS aktif. UPPKS adalah kelompok Binaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Keluarga Pra Sejahtera I yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6

(enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*). Sedangkan Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga. Perhitungan jumlah kelompok UPPKS aktif yaitu jumlah kelompok UPPKS aktif di setiap desa di 27 kecamatan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa melalui indikator Jumlah UPPKS aktif sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.100
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah UPPKS aktif	Kelompok	284	-	268	101,13	265	243	91,70

Berdasarkan tabel hasil pengukuran capaian kinerja sasaran di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah UPPKS aktif di Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 243 kelompok yang tersebar di 27 kecamatan dan 265 desa dan kelurahan. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 265 kelompok. Dengan demikian realisasi jumlah kelompok UPPKS aktif tidak mencapai target yang ditetapkan dan menunjukkan capaian kinerja sebesar 91,70 % dan masih termasuk dalam kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana jumlah UPPKS aktif adalah sebanyak 268 kelompok, maka jumlah UPPKS aktif pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 25 kelompok menjadi 243 kelompok. Penurunan jumlah UPPKS aktif ini dikarenakan pada tahun 2016 BKKBN melaksanakan validasi

terbaru kepada seluruh kelompok yang ada di Kabupaten Ciamis sehingga jumlah kelompok per desa/kelurahan menjadi 243.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 84,38 %. Capaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 karena adanya perbedaan target, dimana target RPJMD lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Hasil perbandingan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.101
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Tahun 2016
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah UPPKS aktif	Kelompok	243	288	84,38

Dalam rangka meningkatkan jumlah serta kualitas kelompok UPPKS di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok UPPKS yang aktif dan pemangku kebijakan di tingkat kecamatan sehingga jumlah UPPKS yang aktif semakin bertambah dan kelompok yang ada menjadi lebih optimal setiap tahunnya.

Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam kelompok UPPKS. Serta stagnasi kelompok UPPKS yang telah terbentuk. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu optimalisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi

(KIE) pada masyarakat baik yang melalui multimedia ataupun melalui petugas lini lapangan.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.317.537.655,- atau sebesar 93,91 % dari total pagu anggaran Rp. 5.662.211.950,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 47 : Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan dan Pembangunan



Sasaran ini menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memperkuat partisipasi masyarakat dari segi pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui penguatan tersebut maka diharapkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan yang menyangkut pelayanan tingkat dasar kepada masyarakat semakin meningkat.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Jumlah kader pembangunan, dan (2) Jumlah kader posyandu, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.102
Capaian Kinerja Sasaran
Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan dan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016			RPJMD	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Kader Pembangunan	orang	530	100	530	530	100	530	100
2	Kader Posyandu	orang	7.890	100	8.042	8.577	106,65	7.895	108,64
Rata-rata Capaian Kinerja		%		100			103,33		104,32

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran di atas diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan tahun 2016 adalah sebesar 103,33 %, dan termasuk dalam kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, 1 (satu) indikator tercapai sesuai target (100 %), dan 1 (satu) indikator tercapai melampaui target yang ditetapkan (103,33 %).
- Perbandingan antara capaian kinerja sasaran tahun 2016 (103,33 %) dengan capaian kinerja sasaran tahun 2015 (100 %) menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,33 %.
- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran sampai dengan Tahun 2016 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 yang merupakan tahun kedua perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 104,32%.

Upaya pencapaian sasaran penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.380.153.850,- atau sebesar 99,93 % dari total pagu anggaran Rp. 1.381.134.100,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kader Pembangunan

Kader pembangunan adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya. Kader pembangunan di tiap desa rata-rata berjumlah 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang. Pada tahun 2016 jumlah kader pembangunan adalah sebanyak 530 orang.

Faktor yang mendorong pencapaian capaian indikator kinerja ini dipengaruhi optimalnya kegiatan pembinaan pembangunan di kawasan pedesaan. Dari kegiatan tersebut dapat diperoleh peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa sehingga mampu menciptakan peningkatan pembangunan di kawasan perdesaan.

2. Kader Posyandu

Kader Posyandu dimaksudkan adalah anggota kelompok pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan Kader kesehatan yang dinamakan juga promotor kesehatan desa (Prokes) adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dari masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat. Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat Kementerian Kesehatan RI memberikan batasan kader : "Kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela. Kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang

dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat, serta bekerja di tempat yang dekat dengan pemberian pelayanan kesehatan. Pada tahun 2016 jumlah kader posyandu adalah sebanyak 8.577 orang yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Ciamis.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan selain makin tepadunya kelembagaan Posyandu juga semakin banyak warga/masyarakat pedesaan yang menjadi sukarelawan yang semakin terlatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan yang timbul di masyarakat. Hal lainnya yaitu peningkatan sarana dan prasarana posyandu sudah semakin lengkap karena mendapatkan beberapa bantuan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Ciamis dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp.974.543.865.138,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.915.911.976.113,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,98%.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016, komposisi belanja APBD Kabupaten Ciamis, sebagai berikut :

Tabel 3.103
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.673.041.900.684	1.544.894.695.835	92,34
2.	Belanja Langsung	974.543.865.138	915.911.976.113	93,98
JUMLAH		2.647.585.765.822	2.460.806.671.948	92,95

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 62,78 % dari realisasi belanja Kabupaten Ciamis di tahun 2016 dan sisanya sebesar 37,22 % disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Ciamis yang diperjanjikan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 974.543.865.138,- dengan realisasi sebesar Rp. 915.911.976.113,- atau 93,98%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.104
Pagu Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun Anggaran 2016

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia	337.041.956.480	338.985.843.214	91,23
01.	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	69.752.606.425	65.789.376.450	94,32
02.	Meningkatnya budaya dan minat baca	878.738.000	877.031.000	99,81
03.	Meningkatnya layanan kesehatan	257.912.342.436	230.116.176.139	89,22
04.	Meningkatnya kesehatan lingkungan	283.091.550	276.890.400	97,81
05.	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	6.002.396.050	5.639.661.255	93,96
06.	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	1.605.000.000	1.603.668.000	99,92
07.	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	749.372.000	737.589.450	98,43
08.	Meningkatnya prestasi olahraga	25.345.163.000	24.968.862.996	98,52
09.	Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat	2.272.000.000	2.271.900.000	99,99

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	10. Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari	1.306.724.700	1.260.021.300	96,43
	11. Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	3.723.404.500	3.708.735.500	99,61
	12. Menurunnya tingkat kemiskinan	896.572.500	890.754.924	99,35
	13. Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan	441.516.400	431.490.800	97,73
	14. Menurunnya PMKS	418.175.000	413.685.000	98,93
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat	212.195.040.437	205.059.180.387	96,64
	15. Meningkatkan kualitas SDM aparat	7.751.793.275	7.603.598.523	98,09
	16. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi	195.619.431.812	188.667.656.029	96,45
	17. Meningkatkan transparansi.	896.934.900	891.363.373	99,38
	18. Meningkatkan pelayanan masyarakat.	1.234.300.000	1.233.999.450	99,98
	19. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.	1.339.353.350	1.336.023.212	99,75
	20. Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat.	1.864.524.000	1.854.451.677	99,46
	21. Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).	2.218.900.000	2.218.900.000	100,00
	22. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.	1.187.054.000	1.170.439.000	98,60
	23. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi	82.750.000	82.749.123	99,99
3	Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	327.948.189.400	313.644.873.390	95,64
	24. Meningkatkan keandalan sarana dan prasarana transportasi	215.050.420.300	205.242.232.754	95,44
	25. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	71.580.182.700	69.812.842.083	97,53
	26. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	19.803.749.700	17.413.995.282	87,93
	27. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan & pembinaan usaha tambang	5.828.300.000	5.799.963.740	99,51
	28. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7.919.102.950	7.724.642.721	97,54

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	29. Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah	3.762.646.000	3.729.148.060	99,11
	30. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	2.486.210.250	2.448.211.250	98,47
	31. Meningkatnya kualitas penataan ruang	1.517.577.500	1.473.837.500	97,12
4	Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh	36.999.169.240	35.941.288.019	97,14
	32. Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	325.000.000	342.915.000	99,97
	33. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	1.753.147.450	1.742.107.450	99,37
	34. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	4.174.880.863	4.132.807.163	98,99
	35. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	1.837.150.000	1.832.983.000	99,77
	36. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat	3.665.141.600	3.587.006.600	97,87
	37. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	814.256.713	812.883.713	99,83
	38. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	2.877.343.000	2.862.287.137	99,48
	39. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	18.434.526.114	17.577.715.556	95,35
	40. Berkembangnya berbagai aktivitas <i>off farm</i> untuk meningkatkan penghasilan petani	2.351.173.700	2.302.032.600	97,91
	41. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	766.549.800	766.549.800	100
5	Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan	25.814.363.500	22.280.791.103	86,31
	42. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD.	2.334.826.000	2.332.595.150	99,90
	43. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan.	20.589.906.000	17.060.587.353	82,86
	44. Menurunnya jumlah desa tertinggal.	0	0	0
	45. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.	1.323.297.400	1.322.254.750	99,92
	46. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.	185.200.000	185.200.000	100,00
	47. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.	1.381.134.100	1.380.153.850	99,93
Jumlah Keseluruhan		974.543.865.138	915.911.976.113	93,98

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektifitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2016.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran pada urusan wajib yang digunakan pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.105
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia	30	109,53	338.985.843.214	91,23
	01. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	4	101,44	65.789.376.450	94,32
		4*	100,06		
	02. Meningkatnya budaya dan minat baca	2	118,47	877.031.000	99,81
	03. Meningkatnya layanan kesehatan	9	103,65	230.116.176.139	89,22
		9*	103,81		
	04. Meningkatnya kesehatan lingkungan	1	100,00	276.890.400	97,81
	05. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	1	100,00	5.639.661.255	93,96
	06. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	2	90,46	1.603.668.000	99,92
	07. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	2	81,25	737.589.450	98,43
	08. Meningkatnya prestasi olahraga	1	100	24.968.862.996	98,52
	09. Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat	2	99,38	2.271.900.000	99,99
	10. Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari	1	36,24	1.260.021.300	96,43
	11. Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	1	100,00	3.708.735.500	99,61
	12. Menurunnya tingkat kemiskinan	1	100,00	890.754.924	99,35
	13. Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan	2	162,50	431.490.800	97,73
	14. Menurunnya PMKS	1	240,09	413.685.000	98,93
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat	18	147,78	205.059.180.387	96,64

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran	%
	15. Meningkatnya kualitas SDM aparat	2	175,52	7.603.598.523	98,09
	16. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	7	122,88	188.667.656.029	96,45
	17. Meningkatnya transparansi.	1	100,00	891.363.373	99,38
	18. Meningkatnya pelayanan masyarakat.	1	195,84	1.233.999.450	99,98
	19. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.	1	85,55	1.336.023.212	99,75
	20. Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat.	2	214,63	1.854.451.677	99,46
	21. Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).	1	133,89	2.218.900.000	100,00
	22. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.	2	101,75	1.170.439.000	98,60
	23. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi	1	200,00	82.749.123	99,99
3	Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	17	93,79	313.644.873.390	95,64
	24. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	3	100,14	205.242.232.754	95,44
	25. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	2	98,70	69.812.842.083	97,53
	26. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	1	56,08	17.413.995.282	87,93
	27. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang	1	102,71	5.799.963.740	99,51
	28. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	3	133,50	7.724.642.721	97,54
	29. Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah	2	75,08	3.729.148.060	99,11
	30. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	1	99,92	2.448.211.250	98,47
	31. Meningkatnya kualitas penataan ruang	4	84,21	1.473.837.500	97,12
4	Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh	62	109,07	35.941.288.019	97,14
	32. Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	2	96,35	342.915.000	99,97
	33. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	6	96,92	1.742.107.450	99,37
	34. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	6	104,70	4.132.807.163	98,99

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran	%
	35. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	2	105,00	1.832.983.000	99,77
	36. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat	2	100,00	3.587.006.600	97,87
	37. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	5	107,41	812.883.713	99,83
		5*	106,70		
	38. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	1	100,00	2.862.287.137	99,48
	39. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	26	109,67	17.577.715.556	95,35
	40. Berkembangnya berbagai aktivitas <i>off farm</i> untuk meningkatkan penghasilan petani	3	147,22	2.302.032.600	97,91
	41. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	9	123,40	766.549.800	100
5	Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan	7	216,43	22.280.791.103	86,31
	42. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD.	1	779,55	2.332.595.150	99,90
	43. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan.	1	124,00	17.060.587.353	82,86
	44. Menurunnya jumlah desa tertinggal.	1	100,00	0	0
	45. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.	1	100,00	1.322.254.750	99,92
	46. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.	1	91,70	185.200.000	100,00
	47. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.	2	103,33	1.380.153.850	99,93

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2016 dapat dikategorikan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai dan lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 47 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 34 sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya

yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.106
Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	01. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	101,44 100,06*	69.752.606.425	65.789.376.450	5,68
	02. Meningkatnya budaya & minat baca	118,47	878.738.000	877.031.000	0,19
	03. Meningkatnya layanan kesehatan	103,65 103,81*	257.912.342.436	230.116.176.139	10,78
	04. Meningkatnya kesehatan lingkungan	100,00	283.091.550	276.890.400	2,19
	05. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	100,00	6.002.396.050	5.639.661.255	6,04
	08. Meningkatnya prestasi olahraga	100	25.345.163.000	24.968.862.996	1,48
	11. Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	100,00	3.723.404.500	3.708.735.500	0,39
	12. Menurunnya tingkat kemiskinan	100,00	896.572.500	890.754.924	0,65
	13. Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan	162,50	441.516.400	431.490.800	2,27
	14. Menurunnya PMKS	240,09	418.175.000	413.685.000	1,07
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat				
	15. Meningkatnya kualitas SDM aparat	175,52	7.751.793.275	7.603.598.523	1,91
	16. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	122,88	195.619.431.812	188.667.656.029	3,55
	17. Meningkatnya transparansi.	100,00	896.934.900	891.363.373	0,62
	18. Meningkatnya pelayanan masyarakat.	195,84	1.234.300.000	1.233.999.450	0,02
	20. Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat.	214,63	1.864.524.000	1.854.451.677	0,54
	21. Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia	133,89	2.218.900.000	2.218.900.000	-
	22. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.	101,75	1.187.054.000	1.170.439.000	1,40

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
	23. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi	200,00	82.750.000	82.749.123	0,001
3	Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan				
	24. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	100,14	215.050.420.300	205.242.232.754	4,56
	27. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang	102,71	5.828.300.000	5.799.963.740	0,49
	28. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	133,50	7.919.102.950	7.724.642.721	2,46
4	Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh				
	34. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	104,70	4.174.880.863	4.132.807.163	1,01
	35. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	105,00	1.837.150.000	1.832.983.000	0,23
	36. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat	100,00	3.665.141.600	3.587.006.600	2,13
	37. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	107,41 106,70*	814.256.713	812.883.713	0,17
	38. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	100,00	2.877.343.000	2.862.287.137	0,52
	39. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	109,67	18.434.526.114	17.577.715.556	4,65
	40. Berkembangnya berbagai aktivitas <i>off farm</i> untuk meningkatkan penghasilan petani	147,22	2.351.173.700	2.302.032.600	2,09
	41. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	123,40	766.549.800	766.549.800	-
5	Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan				
	42. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD.	779,55	2.334.826.000	2.332.595.150	0,10
	43. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan.	124,00	20.589.906.000	17.060.587.353	17,14
	44. Menurunnya jumlah desa tertinggal.	100,00	0	0	-
	45. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.	100,00	1.323.297.400	1.322.254.750	0,08
	47. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.	103,33	1.381.134.100	1.380.153.850	0,07

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2016 Kabupaten Ciamis terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek. Berbanding lurus dengan upaya dan kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis, maka berbagai prestasi di berbagai bidang dapat diraih, baik di tingkat Provinsi, maupun Nasional. Prestasi sebagaimana dimaksud dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 3.107
Prestasi Yang Diraih Kabupaten Ciamis Tahun 2016

No	Nama Penghargaan/ Kejuaraan/Kegiatan	Prestasi	Bidang	Keterangan
NASIONAL				
1.	Adipura	Piala	Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Ciamis
2.	Opini WTP Terhadap LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2015	Piala dan Piagam	Laporan Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Ciamis
3.	Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Piagam Penghargaan	Laporan Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Ciamis

No	Nama Penghargaan/ Kejuaraan/Kegiatan	Prestasi	Bidang	Keterangan
4.	Wahana Tata Nugraha dari Presiden RI	Piala	Tertib Lalu Lintas	Pemerintah Kabupaten Ciamis
5.	Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan RI atas Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2016	Sertifikat	Tertib Lalu Lintas	Pemerintah Kabupaten Ciamis
6.	Dana Rakca 2016 untuk Daerah Berkinerja Baik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik dan Kesejahteraan	Piagam Penghargaan dari	Laporan Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Ciamis
7.	Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2015	Piagam Penghargaan	Hak Asasi Manusia	Pemerintah Kabupaten Ciamis
8.	Anubhawa Sasana Desa	Piagam Penghargaan	Hukum/HAM	Bupati Ciamis
9.	Kepala Daerah Berintegritas dalam Peran Serta dan Kinerjanya pada Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah	Piagam Penghargaan	Pendidikan	Bupati Ciamis
10.	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "CC"	Piagam Penghargaan	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Ciamis
11.	Penghargaan atas Peran Aktif dalam Program Reforma Agraria	Piagam Penghargaan	Agraria/ Pertanahan	Pemerintah Kabupaten Ciamis
12.	Manggala Karya Kencana	Piagam Penghargaan	Kependudukan, KB	Pemerintah Kabupaten Ciamis
13.	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Berprestasi	Piala dan Piagam	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	BP3K Kecamatan Sindangkasih
14.	Lomba <i>Story Telling</i>	Juara Favorit	Bahasa Inggris	Selfi Nur Ayu Tri Lestari SDN I Sukasari
15.	Pekan Olahraga Nasional Tahun 2016 Cabor Muay Thai	Juara I	Olahraga	Ramzi Alwani Mu'min

No	Nama Penghargaan/ Kejuaraan/Kegiatan	Prestasi	Bidang	Keterangan
16.	Lomba Karya Inovasi Pembelajaran	Juara IV	Mipa Sd	Irman Permana, S.Pd.
17.	Tenis Meja Putri pada O2SN SMA	Juara II	Olahraga	Herlin Dwi Kurniawan
18.	Sepak Takraw	Juara II	Olahraga	Bagas Pradipta Cs
19.	Pencak Silat	Juara II	Olahraga	M. Safi'i N.
PROVINSI				
20.	Penghargaan Kinerja Penyaluran Raskin Tahun 2015 Kategori Kabupaten dengan Penyaluran dan Pembayaran Harga Tebus Raskin Terbaik (Raskin Award)	Piagam	Pengelolaan Raskin	Pemerintah Kabupaten Ciamis
21.	Penghargaan Kinerja Penyaluran Raskin Tahun 2015 Kategori Dukungan APBD terhadap Kelancaran Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015	Piagam	Pengelolaan Raskin	Pemerintah Kabupaten Ciamis
22.	Lomba Kelompok Agribisnis Bidang Ternak Domba	Juara I	Peternakan	Kelompok Tani Mekar Desa Kertajaya Kecamatan Panumbangan
23.	Lomba Kelompok Agribisnis Bidang Ternak Itik	Juara III	Peternakan	Kelompok Tani Sari Abadi Harja Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican
24.	Lomba Kelompok Agribisnis Bidang Ternak Sapi Potong	Juara III	Peternakan	Kelompok Al-Hidayah Desa Sukasari Kecamatan Tambaksari
25.	Lomba Kelompok Agribisnis Bidang Ternak Kambing	Juara V	Peternakan	Kelompok Tani Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok
26.	Posyandu Terbaik	Juara I	Pemberdayaan Masyarakat	Posyandu Permata Desa Situmandala Kecamatan Rancah

No	Nama Penghargaan/ Kejuaraan/Kegiatan	Prestasi	Bidang	Keterangan
27.	Kader Posyandu Terbaik	Juara I	Pemberdayaan Masyarakat	Eva Safariah Posyandu Tulip Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya
28.	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Berprestasi	Juara I	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	BP3K Kecamatan Sindangkasih
29.	Gapoktan Berprestasi	Juara III	Pertanian	Gapoktan Mulya Sejati Kecamatan Lakbok
30.	Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi	Juara III	Pertanian	Kelompok Karya Tani Kecamatan Cisaga
31.	Kelompok Tani Hutan Berprestasi	Juara II	Kehutanan	Kelompok Indramukti Kecamatan Panawangan
32.	Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Pelayan Ketahanan Pangan	Juara III	Ketahanan Pangan	Sadwianto, SP Penyuluh Pertanian BP3K Kecamatan Tambaksari
33.	Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan	Juara III	Ketahanan Pangan	KWT Sugih Mukti II Kecamatan Rajadesa
34.	<i>Ethnic Food Galery</i>	Juara Harapan II	Industri Makanan Berbahan Baku Lokal	Pemerintah Kabupaten Ciamis
35.	PORSADIN	Juara Umum	Olahraga dan Seni	Pemerintah Kabupaten Ciamis
36.	Lomba Pidato Bahasa Indonesia pada Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Takmiliah (PORSADIN)	Juara I	Pidato Bahasa Indonesia	Nadi Norhakiki
37.	Lomba Kaligrafi Putra pada Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Takmiliah (PORSADIN)	Juara I	Seni Kaligrafi	Reval Akbar Fauzian

No	Nama Penghargaan/ Kejuaraan/Kegiatan	Prestasi	Bidang	Keterangan
38.	Lomba Murotal Wal Imla Putra pada Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Takmiliyah (PORSADIN)	Juara I	Seni Murotal	Syafa Firdaus Husni
39.	Lomba Puisi Islami Putra pada Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Takmiliyah (PORSADIN)	Juara I	Seni Puisi	Muhamad Meizar A'raf Azaiz
40.	Lomba Sprint Putri pada Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Takmiliyah (PORSADIN)	Juara I	Olahraga	Nurul Hidayah
41.	Lomba Kaligrafi Putri pada Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Takmiliyah (PORSADIN)	Juara II	Seni Kaligrafi	Alinda Muhaerani
42.	Kompetisi Sains Madrasah	Juara I	Pendidikan Agama Islam	Adza Hifhul Haq
43.	Lomba Tingkat (LT) IV Pramuka	Juara I	Pramuka	MTsN 13 Rajadesa
44.	Tenaga Kesehatan Teladan Bidang SDK	Juara II	Kesehatan	Bidan Dewi Endah P., Am.Keb
45.	Lomba <i>Story Telling</i>	Juara I	Bahasa Inggris	Selfi Nur Ayu Tri Lestari SDN I Sukasari
46.	Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) Terbaik	Juara I	Kesehatan	Hj. Ai Elah Syam Arifin
47.	TNI-KB Kesehatan Terpadu	Juara II	KB	Kodim Ciamis
48.	Bhakti IBI Kategori Pencapaian Pelayanan IUD dan Pelaporan	Juara II	Kesehatan	Pengurus Cabang IBI Kabupaten Ciamis
49.	Duta Remaja Genre	Juara II	Kepemudaan	Sabila Putri (SMAN 2 Ciamis)
50.	Motivator KB Pria Terbaik	Juara III	KB	Agus Setia Suparman, Sm.Hk
51.	Pengelola KB Pria Terbaik	Juara III	KB	Dian Kuswardani, S.Pd
	Paguyuban KB Pria Terbaik	Juara Harapan II	KB	Kelompok Pusaka Sejahtera Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku
52.	P2WKSS	Juara I	Pemberdayaan Perempuan	Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi

No	Nama Penghargaan/ Kejuaraan/Kegiatan	Prestasi	Bidang	Keterangan
53.	Pembina P2WKSS Terbaik	Juara I	Pemberdayaan Perempuan	Drs. H. Dondon Rudiana, M.Si
54.	Lomba Kreativitas Produk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kategori Kreativitas Kerajinan Tangan Goodybag Ekonomis	Juara I	Pemberdayaan Perempuan	Pemerintah Kabupaten Ciamis
55.	Kabupaten Kota Layak Anak Kategori Cluster Perlindungan	Juara II	Perlindungan Anak	Bupati Ciamis
56.	Tenis Meja Putri pada O2SN SMA	Juara I	Olahraga	Herlin Dwi Kurniawan
57.	Atletik	Juara I	Olahraga	Yani Maryani
58.	Silat	Juara III	Olahraga	Rian Apriana
59.	Gitar Solo	Juara I	Kesenian	Allif Restu P
60.	Seni Tari	Juara II	Kesenian	Nur Ajijah
61.	Seni Tari	Juara II	Kesenian	Nova Nur R
62.	Seni Tari	Juara II	Kesenian	Tyas Rahayu
63.	Seni Tari	Juara II	Kesenian	Vani Elparani
64.	Seni Tari	Juara II	Kesenian	Aan Aminah
65.	Seni Musik Tradisional	Juara III	Kesenian	Galuh Ihsan N
66.	Seni Musik Tradisional	Juara III	Kesenian	Hikmat Taufiqurohman S
67.	Seni Musik Tradisional	Juara III	Kesenian	M. Rifky Rabbani
68.	Seni Musik Tradisional	Juara III	Kesenian	M. Wildan Cahya R
69.	Seni Musik Tradisional	Juara III	Kesenian	Rizki Farhan
70.	Baca Puisi	Juara II	Kesenian	Via Ramdhani
71.	Seni Lukis	Juara IV	Kesenian	Ade Siska Agustin
72.	Cipta Cerpen	Juara IV	Cipta Cerpen	Ulfa Khorrunnisa
73.	Aksara Sunda	Juara III	Aksara Sunda	Siti Juliaha
74.	Pameran Pemuda	Juara I	Pemuda	Kelompok Pemuda
75.	LTUB	Juara I	Pemuda	SMAN 2 Banjarsari
76.	Cabor Tinju	Juara II	Olahraga	Reza
77.	Sepak Takraw Putra	Juara III	Olahraga	Bagas Pradipta Sd
78.	Cabor Tinju	Juara III	Olahraga	Titan
79.	Cabor Bola Voli Pasir	Juara III	Olahraga	Eguh Cs
80.	Sepak Takraw Putri	Juara III	Olahraga	Elis L Cs
81.	Cabor Senam Putri	Juara II	Olahraga	Hana Agustantina
82.	Cabor Senam Putra	Juara III	Olahraga	M. Nurfadil

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan yang seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kinerja ke depannya.

Penyusunan LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014. Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Ciamis dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan 47 sasaran dengan 134 indikator sasaran,

dengan hasil pengukuran pencapaian sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pengukuran pencapaian sasaran (47 sasaran) menunjukkan sebanyak 41 sasaran atau 87,23 % termasuk dalam kategori sangat baik, 4 sasaran atau 8,51% dalam kategori baik, 1 sasaran atau 0,21 % dalam kategori kurang dan 1 sasaran atau 0,21 % dalam kategori sangat kurang, dengan rincian tingkat pencapaian kinerja dan kategori pencapaian sebagai berikut :
 - 24 sasaran atau 51,06 % tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik;
 - 10 sasaran atau 21,28 % tercapai sesuai target dengan kategori sangat baik;
 - 7 sasaran atau 14,89% tidak mencapai target dengan kategori sangat baik;
 - 4 sasaran atau 8,51% tidak mencapai target dengan kategori baik;
 - 1 sasaran atau 2,13 % tidak mencapai target dengan kategori kurang; dan
 - 1 sasaran atau 2,13 % tidak mencapai target dengan kategori sangat kurang.
- b. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran (134 indikator) menunjukkan sebanyak 124 indikator atau 92,54 % termasuk dalam kategori sangat baik, 3 indikator atau 2,24 % dalam kategori baik, 2 indikator atau 1,49% dalam kategori cukup, 3 indikator atau 2,24 % dalam kategori kurang dan 2 indikator atau 1,49 % dalam kategori sangat kurang.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Ciamis, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 974.543.865.138,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 915.911.976.113,- atau 93,98 % dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator sasaran, secara umum telah dapat terpenuhi sesuai harapan dan menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Namun demikian masih terlihat adanya beberapa sasaran dan indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya beberapa permasalahan dan

hambatan. Hal tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Ciamis ke arah yang lebih baik.